



# DUA TETANGGA, MITRA DALAM KESEJAHTERAAN

**Usulan Grup Kemitraan Bisnis Indonesia-Australia  
tentang IA-CEPA**

**Agustus 2016**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	3
PERMASALAHAN DAN PENGHALANG PERDAGANGAN DAN INVESTASI	5
MODEL STRATEGIS UNTUK KEMITRAAN	6
<b>REKOMENDASI UNTUK NEGOSIASI IA-CEPA</b>	7
TINDAKAN LINTAS SEKTOR UNTUK MENGATASI HAMBATAN	7
REKOMENDASI BERDASARKAN TOPIK	8
<b>Bab 1</b>	
<b>HARAPAN BISNIS ATAS SUATU PERJANJIAN YANG ISTIMEWA DAN UNIK</b>	16
TERUS MEMBANGUN DI ATAS FONDASI YANG KUAT	16
<b>Bab 2</b>	
<b>MENANGANI HAMBATAN PERDAGANGAN, INVESTASI DAN KERJASAMA EKONOMI</b>	26
HAMBATAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI	26
ISU UTAMA UNTUK DITANGANI GUNA MEMPERCEPAT PERDAGANGAN, INVESTASI DAN KERJASAMA EKONOMI	37
<b>Bab 3</b>	
<b>TOPIK LAIN UNTUK DIDISKUSIKAN DALAM IA-CEPA</b>	43
PENGADAAN PEMERINTAH	43
ATURAN ASAL	43
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA	44
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	45
KEBIJAKAN PERSAINGAN	46

## Bab 4

<b>MODEL STRATEGIS UNTUK KEMITRAAN .....</b>	<b>47</b>
PELUANG KUNCI UNTUK IA-CEPA .....	47
PELUANG UNTUK MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAN MEMAJUKAN PERHOTELAN .....	49
PELUANG UNTUK MENGAMANKAN KETERSEDIAAN PANGAN DALAM NEGERI DAN PARTISIPASI DALAM PASOKAN PANGAN GLOBAL .....	50
PELUANG UNTUK PEMBANGUNAN MODAL MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHAP LANJUT .....	52
PELUANG UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN DAN KUALITAS KEHIDUPAN.....	54
PELUANG UNTUK PERCEPATAN EKONOMI DIGITAL, E-NIAGA DAN INDUSTRI KREATIF .....	55
PELUANG DI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN ENERGI .....	57
 <b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1: HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-AUSTRALIA: SEBUAH ANALISIS.....	59
Lampiran 2: DAFTAR PESERTA PERTEMUAN .....	94
Lampiran 3: RANGKUMAN PROSES DAN HASIL KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN [INDONESIA] .....	96
Lampiran 4: KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN INDONESIA .....	101
Lampiran 5: KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN AUSTRALIA .....	121
 <b>REFERENSI</b> .....	<b>136</b>

# SINGKATAN DAN AKRONIM

AANZFTA	<i>ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement</i> Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia dan Selandia Baru
ACCC	<i>Australian Competition and Consumer Commission</i> Komisi Persaingan Usaha dan Konsumen Australia
ACCI	<i>Australian Chamber of Commerce and Industry</i> Kamar Dagang dan Industri Australia
AEC	<i>ASEAN Economic Community</i> Komunitas Ekonomi Australia
AFS	<i>American Field Service</i>
AIBC	<i>Australia Indonesia Business Council</i> Dewan Bisnis Australia-Indonesia
Ai Group	<i>Australian Industry Group</i> Grup Industri Australia
AMTI	<i>Indonesian Tobacco Community Alliance</i> Aliansi Komunitas Tembakau Indonesia
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i> Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik
APINDO	<i>Employers' Association of Indonesia</i> Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> Persekutuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
ASTP	<i>Australian System of Tariff Preferences</i> Sistem Preferensi Tarif Australia
ATIGA	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i> Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN
AUD	<i>Australian Dollar</i> Dolar Australia
B-to-B	<i>Business to Business</i> Bisnis ke Bisnis
BI	Bank Indonesia
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal <i>Indonesian Investment Coordinating Board</i>
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan <i>Indonesian National Agency for Drug &amp; Food Control</i>
BSN	Badan Standarisasi Nasional <i>National Standardisation Agency (Indonesia)</i>

CEPA	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)</i> Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
DNI	Daftar Negatif Investasi <i>Negative Investment List</i> (Indonesia)
EMA	<i>Enterprise Migration Agreements</i> Perjanjian Migrasi Kerja
EU	<i>European Union</i> Uni Eropa
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i> Investasi Asing Langsung
FIRB	<i>Foreign Investment Review Board (Australia)</i> Dewan Peninjau Investasi Asing Australia
FTA	<i>Free Trade Agreement</i> Perjanjian Perdagangan Bebas
G20	<i>Group of 20, a group of leaders from 20 major economies</i> Kelompok 20, kelompok pemimpin dari 20 ekonomi utama
G-to-G	<i>Government to Government</i> Pemerintah ke Pemerintah
GDP	<i>Gross Domestic Product</i> Pendapatan Domestik Bruto (PDB)
GMO	<i>Genetically Modified Organisms</i> Organisme hasil rekayasa genetika
GNI	<i>Gross National Income</i> Pendapatan Nasional Bruto (PNB)
HDPE	<i>High Density Polyethylene</i> Polyethylene dengan tingkat kepadatan yang tinggi
HS	<i>Harmonised System Code</i> Kode Sistem Harmonis
IABC	<i>Indonesia-Australia Business Council</i> Dewan Bisnis Indonesia Australia
IA-BPG	<i>Indonesia-Australia Business Partnership Group</i> Grup Kemitraan Bisnis Indonesia-Australia
IA-CEPA	<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
ICT	<i>Information and Communication Technology</i> Teknologi Informasi dan Komunikasi
IDR	<i>Indonesian Rupiah</i> Rupiah Indonesia

IELTS	<i>International English Language Testing System</i> Sistem Tes Bahasa Inggris Internasional
IPR	<i>Intellectual Property Rights</i> Hak Kekayaan Intelektual
ISDS	<i>Investor State Dispute Settlement</i> Penyelesaian Sengketa Negara Investor
IUP and IUPK	Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Indonesia <i>Indonesian Mining Permits</i>
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia <i>Indonesian Chamber of Commerce and Industry</i>
KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas (Indonesia) <i>Limited Stay Permit Card</i>
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha <i>Indonesian Business Competition Oversight Commission</i>
METS	<i>Mining Equipment, Technology and Services</i> Peralatan Pertambangan, Teknologi dan Jasa
ML Number	<i>A code or registration number issued by BPOM for all imported food products in Indonesia</i> Kode atau nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM untuk semua produk makanan impor di Indonesia
MNP	<i>Movement of Natural Persons</i> Gerakan Manusia Natural
MSME	<i>Micro, Small and Medium-sized Enterprise</i> Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
MUI	Majelis Ulama Indonesia <i>Indonesian Council of Ulama</i>
OECD	<i>The Organisation for Economic Co-operation and Development</i> Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia) <i>Indonesia's Financial Services Authority</i>
PPP	<i>Public Private Partnership</i> Kemitraan Publik Swasta
PwC	<i>PricewaterhouseCoopers</i>
RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional
SA	<i>Standards Australia</i> Standar Australia
SEA	<i>Southeast Asia</i> Asia Tenggara

SEZ	<i>Special Economic Zone</i> (Indonesia) Zona Ekonomi Khusus
SME	<i>Small and Medium Enterprise</i> Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan <i>Indonesian Vocational High School</i>
SNI	Standar Nasional Indonesia <i>Indonesian National Standards</i>
SPS	<i>Sanitary and Phytosanitary</i> Sanitasi dan Fitosanitasi
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia <i>Indonesian Timber Legality Verification System</i>
STRACAP	<i>Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures</i> Prosedur Kesesuaian Standar, Peraturan Teknis dan Penilaian
TAFE	<i>Technical and Further Education</i> (Australia) Pendidikan Teknis dan Lanjutan
TDA	<i>TAFE Directors Australia</i> Direktur TAFE Australia
TPP	<i>Trans-Pacific Partnership</i> Kemitraan Trans-Pasifik
TRIP	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> Aspek hak kekayaan intelektual yang terkait perdagangan
UK	<i>United Kingdom</i> Inggris
US	<i>United States</i> Amerika Serikat
VET	<i>Vocational Education and Training</i> Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
WTO	<i>World Trade Organization</i> Organisasi Perdagangan Internasional





INDONESIA AUSTRALIA  
BUSINESS COUNCIL



Australian  
Chamber of Commerce  
and Industry



AUSTRALIA INDONESIA  
BUSINESS COUNCIL

AiGROUP

# KATA PENGANTAR

Indonesia. Australia. Dua tetangga yang sangat berbeda. Budaya, sosial, ekonomi, dan sejarahnya ... **berbeda**. Namun dalam hal sumber daya, keterampilan, dan aset, dua tetangga ini punya kelebihan yang saling melengkapi dan kompatibel yang sedemikian rupa sehingga dapat dikemas menjadi layanan yang sama-sama saling menguntungkan. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, transisi ekonomi kedua negara, dan peluang baru yang dihadirkan oleh megatrend baru dalam perdagangan dan investasi global, kedua negara perlu saling meninjau agar dapat membuat sebagian besar peluang dan bersama-sama menciptakan peluang-peluang baru. Bersama-sama, mereka dapat menciptakan mesin pertumbuhan perdagangan dan investasi dengan ASEAN, ASEAN Raya, dan dunia luar. Bersama-sama, mereka bisa menjadi contoh sukses model-model kemitraan ekonomi yang baru.

Ini peluang emas yang dapat diraih semaksimal mungkin dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). IA-CEPA harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan bisnis dari Indonesia dan Australia untuk melakukan perdagangan, investasi, dan kerjasama. Jika bisnis berjalan baik, maka IA-CEPA juga memiliki kekuatan untuk berbuat kebajikan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan kekayaan baru serta dengan melandasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan standar hidup yang lebih tinggi. IA-CEPA harus melakukan inovasi agar dapat membuat perjanjian istimewa yang unik antara Indonesia dan Australia. Hal ini harus menciptakan lingkungan perlakuan yang menguntungkan bagi investor, eksportir, dan kolaborator bisnis sambil memperkuat sektor yang rentan di kedua negara.

Awal yang bagus untuk memulai hal itu adalah mengidentifikasi peluang perdagangan, investasi, dan kerjasama, lalu mengajukan pertanyaan mengapa ada tarif atau hambatan di antara kedua negara. Apa dampak yang akan terjadi jika tidak ada satupun tarif atau hambatan? Dapatkah daftar panjang hambatan dihapus dalam kurun waktu yang spesifik dan realistis? Bagaimana caranya agar eksportir barang dan jasa terdorong untuk berinvestasi di pasar, meningkatkan standar lokal, membangun kapasitas dan menaikkan tingkat keamanan dalam sektor demi sektor? Bagaimana kita bisa menghindari intervensi dan dampak yang tidak diinginkan pada masa datang? Apa jenis perlindungan, penyesuaian, dan peningkatan kapasitas yang perlu diterapkan ke sektor-sektor yang lemah dan rentan? Pemerintah diminta untuk mendekati masalah ini secara ilmiah.

IA-CEPA harus digerakkan oleh kesempatan dan berupaya untuk menciptakan lingkungan bilateral di mana bisnis dapat berkembang. Juga, dengan mengenali dan merespon kekuatan dan kelemahan aset ekonomi masing-masing negara, IA-CEPA dapat mencapai keseimbangan risiko dan penghargaan



yang wajar bagi semua pihak di kedua negara. Dengan mengakui berbagai tahap pengembangan dan kapasitas bisnis di masing-masing negara, IA-CEPA akan mencakup peningkatan kapasitas yang akan membantu untuk mengatasi ketidakseimbangan dan usulan IA-BPG tentang IA-CEPA<sup>2</sup> memungkinkan penyesuaian. Pembangunan kapasitas dan pengaturan preferensial yang disesuaikan dengan peluang dan hambatan di setiap negara, lintas ekonomi dan berdasarkan sektor akan memfasilitasi keterlibatan bisnis. Tanpa pendekatan yang disesuaikan untuk mengatasi kegagalan pasar dan menghapus hambatan itu, maka tidak mungkin keterlibatan bisnis saat ini akan berubah signifikan.

Untuk mencapai CEPA yang unik semacam itu, kedua belah pihak harus mendekati negosiasi dengan murah hati dan niat baik. Hasilnya akan menaikkan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang penting untuk kesuksesan. Dengan keterlibatan perusahaan besar dan UKM, kontak antarmanusia riil akan mengubah hubungan antara dua tetangga.

IA-BPG siap untuk terus membantu para perunding dan kedua pemerintah selama berlangsungnya negosiasi dan pelaksanaan IA-CEPA. Halaman-halaman berikut nerinci fitur-fitur yang dianjurkan oleh IA-BPG untuk IA-CEPA.

IA-BPG mengajukan naskah posisi ini kepada Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata Australia dan Investasi Steven Ciobo. Naskah ini telah disampaikan kepada kedua menteri pada pertemuan menteri bersama di Jakarta pada 2 Agustus 2016.



**James Pearson**  
CEO

Australian Chamber of Commerce and  
Industry



**Rosah P. Roeslani**  
Ketua  
KADIN Indonesia



**Debnath Guharoy**  
President

Australia-Indonesia Business Council



**Kris Sulisto**  
President

Indonesia-Australia Business Council



**Innes Willox**  
Chief Executive  
Ai Group



**Hariadi Sukamdani**  
Ketua  
APINDO



INDONESIA AUSTRALIA  
BUSINESS COUNCIL



Australian  
Chamber of Commerce  
and Industry



AUSTRALIA INDONESIA  
BUSINESS COUNCIL

**Ai**GROUP

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Group Kemitraan Bisnis Indonesia-Australia (IA-BPG) menyambut baik dan mendukung penciptaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). IA-BPG sangat percaya bahwa IA-CEPA harus jadi perjanjian yang unik dengan pendekatan yang unik. Perjanjian ini hendaknya menghindari negosiasi rutin yang dibingkai dari perspektif dua pihak yang berlawanan membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan akhir. Perjanjian ini hendaknya mengubah pendekatan tradisional ke Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dalam kepala mereka, dan mulai dengan mengidentifikasi bidang-bidang potensial dan peluang-peluang. Perjanjian ini hendaknya berusaha mengembangkan momentum dengan menciptakan 'desas-desus' yang dihasilkan dari hasil-hasil awal, baik dalam liberalisasi perdagangan maupun inisiatif yang dirancang untuk membangun hubungan ekonomi. Perjanjian ini hendaknya berusaha untuk memberi manfaat yang terbukti dan cepat serta menciptakan momentum, pengakuan, dan dukungandari bisnis di kedua negara. Perjanjian ini hendaknya menerapkan komitmen Presiden Widodo untuk memotong peraturan pemerintah sebesar 50% dan mengambil pendekatan akal sehat ke perdagangan dan investasi. Perjanjian ini hendaknya bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan bisnis dan permintaan pasar. Perjanjian ini hendaknya dengan berani menjelajah ke bidang-bidang yang belum pernah dirambah FTA.

Seperti yang disiratkan oleh namanya, perjanjian bilateral ini diharapkan menjadi "kesepakatan abad ke-21" yang mencakup secara komprehensif berbagai masalah yang berada di dalam dan di luar bidang perdagangan dan investasi. Perjanjian tersebut hendaknya berupaya untuk membangun hubungan yang luas antar sektor usaha di kedua negara untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat, peningkatan perdagangan, dan kemakmuran bersama. Dalam pernyataan bersama pada bulan Maret 2016, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Steven Ciobo menegaskan dukungan bilateral untuk CEPA yang menyatakan bahwa "Perjanjian yang sukses akan berfungsi sebagai platform baru untuk kemitraan ekonomi yang modern dan dinamis, yang mencerminkan ikatan yang kuat di antara kedua negara".

Dalam rangka melampaui FTA tradisional, fitur-fitur IA-CEPA hendaknya mencakup penghapusan progresif semua rintangan perdagangan dan memfasilitasi perdagangan dua arah barang dan jasa, ditambah investasi. Hambatan-hambatan teknis dan peraturan perdagangan hendaknya sebanyak mungkin dihapuskan, sedangkan penghambat-penghambat investasi dua arah hendaknya dihilangkan. Aturan dan standar, termasuk pengakuan atau harmonisasi kualifikasi timbal-balik hendaknya diselaraskan dan disederhanakan sebelum disetujui dan dilaksanakan oleh kedua negara. Pergerakan manusia yang punya keterampilan hendaknya dipermudah untuk memenuhi permintaan

pasar. Kegagalan pasar harus diatasi dengan menyediakan informasi tentang peluang-peluang pasar, tentang melakukan bisnis di masing-masing negara dan kelonggaran kontak dari bisnis ke bisnis. Kerjasama lintas perbatasan untuk mengakses rantai nilai global adalah peluang kunci dan insentif untuk bisnis. Dan, yang terakhir tapi bukan yang terkecil, pentingnya peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan dan perbaikan prosedur pemerintah, disorot sebagai elemen pokok kesuksesan.

Seiring kondisi ekonomi global dan regional yang berubah, Indonesia dan Australia telah mengalami transformasi ekonomi yang besar. Australia berubah dari perekonomian investasi pertambangan dan ekstraksi, ditambah pertanian dan manufaktur, menjadi perekonomian yang lebih beragam, yang didukung oleh layanan, pengetahuan, dan teknologi. Ekonomi Australia kini lebih diarahkan rantai nilai global dan telah kompetitif secara global dalam bidang produksi produk-produk primer, dalam bidang manufaktur ceruk pasar, dalam bidang layanan pokok, dan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Seperti yang ditunjukkan oleh perubahan-perubahan ini, bangsa tersebut menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pembangunan, terutama di wilayah utara. Yang lebih kritis, populasi Australia mengalami penuaan dan hal ini mengubah struktur dan sifat dasar tenaga kerja.

Di sisi lain, Indonesia bergerak menjauh dari mengandalkan industri primer menuju manufaktur dan jasa, lebih lagi karena efek dari dividen demografi dan urbanisasi. Bagaimanapun, transformasi ini membutuhkan investasi dan ekspor yang cukup besar, ketimbang mengandalkan konsumsi domestik. Hal ini, pada gilirannya, membutuhkan perubahan signifikan di sektor publik dan swasta, baik di tingkat nasional maupun regional. Dalam konteks itu, ekspor dan pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh investasi yang dibutuhkan untuk membangun konektivitas di negara kepulauan ini melalui infrastruktur modern, untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan, dan untuk memicu inovasi dan kreativitas melalui pengembangan teknologi.

Kedua negara memiliki kebutuhan dan kekuatan yang sangat saling melengkapi dan kedua negara bisa memperoleh jauh lebih banyak untuk ekonomi dan masyarakat mereka dengan bekerja secara erat bersama-sama ketimbang bekerja masing-masing.

Sementara pemerintah dan masyarakat bisnis kedua negara punya visi yang sama tentang peningkatan kesejahteraan melalui perdagangan bilateral, IA-BPG telah mengidentifikasi sejumlah hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan itu. Laporan yang didasarkan pada analisis hubungan ekonomi yang ada antara Australia dan Indonesia ini sangat mendukung simpulan bahwa dua ekonomi ini saling melengkapi dalam banyak hal, bahwa ada area luas yang berpotensi untuk menjalin kemitraan ekonomi, dan bahwa kedua negara tetangga ini dapat benar-benar sukses bersama di pasar global.

Selain mengidentifikasi hambatan terhadap keterlibatan ekonomi yang lebih besar, laporan ini juga mengidentifikasi sektor-sektor tertentu di mana ada kemungkinan peluang-peluang yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Laporan ini juga mencakup sejumlah rekomendasi untuk langkah-langkah yang dapat diambil guna mewujudkan pernyataan tujuan menjadi mitra dalam kemakmuran.

IA-BPG pertama kali dibentuk pada tahun 2012, Grup ini telah menyusun laporan tentang manfaat potensial dari IA-CEPA dan mengikutsertakan satu set rekomendasi. Pada tahun 2016, pemerintah kedua negara menyatakan kembali dukungan mereka pada perjanjian bilateral yang membahas hubungan ekonomi yang unik antara kedua negara tetangga. IA-BPG disusun ulang serta pembahasan dan konsultasi tentang IA-CEPA diaktifkan secara resmi. Proses konsultasi IA-BPG yang berbasis luas dengan asosiasi-asosiasi bisnis dan anggota melalui wawancara individu, lokakarya, dan usulan tertulis telah dipuji sebagai 'standar emas' karena melibatkan sektor swasta dalam tahap awal negosiasi perdagangan bilateral jenis ini. Menindaklanjuti keterlibatan pemangku kepentingan

sebagai dasar solid ini, grup menegaskan bahwa IA-CEPA hendaknya jadi perjanjian yang dinamis dengan mekanisme bawaan untuk memantau dan mengadaptasikan kinerjanya. Mekanisme nasihat dan konsultasi bisnis yang berkelanjutan hendaknya ditegakkan guna memastikan keberlanjutan keterlibatan dari bisnis ke bisnis dan terus memperluas keterlibatan pemangku kepentingan.

## PERMASALAHAN DAN RINTANGAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Kerjasama antara sektor bisnis dua negara masih dihambat oleh tarif pajak yang tersisa, penghalang teknis bagi perdagangan, pembatasan perdagangan (termasuk kuota impor dan perizinan), pembatasan dalam pergerakan orang, dan pembatasan pada penanaman modal luar negeri langsung. Semua rintangan substansial ini harus ditangani oleh IA-CEPA. Dilandasi atas ketentuan dan penjadwalan pada AANZFTA serta menyesuaikan dengan ketentuan persetujuan perdagangan lain, IA CEPA harus bertujuan untuk menghilangkan tarif pajak yang tersisa dan rintangan bagi perdagangan untuk semua barang dan jasa secepatnya dan membuat komitmen untuk tidak menerapkan tarif pajak atau rintangan lebih jauh. Walaupun perlu melindungi konsumen, peraturan perdagangan seharusnya memfasilitasi bukannya menjadi perintang perdagangan, dan peraturan-peraturan ini harus memberikan kejelasan dan kepastian kepada bisnis mengenai persyaratan dan biaya teknis.

Demikian pula, dalam mengatasi perintang ini, sekalipun disadari bahwa patokan mungkin diterapkan untuk menjaga kualitas produk atau keamanan publik, IA-CEPA harus berusaha mencapai kerangka kerja yang jelas untuk menyelaraskan patokan, kualifikasi dan persyaratan. Selain itu, dibutuhkan kerangka kerja kuat untuk menangani pembatasan perdagangan guna mencapai hasil yang bermanfaat, memastikan perlindungan konsumen dan memulai pembangunan kapasitas untuk meningkatkan keahlian dan tata kelola.

Dalam persetujuan seperti ini, orang adalah kunci untuk membuka potensi dan komplementaritas dalam dua perekonomian. Maka dari itu, kejelasan, kesederhanaan dan keterbukaan untuk memastikan bahwa keahlian dan permintaan tenaga kerja dapat terpenuhi tepat waktu dan cara yang efisien sangat penting. Pada akhirnya, pemerintah kedua negara harus mendukung dan memfasilitasi bisnis pada target dan mengaktifkan investasi yang membuat nilai sangat besar untuk perekonomian – sebagai contoh mereka yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan mendorong produktivitas.

Sebagai tambahan, mencapai tujuan dan hasil IA-CEPA yang diharapkan mungkin memerlukan pertimbangan yang serius dari sektor publik dan swasta yang lebih luas daripada lebih banyak penghalang yang rumit. Pertama, *komunikasi dan pertukaran informasi* yang terbatas sudah menghambat bisnis dalam mengejar kesempatan, dan hal ini akan memerlukan sarana umum untuk mengakses informasi perdagangan dan mendiskusikan kebijakan serta pembangunan kapasitas untuk SME guna memanfaatkan sumber ini. Kedua, *keuangan dan akses pada modal* cukup kritis bagi kerjasama sementara kedua negara mengandalkan pada investasi asing, dan perlu memfasilitasi hal ini bagi pengatur untuk menyesuaikan peraturan dan meningkatkan operasi serentak bagi perusahaan jasa keuangan dan menghubungkan pada bisnis.

Ketiga, kesenjangan dalam *infrastruktur dan logistik* semakin kelihatan, yang akan memerlukan investasi signifikan termasuk melalui Kerjasama Publik Swasta (*Public Private Partnerships*, PPP), penyederhanaan protokol bea cukai, dan penghubungan jaringan transportasi kedua negara. Keempat, *mendorong perusahaan kecil dan menengah* adalah hal yang sangat penting bagi kerjasama yang sukses, dan hal ini akan memerlukan pendidikan SME pada liberalisasi keuntungan

perdagangan, memperhatikan perhatian mereka, dan mendorong partisipasi dalam perdagangan bilateral dan jaringan nilai global.

## MODEL STRATEGIS UNTUK KEMITRAAN

Dalam memfasilitasi kerjasama, IA-BPG bercita-cita menciptakan industri terpadu yang responsif pada pasar global dan yang memanfaatkan investasi dua arah yang kuat. Industri tersebut diperkuat dengan berbagi pengetahuan dan kolaborasi teknologi, Bantuan Perdagangan (Aid for Trade) yang lebih tepat sasaran, dan hubungan investasi sektor jasa dengan pembangunan kapasitas. Rintangan pasti ada dan mengatasi hal itu memerlukan, pertama, perlakuan khusus, di mana IA-CEPA memberi status istimewa untuk perdagangan dan investasi pada masing-masing negara. Status istimewa ini berlaku di seluruh dan di atas pengaturan-pengaturan istimewa lainnya. Kedua, mengambil keuntungan dari Kawasan Ekonomi istimewa (KEK) Indonesia, di mana investasi dan kolaborasi yang tidak dibatasi oleh peraturan diterapkan di seluruh kawasan itu.

IA-BPG mengidentifikasi enam sektor tertentu di mana potensi yang signifikan untuk keterlibatan ekonomi lintas perbatasan dan di mana manfaat dapat direalisasikan dalam bingkai waktu yang relatif cepat.

1. **Memperluas pariwisata dan meningkatkan kesanggrahan** yang akan memerlukan liberalisasi persyaratan visa dan gerakan perorangan natural, serta peningkatan keterampilan dan pelatihan melalui program pertukaran keterampilan.
2. **Mengamankan ketersediaan pangan dalam negeri dan berpartisipasi dalam pasokan pangan global** melalui pengembangan gabungan rantai pasokan dua arah yang terpadu, memfasilitasi perlakuan istimewa bilateral, melaksanakan penelitian bersama dan pembangunan kapasitas, dan menangani isu-isu perbedaan standar makanan.
3. **Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan lanjutan** yang dicapai dengan membuka sektor pendidikan untuk investasi asing, mendorong keterlibatan universitas secara lebih besar dalam program penelitian dan gelar bersama, dan memfasilitasi MNP untuk tujuan pendidikan.
4. **Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup dengan mendorong adanya program-program pertukaran** dalam bidang perawatan kesehatan, memfasilitasi investasi dan pergerakan orang dalam industri kesehatan, menyelaraskan kualifikasi dan peningkatan kapasitas bagi para profesional kesehatan.
5. **Mempercepat konektivitas dalam ekonomi digital, e-commerce, dan industri kreatif** dengan menekankan arus informasi yang bebas sementara menghormati masalah keamanan dan menciptakan lingkungan yang mendukung aliran investasi bebas dalam e-commerce dan teknologi di sektor digital, terutama untuk perusahaan UKM yang baru berdiri di sektor ini.
6. **Memfasilitasi peluang dalam bidang infrastruktur dan energi** dengan menghapus pembatasan, mengurangi peraturan tentang pekerja asing, dan mendorong Kemitraan Publik-Swasta. Peluang-peluang yang signifikan disajikan dengan mengembangkan inovasi dalam sumber energi terbarukan dan sistem integrasi energi global untuk memasok listrik ke jaringan Indonesia dan masyarakat daerah yang kekurangan konektivitas ke sumber listrik yang handal. Sekitar seperempat penduduk Indonesia, lebih dari 60 juta orang, saat ini tidak memiliki akses listrik.



# REKOMENDASI UNTUK NEGOSIASI IA-CEPA

## TINDAKAN LINTAS SEKTOR UNTUK MENGATASI HAMBATAN

Menyadari bahwa Australia dan Indonesia sudah jadi mitra dalam perjanjian perdagangan bebas AANZFTA seiring negosiasi saat ini untuk RCEP dan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan TPP, mitra IA-BPG melihat sejumlah tema umum yang, jika dipertimbangkan dengan tepat, bisa mengatasi masalah dan mendapat peluang untuk banyak sektor melalui tindakan atau inisiatif lintas sektoral untuk meningkatkan hubungan bilateral kita.

Rekomendasi IA-BPG telah mengidentifikasi sejalan dengan ini tema lintas sektoral yang meliputi:

1. Mempercepat penurunan tarif daripada bingkai waktu yang ditetapkan dalam AANZFTA.
2. Mempercepat penghapusan kuota produk.
3. Terapkan ambang modal yang konsisten untuk semua bisnis.
4. Menghapus secara progresif batas-batas kepemilikan ekuitas pada perusahaan terdaftar atau perusahaan swasta yang dimiliki oleh warga negara atau perusahaan dari mitra IA-CEPA asalkan hal ini memenuhi uji kepentingan nasional sebagaimana yang diawasi oleh dewan peninjau investasi asing atau yang setara terhadap kriteria yang transparan.
5. Manusia terampil diizinkan untuk sepenuhnya bebas melintasi perbatasan bersama kita.
6. Memberi pengakuan timbal-balik untuk tingkat pendidikan dan keterampilan terhadap standar internasional.
7. Mendorong peningkatan saling memahami budaya dan bahasa melalui inklusi yang lebih luas dalam kurikulum sekolah.
8. Sebisa mungkin tindakan diarahkan untuk memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi guna mengakses rantai nilai dan penyediaan layanan global.
9. Membangun sistem lintas batas yang harmonis untuk urusan dan regulasi e-niaga berdasarkan standar global.
10. Menghapus kebijakan-kebijakan mata uang asing yang menghambat bisnis sehingga tidak bisa sepenuhnya terlibat dengan pasar global dan melakukan transaksi lintas batas AUD-IDR kecuali untuk langkah-langkah stabilitas moneter.



11. Membuat satu set bea dan retribusi yang konsisten dan yang diterapkan di dalam negeri untuk barang dan jasa impor yang transparan dan sesuai aturan WTO.
12. Membina kerjasama yang lebih erat dalam pengembangan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi.
13. Membangun dan memperkuat lembaga administrasi dan regulasi serta pemahaman mereka tentang masing-masing kebijakan, peraturan, dan norma negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui hubungan Indonesia-Australia dan peningkatan kapasitas yang lebih baik.
14. Memperkenalkan kebijakan persaingan fasilitatif bisnis yang kuat untuk mendorong pengembangan pasar, alokasi sumber daya yang efisien dan pasar peserta bahwa kepercayaan.
15. Menyediakan informasi tentang peluang bisnis dan tentang bagaimana melakukan bisnis di masing-masing negara, dan memfasilitasi hubungan bisnis ke bisnis dan pengembangan rantai pasokan.
16. Menyesuaikan bantuan pembangunan untuk memfasilitasi rekomendasi-rekomendasi ini dan menyediakan kapasitas bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang pesat.
17. Mendorong keterlibatan bisnis ke bisnis yang lebih besar di kedua negara. Kamar Dagang dan Dewan Bisnis bisa menjadi penggerak untuk hal ini dengan mendorong anggotanya agar membina hubungan yang lebih dekat dengan rekan-rekannya.
18. Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di luar komunitas bisnis, termasuk media, masyarakat sipil, universitas dan lembaga pemerintah daerah untuk membangkitkan kesadaran dan melibatkan mereka dalam IA-CEPA.
19. Mendorong tinjauan berkelanjutan dan liberalisasi Daftar Negatif Investasi di Indonesia dan liberalisasi akses lebih jauh ke sektor jasa di Australia.
20. Membina pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sebagai prinsip IA-CEPA, yang memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan, menjamin kesetaraan kesempatan bagi wilayah regional, perempuan dan kelompok minoritas dan sangat penting untuk strategi pertumbuhan yang sukses.
21. Mendorong digitalisasi praktik-praktik yang terkait perdagangan dan meningkatkan kepercayaan dalam lingkungan online melalui cabang e-commerce.
22. Menegakkan kerangka kerja pemantauan berkelanjutan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja IA-CEPA sebagai proses yang dinamis dan yang terus bertumbuh. Hal ini dapat mencakup pembentukan lembaga IA-BPG.

## REKOMENDASI BERDASARKAN TOPIK

### 1. KERJASAMA EKONOMI

#### a. *Pertukaran Informasi*

- i. Memajukan proses-proses regulasi yang transparan dan mulus berdasarkan standar internasional dengan memperbaiki penerapan supremasi hukum dan struktur regulasi sumber daya yang baik dan independen.



- ii. Mengembangkan informasi yang mudah diakses dan transparan tentang peraturan, standar, dan sertifikasi yang diperlukan untuk masuk pasar dan bagaimana hal ini dapat dipenuhi.
- iii. Menyediakan informasi bagi para investor di Australia dan Indonesia guna membantu mereka lebih sadar akan manfaat langsung dan tidak langsung dari bisnis investasi dalam rangka mendorong hubungan investasi yang lebih besar.
- iv. Membuat campuran inisiatif pemerintah nasional, regional, dan daerah yang dipasangkan dengan kontak sektor swasta guna menyediakan informasi tentang pasar dan bagaimana melakukan bisnis, dan mendorong akses pasar.
- v. Mengembangkan platform komunikasi sektoral langsung untuk menjembatani kesenjangan informasi dan interaksi antara kedua negara.
- vi. Menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang IA-CEPA dalam komunitas UKM untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar dari UKM di kedua negara.

#### **b. Peningkatan Kapasitas**

- i. Secara signifikan meningkatkan kapasitas dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan (PPK) di Indonesia melalui perluasan dan pengembangan SMK dan jaringan politeknik yang melibatkan lebih banyak dosen politeknik, membangun standar kompetensi, keterlibatan industri, kualitas PPK, kemitraan PPK internasional, dan pertukaran staf serta menciptakan pusat-pusat keunggulan di setiap kota besar di Indonesia.
- ii. Australia hendaknya bukan hanya mempertimbangkan bantuan teknis pada tingkat ilmiah tetapi juga keterlibatan yang lebih dalam dengan para produsen utama aktual untuk membantu pengembangan industri pertanian Indonesia agar memenuhi standar yang diperlukan supaya bisa masuk ke dalam sistem Australia.
- iii. Meningkatkan kerjasama pendidikan yang meliputi standar pada kurikulum pendidikan, kompetensi guru, penelitian dan pengembangan agenda, dan kesempatan magang.
- iv. Memajukan kerja sama untuk meningkatkan kompetensi timbal-balik dalam hal branding, inovasi produk, penelitian, dan pengembangan.
- v. Menyediakan dukungan yang lebih besar bagi orang bisnis dan pegawai negeri Australia untuk belajar Bahasa Indonesia dan orang bisnis dan pegawai negeri Indonesia untuk belajar bahasa Inggris.
- vi. Menyertakan program yang melaksanakan aktivitas peningkatan kapasitas dan fasilitasi ekspor untuk mendukung eksportir produk pertanian Indonesia.
- vii. Dukungan yang berkelanjutan untuk perbaikan tata kelola ekonomi di Indonesia.
- viii. Mengembangkan program peningkatan kapasitas bisnis berkenaan dengan FTA dan bagaimana memanfaatkannya dalam hubungannya dengan pertukaran informasi tentang peluang bisnis.
- ix. Membantu bisnis untuk memahami mekanisme yang ada untuk penyelesaian sengketa internasional bisnis ke bisnis.

### **c. Fasilitas Perdagangan**

- i. Sentralisasi persetujuan untuk eksploitasi sumber daya alam di Indonesia oleh pemerintah nasional atau kewenangan regional yang kompeten dengan menggunakan kriteria keputusan yang konsisten dan transparan.
- ii. Mendorong pemerintah untuk mendukung reformasi mikro-ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.
- iii. Membangun fasilitas pra-inspeksi bea di lokasi strategis agar lebih menguntungkan rantai pasokan bilateral dan untuk menghindari inefisiensi dengan tujuan untuk menyediakan tingkat pelayanan timbal balik.
- iv. Membentuk mekanisme pemantauan dan konsultasi Industri - Pemerintah mengenai peraturan makanan yang baru atau yang ditingkatkan.
- v. Mendorong kolaborasi yang lebih besar antara lembaga-lembaga karantina dari kedua negara untuk menghindari proses karantina ganda.
- vi. Menekankan kerjasama dan pendekatan yang masuk akal untuk standar kesehatan, keselamatan, dan kualitas di seluruh ekonomi mitra untuk mendukung perdagangan.
- vii. Mengusulkan pembentukan pusat-pusat penelitian sektoral dalam universitas-universitas di Indonesia, dan kolaborasi penelitian dengan universitas-universitas Australia.
- viii. Membentuk Pusat Fasilitas Keunggulan Perdagangan (*Trade Facilitation Centre of Excellence*) untuk mengatasi hambatan perdagangan dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral.
- ix. Menghilangkan hambatan untuk kerjasama infrastruktur antara bisnis-bisnis di Indonesia dan Australia.
- x. Mendorong reformasi peraturan kabotase di Australia dan Indonesia untuk laut dan udara guna mengurangi biaya bisnis, konsumen, dan memfasilitasi perdagangan yang lebih besar.

## **2. PERDAGANGAN BARANG**

- i. Semakin mengurangi atau menghapuskan tarif agar dapat menawarkan harga yang lebih baik serta meningkatkan pilihan konsumen dan jaminan ketersediaan produk.
- ii. Mempercepat jadwal penurunan tarif di luar AANZFTA di IA-CEPA untuk kerjasama perdagangan bebas, terutama untuk lini tarif Indonesia pada produk-produk pertanian dan lini tarif Australia pada tekstil dan produk-produk tekstil.
- iii. Barang dan jasa lingkungan harus bebas dari tarif dan pembatasan perdagangan.
- iv. Persyaratan teknis dan prosedur impor harus sesuai dengan praktik terbaik internasional, transparan dan tidak bertindak sebagai hambatan non-tarif untuk perdagangan.
- v. Menyelaraskan dan/atau mengakui standar-standar dan langkah-langkah sertifikasi di IA-CEPA seperti standar kesehatan, keselamatan, dan kualitas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan sertifikasi halal pada seluruh perekonomian negara mitra.
- vi. Membuat akses dua arah yang bebas cukai dan bebas kuota untuk produk makanan dan produk pertanian.

- vii. Menghapus semua hambatan dan peraturan yang membatasi untuk:
  - a. Impor barang yang tidak terkait dengan kesehatan dan keselamatan
  - b. Kegiatan ekspor
  - c. Penerapan kapasitas atau kuota pada izin impor
- viii. Memfasilitasi perlakuan istimewa antara kedua negara untuk perdagangan produk makanan.
- ix. Sebanyak mungkin mengadopsi standar Codex Alimentarius yang sama untuk mengatasi masalah standar yang berbeda-beda.
- x. Memperluas kemitraan daging merah dan ternak, dan menerapkan pendekatan yang serupa ke sektor-sektor lain dengan kepentingan bersama seperti biji-bijian, makanan laut, dan produk hortikultura.
- xi. Mendukung Ketentuan Asal dan sistem prosedur yang digunakan dalam AANZFTA (yang didukung ASEAN), termasuk amandemen Protokol Pertama, tetapi juga berusaha untuk menyederhanakan administrasi dengan tujuan untuk memfasilitasi kemudahan penggunaan dan ekonomi skala bisnis, pada UKM tertentu.

### 3. PERDAGANGAN JASA

- i. Membangun pendekatan yang sesuai dengan praktik terbaik internasional, transparan dan tidak bertindak sebagai pembatasan jasa.
- ii. Memfasilitasi akses yang lebih besar ke sektor jasa kedua negara.
- iii. Menetapkan pengaturan yang lebih fleksibel pada kehadiran penyedia jasa asing yang bersifat komersial.
- iv. Menghapus pembatasan arus data dan mempertimbangkan kembali pembatasan pada lokasi-lokasi server.
- v. Secara progresif menghapus hambatan yang terkait jasa dalam bidang berikut:
  - a. Praktik profesional dan pendirian bisnis jasa
  - b. Investasi asing dan penyediaan jasa
  - c. Pengembangan sumber daya alam
- vi. IA-BPG merekomendasikan tinjauan berkelanjutan dan liberalisasi Daftar Negatif Investasi di Indonesia dan liberalisasi akses lebih jauh ke sektor jasa di Australia.
- vii. Pembatasan pergerakan orang adalah rintangan utama lain untuk pertumbuhan perdagangan jasa dan investasi. Seperti yang dianjurkan oleh naskah posisi ini di mana-mana, pergerakan orang yang lebih mudah adalah kunci keberhasilan IA-CEPA.

### 4. INVESTASI

- i. Melonggarkan peraturan FDI di Indonesia dipandang sebagai kunci untuk transfer pengetahuan dan teknologi.
- ii. Ambang Dewan Peninjau Investasi Asing Australia (FIRB) untuk meninjau investasi di bidang pertanian harus serupa dengan ambang batas yang diterapkan untuk investasi dari negara lain, seperti Amerika Serikat.
- iii. Ambang FIRB untuk kelas-kelas investasi lain harus dengan cara yang sama mengacu pada kelas-kelas investasi di perjanjian perdagangan lainnya.

- iv. Secara progresif menghapus atau mengangkat semua hambatan dan pembatasan investasi dua arah sebagai berikut:
- a. Investasi tanah, fasilitas produksi seperti penggemukan, fasilitas pengolahan seperti pemotongan hewan, pabrik tepung, pengolahan makanan dan manufaktur barang-barang konsumsi, distribusi dan rantai pemasaran
  - b. Pembatasan ekspor produk
  - c. Lembaga investasi di lembaga pendidikan dan pelayanan pendidikan (kejuruan dan pendidikan tinggi) bagi orang-orang yang terlibat dalam rantai pasokan makanan lengkap (paddock to plate)
  - d. Ekuitas asing dan penyediaan jasa
  - e. Pembentukan industri jasa pengembangan sumber daya alam
- v. Pemangku kepentingan telah mengidentifikasi bahwa sektor-sektor berikut ini memerlukan investasi asing dan pembangunan kapasitas, yang menyajikan peluang signifikan bagi investor Australia. IA-CEPA hendaknya mencakup ketentuan-ketentuan untuk semua tingkat pemerintahan agar bekerja dengan bisnis guna memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan untuk membantu mencocokkan investor dengan mitra bisnis potensial di sektor berikut meskipun tidak terbatas pada sektor berikut saja:
- a. Kopi
  - b. Gula
  - c. Kapas
  - d. Pemuliaan ternak
  - e. Minyak kelapa sawit
  - f. Perikanan
  - g. Padi-padian
  - h. Cokelat
  - i. Fasilitas pengolahan mineral (smelter, kilang)
  - j. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane)
  - k. Lampu hemat energi
  - l. Ekonomi digital dan industri kreatif

IA-BPG merekomendasikan agar model kemitraan daging merah dan ternak bisa digunakan untuk membantu keterlibatan industri guna memajukan kerjasama timbal-balik dalam setiap sektor ini.

- vi. Mendorong terciptanya Pusat PPP Indonesia-Australia yang akan membantu memenuhi kebutuhan Indonesia akan desain berkualitas tinggi, strukturisasi, dan dokumentasi proyek yang ditawarkan. Pusat yang bekerja sama dengan BKPM tersebut akan merampingkan investasi dan alur kerja di sektor penting ini.
- vii. Menemukan mekanisme untuk memastikan keterlibatan Australia dalam proyek PPP tanpa harus melalui persyaratan tender kompetitif internasional. Platform pemerintah ke pemerintah harus ditetapkan. Misalnya, MoU pada proyek-proyek infrastruktur tertentu
- viii. Tetap terbuka untuk menerima tawaran yang tidak diminta untuk proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur daerah dari sektor swasta yang bersedia untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang telah mereka identifikasi secara sepihak.
- ix. Membuka sektor energi untuk investasi asing di semua kelas infrastruktur.

- x. Membuka peluang untuk investasi di bidang rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

## 5. PERGERAKAN PEKERJA

- i. Pengakuan timbal-balik kualifikasi dan sertifikasi oleh kedua negara untuk memfasilitasi perdagangan jasa dan pergerakan pekerja terampil.
- ii. Mendorong pergerakan manusia terampil yang lebih bebas di antara kedua negara. Mendorong lapangan kerja bagi orang Indonesia dan Australia di kedua negara yang punya ketrampilan.
- iii. Mendorong solusi alternatif untuk para pekerja migran jangka pendek dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, misalnya dengan menyediakan “mandor dengan level bahasa Inggris yang tinggi untuk mengawasi kelompok kerja” mirip dengan sistem yang beroperasi di Selandia Baru untuk para pemetik buah dan tukang bungkus.
- iv. Menghapus hambatan dua arah bagi pergerakan pekerja terampil dalam bidang berikut:
  - a. Pertanian produksi, ilmu pengetahuan, pengolahan makanan dan logistik rantai pasokan
  - b. Sektor pertanian agar memungkinkan pelatihan dan pekerjaan di kedua ekonomi untuk memfasilitasi pengembangan dan alih keterampilan
  - c. Pengaturan, sertifikasi dan penilaian standar
  - d. Pertambangan, energi, rekayasa, dan personil manajemen lingkungan
  - e. Pengembangan keterampilan, pelatihan dan transfer teknologi dalam bidang pertambangan, energi, rekayasa dan manajemen lingkungan
  - f. Pendidikan teknis, pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi serta pelatihan, termasuk guru-guru bahasa Inggris.
- v. Pengakuan keterampilan timbal-balik, termasuk mengembangkan pelatihan antara asosiasi profesional atau sekolah kejuruan dan kemungkinan membangun komite atau lembaga bersama untuk memfasilitasi inisiatif di bidang pendidikan.
- vi. Penyederhanaan izin kerja bagi dosen, guru dan peneliti, dan ketentuan visa yang lebih longgar bagi siswa dan mahasiswa.
- vii. Membuat kategori visa istimewa di bawah IA-CEPA untuk memfasilitasi pergerakan manusia terampil di sektor sektor jasa.
- viii. Menerapkan pembatasan lebih longgar untuk izin masuk dan izin kerja sementara untuk personil profesional dan terampil antara Australia dan Indonesia dan sebaliknya.
- ix. Menetapkan peraturan visa di sektor pariwisata untuk menarik warga Australia berinvestasi, tinggal, melewati masa pensiun, atau mengambil manfaat dari fasilitas perawatan manula untuk dikembangkan di Indonesia.
- x. Menyelaraskan pengaturan untuk visa bisnis bagi Australia maupun Indonesia, termasuk Visa on Arrival bagi orang Indonesia yang mencari visa bisnis yang setara dengan yang ditawarkan oleh Indonesia untuk wisatawan Australia, dan visa bisnis multi entri yang mudah didapat untuk orang Australia masuk ke Indonesia.

- xi. Pilihan visa jadi semakin fleksibel untuk memfasilitasi pariwisata yang lebih besar di antara kedua negara. Catatan: Indonesia telah menerapkan mekanisme masuk bebas visa selama 30 hari bagi penduduk Australia dan Australia punya opsi terapan untuk mengajukan visa pengunjung multi-entri tiga tahun. Bagaimanapun, ada lebih banyak hal yang dapat dicapai.
- xii. Lebih mengembangkan keterampilan dan pelatihan yang ditawarkan melalui program Pertukaran Keterampilan antara Indonesia dan Australia untuk mengembangkan sumber daya manusia dan tenaga kesanggrahan yang terampil dalam sektor pariwisata.

## 6. E-COMMERCE

- i. Mengadopsi aturan-aturan perdagangan yang menumbuhkan kepercayaan dalam lingkungan online dan membatasi kemampuan untuk memasang penghalang bagi perdagangan di masa depan. Secara khusus, IA-CEPA akan perlu mengadopsi aturan yang memungkinkan arus informasi dan mempertimbangkan kembali larangan lokalisasi data, memungkinkan penyediaan jasa lintas perbatasan, mendorong pertumbuhan bisnis online, mempermudah UKM dan pengguna agar bisa online, dan memungkinkan penggunaan sistem pembayaran online yang sederhana.
- ii. Membangun sistem tanpa batas yang harmonis untuk administrasi dan regulasi e-commerce
- iii. Mempertimbangkan persyaratan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pemerintah maupun bisnis untuk memanfaatkan e-commerce.
- iv. Sebagai suatu prinsip, IA-CEPA harus mendukung arus informasi bebas sembari tetap menghormati masalah keamanan informasi pribadi sebanyak mungkin. Pemerintah hendaknya tidak berupaya membuat ketentuan perjanjian di mana hukum kontrak sudah cukup.
- v. Menciptakan lingkungan yang mendukung industri dalam sektor ekonomi digital, terutama UKM, dengan memungkinkan aliran investasi dan orang yang lebih bebas serta secara progresif menghilangkan pembatasan kepemilikan asing yang tersisa di sektor digital.
- vi. Mendorong kelompok kerja bersama dalam membangun konvergensi sektoral ekonomi digital Indonesia-Australia.

## 7. PENDIDIKAN

IA-CEPA dan proyek-proyek yang sejenis hendaknya mencakup langkah-langkah untuk mendorong perguruan tinggi bekerja lebih erat dalam pengajaran, pembelajaran, dan penelitian, termasuk program gelar bersama serta kegiatan dan pusat penelitian bersama. Juga, IA-CEPA hendaknya mencakup:

- i. Ketentuan untuk membuka sektor universitas untuk investasi asing.
- ii. Ketentuan untuk membuka sektor pelatihan agar memungkinkan penyediaan sumber daya bagi program transisi sekolah ke universitas yang sangat ditingkatkan.
- iii. Ketentuan untuk kerjasama dan peningkatan kapasitas di sektor VET agar memungkinkannya lebih baik dalam melatih pekerja terampil agar mencapai standar internasional.

- iv. Ketentuan untuk pergerakan manusia terampil agar dapat melakukan penelitian dan melakukan pengajaran.

## 8. PELUANG YANG DAPAT LEBIH CEPAT DICAPAI

Memfokuskan ulang upaya bantuan Australia untuk memajukan seri proyek yang selanjutnya akan membangun kepercayaan pada dan kemajuan dalam tujuan IA-CEPA pada saat negosiasi dilakukan. Contoh proyek-proyek tersebut tercantum di bawah ini:

- i. Kolaborasi dalam peluang dan tantangan pembangkit listrik dan pasokan listrik termasuk pasokan listrik dan pasar lintas perbatasan.
- ii. Upaya-upaya kolaborasi untuk meningkatkan peluang pariwisata global di kedua negara.
- iii. Peluang dan tantangan jasa perbankan dan keuangan termasuk isu mengenai praktek terbaik ekonomi digital.
- iv. Meningkatkan jaringan transportasi antara Australia Utara dan Indonesia.
- v. Program bahasa dan orientasi budaya.
- vi. Membuka Layanan Pra-Inspeksi Bea dua arah
- vii. Membangun Pusat Fasilitas Keunggulan Perdagangan.
- viii. Kelompok kerja sektor METS (Teknologi dan Jasa Peralatan Pertambangan).
- ix. Pusat Keunggulan Indonesia-Australia untuk industri padi-padian.
- x. Merevisi kategori visa agar manusia dalam semua kategori semakin meningkatkan pergerakandua arah.
- xi. Mengembangkan 'Rencana Pangan 2030'.
- xii. Membentuk Jaringan Pemimpin Agrobisnis Indonesia-Australia.
- xiii. Menerapkan Rencana Aksi Harmonisasi Standar IA-CEPA tertentu.
- xiv. Pusat PPP untuk memfasilitasi proyek-proyek infrastruktur bilateral.





INDONESIA AUSTRALIA  
BUSINESS COUNCIL



Australian  
Chamber of Commerce  
and Industry



AUSTRALIA INDONESIA  
BUSINESS COUNCIL

**Ai**GROUP

## Bab 1

# HARAPAN BISNIS ATAS SUATU PERJANJIAN YANG ISTIMEWA DAN UNIK

## TERUS MEMBANGUN DI ATAS FONDASI YANG KUAT

### ➤ **MEMADUKAN BISNIS**

Pada Maret 2016, pemerintah Indonesia dan Australia secara resmi mengaktifkan diskusi untuk menegakkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Dengan reaktivasi tersebut, Grup Kemitraan Bisnis Indonesia-Australia (IA-BPG) juga dibentuk kembali sebagai badan penasihat untuk menyediakan wawasan bisnis tentang isu-isu yang berkaitan dengan penyusunan perjanjian tersebut. Pada tahun 2012, keanggotaan IA-BPG terdiri dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Kamar Dagang dan Industri Australia (ACCI), Dewan Bisnis Indonesia-Australia (IABC), dan Dewan Bisnis Australia-Indonesia (AIBC). Pada tahun 2016, IA-BPG memperluas keanggotaannya dengan memasukkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kelompok Industri Australia (Ai Group) untuk memastikan representasi pemangku kepentingan bisnis yang lebih luas dalam proses konsultasi.

Peran IA-BPG adalah untuk:

- memeriksa perdagangan, investasi dan profil kerjasama ekonomi saat ini antara kedua negara;
- mengidentifikasi perdagangan menyeluruh dan sektoral serta peluang investasi di kedua negara, juga bagaimana kerjasama ekonomi bisa mempersempit kesenjangan pembangunan antara kedua negara;
- mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, dan untuk mengembangkan interaksi ekonomi yang lebih besar, termasuk ruang lingkup bagi kedua negara untuk bekerja sama guna memfasilitasi akses ke pasar ketiga dan memfasilitasi partisipasi dalam rantai nilai global;
- menilai cara-cara peningkatan perdagangan dan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan memungkinkan manfaat ini akan didistribusikan secara luas melalui kedua negara, termasuk untuk usaha kecil dan menengah dan wilayah regional;

- mengusulkan mekanisme dan tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan, dan memfasilitasi distribusi secara luas manfaat integrasi ekonomi yang ditingkatkan;
- membuat rekomendasi tentang isi IA-CEPA termasuk negosiasi dan implementasinya; dan
- memperkuat pemahaman dan kemitraan antara komunitas bisnis Indonesia dan Australia dan berkontribusi pada pengembangan dialog sektor swasta dan sektor publik secara efektif.

Dalam mempersiapkan naskah posisi ini, IA-BPG, melalui organisasi-organisasi anggotanya, telah berkonsultasi secara ekstensif dengan sektor bisnis di kedua negara. IA-BPG berharap bahwa hal itu meletakkan dasar bagi keterlibatan bisnis yang berkelanjutan selama negosiasi tentang IA - CEPA berlangsung, dan yang paling penting, untuk perdagangan, investasi dan kolaborasi bilateral yang lebih besar dalam bisnis masa depan.

### ➤ **LEBIH DARI BISNIS BIASA**

Dari awal, itu IA-CEPA selalu dimaksudkan untuk melampaui perjanjian perdagangan bebas tradisional (FTA). IA-CEPA hendaknya menjadi kemitraan strategis komprehensif yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi (termasuk pembangunan kapasitas) dan isu-isu lintas sektor seperti gerakan manusia natural. IA-BPG juga berpendapat bahwa negosiasi hendaknya membahas sejumlah isu penting dan substantif lainnya seperti perdagangan elektronik, kebijakan persaingan, pengadaan pemerintah, hak-hak kekayaan intelektual, lingkungan dan tenaga kerja, serta ketentuan kelembagaan dan kerangka kerja ( transparansi, ketentuan umum dan pengecualian, ketentuan kelembagaan, prosedur penyelesaian sengketa, dan ketentuan akhir).

ACCI, KADIN, APINDO, Ai Group, IABC dan AIBC mendukung konsep dan visi IA-CEPA. Sektor bisnis percaya bahwa ada banyak peluang untuk kemitraan yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Australia dan karenanya hal itu membuat perjanjian jadi benar-benar berpotensi komprehensif yang mencakup semua aspek hubungan ekonomi antara kedua negara, dan jauh melampaui apa yang telah dicapai dalam FTA lainnya sampai saat ini. IA-CEPA memberi kesempatan unik untuk menciptakan kemitraan strategis di antara kedua negara dan bertujuan menghasilkan kemakmuran dan sukses bersama dalam ekonomi global.

Yang penting, IA-BPG percaya bahwa negosiasi harus didorong kesempatan sembari mengidentifikasi bidang-bidang yang punya potensi ekonomi, dan menyepakati langkah-langkah yang akan memfasilitasi bisnis untuk memaksimalkan peluang dengan bekerja bersama-sama. Tema utama dari perjanjian tersebut beserta pelaksanaannya akan memfasilitasi jaringan bisnis. Oleh karena itu, sama seperti IA-CEPA akan berbeda dari dan menjangkau lebih jauh ketimbang perjanjian perdagangan tradisional, begitu pula seharusnya negosiasinya. Mode negosiasi 'defensif' dan 'ofensif' yang biasa harus digantikan dengan upaya untuk memaksimalkan peluang.

IA-BPG berbesar hati untuk mencatat bahwa sentimen serupa diungkapkan oleh pimpinan kedua negara. Pernyataan bersama oleh kedua pemerintah pada bulan Maret 2016 menggarisbawahi kemauan politik yang kuat untuk melampaui perjanjian perdagangan bebas tradisional untuk mengembangkan perjanjian abad 21, IA-CEPA akan menjadi platform untuk kemitraan visioner baru yang lebih luas, lebih maju, modern, dan fasilitatif ketimbang FTA tradisional dalam semua aspek hubungan ekonomi serta pembangunan kapasitas. Mantan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia, Thomas Lembong, dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi dari Australia, Steven Ciobo MP, bersepakat bahwa IA-CEPA akan berlanjut berdasarkan prinsip-prinsip inti bahwa:

- kedua belah pihak akan berupaya memastikan kesepakatan akhir yang berkualitas tinggi dan sekomprensif mungkin, mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi, dan bahwa hal itu hendaknya seimbang serta memberi manfaat yang saling menguntungkan; dan
- kesepakatan akhir hendaknya dibangun di atas perjanjian multilateral dan regional yang ada serta negosiasi antara Indonesia dan Australia.<sup>1</sup>

Kedua menteri lebih lanjut menyatakan bahwa “Perjanjian yang sukses akan melayani sebagai platform baru bagi kemitraan ekonomi modern dan dinamis yang mencerminkan ikatan kuat antara kedua negara”.

### ➤ **MELAMPAUI PERJANJIAN LAINNYA**

Indonesia dan Australia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sejumlah perjanjian dan kemitraan ekonomi yang mencerminkan kecenderungan untuk lingkungan perdagangan yang lebih bebas dan integrasi ekonomi global. Indonesia dan Australia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia dan Selandia Baru (AANZFTA) yang menyediakan dasar untuk perdagangan yang lebih liberal antara Indonesia dan Australia, serta ASEAN dan Selandia Baru. Australia menyediakan akses istimewa untuk barang-barang dari Indonesia sebagai negara berkembang melalui Sistem Preferensi Tarif Australia (ASTP). ASTP saat ini sedang ditinjau dan punya potensi untuk ditingkatkan bagi Indonesia. Meskipun sistem ini telah ada tapi tampaknya masih kurang dimanfaatkan dan perlu lebih dipromosikan di Indonesia. Eksportir Indonesia berpotensi untuk lebih memanfaatkan hal itu.

ASEAN juga menuju perekonomian terintegrasi yang lebih liberal. Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) berdiri berdasarkan empat pilar yang terkandung dalam cetak biru AEC tentang pencapaian pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pembangunan ekonomi yang adil, dan kawasan yang terintegrasi penuh ke dalam ekonomi global pada 2015.

Lebih luas lagi, sejak diskusi awal tentang IA-CEPA pada 2012, ada dua perjanjian perdagangan ‘mega-kawasan’ lagi yang muncul. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) adalah kemitraan ekonomi antara blok ASEAN dan Enam mitra Plus yang dengannya, RCEP memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas, yaitu: China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan India. Kemitraan ini berfokus pada pengintegrasian ekonomi ASEAN-Plus-Enam anggota, dan, karena ASEAN memimpin kerangka kerja kawasan, maka kemitraan ini dipandu dengan ‘ASEAN Way’ yang lebih berorientasi konsensus, akomodatif, dan fleksibel dalam mencapai tujuan bersama. RCEP saat ini sedang dalam negosiasi aktif dan diharapkan akan selesai pada 2017. Negosiasi IA-CEPA hendaknya tidak menunggu hasil RCEP atau terlalu dipandu oleh hasil-hasil itu karena hasilnya tidak pasti dan dalam hal apapun tidak mungkin seprogresif keinginan kedua pemerintah dan IA-BPG terhadap IA-CEPA.

<sup>1</sup> Pernyataan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Investasi Australia pada Pengaktifan kembali negosiasi dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) di Canberra, 16 Maret 2016.

Kemitraan Trans-Pacific (TPP, Trans-Pacific Partnership), di sisi lain, adalah “perjanjian perdagangan abad 21” yang melibatkan 12 negara maju dan negara berkembang di lingkaran Pasifik. Negosiasi disimpulkan pada bulan November 2015 dan negara-negara anggota sedang menjalani proses ratifikasi internal mereka. Australia adalah anggota TPP dan Indonesia telah mengumumkan ambisinya untuk bergabung dengan kemitraan tersebut.

Selanjutnya, Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) adalah forum yang terdiri dari 21 ekonomi anggota Lingkaran Pasifik yang mempromosikan perdagangan bebas dan reformasi ekonomi di seluruh Asia-Pasifik, dan meliputi Indonesia dan Australia sebagai anggota. Kedua negara juga anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan G20,

Masing-masing kerangka kerja global dan regional ini menyediakan referensi penting untuk membentuk dan mengembangkan IA-CEPA. Apa yang sudah tersedia di bawah perjanjian yang ada dan yang potensial menciptakan tantangan untuk dilebihi oleh IA-CEPA.

Konsep IA-CEPA tidak diragukan lagi jadi pelengkap bagi agenda AEC, ASEAN, AANZFTA, WTO, dan APEC. Kesepakatan akhir juga harus bersifat melengkapi dan mendukung perjanjian ini. Karakteristik AEC menyediakan tolok ukur bagi AANZFTA maupun IA-CEPA untuk menyediakan peluang yang signifikan untuk IA-CEPA guna memanfaatkan kemajuan pesat menuju integrasi ekonomi ASEAN.

## ➤ **FOKUS PADA JASA**

Jasa akan berperan semakin penting dalam ekonomi Indonesia maupun Australia selama mereka bertransformasi. Jasa adalah sektor kunci yang meliputi banyak klasifikasi industri. Jasa sangat penting untuk semua sisi dalam kedua negara, serta memungkinkan daya saing dan transfer pengetahuan dan teknologi. Jasa perlu perhatian istimewa dalam IA-CEPA mengingat peningkatan peran jasa dalam perekonomian Indonesia dan Australia untuk memungkinkan sektor-sektor lain dalam perdagangan dan investasi bilateral serta dalam mengakses rantai nilai global.

Bagi Indonesia, jasa akan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah yang sedang berkembang dalam mendukung industri primer dan sekunder efisien, dalam memungkinkan partisipasi dalam rantai pasokan global, dan dalam mentransformasi dan menumbuhkan ekonomi. Untuk Australia, jasa sama penting di dalam negeri dan makin penting dalam ekspor.

Meskipun jasa penting di dalam negeri, dalam perdagangan bilateral, dan dalam rantai pasokan global, jasa tidak perlu dibatasi oleh Indonesia dan Australia. Pembatasan ini merugikan kedua negara. Dalam bab berikut, naskah posisi ini mengidentifikasi hambatan istimewa untuk perdagangan jasa dan investasi dan rekomendasi untuk mengatasinya.

Laporan Rekomendasi Kebijakan Dewan *Indonesian Service Dialogue* (ISD) 2015 menetapkan implikasi dari pembatasan Jasa Logistik, Jasa Distribusi, Jasa Energi, Jasa ICT, dan e-Commerce.<sup>2</sup> Laporan Rekomendasi Kebijakan menyediakan resep yang sangat baik untuk perubahan kebijakan dalam sektor-sektor ini serta sektor-sektor yang lain. Secara khusus, laporan ini

<sup>2</sup> <http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/10/Indonesia-Services-Dialogue-Policy-Recommendation-Yose-Rizal-Damuri.pdf>

merekomendasikan tinjauan Daftar Negatif Investasi untuk membuka kunci pertumbuhan sub-optimal dari sektor jasa.

Daftar Negatif Investasi adalah juga instrumen peraturan yang paling sering dikutip mengenai keprihatinan para investor asing dalam bidang jasa. Sementara daftar itu dimodifikasi secara luas pada awal 2016 agar beberapa sektor jadi lebih terbuka bagi mayoritas investasi asing, banyak sektor tetap efektif masih tetap tertutup, atau sangat terbatas bagi investor yang mengupayakan kontrol atas investasi mereka. Selain itu, peraturan-peraturan lain telah melalui arah lain yang secara efektif meniadakan ketentuan lebih terbuka dari daftar, sementara Daftar Negatif Investasi mungkin telah dibuka di beberapa sektor.

*Australian Services Roundtable* telah membuat rekomendasi<sup>3</sup> untuk perubahan kebijakan domestik dan perdagangan Australia dalam berbagai usulan untuk pemerintah. Hal ini termasuk peninjauan hambatan investasi seperti perizinan profesional berdasarkan negara dan sistem pembatasan mata uang dan pembayaran.

## REKOMENDASI

- IA-BPG merekomendasikan tinjauan secara terus-menerus dan liberalisasi Daftar Negatif Investasi di Indonesia dan liberalisasi akses lebih jauh ke sektor jasa di Australia.
- Pembatasan perpindahan pekerja adalah hambatan utama lain bagi pertumbuhan perdagangan jasa dan investasi. Seperti yang dianjurkan naskah posisi ini, perpindahan pekerja yang lebih mudah adalah kunci keberhasilan IA-CEPA.

## ➤ **PENYAMPAIAN ASPIRASI EKONOMI**

### ***Potensi Hubungan Ekonomi Indonesia-Australia***

Untuk mempersiapkan naskah posisi ini, IA-BPG menugaskan Dr. Kiki Verico dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk melakukan studi analisis hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia. Penelitian yang dimasukkan dalam Apendiks 1 ini menyediakan analisis akademis rinci tentang hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia, termasuk hubungan sejarah dan sosial-politik antara kedua negara, tren dalam perdagangan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyediakan materi latar belakang dan konteks yang luas dan menyediakan berbagai data ekonomi, statistik, dan indikator. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, walaupun ekonomi kedua negara menunjukkan perbedaan yang signifikan, perbedaan-perbedaan itu bersifat saling melengkapi dan memberi potensi pertumbuhan tambahan yang signifikan sebagai hasil dari penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif.

Dengan asumsi hubungan ekonomi yang lebih dekat seperti yang tergambar dalam IA-CEPA, laporan itu memprediksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bagi Indonesia dan Australia. Atas dasar itu, laporan tersebut memprediksi bahwa:

<sup>3</sup> <http://australianservicesroundtable.com.au/>

- Pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia akan meningkat dari 5% (1999-2014) menjadi 7,4% (2016-2030).
- Pertumbuhan ekonomi jangka panjang Australia akan meningkat dari 3,1% (1999-2014) menjadi 3,6% (2016-2030).
- PNB per kapita Indonesia akan mencapai US\$10,385 pada 2030 dari US\$3,573 pada 2015,
- PNB per kapita Australia akan mencapai US\$118,648 pada 2030 dari US\$60,070 pada 2015,
- Pendapatan per kapita di Indonesia akan naik jadi tiga kali lipat selama 15 tahun ke depan, sementara Australia akan naik hampir dua kali lipatnya.

Indonesia dan Australia adalah dua ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara/Oseania. Dengan bekerja sama, kedua negara ini akan menjadi ekonomi terbesar kesembilan di dunia. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia berkembang (selama dasawarsa terakhir jadi nomor ketiga setelah China dan India dalam pertumbuhan PDB tahunan), sedangkan Australia adalah ekonomi OECD yang paling cepat berkembang.

Kinerja perdagangan dan investasi bilateral kedua ekonomi sangat kurang memadai untuk menggarap potensinya, meskipun Indonesia dan Australia bertetangga dan meskipun ekonomi mereka saling melengkapi. Dua ekonomi secara struktural berbeda dan ini mencerminkan status pengembangan mereka. Keunggulan komparatif dan kompetitif berbeda. Kultur dan kemampuan bisnis dan kelembagaan berbeda. Bisnis di setiap negara kurang memahami peluang di negara lain dan bagaimana melakukan bisnis di negara lain. Kepercayaan dan keyakinan pada umumnya rendah.

Namun demikian, dan memang antara lain karena perbedaan itu, dua ekonomi tersebut saling melengkapi. Dengan pola konsumsi, produksi, teknologi dan keterampilan yang saling melengkapi, ada peluang yang menguntungkan untuk menciptakan sinergi dengan cara-cara yang bisa dicapai kedua bangsa. Dengan membangun perjanjian yang ada, IA-CEPA diperlukan untuk menyediakan kerangka kerja yang inovatif untuk membangun kemitraan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Dari semua hubungan Indonesia dan Australia, kemitraan ekonomi antara mereka memiliki potensi terbesar untuk perubahan transformasional dalam hubungan bilateral. Untuk Indonesia, Australia dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan pentingnya yang mencakup dari pertanian hingga pariwisata dan infrastruktur untuk e-niaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan koneksi perdagangan global Indonesia. Untuk Australia, Indonesia dapat membuka jalan baru untuk pertumbuhan menggunakan sumber daya manusia, aset alam, dan AEC sebagai batu loncatan ke Asia dan dunia luar. Ketika ada perdagangan dan investasi yang lebih besar, lebih banyak kemitraan dan lebih banyak kontak dari orang ke orang, maka hubungan akan berubah jadi lebih baik, ke hubungan yang saling menghormati, dan kerjasama yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama.

### ***Fitur Dasar IA-CEPA***

IA-BPG mendukung konsep IA-CEPA yang jauh lebih luas ketimbang FTA tradisional. IA-CEPA juga harus mencerminkan komitmen yang lebih maju ketimbang Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia dan Selandia Baru (AANZFTA) dan komitmen-komitmen FTA lain yang telah disepakati oleh Indonesia dan/atau Australia dengan negara-negara lain. IA-CEPA akan meletakkan dasar untuk kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Australia yang



memfasilitasi perdagangan, investasi dan kegiatan usaha bersama yang jauh lebih besar. Ini harus mencakup inisiatif bersama yang inovatif antara pemerintah, asosiasi bisnis, bisnis, industri, dan lembaga pendidikan; serta peningkatan kapasitas di daerah strategis untuk membangun hubungan bilateral. Aliran bebas bahan baku, barang setengah jadi, modal, dan jasa juga akan memungkinkan rantai produksi yang efisien untuk mengakses pasar global di luar perbatasan kita bersama.

Fitur dasar IA-CEPA seperti yang diidentifikasi dan direkomendasikan bersama oleh komunitas bisnis Indonesia dan Australia adalah sebagai berikut:

1. Liberalisasi perdagangan dua arah barang melalui pengurangan tarif lebih cepat atau pengecualian yang sangat terbatas (yang perlu menjadi WTO konsisten), dan menurunkan diperbatasan dan di belakangperbatasan hambatan, seperti kuota dan larangan (dengan langkah-langkah yang tersisa perlu menjadi konsisten dengan WTO), untuk memungkinkan produsen di kedua negara untuk mengakses kedua pasar dan dalam proses pengalaman untuk bersama-sama mengakses pasar lain.
2. Liberalisasi dua arah perdagangan jasa, termasuk pengurangan regulasi ketat, dan memungkinkan pergerakan orang alami untuk memungkinkan penyedia layanan di masing-masing negara untuk mengakses pasar lain dan memenuhi tuntutan untuk layanan, pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kapasitas dan kualitas penyedia.
3. Fasilitasi investasi di semua sektor melalui penyediaan lebih efektif dari informasi investasi, aktif mendorong dua arah investasi, promosi dan pengurangan atau penghapusan pembatasan investasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kedua negara.
4. Keselarasan dan penyederhanaan peraturan, termasuk saling pengakuan standar teknis untuk barang dan jasa, kualifikasi profesional, standar dan klasifikasi barang untuk keperluan pabean yang akan meningkatkan fasilitasi perdagangan.
5. Memfasilitasi pergerakan manusia terampil ke Indonesia dan Australia, dan pekerja musiman ke Australia, danpeningkatan kapasitasbagi pekerja yang kurang terampil termasuk pengalaman dalam pasar dan peningkatan kemampuan bahasa, untuk meningkatkan ketersediaan orang guna mendukung pembangunan ekonomi bersama.
6. Integrasi rantai nilai dengan kerjasama lintas batas untuk mengidentifikasi peluang pasar dan sinergi bisnis, meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, meningkatkan akses ke pasar internal, dan berpartisipasi dalam rantai pasokan global.
7. Pembangunan kapasitas berkelanjutan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur pemerintah, membangun kapasitas kelembagaan, menaikkan tingkat keterampilan, memfasilitasi peluang bisnis bilateral, meningkatkan keterampilan dan pemahaman budaya dan bahasa secara dua arah, dan meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan
8. Digitalisasi praktik-praktik terkait perdagangan dan peningkatan kepercayaan dalam lingkungan online melalui perdagangan e-niaga.
9. Memfasilitasi perdagangan barang dan jasa lingkungan melalui identifikasi peluang bersama, dan menurunkan hambatan perdagangan, investasi, dan pergerakan manusia.
10. Mempromosikan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan meningkatkan kerjasama dan investasi antara UKM di Indonesia dan Australia.



11. Mengupayakan mekanisme yang memfasilitasi pengembangan bisnis kawasan selain bisnis di pusat-pusat ekonomi saat ini di kedua negara.
12. Menetapkan mekanisme kelembagaan baru untuk memantau dan memfasilitasi pelaksanaan IA-CEPA.

### **Karakteristik Kunci IA-CEPA**

Komunitas bisnis Indonesia dan Australia sepakat bahwa IA-CEPA hendaknya dicirikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. *Kerjasama ekonomi.***

Keutamaan kerjasama ekonomi dalam IA-CEPA dibandingkan perjanjian perdagangan bebas standar telah ditekankan di seluruh pertimbangan IA-BPG ini. Potensi keuntungan dari kerjasama strategis antara sektor swasta kedua negara dan pemerintah itu sangat besar, terutama dalam integrasi lintas-perbatasan dalam rantai nilai proses ekonomi dan bisnis. Fakta bahwa kedua ekonomi pada dasarnya saling melengkapi dalam hal sumber daya dan kemampuan telah membuat kasus ini bahkan lebih menarik. Analisis ekonomi yang ditugaskan oleh IA-BPG (Lampiran 1) menemukan bahwa “Indonesia dan Australia keduanya menghasilkan produk yang saling dibutuhkan, memberi kesempatan yang sangat baik untuk masing-masing guna membangun hubungan perdagangan yang kuat”. Dan selanjutnya, tenaga kerja tidak terampil dari Indonesia yang berlimpah-limpah melengkapi tenaga kerja yang sangat terampil tapi berjumlah kecil di Australia. Program bantuan pembangunan Australia akan jadi mekanisme kerjasama ekonomi utama dalam dirinya sendiri dan jadi pemungkin kerjasama ekonomi bilateral di sektor swasta. Program ini harus ditujukan untuk membangun kapasitas ekonomi dan memfasilitasi pengembangan pasar dan rantai nilai bagi kedua mitra.

#### **2. *IA-CEPA sebagai proses yang dinamis dan berkembang.***

IA-CEPA hendaknya menjadi suatu proses yang hidup - suatu pekerjaan yang terus bergerak maju dan yang memerlukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang konsisten dari waktu ke waktu. Karena itu, suatu proses pemantauan dan tinjauan yang berkelanjutan, termasuk beberapa bentuk kerangka kerja publik - swasta, diperlukan untuk memungkinkan bisnis terus memberi masukan tentang kemajuan, arah, dan pertumbuhan perjanjian.

#### **3. *Mendorong pertumbuhan inklusif di kedua negara.***

Inklusivitas meliputi ekuitas, persamaan kesempatan, dan dukungan dalam pasar dan transisi tenaga kerja. Pertumbuhan yang inklusif hendaknya berkontribusi mengurangi kemiskinan secara persisten sehingga memungkinkan orang untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Ini adalah butir penting bagi strategi pertumbuhan yang sukses yang harus menjadi fitur kunci dalam IA-CEPA. Kesetaraan kesempatan dalam hal dampak gender dan penyebaran geografis pada peluang dan manfaat, akses ke pasar, sumber daya, dan lingkungan peraturan berisi untuk bisnis dan individu juga harus ditekankan. Pertumbuhan yang inklusif juga menyiratkan perspektif jangka panjang berkaitan dengan dampak yang ditargetkan untuk dicapai.

#### **4. *Keterlibatan yang berkelanjutan dari para pemangku kepentingan.***

IA-CEPA diharapkan memiliki dampak yang luas dengan jangkauan yang jauh di kedua negara. Hal ini akan membutuhkan strategi transformasi yang akan memfasilitasi dan mendorong perubahan dalam sektor bisnis, terutama UKM. Keterlibatan berkelanjutan dengan komunitas bisnis di kedua negara diperlukan untuk memastikan kesadaran dan

kepercayaan yang tinggi. IA-CEPA juga harus praktis dan memberi hasil dengan segera melalui tindakan dan solusi jangka pendek, namun mempertahankan tujuan dan visi jangka panjang. IA-BPG dan organisasi-organisasi yang jadi anggotanya dapat terus memfasilitasi keterlibatan bisnis selama implementasi IA-CEPA dan menjadi saluran untuk umpan balik dan pengukuran dampak.

**5. *Sertakan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan informasi dan kegagalan pasar, serta memfasilitasi jaringan bisnis.***

Bisnis dari kedua negara mengidentifikasi kurangnya ketersediaan informasi mengenai peluang bisnis dan perdagangan di kedua pasar. Kekurangan informasi dan bahkan salah informasi adalah kendala utama bagi peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara hubungan bisnis yang signifikan sudah ada antara kedua negara, pemangku kepentingan bisnis merasa bahwa hal ini adalah dasar yang sempit dan bahwa banyak akan diperoleh dari berbagi informasi bisnis secara terorganisir dan sistematis dan peningkatan kesadaran di kedua negara. Bahkan dengan informasi yang lebih baik tentang pasar dan bagaimana melakukan bisnis pun, hubungan bisnis dapat terus berkinerja buruk karena persepsi negatif yang sudah berjalan lama dan bahkan kurangnya kepercayaan antarbisnis dan antara bisnis dengan pemerintah. Oleh karena itu, di samping tindakan menciptakan pertukaran sistematis informasi yang lebih banyak, IA-CEPA harus menyediakan dana untuk promosi perdagangan dan investasi, dan meliputi mekanisme-mekanisme yang akan memfasilitasi pembangunan hubungan kepercayaan yang mengakibatkan penguatan jaringan Bisnis ke Bisnis (*B-to-B*) dan Bisnis ke Pemerintah (*B-to-G*).

***Keterlibatan Bisnis dan Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam IA-CEPA***

Pembentukan IA-BPG dan hasil konsultasi dan diskusi antara asosiasi bisnis di Indonesia dan Australia adalah pendekatan yang unik dan baru ke pemangku kepentingan dalam proses negosiasi *G-to-G* seperti IA-CEPA. Proses IA-BPG telah memungkinkan komunitas bisnis dari kedua negara untuk menyuarakan pendapat mereka untuk membentuk hubungan ekonomi dan perdagangan yang coba dibangun oleh Indonesia dan Australia.

Mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh IA-BPG pada tahun 2012 dalam mempersiapkan usulan ini, yaitu, proses konsultasi yang meminta masukan dari semua pemangku kepentingan bisnis, asosiasi-asosiasi yang menyusun IA-BPG mengundang anggota konstituen mereka masing-masing untuk memberi masukan, opini, rekomendasi, atau saran lain melalui wawancara, usulan tertulis, dan lokakarya. Sementara pada tahun 2012, IA-CEPA adalah konsep yang relatif baru, dalam periode intervensi, kesadaran umum tentang negosiasi telah meningkat sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan masukan yang lebih luas untuk proses IA-BPG. Rincian lebih lanjut tentang proses mencari masukan dari sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya terkandung dalam lampiran laporan ini.

Meskipun naskah posisi ini mencerminkan posisi yang dipegang luas oleh bisnis Indonesia dan Australia, naskah ini tidak mungkin mencerminkan pandangan bisnis tentang setiap aspek IA-CEPA.

Selama negosiasi berlanjut di antara kedua pemerintah, bisnis akan membutuhkan kesempatan yang berkelanjutan untuk memberi masukan, terutama tentang detail sektoral IA-CEPA dan tentang masalah kerjasama ekonomi dan masalah lintas sektoral.

Selain itu, IA-BPG menunjukkan bahwa proses hampir sama penting dengan hasil karena konsultasi terbaru dan konsultasi berkelanjutan akan jadi hal yang penting dalam penyediaan informasi bisnis tentang peluang dan juga dalam mengatasi defisit informasi dan kegagalan pasar.

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan di atas, IA-BPG percaya bahwa IA-CEPA hendaknya menjadi perjanjian yang dinamis dan yang dapat disesuaikan dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, IA-BPG merekomendasikan hal-hal berikut ini ditegaskan selama negosiasi IA-CEPA:

- ***Melanjutkan Pelibatan Bisnis ke Bisnis***

Inisiatif seperti IA-BPG hendaknya menjadi model bagi asosiasi-asosiasi bisnis dari kedua negara untuk saling terlibat guna mendiskusikan dan mengidentifikasi peluang kerjasama. Kamar Dagang dan Dewan Bisnis bisa jadi penggerak di kedua negara dan mendorong anggotanya untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan rekan-rekan mereka di Indonesia atau Australia. Bisnis dari kedua negara harus mulai melihat peluang yang signifikan yang dapat dicapai dengan bekerja sama. Keterlibatan bisnis ke bisnis juga jadi cara yang efisien untuk mengatasi kegagalan pasar saat ini.

- ***Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Lebih Luas***

IA-BPG juga menyimpulkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan tidak harus dibatasi pada bisnis saja. IA-CEPA hendaknya mencakup ketentuan untuk melibatkan satu set pemangku kepentingan yang lebih luas, yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap IA-CEPA akan datang. Satu set ini mencakup media, masyarakat sipil, universitas, dan lembaga pemerintah daerah. Pelibatan kelompok pemangku kepentingan di kedua negara ini diperlukan untuk memastikan kesadaran dan kepercayaan yang tinggi. Sebagai contoh, ada sinisme umum terhadap FTA, CEPA, dan perekonomian terbuka di Indonesia. Sementara itu, di Australia, ada beberapa kekhawatiran masyarakat tentang FTA, ditambah pandangan negatif dan ketinggalan jaman tentang Indonesia yang menghambat kerjasama. Ini perlu ditangani secara strategis melalui kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Pelibatan media massa pun penting, mengingat media massa punya kapasitas untuk memengaruhi opini publik. Persepsi yang salah pada kedua belah pihak seringkali diperbesar oleh media.

- ***Memastikan Pelibatan Bisnis secara Berkelanjutan***

IA-BPG memuji komitmen Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Australia) dan Kementerian Perdagangan (Indonesia) untuk mengakomodasi mekanisme untuk melibatkan bisnis dan mencari masukan mereka. IA-BPG merekomendasikan bahwa proses masukan bisnis yang berkelanjutan, termasuk grup bisnis pemerintah, hendaknya dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan, pemantauan dan pengembangan IA-CEPA lebih lanjut. IA-BPG menyarankan panitia hendaknya terdiri dari wakil-wakil dari komunitas bisnis, pakar sektor, dan wakil-wakil pemangku kepentingan lain (termasuk akademisi) dari kedua negara yang akan membahas lebih lanjut secara rinci tentang bagaimana mengaktifkan peluang dan isu-isu yang diangkat dalam naskah ini dan yang diangkat oleh orang lain. Sejalan dengan maksud untuk membuat IA-CEPA jadi proses hidup, IA-BPG akan terus-menerus memberi masukan dan saran tentang proses negosiasi IA-CEPA dan aplikasinya.



## Bab 2

# MENANGANI HAMBATAN PERDAGANGAN, INVESTASI DAN KERJASAMA EKONOMI

Meskipun sudah berlaku liberalisasi perdagangan baru-baru ini, masih ada berbagai hambatan arus perdagangan dan investasi yang lebih besar dan untuk kolaborasi bisnis antara Indonesia dan Australia.

Selama konsultasi dan diskusi IA-BPG, sektor bisnis dari Indonesia dan Australia sebagai penggerak perdagangan dan investasi menggunakan pendekatan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memberi wawasan tentang apa yang dirasakan menjadi kendala utama bagi hubungan perdagangan dan investasi yang lebih kuat di antara kedua negara.

Rekomendasi dan harapan untuk IA-CEPA yang dinyatakan selama konsultasi menjadi titik awal bagi IA-BPG untuk menyusun naskah ini. Elemen ini penting untuk mendapat masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan rincian pilar utama, sektoral, dan lintas-sektoral IA-CEPA.

Meskipun ada peluang untuk mengembangkan kemitraan komprehensif di berbagai sektor antara Indonesia dan Australia dan meskipun ada manfaat yang jelas dari kemitraan itu, bagian berikut menguraikan beberapa masalah yang terus menghambat perdagangan dan investasi di antara kedua negara.

### HAMBATAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Aliran barang dan jasa yang lebih terbuka dan bebas dengan realisasi investasi yang tinggi hendaknya menjadi tujuan utama dari IA-CEPA menurut komunitas bisnis. Hal ini tidak dapat dicapai jika hambatan perdagangan dan investasi tetap berada di tempatnya. IA-CEPA hendaknya juga berisi komitmen bahwa kedua negara tidak akan memberlakukan pembatasan perdagangan lagi di masa depan, termasuk perdagangan jenis barang dan jasa yang baru. Hambatan bagi perdagangan dan investasi sebagaimana yang diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan usaha adalah sebagai berikut:

## ➤ **TARIF YANG BERLAKU**

Seperti yang tercantum dalam naskah posisi IA-CEPA 2012, para pemangku kepentingan di kedua negara telah menunjuk hambatan tarif yang tersisa sebagai hambatan yang signifikan terhadap perdagangan. Karena IA-CEPA diharapkan melengkapi ketentuan AANZFTA, IA-BPG berusaha untuk mempercepat komitmen AANZFTA untuk secara bertahap mengurangi tarif dan akhirnya menghapus tarif, termasuk tarif terhadap produk yang sejauh ini tetap dibebaskan dari AANZFTA. Menurut jadwal penghapusan tarif AANZFTA ini, Australia telah berkomitmen untuk 100% menghapus tarif pada 2020, sementara Indonesia telah berkomitmen untuk menghilangkan 93,2% dari tarif keseluruhan pada 2025, Seperempat dari perdagangan barang Australia saat ini menghadapi tarif Indonesia, sementara itu, seperti dibahas di bawah, perdagangan beberapa barang di mana Indonesia memiliki keunggulan kompetitif (misal, tekstil, pakaian dan alas kaki) masih menghadapi tarif besar di Australia.

IA-BPG merekomendasikan percepatan penghapusan semua tarif secepat mungkin. Hal ini akan meningkatkan pilihan konsumen dan mengurangi biaya masuk oleh produsen, serta membantu mengintegrasikan rantai nilai.

Indonesia telah mengurangi tetapi tidak menghilangkan tarif berbagai produk pertanian dan agribisnis, termasuk ternak hidup, daging kambing dan domba kategori tertentu, babi beku, makanan laut olahan, beberapa produk susu, dan beberapa buah dan sayuran segar dan olahan. Sejumlah produk pertanian sensitif seperti beras, gula, anggur, dan minuman keras juga dikecualikan dari komitmen pengurangan tarif AANZFTA Indonesia, oleh karena itu, beberapa produk terus dikenakan tarif tinggi. Pemerintah Indonesia punya pandangan bahwa beras dan gula merupakan komoditas pertanian pokok yang perlu diatur dan dipantau mengingat produk tersebut punya tingkat konsumsi yang tinggi dan untuk melindungi petani lokal. Walaupun kebutuhan untuk melindungi petani lokal dapat diakui, IA-CEPA harus memastikan bahwa tarif yang diberlakukan untuk Australia berkurang sebanyak mungkin dan berada di tingkat yang sama seperti yang diterapkan pada negara-negara lain. Misalnya, eksportir gula Australia meningkatkan kekhawatiran berkaitan dengan kerugian yang timbul dari Perdagangan ASEAN Dalam Perjanjian Barang (ATIGA, ASEAN Trade in Goods Agreement) yang menyediakan tarif lebih rendah dan dengan demikian menikmati impor gula dari negara-negara seperti Thailand. Hendaknya ada pengurangan tarif impor gula Australia, sekurang-kurangnya sampai ke tingkat yang setara dengan yang diterapkan untuk Thailand.<sup>4</sup>

Di sisi lain, Australia telah menghilangkan tarif untuk sebagian besar produk pertanian tetapi menerapkan tahap-tahap pengurangan tarif yang lebih lambat pada beberapa lini produk, terutama di bidang manufaktur hingga 2020, Beberapa lini tarif untuk tekstil dan produk tekstil di Australia tetap, dan hanya akan dihapus sepenuhnya pada 2020, Misalnya, tekstil kain tenun; karpet wol; handuk terry, kapas rajutan, dan kain rajutan masih akan dikenakan tarif hingga 2019, Adapun pakaian dan aksesoris pakaian kena tarif 15% dan secara bertahap akan dikurangi jadi 10% pada 2019, Meskipun kuantitas ekspor tahunan tekstil Indonesia masih terbatas, bisnis tekstil Indonesia mengusulkan bahwa, di bawah IA-CEPA, ekspor tekstil ke Australia hendaknya dibuat benar-benar bebas tarif atau mereka menerima tingkat tarif khusus. Saat ini, hanya ada dua produk tekstil bebas tarif, yaitu HS52 (Garmen Rajutan) dan HS62 (Garmen Non-Rajutan).<sup>5</sup> Sementara Indonesia sudah menerima perlakuan istimewa di bawah Sistem Preferensi Tarif

<sup>4</sup> Usulan dari *Australian Sugar Industry Alliance*.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Australia (ASTP), menghilangkan tarif-tarif ini secara lebih cepat akan membuka peluang bagi produsen tekstil dan pakaian Indonesia untuk bersaing dengan produk Cina di pasar Australia. Tinjauan ASTP saat ini bisa merekomendasikan konsesi yang lebih besar bagi Indonesia, tetapi seperti yang telah dinyatakan, preferensi IA-BPG adalah lebih cepat menghilangkan tarif di bawah IA-CEPA. Selain itu, di sektor pertanian, para pemangku kepentingan Indonesia mengupayakan penghapusan tarif impor produk kakao.<sup>6</sup>

Penghapusan tarif sepenuhnya untuk barang-barang manufaktur akan memaksimalkan pilihan konsumen dan memungkinkan produsen untuk memiliki akses yang lebih besar ke bahan mentah atau bahan setengah jadi sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

### ➤ **PERATURAN DAN PROSEDUR PERDAGANGAN**

Peraturan dan prosedur yang rumit sering menghambat pergerakan bebas barang dan jasa. Peraturan seringkali tumpang tindih dan tidak jelas sehingga menyebabkan penundaan proses bisnis. Bisnis Indonesia dan Australia menyatakan bahwa mereka perlu pedoman yang komprehensif tentang peraturan perdagangan dan peluang pasar. Bimbingan tersebut akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas saat melakukan bisnis di negara masing-masing serta menghindari keluhan yang tidak perlu tentang perdagangan antara kedua negara.

Bisnis Indonesia perlu pedoman yang lebih jelas tentang persyaratan impor ke pasar Australia. Pemangku kepentingan Indonesia berkomentar bahwa mereka mengalami penundaan yang panjang saat mengeksport barang seperti kerajinan tangan dan kopi ke Australia akibat cukai dan proses karantina.<sup>7</sup> Karena itu, bisnis-bisnis telah menyuarakan preferensi mereka untuk prosedur yang disederhanakan yang akan menurunkan biaya, meningkatkan kepastian hasil, dan menghindari proses karantina ganda. Banyak pemangku kepentingan Indonesia percaya bahwa prosedur ini dimaksudkan untuk menghambat masuknya barang Indonesia ke pasar Australia, terutama mengingat bahwa barang yang sama diterima lebih mudah oleh pasar Amerika Serikat atau Eropa. Persepsi negatif semacam ini harus ditangani oleh IA-CEPA dengan membuatnya fasilitatif dan menyediakan mekanisme yang membantu eksportir Indonesia untuk memasuki pasar Australia termasuk informasi rinci tentang bagaimana memenuhi ketentuan karantina yang biasa.

Sektor tembakau Indonesia menunjuk kebijakan kemasan polos Australia untuk produk tembakau sebagai penghalang untuk perdagangan, dan berpendapat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang memadai untuk mendukung kewajiban menggunakan kemasan polos. Indonesia, dengan beberapa negara lain termasuk Republik Dominika, Kuba, Ukraina, dan Honduras, telah memprotes kebijakan kemasan polos Australia dengan alasan bahwa kebijakan tersebut melanggar kewajiban perdagangan internasional Australia berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, merek dagang tertentu, dan indikasi geografis.<sup>8</sup> Dalam konteks IA-CEPA, kebijakan-kebijakan hendaknya dihindari dengan lebih dulu punya dasar ilmiah yang kuat sebelum diberlakukan.

Sama seperti bisnis di Indonesia telah menyatakan keprihatinan tentang sulitnya peraturan dalam perdagangan dengan Australia, demikian juga bisnis Australia telah menyuarakan

<sup>6</sup> Pengajuan dari Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO).

<sup>7</sup> Usulan dari Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI). Wawancara dengan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI).

<sup>8</sup> Usulan dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam FGD pada 30 Mei 2016.



keprihatinan tentang peraturan dan prosedur rumit dan buram yang diterapkan untuk perdagangan di Indonesia. IA-BPG mengakui bahwa Pemerintah Indonesia berupaya untuk menghilangkan hambatan perdagangan tertentu dengan merevisi peraturan terkait (misalnya, peraturan tentang impor hewan dan produk hewan). Indonesia memperbaiki secara progresif lingkungan perdagangan dan investasinya, dan IA-BPG menghargai bahwa tindakan tersebut diambil setelah penilaian cermat, termasuk pertimbangan istimewa mengenai dampaknya pada UMKM dan menyiapkan mereka untuk era perdagangan global yang bebas.

Seperti yang tercantum dalam laporan 2012, bisnis Australia masih menghadapi prosedur yang rumit dalam mengekspor makanan dan produk makanan ke pasar Indonesia. Semua produk impor harus terdaftar di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia untuk mendapatkan nomor ML. Penyelesaian proses ini membutuhkan waktu 6 sampai 18 bulan. Barang-barang Australia juga membutuhkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disertifikasi oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSN). Badan-badan usaha Australia menganggap sederet peraturan ini rumit, sulit, dan tidak jelas. Pedoman komprehensif dan otoritatif yang memandu persyaratan birokrasi ini sangat penting untuk mencapai hasil perdagangan yang lebih baik bagi kedua negara.

Kebijakan dan peraturan perlindungan masih diterapkan di sektor jasa kedua negara. Misalnya, dokter Australia sulit untuk beroperasi di Indonesia meskipun ada permintaan yang tinggi di Indonesia untuk pengobatan kesehatan kelas dunia. Begitu pula dokter Indonesia yang ingin mendapatkan pengalaman di Australia juga mengalami kesulitan. Pembatasan juga membatasi kemampuan dokter Australia untuk melakukan pelatihan di tempat kerja di negara Indonesia. Ada kebutuhan untuk kerjasama dengan Australia di bidang pelatihan, khususnya bagi dokter yang membutuhkan untuk pengembangan kapasitas profesional di daerah luar Jabodetabek dan kota-kota besar di Jawa. Peraturan hendaknya rileks untuk memfasilitasi hal ini.

Layanan-layanan profesional lainnya juga mengalami masalah serupa yang menghambat kerjasama di sektor ini dan bahkan menciptakan rintangan untuk terjadinya transfer pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik. Pemahaman bersama tentang apa yang dianggap sebagai kualifikasi yang dapat diterima untuk para pekerja di antara Indonesia dan Australia juga diperlukan karena definisi Australia tentang pekerja “terampil” didasarkan pada kepemilikan kualifikasi yang diakui.<sup>9</sup>

## REKOMENDASI

- Membentuk forum konsultasi untuk memberi panduan tentang peraturan perdagangan dan peluang pasar terutama karena hal itu berlaku untuk jasa profesional. Pedoman tersebut akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas melakukan bisnis dan meningkatkan kapasitas di masing-masing negara.

<sup>9</sup> Grup Kemitraan Bisnis Indonesia-Australia, “Makalah Posisi: atas Pertimbangan terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia,” 2012.



## ➤ **HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN**

Hambatan-hambatan teknis perdagangan, seperti langkah-langkah SPS<sup>10</sup>, persyaratan pendaftaran wajib, atau sertifikasi yang diterapkan di Indonesia dan Australia sering menghambat perdagangan dan investasi. Menurut pemangku kepentingan, Indonesia maupun Australia menerapkan standar dan proses sertifikasi yang rumit dan membatasi kebebasan pergerakan produk.

IA-CEPA hendaknya mendorong Indonesia dan Australia untuk bekerja sama menuju harmonisasi standar dan peraturan, misalnya, meningkatkan koherensi peraturan, mekanisme kerjasama, dan saling pengakuan.

### **Standar Sanitasi dan Fitosanitasi**

Di Australia, standar SPS<sup>11</sup> dan persyaratan karantina yang tinggi belum dimengerti atau belum dipatuhi oleh produsen Indonesia karena masalah kapasitas maupun tekanan biaya.<sup>12</sup> Untuk produsen Indonesia, pasar AS dan Uni Eropa dianggap lebih besar dan lebih menarik, sehingga menghasilkan upaya untuk memenuhi standar AS dan Uni Eropa berharga, dibandingkan dengan apa yang mereka lihat sebagai pasar kecil di Australia. Namun, bisnis-bisnis di Indonesia bingung karena standar tersebut sering tidak diakui oleh otoritas Australia. Sementara banyak yang yakin bahwa upaya dan biaya ekstra yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan SPS Australia adalah hal yang layak secara komersial, mereka berharap bahwa produk sudah memenuhi standar internasional seperti yang diterapkan di AS atau Uni Eropa juga seharusnya diterima di Australia.

Misalnya, produk kopi Indonesia yang sudah diterima pasar internasional mengalami kesulitan untuk memenuhi standar ketat untuk masuk pasar Australia.<sup>13</sup>

IA-BPG mencatat bahwa FTA Thailand-Australia memungkinkan ekspor buah ke Australia jadi lebih mudah dan mencakup kerjasama untuk membantu eksportir Thai untuk memenuhi persyaratan SPS. IA-CEPA hendaknya mencakup program dalam aliran Kerjasama Ekonomi yang menegakkanpeningkatan kapasitasdan kegiatan fasilitasi ekspor guna mendukung eksportir produk pertanian Indonesia.

### **Karantina**

Lembaga-lembaga karantina juga perlu berkolaborasi untuk menghindari proses karantina ganda. Misalnya, pemerintah Indonesia perlu mengkarantina tanaman kapas impor akan dikarantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Demikian pula, pemerintah Australia perlu mengkarantina tanaman kapas sebelum ekspor. Hal ini dipandang sebagai tidak efisien dan menghambat pasokan kapas. Mekanisme karantina harus melindungi lingkungan yang unik di kedua negara dan didasarkan pada analisis ilmiah yang kokoh dan analisis berbasis risiko.

---

<sup>10</sup> *Sanitary and Phytosanitary.*

<sup>11</sup> Ketentuan SPS diterapkan untuk melindungi hidup atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhandari risiko yang timbul akibat paparan dan penyebaran hama dan penyakit dan dari risiko yang timbul akibat zat aditif, racun dan kontaminan dalam makanan dan bahan makanan.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI), Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Sumatera Utara (APINDO Sumut), Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur (APINDO NTT), Asosiasi Eksportir & Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Asosiasi Pengusaha Ikan Kaleng Indonesia (APIKI), Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), dan Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA-Kosmetika).

<sup>13</sup> Usulan dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI).

Bagaimanapun, hal itu seharusnya tidak menghambat arus perdagangan yang sah dan yang dapat menyebabkan inefisiensi dan biaya produksi yang lebih tinggi.

### **Harmonisasi Standar**

Harmonisasi atau menyelaraskan standar internasional telah diidentifikasi sebagai satu bidang yang secara signifikan akan memfasilitasi perdagangan; dan kemajuan telah dibuat di bidang ini. Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSN) dan Standar Australia (SA) sudah mulai bekerja merumuskan Rencana Aksi Harmonisasi Standar IA-CEPA.<sup>14</sup> Dalam Rencana Aksi ini, SA dan BSN akan berkolaborasi untuk mengembangkan dan menyelaraskan standar bersama dengan tujuan mengurangi biaya yang tidak perlu yang berasal dari standar dan peraturan yang berbeda.

SA ditempatkan dengan baik untuk menyediakan dukungan keahlian dan peningkatan kapasitas bagi BSN melalui program kerjasama ekonomi untuk mendukung pelaksanaan ketentuan-ketentuan Prosedur Penilaian Standar, Regulasi Teknis, dan Kesesuaian (STRACAP) dalam IA-CEPA. Tindakan SA meliputi perencanaan kegiatan bersama, pengembangan Rencana Aksi Sukarela untuk adopsi standar internasional, dan pelaksanaan Rencana Aksi Harmonisasi Standar IA-CEPA yang spesifik.

Sehubungan dengan harmonisasi standar, IA-BPG mencatat bahwa perbedaan yang signifikan mungkin ada di berbagai sektor dalam kompleksitas dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses ini. Oleh karena itu, sektor-sektor prioritas yang paling membutuhkan harmonisasi hendaknya diidentifikasi pertama oleh kedua pemerintah melalui konsultasi dengan asosiasi-asosiasi bisnis. Makanan dan minuman, pertanian, dan tenaga kerja adalah tiga sektor dengan prioritas tinggi.

Industri plastik Indonesia juga menekankan bahwa HDPE (*High Density Polyethylene*) yang saat ini tidak diterima di Australia biasanya diterima secara global di pasar-pasar lain.<sup>15</sup>

### **Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal juga telah diusulkan sebagai hambatan potensial terhadap perdagangan yang dapat diatasi dengan pendekatan terkoordinasi. Saat ini, makanan olahan Australia yang memasuki pasar Indonesia harus disertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Membentuk badan bersama yang bisa mensertifikasi produk Halal untuk pasar Australia, pasar Indonesia, dan pasar negara ketiga yang secara signifikan bisa mengatasi inefisiensi dan ketidakpastian yang ada di bidang ini sekarang. Mengatasi masalah ini akan menyebabkan efisiensi yang lebih besar bagi eksportir. Hal ini dapat diterjemahkan menjadi akses yang lebih besar, pilihan, dan biaya yang lebih rendah bagi konsumen.<sup>16</sup> Hasil akhir harus menjadi salah satu yang mendukung perdagangan dan pada saat yang sama memenuhi tujuan yang lebih besar yang mendasari standar halal baru.

BPG mencatat bahwa masalah sertifikasi halal lebih kompleks daripada apa yang terlihat, karena ada perbedaan di antara persyaratan sertifikasi Halal antar negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim yang bertindak sebagai penghalang untuk pengakuan standar halal bersama.

<sup>14</sup> Usulan dari *Standards Australia Ltd.*

<sup>15</sup> Usulan dari Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (INApilas).

<sup>16</sup> Usulan dari *Meat and Livestock Australia.*

### ***Penyelarasan Kualifikasi***

Hambatan teknis lebih lanjut untuk perdagangan yang harus ditangani oleh IA-CEPA adalah standarisasi atau keselarasan kualifikasi bagi pekerja di sektor jasa. Pemangku kepentingan Indonesia menyatakan kesulitan dalam memenuhi standar sektoral tertentu yang diterapkan di Australia. Para profesional Indonesia dengan kualifikasi di sektor pertambangan dan asuransi relatif telah diakui dengan baik untuk memasuki pasar Australia. Namun, kualifikasi pekerja terampil seperti perawat atau pengasuh umumnya tidak diakui di Australia.

Karena itu, parapemangku kepentingan menyatakan harapan hendaknya IA-CEPA dapat mengatasi ini dengan menyediakan peningkatan kapasitas untuk memfasilitasi masuknya pekerja sektor jasa ke kedua pasar. Misalnya, insinyur listrik Indonesia telah menyatakan perlunya pembangunan kapasitas, pelatihan dan peningkatan keterampilan lebih lanjut untuk memfasilitasi sertifikasi yang diperlukan untuk mengakses pasar Australia.<sup>17</sup> Sementara itu, sulit bagi profesional Australia untuk memasuki pasar jasa Indonesia sebagai dokter medis atau praktisi hukum, meskipun pengacara Australia bisa berlatih di firma hukum Indonesia dengan pembatasan tertentu.

### **➤ PEMBATASAN PERDAGANGAN SEPerti KUOTA IMPOR DAN PERIZINAN**

Di bidang pertanian dan agribisnis, Indonesia memberlakukan kuota impor dan pembatasan daging sapi dan impor ternak hidup yang dimaksudkan untuk melindungi produsen daging sapi dalam negeri, dan mempromosikan rencana jangka panjang untuk mencapai swasembada daging sapi. Keputusan baru-baru ini memberlakukan batas berat yang ketat untuk impor ternak hidup seberat 350 kg per konsinyasi. Pembatasan kuantitatif pada jumlah impor ternak hidup juga dikenakan, dan izin impor daging sapi/jeroan juga dikelola dengan volume impor yang disesuaikan secara ad-hoc. Indonesia juga saat ini memberlakukan larangan produk jeroan dan tidak ada sertifikasi istimewa yang disepakati untuk impor lemak dan minyak hewan edibel dari Australia, seperti lemak, ke pasar Indonesia.<sup>18</sup> Dalam hal perizinan, pemangku kepentingan Australia menyampaikan bahwa prosedur pemberian izin impor kurang transparan dan kurang kepastian. Ada juga kekhawatiran bahwa larangan Indonesia untuk produk jeroan saat ini tidak dapat dibenarkan atas dasar keamanan pangan atau sertifikasi halal.

Pemangku kepentingan dari sektor daging dan ternak karena itu merekomendasikan bahwa IA-CEPA membahas langkah-langkah penghapusan non-tarif mana yang berdampak merugikan pada kemampuan industri untuk mempertahankan konsistensi dan kepastian pasokan.

Di sektor pertanian, bisnis Indonesia mengupayakan penghapusan pembatasan impor Indonesia untuk produk ikan kaleng dan gula halus. Meskipun saran ini awalnya diungkapkan oleh pemangku kepentingan Indonesia, ini dapat mempengaruhi rantai pasokan bilateral. Pasokan Australia diperlukan untuk memenuhi permintaan Indonesia terhadap ikan segar untuk industri ikan kaleng maupun gula halus untuk industri minuman ringan.<sup>19</sup>

Di sektor pertambangan dan energi, pemerintah Indonesia baru-baru ini memberlakukan larangan ekspor mineral mentah dalam upaya untuk mengamankan pasokan dalam negeri dan meningkatkan pengembangan industri hilir dalam negeri. Hukum Pertambangan Indonesia 2009

<sup>17</sup> Wawancara dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

<sup>18</sup> Usulan dari *Meat and Livestock Australia*.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Asosiasi Pengusaha Ikan Kaleng Indonesia (APIKI) dan Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM).

menetapkan larangan ekspor lengkap komoditas tambang yang belum diolah. Hukum ini berlaku pada 2014 dengan langkah-langkah progresif untuk mengurangi ekspor skala besar yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan energi negara. Karena murahness harga komoditas, Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri pada 2014 untuk memperpanjang batas waktu hingga 2017 untuk perusahaan dengan komitmen nyata untuk membangun fasilitas pengolahan.

Pemerintah Indonesia tidak diharapkan melonggarkan ketentuan hukum meskipun UU Pertambangan Indonesia dijadwalkan direvisi tahun 2016, Mengenai investasi asing, hukum saat ini masih mensyaratkan bahwa jasa penambangan harus disediakan oleh perusahaan Indonesia apabila tersedia. Perusahaan jasa pertambangan asing hanya dapat beroperasi dalam kondisi istimewa apabila penyedia nasional dianggap tidak dapat menyediakan layanan yang diperlukan.

Dalam manufaktur, beberapa barang, antara lain seperti plastik, obat-obatan, alkohol dan pelumas, tunduk pada pembatasan seperti lisensi istimewa dan/atau volume impor terbatas ke Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk melindungi industri hulu dan juga konsumen dari bahan berbahaya berkualitas rendah. Evaluasi kebijakan ini telah dilakukan berdasarkan diskusi dengan industri hulu dan hilir. Jika pembatasan dan lisensi istimewa terus diterapkan akan sulit bagi Australia untuk mendapatkan bahan baku dari Indonesia, misalnya pembatasan ekspor kayu oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung industri hilir Indonesia di bidang manufaktur.

Pembatasan juga dapat ditemukan di Australia di mana pemerintah menerapkan peraturan ketat pada produk farmasi dan botani yang menunjukkan halangan bagi perusahaan jamu Indonesia untuk memperoleh pasokan dari Australia. Masih terkait dengan manufaktur, beberapa di bisnis Australia telah menyerukan anti - dumping untuk produk kertas guna melindungi industri lokal.

IA-BPG mengakui bahwa dumping dan tuduhan dumping dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral. Sementara aturan seputar Anti-Dumping secara teknis dikelola oleh WTO, kami percaya bahwa dalam kepentingan hubungan bilateral, harus ada kerjasama yang terus-menerus untuk memastikan bahwa industri lokal, importir, eksportir dan pelanggan memiliki keyakinan pada proses maupun keputusan para pemegang otoritas Anti-Dumping yang terkait. Dengan skema peraturan, pemerintah sangat perlu untuk menerima pembaruan reguler dari industri untuk memastikan bahwa sistem terus efektif dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan memberi keputusan tepat waktu, konsisten, dan transparan bagi industri.

Di sektor jasa, ada peraturan pelindung, khususnya dalam hal penyediaan layanan profesional di Indonesia. Kontrol entri yang sangat ketat dan pembatasan operasi bisnis dianggap diskriminatif dalam layanan profesional di Indonesia, dan hal itu mencakup akuntan, pengacara, arsitek, insinyur, profesional perbankan, dan profesional kesehatan. Berdasarkan peraturan Indonesia saat ini, kehadiran penyedia jasa asing komersial tidak diizinkan tanpa melibatkan mitra lokal. Di Indonesia, pengacara asing tidak boleh lebih dari 20% proporsi pengacara dalam sebuah perusahaan dan tidak lebih dari lima pengacara asing per perusahaan diperbolehkan.

#### ➤ **HAMBATAN MASUK SEMENTARA BAGI PROFESI TERAMPIL DAN PEKERJA MUSIMAN**

Hambatan perdagangan yang tersisa dan persisten tidak terbatas pada hambatan perdagangan barang dan jasa. Hambatan terhadap entri sementara profesional yang terampil dan pekerja musiman juga merupakan hambatan yang signifikan bagi peningkatan perdagangan dan hubungan ekonomi. Dalam konteks negosiasi IA-CEPA, gerakan pekerja tersebut dianggap

sebagai elemen kunci untuk mengembangkan gerakan orang terampil yang lebih adil dan bukan hanya lebih bebas saja. Yang lebih penting lagi, tanpa ketentuan yang lebih baik mengenai pergerakan orang, IA-CEPA tidak akan mengarahkan potensi maksimal karena buruh terampil dan sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan.

Isu tentang entri sementara bagi profesional terampil dan pekerja musiman berhubungan dengan proses untuk memperoleh visa, izin kerja, dan lama tinggal. Ada juga hambatan yang diciptakan oleh kurangnya saling pengakuan kualifikasi yang perlu ditangani dalam IA-CEPA. Pada dasarnya, persyaratan visa antara kedua negara tidak seimbang. Sementara wisatawan Australia dan para pelaku bisnis Australia dapat menggunakan entri bebas visa atau entri Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*visa-on-arrival*) ketika mengunjungi Indonesia, Indonesia masih dikenai proses memberatkan yang panjang untuk memperoleh visa untuk perjalanan ke Australia.<sup>20</sup> Namun, para pemangku kepentingan Australia juga telah menyampaikan kesulitan-kesulitan dalam proses akuisisi visa bisnis multi-entri atau izin kerja (KITAS). Dalam banyak kasus, para pelaku bisnis Australia kembali beralih ke visa turis ketika mereka harus bepergian dengan visa bisnis atau pekerjaan dan ini berdampak pada pelaporan dan klasifikasi perjalanan ke Indonesia oleh Australia.<sup>21</sup>

IA-CEPA menciptakan kesempatan untuk pengembangan kategori visa baru dengan karakteristik yang dapat diperoleh dari skema visa Australia yang ada seperti Skema Pekerja Musiman Pasifik atau *Pacific Seasonal Worker Scheme*,<sup>22</sup> yang menyediakan lapangan kerja musiman, dan Perjanjian Migrasi Enterprise atau *Enterprise Migration Agreements (EMAs)*,<sup>23</sup> yang menyediakan lapangan kerja sementara berbasis proyek. IA-CEPA harus mencakup skema visa yang longgar dan baru sehingga memungkinkan para pekerja terampil Indonesia dan Australia dengan mudah bergerak melintasi perbatasan seperti tergambar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan skema visa yang lebih longgar, Indonesia akan mendapat keuntungan dari pengalaman di tempat kerja (seperti magang dan penugasan) untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka dan keterampilan profesional sebelum kembali ke Indonesia untuk lebih berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Demikian pula orang Australia bisa mendapat keuntungan dari pengalaman terjun langsung dalam pasar di Indonesia dan kemampuan berbahasa Indonesia.

Para pemangku kepentingan Indonesia percaya bahwa kualifikasi yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar jasa Australia tidak diterapkan secara adil.<sup>24</sup> Perwakilan dari sektor swasta Indonesia menekankan bahwa tingkat kompetensi bahasa Inggris yang diperlukan tidak perlu tinggi untuk jadi pekerja migran Indonesia (tenaga kerja semi terampil) untuk memasuki pasar Australia di bawah skema visa 457, Misalnya, perawat Indonesia sulit untuk berlatih di Australia karena

<sup>20</sup> Wawancara dengan Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (AKKINDO).

<sup>21</sup> Usulan dari AFS Intercultural Program Australia.

<sup>22</sup> Program Pekerja Musiman dimulai pada 1 Juli 2012, dibangun di atas Skema Percontohan Pekerja Musiman Pasifik (*Pacific Seasonal Worker Pilot Scheme*) untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara-negara peserta, sekaligus juga menawarkan pengusaha Australia di industri hortikultura akses kepada tenaga kerja dari delapan negara di Kepulauan Pasifik dan Timor Timur saat mereka kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal yang cukup untuk memenuhi permintaan musiman. (DEEWR – Australia).

<sup>23</sup> EMAs proyek besar pengaturan migrasi yang dirancang khusus agar sesuai dengan sektor sumber daya. EMAs memastikan kurangnya keterampilan tidak menghambat proyek-proyek besar dan membahayakan pekerjaan Australia. EMAs membantu proyek-proyek sumber daya utama mengakses tenaga kerja dari luar Australia untuk mengisi kekosongan keterampilan sejati yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar tenaga kerja Australia. (Departemen Imigrasi – Australia).

<sup>24</sup> Usulan dari *Indonesia Service Dialogue (ISD)*.

persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Dalam rangka untuk mendapat registrasi keperawatan, perawat asing perlu mendapat hasil tes IELTS yang relatif tinggi, yaitu 7,0 dari 9, di samping persyaratan lain seperti mendapat sponsor atau visa penduduk, serta menjalani pemeriksaan medis. Lulusan Indonesia dari universitas-universitas Australia telah menyuarakan keprihatinan tentang kesulitan memperoleh pengalaman kerja atau kesempatan kerja pasca-kelulusan. Lulus dari universitas Australia tidak menjamin kemampuan untuk mendapat pengalaman kerja di Australia. Di sisi lain, praktisi medis dan hukum Australia yang berusaha untuk berlatih di Indonesia menghadapi pembatasan yang sama.

Namun, perubahan kondisi di pasar tenaga kerja global dalam tahun-tahun mendatang dapat secara drastis mengubah situasi di bidang ini. Prediksi kekurangan tenaga kerja terampil besar-besaran di Australia pada 2030 yang disebabkan oleh ketergantungan pada jasa dan penuaan populasi layanan bisa menimbulkan peluang dan manfaat yang signifikan bagi pekerja terampil Indonesia.<sup>25</sup> Dengan memandang kemungkinan ini, Indonesia dan Australia sekarang harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi keselarasan kualifikasi keterampilan, standar tenaga kerja terampil, pelatihan, pengembangan kapasitas, dan persyaratan visa untuk memastikan bahwa kebutuhan pasar tenaga kerja terampil terpenuhi dan masa depan yang saling diinginkan dan hasil yang diharapkan tercapai.

### ➤ **PEMBATASAN INVESTASI ASING LANGSUNG**

Dalam hal investasi asing, para pemangku kepentingan dari kedua negara menyoroti pelaksanaan Daftar Negatif Investasi (DNI) paling baru-baru ini di Indonesia. Pada 18 Mei 2016, daftar negatif investasi baru dikeluarkan. Daftar ini mengandung perubahan yang signifikan. Yang paling penting, daftar ini memberikan perlakuan istimewa bagi negara-negara ASEAN. DNI sekarang memungkinkan investor ASEAN untuk berinvestasi di bidang usaha tertentu yang sebelumnya tertutup dan bisa memiliki saham hingga 70% di sektor tertentu. Liberalisasi investasi asing dalam lebih banyak sektor disambut sebagai perkembangan positif oleh IA-BPG. Perlakuan istimewa, setidaknya pada tingkat yang sama seperti yang ditawarkan kepada negara-negara ASEAN, juga harus disediakan untuk investasi Australia di bawah IA-CEPA.

Bisnis Australia telah menyatakan keprihatinan bahwa bahkan dengan perubahan ketentuan Daftar Negatif Investasi, beberapa sektor tetap dibatasi dan beberapa yang telah diliberalisasi tunduk kepada peraturan Menteri yang menerapkan pembatasan baru atau pembatasan yang sedang berlangsung. Konsistensi regulasi diperlukan untuk membangun kepercayaan investor.

IA-CEPA perlu membahas liberalisasi peraturan investasi sebagai prioritas. IA-BPG mencatat bahwa AANZFTA saat ini tidak punya komitmen negara atau akses pasar yang paling diuntungkan berkaitan dengan investasi.

Di Australia, Dewan Tinjauan Investasi Asing meninjau lamaran investasi asing atas ambang nasional atas dasar kasus per kasus yang memaksimalkan aliran investasi dan pada saat yang sama melindungi kepentingan nasional Australia. Di Indonesia, tanggung jawab pengelolaan investasi asing terletak pada BKPM,<sup>26</sup> tetapi sebagian besar diatur oleh sektor-sektor dengan menteri terkait.

<sup>25</sup> ANZ Bank, "News Release: Australian Service Dependent Economy and Ageing Population could cause Skilled Labour Shortage by 2030", Juni 2016.

<sup>26</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Indonesia maupun Australia membutuhkan investasi asing. Pertumbuhan di kedua negara bergantung pada tingginya tingkat investasi, dengan sebagian besar investasi dari luar negeri. Angka investasi BKPM menunjukkan bahwa selama dasawarsa terakhir, lebih dari 65% investasi di Indonesia berasal dari FDI. Pola tersebut diperkirakan akan terus berlanjut dalam menghadapi permintaan yang luar biasa untuk total investasi di semua sektor. Australia juga sangat bergantung pada FDI tetapi dengan proporsi yang lebih kecil (13%) dari total investasi, terutama karena pasar modal dalam negeri berkembang dengan baik. Karenanya itu, hambatan investasi hendaknya dianggap merugikan Indonesia serta kepentingan nasional Australia.

IA-BPG percaya bahwa data investasi dua arah tidak memadai dan mendorong kedua pemerintah untuk bekerja sama untuk memperbaiki data investasi bilateral.

Meskipun ada kedekatan geografis dan hubungan yang telah lama berlangsung, tingkat investasi bilateral di Australia dan Indonesia relatif kecil. Pada 2015, FDI Australia di Indonesia mencapai AU\$5,321 juta, sedangkan FDI Indonesia hanya AU\$13 juta.<sup>27</sup> Konsultasi dengan bisnis Australia telah mengungkapkan bahwa tingkat FDI yang relatif rendah sebagian besar karena sejumlah hambatan investasi di Indonesia, termasuk ketidakpastian investor yang terus-menerus tentang sistem regulasi, khususnya di bidang pertambangan dan juga di sektor-sektor lain seperti jasa keuangan. Untuk layanan, Daftar Negatif Investasi dan peraturan lainnya telah membatasi investasi di beberapa sektor yang merupakan kekuatan bisnis Australia. Namun, pengenalan Daftar Negatif Investasi yang baru saja diamandemen pada 2016 seharusnya meningkatkan prospek untuk investasi asing di sejumlah sektor.

Pembatasan atas investasi asing merupakan faktor utama dalam mengurangi arus investasi di antara kedua negara. Di bidang pertanian dan agribisnis, Indonesia memberlakukan kepemilikan asing maksimal 49% untuk pertanian dimana tanaman utamanya adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Selain itu, investasi asing di budidaya tanaman, pembibitan, pertanian genetik, dan produk GMO dapat dikenakan pembatasan dan harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan pandangan pemerintah Indonesia bahwa investasi asing di bidang pertanian harus mendukung produksi pertanian, penciptaan lapangan kerja, dan memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat pedesaan dan ekonomi yang lebih luas.

Kebijakan pertanian pemerintah Australia mirip meski sedikit berbeda. Kebijakan itu untuk meningkatkan produktivitas, lapangan kerja dan ekspor dan mendorong investasi untuk memastikan Australia tetap menjadi produsen pertanian yang berdaya saing global. Penurunan ambang hanya AU\$15 juta untuk tinjauan FIRB (*Foreign Investment Review Board*) untuk pembelian lahan pertanian Australia oleh orang asing dipandang sebagai halangan untuk investasi Indonesia atau ko-investasi Indonesia di bidang pertanian di Australia. IA-BPG mencatat bahwa ada ambang batas yang lebih tinggi untuk pembelian oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara seperti Amerika Serikat. IA-BPG merekomendasikan bahwa Australia harus memungkinkan ambang yang sama bagi Indonesia karena investasi pertanian Indonesia seperti yang diperbolehkan untuk negara-negara lain dalam perjanjian perdagangan yang ada. Ambang FIRB untuk kelas-kelas investasi lain hendaknya sama-sama mengacu kepada ambang dalam perjanjian lainnya.

---

<sup>27</sup> Pemerintah Australia: Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, "Indonesia", diakses pada 20 Juli 2016, <https://dfat.gov.au/trade/resources/Documents/indo.pdf>.



Pembatasan FDI juga menghambat pembangunan di sektor pertambangan dan energi. Ketidakpastian investasi terjadi karena peraturan divestasi kepemilikan asing di bawah rezim pertambangan Indonesia saat ini telah menyebabkan penurunan minat dari investor asing di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No. 24/2012, perusahaan tambang asing yang memegang izin atau izin istimewa yang dikenal sebagai IUP atau IUPK diwajibkan untuk melakukan divestasi antara 20% hingga 51% dari total saham kepada pemangku kepentingan Indonesia.

Di sektor jasa, kehadiran komersial penyedia jasa asing di Indonesia tidak diperkenankan tanpa melibatkan mitra lokal. Hal ini berlaku untuk semua layanan bisnis termasuk pengacara, akuntan, arsitek, dan konsultan. Selanjutnya, hambatan hukum dapat ditemukan dalam Daftar Negatif Investasi yang membatasi FDI dalam sejumlah sektor utama seperti transportasi, kesehatan dan pendidikan, serta pembatasan tenaga kerja asing yang menghambat pertumbuhan di sektor jasa.

Banyak perusahaan tidak memiliki akses ke modal, dan, terutama selama perlambatan ekonomi global, sulit untuk hanya mengandalkan sumber investasi domestik. Peluang bisnis dapat lebih mudah ditangkap jika ada modal yang tersedia untuk mendukung kapasitas operasional perusahaan. Kedua negara hendaknya mendukung bisnis untuk menargetkan dan mengaktifkan investasi yang menciptakan nilai tertinggi bagi perekonomian – yaitu investasi-investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan merangsang produktivitas.

## ISU UTAMA UNTUK DITANGANI GUNA MEMPERCEPAT PERDAGANGAN, INVESTASI DAN KERJASAMA EKONOMI

Meskipun ada banyak hambatan spesifik sektor dan lintas sektoral yang membatasi perdagangan dan investasi antara kedua negara, IA-BPG juga telah mengidentifikasi sejumlah isu yang lebih halus namun penting yang secara langsung atau tidak langsung menghambat perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Isu-isu ini dapat menghambat banyak peluang yang disajikan oleh hubungan ekonomi yang lebih kuat antara Indonesia dan Australia. IA-BPG memahami bahwa banyak masalah ini melampaui kapasitas IA-CE PA sendiri, tetapi berpendapat bahwa ada prospek untuk IA-CEPA untuk meletakkan dasar bagi kerjasama ekonomi untuk mengatasi masalah ini.

### ➤ **KEGAGALAN PASAR AKIBAT KURANGNYA KOMUNIKASI DAN PERTUKARAN INFORMASI**

Praktisi bisnis dari kedua negara telah menyatakan kebutuhan akan komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih banyak mengenai peluang bisnis yang tersedia di masing-masing negara. Informasi yang dapat dipercaya merupakan elemen penting dari pengambilan keputusan bisnis, dan pihak yang kurang informasi tidak mungkin bersedia untuk berinvestasi dalam pasar baru. Informasi yang telah tersedia tentang preferensi konsumen, ketentuan dan persyaratan ekspor-impor, serta kebijakan pemerintah dan peraturan akan memungkinkan bisnis mendapat strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Kurangnya informasi adalah kendala utama peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara hubungan bisnis yang signifikan sudah ada antara kedua negara, pemangku kepentingan bisnis merasa bahwa hanya ada sedikit informasi dalam forum bisnis yang terorganisir dan sistematis, yang difasilitasi oleh pemerintah dengan melibatkan asosiasi bisnis. Tindakan tersebut akan lebih merangsang minat bisnis Indonesia untuk memasuki pasar Australia dan sebaliknya.

Seperti pada tahun 2012, para pemangku kepentingan Indonesia terus melihat Australia sebagai pasar yang relatif kecil dengan standar masuk yang entah kenapa rumit dan ketat dibandingkan dengan pasar lain seperti Uni Eropa atau AS. Selain itu, Australia dipandang memiliki hubungan lebih dekat dengan negara-negara Commonwealth seperti Singapura dan Malaysia.<sup>28</sup> Para pemangku kepentingan Indonesia juga menyatakan keyakinan bahwa pasar Australia lebih cocok untuk produk premium karena konsumen memiliki daya beli yang tinggi. Persepsi ini membuat keengganan yang kuat di kalangan bisnis Indonesia untuk melakukan bisnis di pasar Australia.

Di sisi lain, seperangkat peraturan perdagangan yang rumit di Indonesia dipandang sebagai salah satu hambatan utama bagi bisnis Australia untuk terlibat dalam bisnis di Indonesia. Mengingat prospek signifikan yang ada di pasar, bisnis di kedua negara membutuhkan informasi yang dapat dipercaya dan kredibel tentang peraturan pemerintah dan kondisi pasar untuk menarik investasi lebih lanjut.

Kurangnya komunikasi dan pertukaran informasi juga memengaruhi arus investasi antara kedua negara. Para investor Australia telah menyatakan kebutuhan untuk diberitahu tentang peluang untuk investasi dan lingkungan peraturan yang ada melalui sesi diskusi sektor / kelompok, seminar, dan publikasi yang disesuaikan. Sementara platform untuk kerjasama bisnis bilateral sudah ada (IA-BPG adalah salah satu contohnya), stakeholder menyatakan pandangan kurangnya forum bisnis terorganisir dan sistematis yang difasilitasi oleh pemerintah, dengan melibatkan asosiasi bisnis, seperti forum konsultasi atau pelatihan bagi pengusaha.

Para pelaku bisnis Indonesia juga secara teratur menunjukkan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas yang ditingkatkan antara pejabat publik Indonesia.<sup>29</sup> Kinerja pejabat pemerintah di sektor tertentu bisa jadi faktor kunci dalam memfasilitasi atau menghambat perdagangan. Karena itu, perwakilan pemerintah didorong untuk mengembangkan hubungan dekat dengan sektor swasta melalui konsultasi rutin yang difasilitasi melalui forum komunikasi tersebut untuk mengembangkan pengetahuan teknis dan praktis yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan dan menyelesaikan sengketa perdagangan.

Usulan kepada IA-BPG menyarankan pembentukan pusat keunggulan yang berbasis di Jakarta untuk mengatasi berbagai hambatan perdagangan. Sementara fokus awal nantinya adalah perdagangan bilateral antara Australia dan Indonesia, ada kesempatan untuk memperluas konsep dan fasilitas ini hingga menjadi pusat keunggulan kawasan Asia Tenggara dan/atau ASEAN. Pusat tersebut hendaknya:

- Menyediakan fasilitas dialog regional antara sektor publik dan swasta untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan terhadap perdagangan bilateral, termasuk pembebanan biaya tambahan pada eksportir dan konsumen;
- Memberikan Pabean Indonesia (dan juga administrasi SEA lain) dengan bantuan teknis dan pelatihan yang efektif dalam praktik dan prosedur manajemen lintas batas;
- Membahas prioritas lintas batas IA-CEPA lain yang telah diidentifikasi.

Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang tepat pada awalnya perlu diberikan kepada Pusat tersebut, termasuk penyediaan inisiatif pengembangan manajemen, pelatihan teknis, dan pendampingan.

<sup>28</sup> IA-BPG, "Makalah Posisi: atas Pertimbangan menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia," 2012.

<sup>29</sup> Isu ini berulang kali muncul selama konsultasi dengan para pemangku kepentingan Indonesia dari semua sektor.

## ➤ **PEMBIAYAAN DAN AKSES MODAL**

Seperti dibahas di atas, Indonesia maupun Australia sangat bergantung pada investasi asing. Tingkat pertumbuhan di kedua negara tergantung pada tingginya tingkat investasi, dengan sebagian besar investasi berasal dari sumber-sumber asing. Di Australia, Dewan Peninjau Investasi Asing menyarankan Bendahara mengenai aplikasi investasi asing atas dasar kasus per kasus dengan pertimbangan untuk memaksimalkan aliran investasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Australia. Di Indonesia, tanggung jawab untuk mengelola investasi asing terletak pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia.

Mirip dengan Australia, perekonomian Indonesia secara signifikan terdiri dari UKM. UKM adalah kontributor terbesar untuk pertumbuhan PDB. UKM menyusun lebih dari 90% perusahaan Indonesia di semua sektor dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 90% angkatan kerja.<sup>30</sup> Masalah utama bagi UKM di Indonesia adalah kurangnya investasi yang diperlukan dan dana untuk meningkatkan bisnis mereka. Investasi juga diperlukan untuk menyediakan dana untuk pengembangan inovasi di UKM. Kurangnya sumber daya keuangan dan kesulitan mengaksesnya adalah faktor kunci yang telah menghambat inovasi dalam UKM.

Memperbaiki akses ke modal akan meningkatkan pasokan keseluruhan barang dan jasa serta membantu untuk memenuhi permintaan bukan hanya Indonesia dan Australia, tetapi juga negara-negara lain. Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, ada kekhawatiran tentang peraturan keuangan domestik Indonesia karena terkait dengan akses modal. Bank asing di Indonesia telah sangat prihatin dengan mandat Kementerian Telekomunikasi Indonesia tahun 2012 bahwa semua layanan perusahaan publik (termasuk sektor perbankan) harus memproses transaksi dan data mereka di pusat data *onshore*.<sup>31</sup> Sementara mandat tidak akan berlaku hingga Oktober 2019 dan ada kemungkinan sektor perbankan akan dikecualikan dari operasi, masalah ini masih menjadi salah satu perhatian yang cukup besar untuk industri.

Lagipula, sektor perbankan Australia telah menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia (OJK) mengadopsi kebijakan untuk membatasi kepemilikan asing di sektor keuangan menjadi sekitar 40%. Kebijakan ini akan berdampak negatif pada investasi di Indonesia pada saat investasi asing diperlukan.

Sementara itu, perwakilan dari sektor perbankan Indonesia secara teratur mengacu pada kesulitan yang signifikan dihadapi dalam membuka cabang di Australia. Dalam banyak hal, masalah berasal dari negosiasi tidak efektif antara regulator perbankan nasional masing-masing. Bank Indonesia (BI) dan OJK tidak biasanya mengejar pengaturan timbal balik untuk membuka cabang bank Indonesia di luar negeri. Selain itu, para pemangku kepentingan industri perbankan Indonesia telah menyatakan bahwa mereka akan memerlukan jaminan akses yang dipersingkat dan rezim peraturan yang kondusif untuk dapat melanjutkan dengan membuka operasi di pasar Australia.<sup>32</sup> Memfasilitasi akses bank-bank Indonesia ke pasar Australia dapat memicu keterlibatan signifikan bisnis-bisnis Indonesia secara lebih lanjut dengan Australia.

<sup>30</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Indonesia.

<sup>31</sup> Usulan Australia dari AIBC.

<sup>32</sup> Forum Diskusi Kelompok konsultasi dengan perwakilan industri perbankan Indonesia yang dilakukan oleh IA-BPG.

## ➤ **INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK**

Secara singkat disebutkan sebelumnya, pembangunan infrastruktur memiliki implikasi lintas sektoral. Kondisi jalan yang buruk meningkatkan biaya untuk mengangkut barang dan berkontribusi terhadap kerawanan pangan melalui pembusukan produk selama transportasi. Kekurangan daya mengurangi kapasitas produksi, dan kurangnya akses terhadap air bersih sering menjadi sumber penyakit. Perbaikan infrastruktur mendorong inovasi bisnis dan meningkatkan daya saing global suatu negara. Sebaliknya, biaya pengiriman yang tinggi sangat mengurangi daya saing suatu negara di pasar global.

Untuk menggambarkan hal ini, pemangku kepentingan industri gandum Australia menunjukkan bahwa keuntungan kompetitif angkutan Australia untuk ekspor gandum ke Indonesia sedang terkikis oleh harga minyak yang rendah dan pasokan kapal yang berlebihan. Hal ini mengekspos inefisiensi dalam infrastruktur rel Australia yang berarti bahwa sekarang lebih murah US\$5 per ton untuk mengangkut gandum dari Ukraina ke Indonesia, daripada untuk mengangkut gandum sejauh 350 km dengan kereta api di Australia.<sup>33</sup> Hal ini menciptakan keuntungan yang signifikan bagi ekspor gandum dari negara Laut Hitam untuk menembus ke pasar Indonesia yang merupakan pasar ekspor gandum terbesar di Australia. IA-CEPA berpotensi membantu meringankan situasi ini dengan jasa pengiriman yang lebih liberal dari Indonesia. Pemerintah negara bagian Australia juga telah mengakui kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur rel selama industri berjuang dengan urgensi meningkatkan rantai pasokan.

Dalam hal memfasilitasi hubungan transportasi antara Australia dan Indonesia, pemangku kepentingan di Wilayah Australia Utara telah menunjuk kebutuhan bagi pemerintah Australia untuk melonggarkan pembatasan kabinase untuk penerbangan internasional baru yang melayani Wilayah Australia Utara. Hal ini akan melengkapi komitmen pemerintah Australia untuk mengembangkan Australia Utara dan kebijakan pembangunan daerah lainnya. Negosiasi masa depan Perjanjian Akses Udara Australia dan Indonesia dapat menjadi bagian dari IA-CEPA sehingga menciptakan layanan udara point-to-point yang baru di antara kedua negara.<sup>34</sup> Indonesia meliberalisasi beberapa sektor termasuk sektor logistik di bawah AEC dan ketentuan yang sama harus dipertimbangkan di bawah IA-CEPA.

Logistik adalah elemen penting untuk kinerja ekonomi. Di Indonesia, logistik, infrastruktur transportasi, dan jasa transportasi adalah isu dengan prioritas tinggi dan masalah yang sangat menantang. Geografi Indonesia dan distribusi industri dan sumber daya menimbulkan tantangan besar bagi efisien dan logistik berbiaya rendah. Sekitar 60% dari sekitar 240 juta orang penduduk tinggal di Pulau Jawa sedangkan sisanya didistribusikan di antara 6.000 pulau berpenghuni. Banyak di antara pulau-pulau tersebut punya penduduk yang sangat jarang. Manufaktur juga berpusat di Jawa, sementara produksi sumber daya alam secara luas tersebar di nusantara.

Jasa pengiriman saat ini mengharuskan sebagian besar ekspor Australia ke Indonesia bagian timur dikapalkan lebih dulu melalui Java atau Singapura sehingga menciptakan inefisiensi yang signifikan dan jelas. pengaturan dan aturan trans-pengapalan hendaknya memfasilitasi perdagangan untuk memastikan rantai pasokan dapat beroperasi secara efisien. Fasilitas Pra-Inspeksi Bea, seperti yang didirikan di Darwin pada 2005 dan kemudian ditangguhkan, dapat menyediakan sarana penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang efisien antara kedua negara. Fasilitas pabean Indonesia berbasis Darwin mampu menghapus persyaratan

<sup>33</sup> *Australian Financial Review*, 30 Mei 2016.

<sup>34</sup> Usulan dari *Chamber of Commerce of the Northern Territory*.

pabeau untuk ekspor ke semua pelabuhan di Indonesia. pengaturan timbal balik fasilitas pra-inspeksi bea untuk semua port di kedua negara akan berpotensi untuk sangat memudahkan peningkatan perdagangan bilateral.

Jasa kaboase kapal secara ketat diterapkan di kedua negara dengan Indonesia mewajibkan konstruksi kapal lokal. Negosiasi IA-CEPA bisa mengatasi masalah sulit ini dengan pandangan untuk menawarkan setiap bangsa mengakses pengiriman domestik negara lain dalam konteks membangun link pengapalan yang lebih kuat di antara kedua negara.

Mandat tentang kapal yang dikonstruksi lokal oleh Indonesia sangat membatasi kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dengan feri cepat yang canggih, di mana perusahaan-perusahaan Australia memimpin pemasok terkemuka melalui yard di Australia, Amerika Serikat dan Filipina. Mengingat Indonesia merupakan pemasok utama kapal dan modul untuk proyek-proyek minyak dan gas Australia, adalah wajar bagi Australia untuk memiliki akses ke pasar feri cepat di Indonesia.

Investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan logistik akan mengikuti dari kepercayaan yang dihasilkan oleh aturan-aturan perdagangan yang kokoh serta volume perdagangan yang solid dan berkembang. Perlu dicatat bahwa administrasi Indonesia saat ini telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Di seluruh Indonesia, ada ambisi untuk membangun bendungan dan jalan, kereta api, bandara, dll untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Seperti dibahas di atas, keberadaan infrastruktur yang baik akan mengakibatkan efek domino positif di bidang ekonomi; dan menciptakan peluang yang signifikan untuk investasi Australia di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. IA-CEPA hendaknya mempertimbangkan penghapusan hambatan untuk kerjasama infrastruktur antara perusahaan di Indonesia dan Australia.

### ➤ **MEMBINA USAHA KECIL DAN MENENGAH**

UKM sering terancam oleh konsesi perjanjian perdagangan lintas batas karena mereka melihat pesaing baru memasuki pasar. Pandangan ini berulang kali diungkapkan oleh pemangku kepentingan Indonesia selama konsultasi, menunjukkan kurangnya kepercayaan pada bagian dari UKM Indonesia terhadap manfaat dari liberalisasi perdagangan. Keprihatinan serupa juga muncul di kalangan UKM Australia yang ketakutan dengan persaingan yang tidak sehat dari negar-negara berkembang dengan peraturan tenaga kerja, pajak, dan standar yang lebih lemah sehingga memungkinkan mereka untuk memproduksi dengan biaya lebih rendah. Akibatnya, IA-CEPA harus membahas pentingnya UKM melalui peran serta dan keterlibatan yang lebih dalam. UKM harus mendapat informasi selengkapnya tentang potensi manfaat dari liberalisasi perdagangan dan berpartisipasi dalam rantai pasokan global.

UKM membutuhkan dukungan untuk berpartisipasi dalam peluang yang dihasilkan oleh IA-CEPA (dan perjanjian lainnya seperti AEC dan AANZFTA) serta penyesuaian untuk menangani kenaikan tingkat kompetisi. Seperti yang diakui oleh IA-CEPA, tingkat pembangunan yang berbeda di Indonesia dan Australia mungkin memerlukan tanggapan yang berbeda, termasuk peningkatan kapasitas dan pengaturan penyesuaian yang berbeda.

Bisnis, terutama UKM, telah melaporkan kesulitan memperoleh informasi tentang peluang pasar yang diperlukan untuk membangun strategi bisnis dan perencanaan yang mantap. Kerangka regulasi Indonesia tidak cukup membedakan antara UKM dan perusahaan besar. Biaya yang ditanamkan untuk membuka usaha di Indonesia terlalu tinggi di seluruh dewan untuk UKM dan perusahaan pelat merah, juga prosedur pendirian perusahaan yang panjang mengakibatkan

beberapa bisnis memulai operasi di negara-negara pesaing seperti Malaysia. Banyak UKM dari Australia menjelaskan bahwa kurangnya transparansi adalah salah satu faktor yang menghambat peningkatan perdagangan mereka.<sup>35</sup> Dalam hal peraturan ekspor dan impor, UKM sering menemukan unsur-unsur non-transparan yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membebankan biaya yang tingginya tidak layak.

UKM Australia keberatan bahwa prosedur perizinan impor di Indonesia itu rumit dan sering tidak efisien, contohnya prosedur perubahan alamat UKM. Sementara pemangku kepentingan Indonesia menunjukkan bahwa sistem karantina Australia menciptakan biaya tinggi dan risiko bagi eksportir Indonesia, khususnya UKM, sehingga enggan berdagang dengan Australia.

---

<sup>35</sup> Usulan Australia dari AIBC.



## Bab 3

# TOPIK LAIN UNTUK DIDISKUSIKAN DALAM IA-CEPA

Topik-topik berikut telah diangkat oleh sejumlah pemangku kepentingan selama proses konsultasi. IA-BPG percaya bahwa diskusi lebih lanjut tentang subjek ini mungkin diperlukan dan dikembangkan secara lebih rinci oleh komite ahli selama negosiasi IA-CEPA berlangsung.

### PENGADAAN PEMERINTAH

Proses pengadaan pemerintah harus transparan dan non-diskriminatif. Pemerintah harus mempertimbangkan secara progresif pemberian akses yang adil dan merata untuk pengadaan pemerintah.

Pengadaan pemerintah hendaknya mempromosikan transparansi, nilai uang, kompetisi terbuka dan efektif, adil, akuntabilitas dan proses hukum yang wajar, dan non-diskriminatif dalam pengambilan keputusan. Peluang untuk meningkatkan kerja sama dan isu-isu yang dapat dibahas dalam diskusi tentang sifat dan ruang lingkup ketentuan dapat mencakup:

- Mekanisme konsultasi
- Hak-hak pemasok
- Prinsip-prinsip non-diskriminasi dan penerapannya
- Cakupan segala kesepakatan
- Persyaratan prosedur minimum terkait proses pengadaan.

Mengingat bahwa pengadaan pemerintah tidak ditonjolkan di bawah AANZFTA, IA-CEPA dapat membuktikan konteks yang tepat untuk mengembangkan disiplin bilateral di daerah ini.

### ATURAN ASAL

Dalam rangka untuk mengecualikan non-pihak dari perjanjian itu perlu untuk membangun sebuah sistem penentuan asal barang untuk menerapkan konsesi tarif yang tepat. Revisi Konvensi Kyoto 2006 tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Bea dan pelaksanaan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO akan membantu mengurangi tingkat kompleksitas dan peraturan bagi mereka



yang terlibat dengan perdagangan barang internasional. Konsistensi dengan dua kesepakatan global ini akan menjamin biaya rendah dan kepatuhan sederhana. Mereka juga menciptakan tantangan bagi IA-CEPA untuk melampaui apa yang sudah tersedia di bawah perjanjian yang ada dan potensial. IA-BPG mendukung sistem yang digunakan dalam AANZFTA termasuk penggunaan sertifikat asal sebagai sistem verifikasi – termasuk amandemen Protokol Pertama.

Mengejar koherensi dan konsistensi dengan Aturan Asal ASEAN sebanyak mungkin ada dalam kepentingan terbaik bisnis, selain juga berusaha untuk menyederhanakan administrasi dengan tujuan untuk memfasilitasi kemudahan penggunaan dan skala ekonomi untuk bisnis, di UKM tertentu.

Karena Indonesia dan Australia sudah bermitra di AANZFTA dan karena salah satu kesepakatan tidak menggantikan yang lain, ada alasan baik bagi pemerintah dan bisnis untuk tetap konsisten dengan pendekatan AANZFTA. Ini adalah lebih baik untuk membangun sistem lain di bawah IA-CEPA yang berpotensi akan membuat kebingungan dan variasi untuk bisnis dan layanan bea cukai.

IA-BPG mendukung penerapan pendekatan berbasis risiko untuk penerimaan sertifikat asal oleh pabean. Artinya, asalkan kedua negara memiliki keyakinan dalam sistem, kantor bea cukai hanya perlu meninjau sejumlah statistik yang relevan dari sertifikat untuk memastikan integritas skema sesuai dengan profil risiko dari barang yang bersangkutan. Penyederhanaan administrasi lainnya juga diinginkan untuk bisnis.

Pendekatan seperti itu akan bermanfaat bagi bisnis karena akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melintasi perbatasan dan mengurangi biaya.

## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk lebih meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, sangat penting untuk menetapkan prosedur yang adil, transparan, tepat waktu, dan efektif guna memfasilitasi penyelesaian sengketa komersial. Indonesia maupun Australia melihat pentingnya menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan yang mudah dilaksanakan.

Saat ini, ada penghalang hukum utama bagi investasi asing di Indonesia, yaitu inefisiensi dalam sistem pengadilan. Ketidakpastian perlindungan hukum di Indonesia yang dialami tidak hanya oleh investor asing di negeri ini, tetapi juga oleh bisnis Indonesia. Ada kebutuhan yang jelas untuk mekanisme sederhana dan langsung untuk menyelesaikan sengketa.

Ada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam AANZFTA dan IA-CEPA seharusnya tidak berbeda dari ini. Bisnis juga dapat mengambil keuntungan dari mekanisme seperti yang ditawarkan oleh ICC, UNCITRAL, ICSID, ITC, dll. Semua tawaran mereka bermodel klausul dan kontrak dan kemudian menyelesaikan proses menggunakan mediasi dan arbitrase.

Bisa ada keuntungan dalam memperluas penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dapat menyediakan biaya dan waktu yang lebih efisien sebagai alternatif untuk litigasi, dan ini harus dipertimbangkan untuk dimasukkan di bawah ketentuan IA-CEPA atau di samping IA-CEPA.

Mekanisme arbitrase, mekanisme untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dapat memberi alternatif dengan biaya dan waktu yang lebih efisien sebagai alternatif untuk litigasi, hendaknya dipertimbangkan untuk dimasukkan di bawah ketentuan IA-CEPA. Mediasi mungkin menawarkan beberapa keunggulan dalam konteks IA-CEPA, misalnya:

- Mediasi dapat diatur, disiapkan, dan diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu, bukan bulan atau tahun seperti dalam kasus prosedur adversari. Sebagai proses non-hukum,

mediasi mampu melintasi perbatasan dan tidak memiliki kendala hukum dan yurisdiksi yang melekat dalam proses adversari.

- Prosedur ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar budaya Indonesia seperti “musyawarah”, yaitu tradisi diskusi dan konsensus di antara orang-orang Indonesia.
- Mediasi dapat digunakan sebagai tambahan untuk proses penyelesaian sengketa pada setiap tahap sengketa. Bisa ada beberapa mediasi dalam satu sengketa besar atau hanya mediasi pada bagian dari suatusengketa.
- Bahkan bila mediasi tidak mencapai hasil akhir, mediasi itu masih dapat menghasilkan penyempitan atau peningkatan sengketa yang signifikan.
- Karena pihak-pihak yang bersengketa mengontrol proses dan mencapai kesepakatan mereka sendiri, mediasi umumnya dianggap adil.

Untuk menekankan sensitivitas Penyelesaian Sengketa Investor Negara (ISDS), kedua belah pihak harus sepakat bahwa penyelesaian sengketa adalah upaya terakhir ketika negosiasi atau mediasi langsung tidak dapat mencapai hasil yang dapat diterima bersama. ISDS harus dilakukan secara hati-hati dan tidak mengkhususkan barang atau sektor tertentu.

Ada peluang untuk meningkatkan kapasitas bersama bagi para profesional hukum dan pejabat pemerintah dalam penyelesaian sengketa.

## PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual (HKI) sangat penting untuk menjaga inovasi dan kreativitas dan mempertahankan pembangunan ekonomi di era informasi. Meskipun menjadi penandatanganan banyak perjanjian perlindungan HKI, kekhawatiran tetap ada berkenaan dengan perlindungan HKI di Indonesia. Masih ada pelanggaran HKI yang merajalela di lapangan, termasuk pembajakan, pelanggaran paten farmasi, pemalsuan merek dagang pakaian, dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Situasi ini secara signifikan menghalangi arus investasi dari perusahaan-perusahaan asing dan membatasi akses bagi bisnis Indonesia ke penelitian dan teknologi yang masih kurang. IA-CEPA bisa memperkuat perlindungan di bidang ini dengan membentuk kerangka suara untuk peningkatan kapasitas, termasuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI untuk pembangunan ekonomi.

Kapasitas UKM untuk mengelola HKI juga merupakan bidang perhatian utama. UKM dilaporkan tidak siap untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari HKI, seperti melindungi, menjual, dan melisensikan hak. IA-CEPA harus mencakup kerangka kerja untuk membangun kapasitas dalam mengelola HKI sebagai cara untuk meningkatkan inovasi di kalangan UKM.

Australia dan Indonesia adalah penandatanganan perjanjian WTO TRIPs. Sebagai pembajakan dan pemalsuan masih masalah besar di Indonesia, ada kebutuhan untuk pengembangan kapasitas untuk menegakkan perlindungan HKI bagi investor dan produsen untuk mendapatkan kepercayaan investor yang lebih besar. Perlindungan HKI diperlukan di semua bentuk kekayaan intelektual yang meliputi

hak cipta dan hak terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit-desain terpadu dan informasi yang dirahasiakan.<sup>36</sup>

## KEBIJAKAN PERSAINGAN

Implementasi atas kebijakan persaingan adalah komponen penting dari reformasi untuk perekonomian Indonesia yang diperlukan untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dan undang-undang untuk memastikan praktek kompetitif dan persaingan independen di pasar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen dan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Manfaat mungkin termasuk harga yang lebih baik dan berbagai produk untuk konsumen, perlindungan untuk bisnis dari praktek korupsi, tidak adil atau anti-kompetitif, kualitas produk yang lebih baik melalui peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi, meningkatkan keamanan produk dan kebenaran klaim produk.

Ada peluang untuk peningkatan kapasitas lembaga yang terlibat dalam desain pasar dan regulasi kompetisi, dan untuk akses ke kemampuan layanan Australia tingkat tinggi di bidang ini. Peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dapat berlangsung antara otoritas persaingan kedua negara, yaitu ACCC<sup>37</sup> dan KPPU,<sup>38</sup> untuk membantu dalam pencegahan praktek anti-kompetitif dan deteksi dan penuntutan perilaku yang melanggar hukum persaingan.

---

<sup>36</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/tripfq\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm).

<sup>37</sup> ACCC – *Australian Competition and Consumer Commission*.

<sup>38</sup> KPPU – *Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Indonesian Business Competition Supervisory Commission)*.



## Bab 4

# MODEL STRATEGIS UNTUK KEMITRAAN

### PELUANG KUNCI UNTUK IA-CEPA

IA-BPG telah mengidentifikasi beberapa peluang kunci untuk kemitraan yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Australia. Seperti disebutkan di atas, kedua negara memiliki sumber daya dan kapasitas yang saling melengkapi. IA-CEPA harus melampaui perjanjian perdagangan konvensional dengan mencari cara untuk memaksimalkan saling melengkapi ini dan memungkinkan kedua negara untuk berhasil bersama-sama sebagai mitra. Dengan demikian, peluang kemitraan ekonomi harus mencakup, dalam ringkasan:

1. **Mengembangkan industri terpadu lintas perbatasan dan rantai nilai** dalam barang maupun jasa yang memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing negara untuk memasok pasar domestik dan negara ketiga di AEC, Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan China, yang tidak bisa dicapai sendiri.
2. **Membangun investasi dua arah**, meningkatkan investasi Australia di Indonesia dan mendorong investasi jangka panjang Indonesia di Australia. Hal ini hendaknya dicapai dengan mengembangkan pasar yang kompetitif, menurunkan hambatan, mengurangi risiko, dan mempromosikan peluang investasi, termasuk usaha patungan.
3. **Memungkinkan berbagi pengetahuan dan teknologi lebih banyak** melalui harmonisasi standar dan peraturan; mengakui kualifikasi; mengakui hak kekayaan intelektual; membangun mekanisme penyelesaian sengketa; membangun pendidikan, kerjasama pengembangan profesi dan pelatihan; memfasilitasi usaha patungan dan perizinan usaha; dan mendorong pergerakan orang terampil antara kedua negara.
4. **Memfasilitasi kerjasama ekonomi melalui program peningkatan bantuan pembangunan** yang difokuskan pada membangun kapasitas ekonomi, mengembangkan keterampilan, berbagi informasi pasar, memungkinkan akses pasar, memfasilitasi pengembangan rantai nilai, membangun bisnis lokal dan meningkatkan kerjasama antara kegiatan bantuan pembangunan pemerintah dan sektor swasta.
5. **Mengakui hubungan langsung antara investasi dalam sektor jasa dan peningkatan kapasitas** melalui peningkatan pendidikan formal dan pelatihan, pembelajaran dan pengembangan

profesional langsung di tempat kerja, transfer teknologi dan ‘limpahan’ pengetahuan yang mengalir dari kehadiran perusahaan jasa internasional.

6. Bisnis di kedua negara telah mengungkapkan peluang besar yang ada untuk **kolaborasi bisnis yang lebih tinggi dan kemitraan yang lebih dalam** antara Indonesia dan Australia di sektor-sektor kunci. IA-CEPA hendaknya membahas hambatan-hambatan yang ada sehingga keuntungan dari liberalisasi perdagangan akan menjadi potensi kemitraan yang terbesar sepenuhnya terpenuhi. IA-BPG percaya bahwa peluang dapat dan harus diprioritaskan di sektor-sektor dimana hasil cepat dan terlihat adalah yang dicapai lebih dulu.
7. **Perlakuan khusus.** Untuk bekerja dengan baik demi kepentingan Indonesia dan Australia, IA-CEPA harus terang-terangan bersifat istimewa. Australia dan Indonesia hendaknya saling memberi perlakuan istimewa dalam perdagangan dan investasi. Bila memungkinkan, Indonesia dan Australia hendaknya menyatakan dan mengaktifkan preferensi perdagangan dan investasi yang beroperasi di atas pengaturan istimewa lainnya.
8. **Mengambil keuntungan dari Zona di Indonesia Ekonomi istimewa (KEK) bila memungkinkan.** KEK sekarang dan masa depan bisa memberi tempat yang sangat baik untuk investasi dan kerjasama tanpa batasan regulasi yang berlaku di tempat lain di Indonesia. Proyek yang berhasil memanfaatkan KEK Indonesia bisa berfungsi sebagai contoh untuk mempublikasikan dan mengembangkan KEK lanjut di tempat lain. IA-BPG punya pandangan yang sangat positif pada proposal tersebut, namun mencatat bahwa banyak KEK sekarang berada jauh dari pusat-pusat populasi dan pasar. KEK IA-CEPA dapat dikembangkan dan diimplementasikan sebagai cara untuk membuat penerapan liberalisasi yang lebih cepat di sektor atau kawasan prioritas.

IA-BPG mengidentifikasi enam sektor tertentu di mana ada potensi yang signifikan untuk keterlibatan ekonomi lintas batas dan di mana manfaat dapat direalisasikan dalam waktu yang relatif singkat-frame. Masing-masing dari enam sektor itu dibahas secara rinci di bawah ini.

## PELUANG UNTUK MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAN MEMAJUKAN PERHOTELAN

Sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia dan Australia terus mengalami pertumbuhan yang stabil. Pada 2015, kedatangan pengunjung internasional ke Australia meningkat 8% dari tahun sebelumnya.<sup>39</sup> Sementara itu, kunjungan wisatawan asing di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam dasawarsa terakhir, hampir dua kali lipat jumlahnya dari 5,51 juta kedatangan di 2007 menjadi 9,73 juta pada 2015.<sup>40</sup> Kedatangan pengunjung luar negeri diharapkan mencapai target pemerintah Indonesia menjadi 20 juta per tahun pada 2020.

Peningkatan kelas menengah ASEAN memberi kesempatan bagi ekspor pariwisata Indonesia maupun Australia. Kesamaan kegiatan dan pengalaman yang tersedia di Indonesia dan Australia menawarkan potensi kuat untuk bisnis pariwisata dan perhotelan – terutama perusahaan kecil dan menengah – untuk bermitra dan memperluas pasar mereka.

Investasi untuk pariwisata dan perhotelan di Indonesia berpotensi tinggi terutama untuk pembangunan infrastruktur, hotel, dan Kerjasama Pemerintah Swasta. Investasi ini diperkirakan akan bergerak menuju tujuan baru di Indonesia, seperti Lombok, Tanjung Lesung, Bunaken, Labuan Bajo, Komodo, Derawan, Wakatobi atau Toba, entah ditetapkan sebagai zona ekonomi / pariwisata istimewa ataupun tidak. Perlu dicatat bahwa 10 KEK telah diusulkan untuk pariwisata, dan tiga di antaranya telah diterima. KEK ini memberi kesempatan untuk investasi yang lebih terbatas dari Australia ke Indonesia.

### REKOMENDASI

- Gerakan manusia natural yang lebih bebas akan meningkatkan kemampuan bisnis kedua negara untuk memperluas di sektor pariwisata dan perhotelan. Indonesia telah menerapkan mekanisme masuk bebas visa 30 hari untuk 169 negara termasuk Australia, sementara Australia telah mulai menyediakan fleksibilitas yang lebih besar bagi warga negara Indonesia dengan pilihan untuk mengajukan permohonan visa pengunjung multi-masuk tiga tahun. Lebih banyak hal bisa dicapai oleh Australia, dan IA-BPG percaya bahwa pariwisata dari Indonesia ke Australia serta pergerakan pekerja terampil antara kedua negara hendaknya difasilitasi sebanyak mungkin untuk mendukung sektor pariwisata.
- Keterampilan dan pelatihan, khususnya melalui program Pertukaran Keterampilan antara Indonesia dan Australia, harus lebih dikembangkan. Peningkatan sumber daya manusia dan tenaga kesanggrahan yang terampil jadi prioritas tinggi untuk sektor pariwisata Indonesia. Dengan diperkenalkannya AEC, profesional pariwisata berkualitas tinggi diperlukan agar Indonesia dapat mempertahankan daya saingnya. Pariwisata merupakan sektor di mana Australia memiliki pengetahuan yang luar biasa dan dengan demikian dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas di Indonesia.

<sup>39</sup> [http://www.tourism.australia.com/documents/Statistics/TAINT10315\\_International\\_Market\\_Update\\_March\\_2016.pdf](http://www.tourism.australia.com/documents/Statistics/TAINT10315_International_Market_Update_March_2016.pdf)

<sup>40</sup> <http://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/tourism/item6051>.

## PELUANG UNTUK MENGAMANKAN KETERSEDIAAN PANGAN DALAM NEGERI DAN PARTISIPASI DALAM PASOKAN PANGAN GLOBAL

Kenaikan kelas menengah Indonesia dan peningkatan konsentrasi penduduk di daerah perkotaan (diproyeksikan mencapai 71% pada 2050) menyumbang beberapa tantangan ketersediaan pangan yang dihadapi oleh negara. Nilai konsumsi pangan di Indonesia diproyeksikan empat kali lipat antara 2009 dan 2050, tetapi produksi pangan lokal hanya diperkirakan dua kali lipat. Hal ini meninggalkan celah yang signifikan untuk diisi oleh impor dari luar negeri, terutama dari produksi yang bernilai tinggi.<sup>41</sup>

Negosiasi IA-CEPA hendaknya mempertimbangkan cacat asumsi bahwa ketahanan pangan di Indonesia dapat dicapai melalui swasembada pangan. Ketersediaan pangan dapat direalisasi jauh lebih cepat dan handal melalui kerjasama. Masalah ketersediaan pangan Indonesia signifikan disebabkan produktivitas yang rendah. Di sisi lain, Australia mampu menghasilkan cukup makanan berkualitas tinggi untuk 60 juta orang<sup>42</sup> berkat keahlian dan tingkat produktivitas pertanian kelas dunia. Dengan bekerja sama, Australia dan Indonesia dapat saling membantu memenuhi tujuan pertanian dan makanan mereka. Oleh karena itu, ada banyak potensi investasi dalam inovasi agribisnis dan penelitian di kedua negara untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan ketersediaan pangan.

Australia dan Indonesia hendaknya bekerja sama untuk menciptakan sistem pertanian yang dirancang untuk memenuhi ketahanan pangan. Dalam jangka panjang, ada kesempatan yang lebih besar bagi Indonesia dan Australia untuk berkolaborasi dalam mengakses pasar ketiga. Untuk sementara, salah satu strategi pasar dan peningkatan kapasitas ini adalah Indonesia mengembangkan rantai pasokan pertanian yang bernilai tinggi ke Australia.

Kemitraan Indonesia-Australia Di Bidang Ketahanan Pangan dalam Sektor Daging Merah dan Ternak adalah contoh bagaimana kemitraan bisnis yang lebih kuat dapat dibuat dan bahwa IA-BPG berharap akan memimpin untuk membangun keunggulan kompetitif dalam pengiriman ke pasar ketiga.<sup>43</sup> Karena biaya daging sapi di Indonesia yang relatif tinggi, hanya sekitar 20% dari rumah tangga saja yang jadi konsumen, itu pun kadang-kadang. Permintaan laten yang 80% dapat dipenuhi oleh daging sapi produksi lokal. Ini adalah kesempatan bagi kedua negara untuk memberi perhatian yang lebih besar pada peningkatan kapasitas dan usaha patungan di pasar. Sektor lain bisa mendapatkan keuntungan dari inisiatif serupa.

Gula, misalnya, menyajikan peluang tersebut. Bisnis di Indonesia telah menyatakan bahwa investasi yang lebih banyak dalam teknologi on-farm dan off-farm untuk meningkatkan produktivitas, dalam pabrik gula serta dalam teknologi dan transfer pengetahuan dapat meningkatkan standar kualitas dan memungkinkan Indonesia untuk mengakses pasar Australia dan pasar global potensial.<sup>44</sup> Australia mampu bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kapasitas produksi gula, sementara Indonesia harus memastikan bahwa gula Australia bersaing di tingkat lapangan permainan dengan para produsen ASEAN. Penurunan tarif yang berlaku untuk impor gula mentah Australia ke tingkat yang setara dengan yang diterapkan ke Thailand akan memastikan penyuling Indonesia akan terus dapat sumber impor gula mentah dari Australia serta mereka dan para

<sup>41</sup> Laporan Horizon oleh Perth USAsia Centre, Mei 2016.

<sup>42</sup> PMSEIC (2010). *Australia and Food Security in a Changing World*, the Prime Minister's Science, Engineering and Innovation Council, Canberra, Australia.

<sup>43</sup> Sukses Bersama: Memaksimalkan Potensi Peluang Bersama antara Australia dan Indonesia.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Asosiasi Gula Indonesia dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia.



produsen makanan mempertahankan akses ke sumber persediaan alternatif yang berkualitas tinggi dan kompetitif.<sup>45</sup>

Pendekatan serupa bisa diterapkan untuk produk lain seperti buah-buahan tropis dan kopi dari Indonesia ke Australia atau gandum dari Australia ke Indonesia. GrainGrowers, misalnya, telah mengusulkan pembentukan Pusat Padi-Padian Australia dalam suatu universitas di Indonesia. Pusat ini akan mengajarkan sejumlah program yang berkaitan dengan penggunaan padi-padian. Kursus dapat mencakup cara pembuatan kue Australia dan pembuatan mie, penggilingan gandum, serta pengujian dan penyimpanan padi-padian. Pusat tersebut bisa melakukan proyek strategis oleh para akademisi dan mahasiswa lulusan pasca sarjana dalam kerjasama dengan Pusat Inovasi Padi-Padian Ekspor Australia.<sup>46</sup>

IA-BPG menghargai jenis-jenis inisiatif yang sejalan dengan proposal proyek pilot “Diet Sehat” 2012, Namun, tarif yang tersisa, pembebasan perdagangan bebas, pembatasan perdagangan, hambatan teknis, dan prosedur karantina masih menjadi penghalang untuk memperoleh potensi penuh dari rantai nilai global di bidang pertanian.

## REKOMENDASI

- Memfasilitasi perlakuan istimewa antara kedua negara untuk perdagangan produk makanan. Misalnya ketentuan perdagangan hortikultura dalam FTA Thailand-Australia dapat memberi preseden, termasuk dalam memfasilitasi ekspor buah Thailand ke Australia. Perjanjian antara Selandia Baru dan Indonesia pada Juni 2016 untuk bekerja sama dan memfasilitasi akses bagi produk pertanian Indonesia ke Selandia Baru, khususnya untuk buah-buahan tropis, dapat berfungsi sebagai contoh lain.
- Untuk mengatasi masalah perbedaan standar, kedua negara juga harus mengadopsi sebanyak mungkin standar CODEX Alimentarius yang sama.
- Untuk memperluas kemitraan daging merah dan sapi, dan untuk menerapkan pendekatan yang sama ke sektor kepentingan bersama lainnya, seperti biji-bijian, makanan laut, dan produk hortikultura.

<sup>45</sup> Usulan dari Aliansi Industri Gula Australia (*Australian Sugar Industry Alliance*).

<sup>46</sup> Usulan dari GrainGrowers.

## PELUANG UNTUK PEMBANGUNAN MODAL MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHAP LANJUT

Hambatan yang signifikan untuk gerakan manusia natural dari Indonesia ke Australia adalah standar dan sertifikasi tinggi yang dituntut oleh bisnis Australia. Investasi dalam modal manusia di Indonesia melalui investasi bersama dalam pendidikan tinggi dan fasilitas pelatihan serta personil dari Australia adalah kesempatan yang saling menguntungkan dan yang mempromosikan sertifikasi Australia maupun pelatihan standar, dan investasi dalam negeri di Indonesia yang dapat dimanfaatkan di kedua negara maupun global. Kemitraan antar lembaga pendidikan tinggi, misalnya pengenalan “gelar ganda” untuk profesi tertentu, dapat mempromosikan gerakan lintas perbatasan dan mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tertentu. Bidang-bidang dengan potensi keuntungan yang tinggi dengan pendekatan ini termasuk penelitian medis, di mana hasilnya dapat dikomersialisasi, profesi keperawatan yang kronis mengalami kekurangan staf di Australia, agribisnis, dan pariwisata.

Program bersama dalam keperawatan, akuntansi, pariwisata, jasa hukum, teknik, dan sektor maritim perlu ditingkatkan. Misalnya, perawat Indonesia memerlukan peningkatan kapasitas untuk mencapai Sertifikasi Perawat Berkualitas Internasional yang diakui secara global. Untuk profesi hukum di Indonesia, pelatihan bisa menjadi titik awal sebelum pembukaan sektor sepenuhnya untuk pengacara Australia.

Sektor Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (VET) belum berkembang di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan permintaan laten besar untuk pekerja dengan keterampilan VET. Pada Desember 2011, Direksi TAFE Australia (TDA) memulai sebuah proyek yang berfokus pada sektor VET Indonesia dan keterlibatannya dengan bisnis dan industri. Proyek ini didukung oleh Pemerintah Indonesia dan Australia, serta bisnis. Salah satu usulan yang timbul dari proyek ini adalah model publik-swasta baru untuk VET Indonesia. Pada September 2013, TDA dan Dewan Bisnis Indonesia-Australia (IABC) menjadi rekan tuan rumah Indonesia-Australia *Industry Skills Training Roundtable* perdana di Jakarta. Namun, proyek ini kemudian terhenti karena beberapa alasan, termasuk pemotongan dan reprioritisation anggaran bantuan pemerintah Australia. Kemitraan Indonesia-Australia punya kebutuhan yang jelas untuk membantu membangun jaringan VET publik-swasta yang menyajikan peluang yang signifikan bagi industri. Hal ini perlu didasarkan pada kerangka kualifikasi yang diakui secara internasional dan kurikulum yang konsisten.

Ada kesempatan untuk berinvestasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia karena banyak universitas milik swasta. Di sisi lain, Australia juga menyambut lembaga Indonesia untuk berinvestasi di sektor pendidikan. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa ada pembatasan besar pada investasi di VET dan Universitas di Indonesia. Selanjutnya pergerakan orang masih menghadapi tantangan karena sulit untuk membawa akademisi dan pelatih dari Australia ke Indonesia, yang berdampak pada ketersediaan pengajaran akademis berkualitas tinggi dan pelatihan.

## REKOMENDASI

IA-CEPA dan proyek sejenis harus mencakup langkah-langkah untuk mendorong perguruan tinggi bekerja lebih erat dalam pengajaran, pembelajaran dan penelitian, termasuk program gelar bersama dan kegiatan penelitian bersama dan pusat. Juga, IA-CEPA harus mencakup:

- Ketentuan untuk membuka sektor universitas untuk investasi asing.
- Ketentuan untuk membuka sektor pelatihan untuk memungkinkan resourcing dari banyak peningkatan program transisi dari sekolah hingga universitas.
- Ketentuan untuk kerjasama dan peningkatan kapasitas di sektor VET untuk memungkinkannya melatih pekerja terampil secara lebih baik untuk mencapai standar internasional.
- Ketentuan pergerakan orang-orang terampil untuk melakukan penelitian dan melakukan pengajaran.

## PELUANG UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN DAN KUALITAS KEHIDUPAN

Industri perawatan kesehatan Indonesia terus mengalami tingkat pertumbuhan yang baik dalam semua bidang termasuk rumah sakit, asuransi kesehatan dan alat kesehatan. Pada tahun 2016, 60% dari rumah sakit di Indonesia dimiliki dan dioperasikan pemerintah. Sisanya dikelola oleh swasta.

Kesediaan pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan investor asing di sektor kesehatan merupakan langkah yang signifikan untuk mengurangi pengeluaran biaya kesehatan oleh warga negara Indonesia yang dibelanjakan di luar negeri, misalnya, di Singapura dan Malaysia. Peraturan-peraturan baru telah membuka beberapa sektor bisnis dalam industri kesehatan untuk 100% investasi asing, termasuk bahan baku farmasi, bisnis dan jasa konsultasi manajemen, dan jasa dukungan kesehatan yang meliputi sewa peralatan medis, klinik laboratorium dan klinik pemeriksaan kesehatan. Karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku farmasi dan peralatan medis, maka ini memberikan kesempatan utama bagi investor asing.

Investasi di rumah sakit yang berkualitas tinggi sangat dicari di Indonesia, dan penyedia layanan kesehatan Australia dapat membantu Indonesia mengembangkan layanan kesehatan kelas dunia, termasuk rumah sakit, klinik, perawatan lansia, dan perawatan cacat. Perusahaan-perusahaan Australia yang dipimpin oleh Ramsay Healthcare adalah investor utama dalam sektor kesehatan Indonesia dan telah mulai menyediakan layanan kelas dunia kepada konsumen Indonesia. IA-BPG menyambut penyesuaian peraturan yang memungkinkan 100% kepemilikan asing di beberapa sektor kesehatan, meskipun masih ada pembatasan dalam untuk dokter asing dapat berlatih di Indonesia.

Dalam industri kesehatan, sumber daya manusia Indonesia yang terjangkau adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan besar oleh Australia. Karena populasi Australia yang menua, permintaan untuk profesional kesehatan yang terampil mengalami peningkatan, terutama dalam profesi keperawatan. Investasi dalam pelatihan personil dan memfasilitasi gerakan profesional yang terampil di sektor ini adalah strategi yang potensial untuk memerangi kebutuhan ini di masa depan, tenaga kerja Indonesia dapat mengisi kesenjangan permintaan Australia.

### REKOMENDASI

- Berfokus pada program pertukaran dalam perawatan kesehatan sebagai cara untuk cepat meningkatkan kapasitas dan keahlian dokter kedua negara.
- Melonggarkan pembatasan pergerakan orang, sehingga dapat membantu membangun kapasitas dan meningkatkan kualitas keseluruhan layanan kesehatan di Indonesia. Misalnya, dokter Australia dan pelatih perawat yang memberi pelatihan di Indonesia sangat dibatasi oleh peraturan Indonesia, misalnya untuk menangani pasien bahkan dalam konteks pelatihan. Pembatasan ini perlu dilonggarkan untuk memungkinkan peningkatan kapasitas efektif.
- Membuka peluang untuk investasi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

## PELUANG UNTUK PERCEPATAN EKONOMI DIGITAL, E-NIAGA DAN INDUSTRI KREATIF

IA-CEPA hendaknya membahas peluang yang diciptakan oleh ekonomi digital, e-niaga dan industri kreatif, dan termasuk mekanisme untuk memfasilitasi pertumbuhan lintas batas sektor ini serta penerapan e-niaga untuk semua perdagangan. IA-BPG mencatat bahwa bab AANZFTA pada e-niaga ini terbatas cakupannya dan IA-CEPA perlu mengambil pendekatan yang komprehensif.

Profil revolusi digital global dan pergeseran industri di Australia dan Indonesia meningkatkan jumlah dan kebutuhan akan perusahaan berbasis teknologi yang inovatif.

Indonesia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk mengembangkan aplikasi, dan satu pasar aplikasi yang paling cepat berkembang di dunia berada di Indonesia. Ukuran hiburan dan media pasar Indonesia pada 2013 adalah US\$10,2 miliar, dengan segmen dengan pertumbuhan tercepat terbukti iklan internet. Penerbitan surat kabar pada 2013 menyumbang 34,3% dari belanja pasar, dengan pendapatan US\$3,5 miliar.<sup>47</sup> Diramalkan, pertumbuhan di Indonesia akan melebihi pertumbuhan secara keseluruhan dalam hiburan dan media belanja di seluruh Asia Pasifik maupun global selewat 2018.

Perniagaan elektronik (e-commerce) menyediakan peluang yang sangat besar untuk menyediakan platform perdagangan bagi perusahaan kecil dan menengah di Indonesia dan Australia. E-niaga akan menjadi semakin penting bagi bisnis untuk dapat mengakses pasar global. E-niaga juga merupakan sektor yang penting dalam dirinya sendiri bagi Indonesia dan Australia untuk mengembangkan dan menyelaraskan. Oleh karena itu, e-niaga penting perlu sangat didorong dalam IA-CEPA. Langkah-langkahnya bisa mencakup aturan-aturan perdagangan yang menumbuhkembangkan kepercayaan dalam lingkungan on-line dan membatasi kemampuan untuk memasang penghalang jalan untuk perdagangan tersebut di masa depan.

Sejalan dengan diskusi RCEP tentang e-niaga, IA-CEPA perlu mengadopsi aturan yang memungkinkan arus informasi dan melarang lokalisasi data, sehingga memungkinkan penyediaan layanan lintas batas, mendorong pertumbuhan bisnis online, mempermudah UKM dan pengguna untuk online, dan memungkinkan penggunaan sistem pembayaran online yang sederhana.

Kerjasama bisnis hendaknya ditingkatkan untuk mendapat keuntungan di sektor ekonomi digital. Mitrais, suatu perusahaan ICT Indonesia dengan kehadiran di Australia dan Asia Tenggara, adalah kisah sukses yang menampilkan potensi kerjasama bisnis dan ekspansi di sektor ini. Konferensi tingkat tinggi ekonomi digital Indonesia-Australia hendaknya diselenggarakan sebagai cara untuk mempersatukan para investor, bukan hanya dari kedua negara tetapi juga dari negara-negara lain.

Namun demikian, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan lebih banyak akses ke investasi asing bagi anggota mereka yang sebagian besar UKM.<sup>48</sup> Investasi asing pada penyedia layanan internet dibatasi 67%. Selanjutnya, meskipun daftar DNI baru-baru ini memungkinkan 100% kepemilikan asing di e-niaga dengan investasi modal di atas Rp 1 triliun, daftar tersebut masih menempatkan pembatasan kepemilikan asing dalam sistem e-niaga untuk investasi di bawah Rp100 miliar (sekitar AUD10 juta) yang menghambat investasi oleh UKM. IA-CEPA harus mendorong investasi dua arah di sektor ekonomi digital termasuk e-niaga dan industri kreatif untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan UKM. Di sisi lain, kedaulatan data

<sup>47</sup> <https://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/hot-topics/assets/pwc-indonesia-summary.pdf>

<sup>48</sup> Wawancara dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

dikenal sebagai masalah yang berhubungan dengan keamanan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mensyaratkan Pusat Data berlokasi di Indonesia. Syarat ini menyebabkan kekhawatiran dari sektor perbankan maupun sektor ICT secara umum.

Peluang besar ada di industri kreatif. Menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, industri kreatif menyumbang Rp642 milyar atau 7,05% dari PDB Indonesia. Kontributor utama adalah bisnis kuliner (32,4%), mode (27,9%), dan kerajinan tangan (14,9%). Menimbang bahwa Australia memiliki salah satu seni yang paling canggih dan sektor kreatif di dunia, Indonesia dan Australia dapat bekerja sama di bidang desain dan manufaktur untuk meningkatkan kemampuan ekspor produk Indonesia sekaligus menciptakan bisnis yang lebih kuat serta hubungan rakyat di kedua negara.

Misalnya, lebih dari empat juta orang Indonesia dan 220,000 warga Australia bekerja di sektor fashion. Hal itu menambahkan AU \$ 12 miliar ke ekonomi Australia setiap tahun. Ekspor Indonesia dari produk fashion telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 25 pengusaha mode Indonesia telah menerima beasiswa untuk menghadiri dua minggu Program Kesiapan Bisnis Internasional di Queensland, sementara desainer mapan di kedua negara telah didukung untuk memamerkan karya mereka di acara mode yang terkemuka di Jakarta dan Melbourne. Salah satunya desainer Indonesia yang muncul, Toton, akan bersaing untuk International Woolmark Prize yang didirikan oleh Australia. Ajang tersebut akan diselenggarakan di Paris pada akhir tahun ini.

## REKOMENDASI

IA-BPG merekomendasikan bahwa langkah-langkah e-niaga IA-CEPA, digital, dan industri kreatif hendaknya mencakup:

- Aturan-aturan perdagangan yang mendorong kepercayaan dalam lingkungan on-line dan membatasi kemampuan untuk memasang penghalang jalan untuk perdagangan tersebut di masa depan. Khususnya, IA-CEPA akan perlu mengadopsi aturan yang memungkinkan arus informasi dan melarang lokalisasi data, memungkinkan penyediaan lintas batas layanan, mendorong pertumbuhan bisnis online, mempermudah UKM dan pengguna untuk online, dan memungkinkan penggunaan sistem pembayaran online yang sederhana.
- Membangun sistem tanpa batas yang harmonis untuk perilaku dan regulasi e-niaga.
- Mempertimbangkan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pemerintah dan bisnis untuk memanfaatkan e-niaga.
- Pada prinsipnya, IA-CEPA hendaknya mendukung kebebasan aliran informasi sementara menghormati sejauh mungkin keamanan informasi pribadi. Pemerintah hendaknya tidak berupaya menciptakan istilah perjanjian di mana hukum kontrak cukup.
- Menciptakan lingkungan yang mendukung industri di sektor ekonomi digital, terutama UKM, dengan memungkinkan kebebasan aliran investasi dan manusia serta menghapus pembatasan kepemilikan asing yang tersisa di sektor digital.

## PELUANG DI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

Infrastruktur di Indonesia umumnya kurang dalam hal kualitas dan kuantitas. Bisnis Indonesia merasa bahwa ketersediaan infrastruktur yang handal terutama mempengaruhi rantai pasokan dan logistik, sehingga menciptakan biaya produksi yang semakin tinggi, yang dapat mengakibatkan harga produk jadi lebih tinggi dan kurang kompetitif. Administrasi di Indonesia saat ini mendorong pembangunan infrastruktur baru dengan ambisi untuk membangun bendungan dan jalan, kereta api, bandara, dll guna memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Selain itu, pemerintah berencana untuk membangun infrastruktur listrik 35 GW untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan energi negara. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target 25% pembangkit bertenaga terbarukan dan 25% pembangkit bertenaga gas.

Pemerintah dan sektor swasta sudah menjelajahi peluang untuk koneksi gas dan jaringan listrik lintas batas dan pasar listrik internasional di Asia Tenggara berdasarkan pengalaman di Eropa dan tempat lain. IA-CEPA punya kemungkinan untuk mendorong penyelidikan tentang pasar listrik grid terhubung dengan pasokan energi dari Australia ke Indonesia dan negara lain.<sup>49</sup>

Wajarnya, peningkatan infrastruktur akan memiliki efek domino positif bagi perekonomian Indonesia. Australia adalah salah satu pemasok energi terbesar di dunia dan memiliki akses ke sumber daya energi yang melimpah terbarukan seperti matahari dan angin. Australia telah mengembangkan teknologi dan keahlian dalam mengoperasikan sistem tenaga terbarukan dan tenaga hibrida yang mungkin sangat cocok untuk diadaptasi oleh pulau-pulau di Indonesia. Australia juga memiliki persyaratan infrastruktur yang signifikan dan menekankan pada pengembangan Australia Utara. Kedua negara juga berusaha untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Kepentingan bersama dan saling mendukung ini dapat dimanfaatkan melalui IA-CEPA.

Berkaitan dengan IA-CEPA, rencana Indonesia untuk belanja besar-besaran pada infrastruktur harus menciptakan kesempatan yang ideal bagi Australia untuk memperdalam kerjasama dengan Indonesia. Sementara Indonesia membutuhkan infrastruktur yang lebih baik, Australia dapat berinvestasi dan memberikan keahlian untuk mencapai manfaat bersama. Peluang mencakup kerjasama di bidang infrastruktur seperti membangun jalan tol, pengembangan pelabuhan, merancang dan memasok sistem daya terpusat, dan bekerja sama dengan sektor perbankan untuk pembiayaan dan manajemen aset.

Lembaga keuangan Australia, perusahaan konsultan infrastruktur, dan lembaga-lembaga infrastruktur pemerintah memiliki keahlian kelas dunia dalam kemitraan publik-swasta untuk menyediakan infrastruktur. Tapi potensi kerjasama dihambat oleh kurangnya pengetahuan tentang peluang di Indonesia dan bagaimana beroperasi di Indonesia, serta kurangnya kepercayaan dalam lingkungan operasi, dan hambatan bagi operasi perusahaan asing dan pergerakan orang.

Penghambat lain untuk kerjasama Australia-Indonesia lebih besar dalam infrastruktur yang diidentifikasi oleh AIBC melalui inisiatif Dialog Infrastruktur IA meliputi:

- Proses-proses yang tidak pasti pada semua tahap desain proyek, kontraktor, pengiriman, dan operasi;
- Pembatasan yang parah dalam hal penyediaan layanan untuk penyediaan infrastruktur, baik melalui Daftar Negatif Investasi atau peraturan oleh Kementerian, termasuk pembatasan

---

<sup>49</sup> Usulan dari *Chamber of Commerce of the Northern Territory*.



operasi jasa keuangan dan perusahaan jasa profesional dengan kapasitas yang dibutuhkan; dan

- Pembatasan keterlibatan profesional asing yang diperlukan untuk mengarahkan keahliannya dan kapasitas untuk proyek-proyek infrastruktur yang kompleks.

## REKOMENDASI

Untuk dapat sepenuhnya merangkul peluang dalam sektor infrastruktur dan energi, IA-BPG:

- Mendorong kedua Pemerintah untuk bersama-sama menciptakan Pusat PPP Indonesia-Australia yang akan membantu memenuhi kebutuhan Indonesia dalam bidang desain berkualitas tinggi, penataan dan dokumentasi proyek yang ditawarkan. Pusat yang bekerja sama dengan BKPM akan merampingkan investasi dan alur kerja di sektor penting ini. Contoh mengenai pusat yang serupa baru-baru dibuat di Filipina dengan bantuan Australia dan contoh kawasan ada seperti misal pusat PPP Makassar.
- Cari mekanisme untuk memastikan keterlibatan Australia dalam proyek PPP tanpa harus melalui persyaratan tender kompetitif internasional.
- Membangun platform G-to-G seperti MoU pada proyek infrastruktur tertentu.
- Mendorong kedua pemerintah tetap terbuka untuk menerima tawaran yang tidak diminta sehubungan dengan proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur daerah dari sektor swasta yang telah mereka identifikasi secara sepihak.
- Merekomendasikan agar semua kelas infrastruktur hendaknya lebih terbuka untuk investasi asing.



INDONESIA AUSTRALIA  
BUSINESS COUNCIL



**Ai**GROUP



AUSTRALIA INDONESIA  
BUSINESS COUNCIL



Australian  
Chamber of Commerce  
and Industry

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

# HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-AUSTRALIA: SEBUAH ANALISIS<sup>50</sup>

Tujuan dari bagian ini adalah menyediakan konteks sejarah dan pemeriksaan kritis terhadap hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia. Hal ini akan dilakukan dengan menganalisis kinerja ekonomi kedua negara dengan memperhitungkan konteks dinamika sosial-politik, hubungan perdagangan, hubungan rakyat dengan rakyat, dan hubungan ekonomi kawasan multi-dimensi.

## TINJAUAN SEKILAS TENTANG HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-AUSTRALIA

Indonesia dan Australia adalah negara tetangga dengan tingkat perkembangan dan populasi yang berbeda. Indonesia adalah negara yang padat penduduk, negara berkembang dengan kelimpahan tenaga kerja tidak terampil, sedangkan Australia adalah negara maju dengan penduduk yang relatif jarang dan tenaga kerja terampil yang berlimpah. Namun, meskipun berpenghasilan menengah bawah, pertumbuhan dan inflasi tarif ekonomi Indonesia lebih tinggi daripada Australia. Kedua negara kaya dalam hal produk pertanian, mineral dan sumber daya seperti batu bara, baja, besi, timah, dan bahan kimia anorganik. Hal itu membuat pola akselerasi pertumbuhan ekonomi mereka mengikuti pergerakan harga komoditas global. Surplus perdagangan Indonesia dalam produk pertanian sebagian besar berasal dari komoditas non-pangan yang terkait, sementara Australia mendapat surplus keuntungan dari produk yang berhubungan dengan makanan. Indonesia dan Australia saling menghasilkan produk yang dibutuhkan pihak lain, karena itu, memberi kesempatan yang sangat baik bagi masing-masing untuk membangun hubungan dagang yang kuat satu sama lain (Crawford, 1935, Hill, 1990, 2000; Mackie, 2007; Resosudarmo, Verico, Pasaribu, 2015). Bersama-sama, Indonesia dan Australia akan menjadi ekonomi terbesar kesembilan di dunia. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia berkembang (saat ini pertumbuhan tercepat tahunan ketiga setelah China dan India), sedangkan Australia adalah ekonomi OECD yang paling cepat berkembang.

Indonesia dan Australia telah mencapai kemajuan yang signifikan pada sejumlah isu penting bilateral non-perdagangan. Namun, kemajuan dalam hubungan bisnis ke bisnis, terutama dalam perdagangan dan investasi, jauh lebih terbatas (Grup Bisnis Kemitraan Indonesia-Australia, 2012). Kinerja perdagangan dan investasi bilateral kedua ekonomi di bawah potensi mereka, meskipun Indonesia dan Australia bertetangga dan meskipun ekonomi mereka saling melengkapi.

Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Australia sebagai bagian dari pengejaran umum perjanjian ekonomi bilateral dengan negara-negara<sup>51</sup> dengan yang di masa lalu punya tingkat perdagangan dan investasi yang rendah.

<sup>50</sup> Analisis ini disusun oleh Kiki Verico, PhD. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia) untuk IA-BPG, dan terima kasih kepada Profesor Anwar Nasution atas input berharga dan saran pada bagian ini.

<sup>51</sup> Dua perjanjian perdagangan bilateral Indonesia yang berlaku saat ini adalah: (1) IJEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang) pada 2008 yang mencakup perdagangan barang dan jasa, dan investasi dan (2) Indonesia-Pakistan PTA (Perjanjian Perdagangan Bidang Tertentu) pada 2014 yang berfokus hanya pada perdagangan barang dan jasa. Lima

Selain negosiasi bilateral untuk IA-CEPA, kedua negara juga terhubung melalui kerangka kerja perjanjian ekonomi plus regional FTA ASEAN-Australia dan Selandia Baru (AANZFTA, 2009) dan Kemitraan Ekonomi Kawasan Komprehensif (RCEP, negosiasi masih dalam proses) yang pada dasarnya adalah ASEAN plus Enam negara (ASEAN + China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru).

Penelitian oleh Lembaga Riset Penelitian Ekonomi dan Sosial di Universitas Indonesia (LPEM)<sup>52</sup> pada 2014, dengan menggunakan metode Penilaian Dampak Regulasi (RIA), menemukan bahwa kerja sama ekonomi bilateral dengan Australia akan menguntungkan Indonesia terutama jika kerja sama tersebut dapat meningkatkan dan menyempurnakan arus investasi asing langsung (FDI) masuk dari Australia ke Indonesia.

Namun, Indonesia dan Australia harus bekerja sama dan intensif bersama-sama untuk memastikan tiga isu utama. Pertama, bilateral IA-CEPA hendaknya dibangun dan saling melengkapi berdasar kerangka kerja kawasan di mana kedua negara terlibat, seperti AANZFTA dan RCEP. Seperti namanya, IA-CEPA mencakup lebih dari sekedar liberalisasi perdagangan dan peningkatan aliran bebas barang dan jasa. IA-CEPA juga mencakup arus bebas investasi<sup>53</sup> dan orang, serta menambah ketentuan perdagangan bebas AA NZFTA dan RCEP. Salah satu contoh bangunan IA-CEPA tentang ketentuan AANZFTA adalah pernyataan tujuan tentang mencapai eliminasi tarif 100% atas barang-barang Indonesia yang memasuki pasar Australia, dan penghapusan 93,2% dari tarif ekspor Australia ke Indonesia pada tahun 2020 (Grup Kemitraan Bisnis Indonesia- Australia, Naskah Posisi, 2012). Kedua, IA-CEPA bilateral adalah sarana untuk memastikan bahwa 'liberalisasi dua arah'<sup>54</sup> perdagangan dan investasi menghasilkan 'situasi menang-menang' bagi kedua belah pihak. Ketiga, IA-CEPA hendaknya mengambil peran perampangan regulasi dalam rangka untuk lebih meningkatkan prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi kerangka kerja plus kawasan AANZFTA & RCEP. Dengan beroperasi pada tingkat nasional dan bilateral, IA-CEPA hendaknya jadi lebih luas dan memberi detail sektoral yang lebih besar mengenai isu-isu dan kawasan-kawasan yang dicakupnya, yang membedakannya dari kerangka kerja kawasan plus.

Yang terakhir, IA-CEPA hendaknya memiliki mekanisme yang secara aktif memfasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua negara serta dengan negara-negara ketiga melalui kolaborasi dalam mengakses rantai nilai global.

## GAMBARAN MAKROEKONOMI KOMPARATIF

### ➤ HUBUNGAN EKONOMI

Sampai pertengahan 1960-an, kepentingan bisnis antara Australia dan Indonesia tetap pada tingkat yang sangat rendah (Arndt, 1968). Dari tahun 1967, dengan munculnya pemerintahan Soeharto, Indonesia mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan yang lebih tinggi dari Australia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini merangsang hubungan ekonomi

---

perjanjian bilateral saat ini dalam tahap negosiasi, yaitu (1) Indonesia-Korea CEPA, (2) Indonesia-EFTA (Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia & Konfederasi Swiss), (3) Indonesia-Iran PTA, (4) Indonesia-Australia CEPA and (5) Indonesia-Chile CEPA.

<sup>52</sup> LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

<sup>53</sup> Menurut Makalah Posisi IA-BPG 2012, IA-CEPA harus mencakup enam wilayah penting selain perdagangan dan investasi, yaitu: pengadaan pemerintah, ketentuan asal, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hak kekayaan intelektual, kebijakan kompetisi dan 'tindakan lintas sektoral untuk mengatasi hambatan' (IA-BPG, 2012).

<sup>54</sup> Kondisi ini juga dikenal sebagai "*Cournot-Nash Equilibrium*".

antara kedua negara. Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, hanya ada dua tahun (1982 dan 1985) di mana Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah ketimbang Australia. Hal ini diakibatkan oleh penurunan harga minyak sehingga mendorong pemerintah Indonesia untuk memulai sejumlah reformasi ekonomi untuk meningkatkan produksi dan ekspor komoditas non-minyak dan gas. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, perekonomian Indonesia kembali ke pertumbuhan yang kuat sampai menghadapi dampak dari Krisis Finansial Asia 1997-1998.<sup>55</sup>

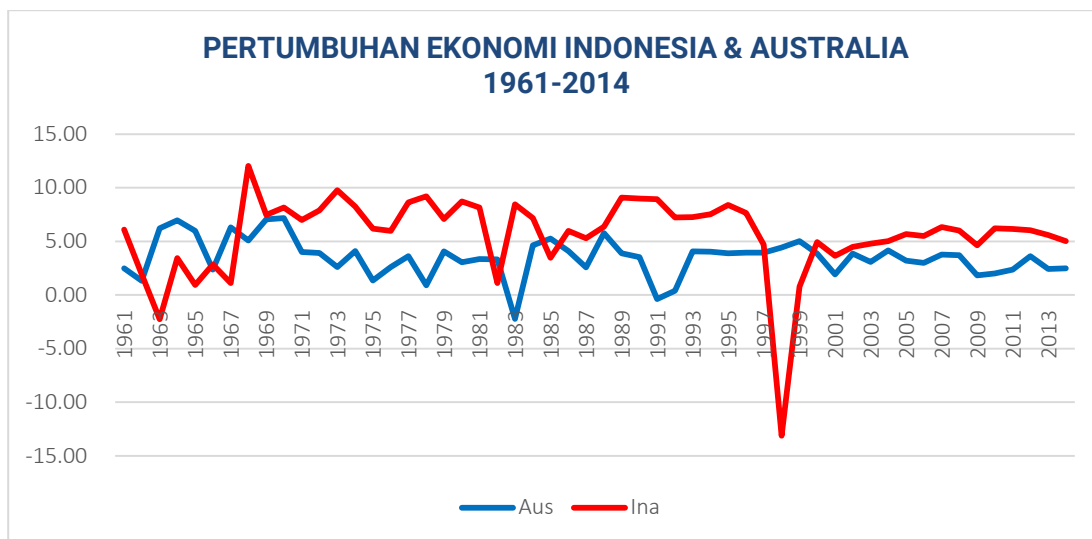
AFC memaksa Indonesia untuk memasuki apa yang disebut 'periode dentuman besar' yang ditandai dengan reformasi pemerintah yang bersifat fundamental dan tekanan untuk desentralisasi.<sup>56</sup> Selama masa transisi ini, mirip dengan transisi kepresidenan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1960an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Ekonomi Indonesia telah pulih, dan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini telah lebih tinggi dari Australia sejak tahun 2000, Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak AFC dan ini sekali lagi mendorong hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia, bahkan lebih dari pada era presiden Soeharto.

---

<sup>55</sup> Indonesia mengadopsi sedikitnya tiga reformasi ekonomi setelah AFC: pengetatan kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang konstruktif dengan mengadopsi Kriteria Maastricht Criteria ke dalam hukum nasional Indonesia, dan baru-baru ini, reformasi struktural terutama pada faktor sisi pasokan. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo telah merilis serangkaian paket kebijakan ekonomi tentang kapasitas persaingan ekonomi global, pro-masyarakat miskin dan kesetaraan tujuan (Paket 1), kebijakan investasi yang menarik (Paket 2), penurunan tarif listrik, BBM, akses masyarakat terhadap kredit, perampingan perizinan pemerintah untuk tanah dan investasi (Paket 3), semangat pembangunan yang berfokus pada rakyat (Paket 4), insentif pajak, revaluasi aset dan pemberdayaan perbankan syariah (Paket 5), pemberdayaan ekonomi perifer, kemudahan akses terhadap air bersih dan pengobatan impor (Paket 6), percepatan sertifikasi tanah dan insentif terhadap industri padat karya (Paket 7), kebijakan satu-peta nasional, pengembangan kilang minyak dan nol bea impor untuk impor pesawat (Paket 8), percepatan pembangunan infrastruktur listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan logistik desa-kota (Paket 9), perlindungan terhadap UKM dan pembatasan kepemilikan saham asing (Paket 10), serta peningkatan kapasitas daya saing nasional di tingkat global (Paket 11) dan penyederhanaan prosedur, konsumsi waktu dan biaya administratif untuk tujuan-tujuan bisnis di Indonesia. Selain mengeluarkan seri paket kebijakan ini, tugas penting berikutnya adalah untuk memastikan bahwa masing-masing kebijakan tidak bertentangan dan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara tepat dan tepat waktu.

<sup>56</sup> Indonesia mengalami tiga lapisan reformasi selama periode ini: pertama, sistem politik militer otoriter digantikan oleh sistem multi-partai demokratis; kedua, peran dominan pemerintah dalam perekonomian bergerak menuju sistem ekonomi berbasis pasar dan globalisasi ekonomi terbuka; ketiga, Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi yang luas dan dahsyat dengan memberikan kekuasaan politik dan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Untuk memelihara kesatuan Indonesia, Aceh dan Papua menerima hak otonomi khusus dalam urusan agama, adat istiadat dan lembaga setempat, pendidikan dan kebijakan pembangunan daerah (Nasution, 2016).

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia &amp; Australia (1961-2014)

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia.<sup>57</sup>

Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki rata-rata lebih tinggi dari Australia, angka per kapita Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Australia lebih besar dari Indonesia. Indonesia, dengan per kapita PNB dari US\$3.630 (2014) diklasifikasikan sebagai Negara Berpendapatan Menengah Bawah, sementara Australia dengan per kapita PNB US\$64.600 (2014) dikategorikan Negara Berpenghasilan Tinggi. Menurut model pertumbuhan Solow, negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Data menunjukkan bahwa Australia telah menjadi negara berpendapatan tinggi sejak akhir dasawarsa 1980-an, sementara beberapa perkiraan mengklaim Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi sekitar tahun 2030, Meskipun perekonomian Indonesia berukuran besar, cukup besar untuk keanggotaan dalam kelompok G-20, Indonesia masih tertinggal jauh di belakang Australia dalam hal ukuran ekonomi penting lainnya seperti per kapita PNB. **Tabel 1** di bawah ini menunjukkan PNB Indonesia dan Australia dalam US\$ antara 1964 dan 2014.

Tabel 1. PNB per Kapita Indonesia &amp; Australia (1964-2014) dalam US\$ saat ini

TAHUN	AUSTRALIA	INDONESIA	AKSELERASI PNB PER KAPITA AUSTRALIA	AKSELERASI PNB PER KAPITA INDONESIA
1964	2.070	60	Tidak ada	Tidak ada
1974	5.890	170	1,85	1,83
1984	11.920	550	1,02	2,24
1994	18.750	880	0,57	0,60
2004	25.490	1.080	0,36	0,23
2014	64.600	3.630	1,53	2,36

Sumber: Dihitung dengan menggunakan Indikator Pembangunan Dunia.

<sup>57</sup> <http://data.worldbank.org/products/wdi>.

Pola percepatan ekonomi antara Indonesia dan Australia 1964-2014 menunjukkan beberapa kesamaan. Hal ini sejalan dengan pergerakan harga dunia untuk minyak dan gas, mineral, logam dan komoditas primer lainnya yang menunjukkan bahwa kedua negara telah memperoleh manfaat dari ekspor produk primer (pertanian dan pertambangan).<sup>58</sup> Seperti terlihat pada **Tabel 1**, kedua ekonomi menunjukkan puncak pada 1970 dan pertengahan 1980-an. Pertumbuhan ekonomi kemudian melambat dari pertengahan dasawarsa 1990-an sampai pertengahan dasawarsa 2000-an, kemudian menaik dari pertengahan 2000-an sampai baru-baru ini.

Kesamaan antara Indonesia dan Australia dikonfirmasi lebih jauh berdasarkan pengukuran elastisitas untuk PDB harga konstan kedua negara seperti yang dijelaskan dalam **Tabel 2**.

**Tabel 2. Elastisitas Harga Konstan PDB antara Indonesia and Australia (1967-1998 dan 1999-2014)**

ELASTISITAS PDB KONSTAN	1967 – 1998		1999 – 2014	
	INDONESIA	AUSTRALIA	INDONESIA	AUSTRALIA
Indonesia		-0,1		1,64***
Australia	-0,46		0,57***	
$R^2$	0,05	0,05	0,94	0,94

*Sumber: Dihitung dengan menggunakan Indikator Pembangunan Dunia.*

Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, hubungan ekonomi Indonesia-Australia lebih kompetitif dibandingkan komplementer. Namun secara statistik, hubungan itu tidak signifikan. Bahkan di hari-hari terakhir presiden Soeharto, dua negara tetangga, menunjukkan hubungan ekonomi yang lebih besar dengan negara-negara lain yang secara geografis lebih jauh dibandingkan Indonesia-Australia (Hill, 2000). Kurangnya keterlibatan antara Indonesia dan Australia dapat dikonfirmasi oleh bukti empiris seperti jumlah kunjungan kenegaraan bilateral. Selama era Presiden Soeharto, hanya ada dua kunjungan pejabat negara ke Australia, yaitu pada 1972 ke Canberra dan 1975 ke Townsville. Selama periode yang sama, Perdana Menteri Australia melakukan sembilan kunjungan resmi ke Indonesia.<sup>59</sup>

Namun, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam hubungan ekonomi sejak awal 2000-an setelah terjadi serangkaian reformasi dan deregulasi di Indonesia. pemodelan statistik menunjukkan bahwa kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dan positif sejak awal abad ke-21, dan bahwa ekonomi Indonesia telah memiliki dampak yang lebih besar pada Australia dibandingkan dengan sebaliknya. Hal ini dapat dilihat sebagai tanda awal bahwa perekonomian Indonesia jadi lebih penting untuk Australia dan juga dapat dilihat sebagai sinyal yang kuat untuk kedua negara (pemerintah, pemimpin bisnis dan masyarakat pada umumnya) bahwa sekarang adalah waktu bagi kedua negara untuk lebih meningkatkan dan mengakselerasi hubungan diantara mereka.

Bahkan, kedua negara telah melakukan upaya untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan mengatasi kekurangan historis dalam keterlibatan antara dua ekonomi terbesar di kawasan ini.

<sup>58</sup> Kedua Negara mengalami dampak negative dari penurunan global harga produk primer pertanian dan pertambangan pada akhir 2000-an.

<sup>59</sup> Perdana Menteri Gorton (1968), Perdana Menteri MacMahon (1972), Perdana Menteri Whitlam (1973, 1974), Perdana Menteri Fraser (1976), Perdana Menteri Hawke (1983), Perdana Menteri Keating (1992,1994) dan Perdana Menteri Howard (1996).



Sejak tahun 2000, frekuensi kunjungan resmi meningkat lebih dari dua kali lipat yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 dan 2012, dan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, Pada periode yang sama, Perdana Menteri Australia telah mengunjungi Indonesia sebanyak empat belas kali.<sup>60</sup>

## ➤ **TINGKAT PRODUKTIVITAS YANG BERBEDA**

Faktor produktivitas Australia lebih besar dari Indonesia seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 3**. Dalam hal ukuran ekonomi (PDB), Australia yang punya populasi lebih rendah ketimbang Indonesia (23 juta dibandingkan dengan 254 juta pada 2014) menghasilkan PDB US\$1,45 milyar (2014), jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia di US\$0,89 milyar (2014 ). Ini menegaskan bahwa Australia dengan PNB per tahun per kapita US\$64.600 (2014) lebih produktif daripada Indonesia dengan PNB US\$3.630, Selanjutnya, dalam hal nilai tukar (ER), PNB riil Indonesia per kapita (PPP) lebih tinggi dari PNB nominal per kapita Indonesia (di ER nominal), berkebalikan dengan Australia. Hal ini menunjukkan bahwa Rupiah bernilai lebih rendah terhadap dolar AS, sementara dolar Australia dinilai terlalu tinggi. Ini menegaskan bahwa ekonomi Australia lebih kuat daripada Indonesia dalam hal daya saing global. Dua indikator penting lainnya juga mengkonfirmasi kerangka kerja dan produktivitas Australia, yaitu Credit Rating dan Indeks Pembangunan Manusia. Australia memegang indeks tinggi dari segi lembaga ekonomi dengan rating kredit AAA dan indikator produktivitas 0,935 HDI (peringkat kedua di dunia).

Tabel 3. **Indikator Makroekonomi Komparatif antara Indonesia & Australia**

INDIKATOR 2014	INDONESIA	AUSTRALIA
Ranking Indeks Pembangunan Manusia (HDI)	110 (0,68)	2 (0,935)
Peringkat Kredit (S&P;M;F)	BB+;Baa3:BBB-	AAA;Aaa;AAA
Populasi (juta)	254	23
Kepadatan Penduduk (meter persegi)	140	3
PDB pada harga pasar (juta US\$ saat ini)	888.538	1.454.675
PNB per Kapita (US\$ saat ini)	3.630	64.600
PNB per Kapita (PPP US\$)	10.190	44.700
Pertumbuhan PDB (% tahunan)	5,02	0,96
Inflasi, harga konsumen (% tahunan)	6	2,5
Tingkat bunga riil (%)	7	4,5
Perdagangan terhadap PDB (%)	48	42
Tingkat tarif, negara yang paling disukai, rerata sederhana, produk manufaktur (%) 2013	7,2	3,3
Tingkat tarif, negara yang paling disukai, rerata sederhana, semua produk (%) 2013	6,7	2,7

	Data Indonesia lebih tinggi dari Australia
	Data Australia lebih tinggi dari Indonesia

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia dan berbagai sumber.

<sup>60</sup> Perdana Menteri Howard pada 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; Perdana Menteri Rudd pada 2007, 2008, 2013; Perdana Menteri Gillard pada 2010, 2012; Perdana Menteri Abbott pada 2013 dan dua kali pada 2014, dan Perdana Menteri Turnbull pada 2015.

Dari perspektif kelembagaan, Australia mengadopsi kerangka kerja institusional canggih Inggris sejak awal. Hal ini meningkatkan tingkat ekonomi Australia melalui faktor pertumbuhan endogenya (McLean, 2004). Sementara itu, Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja kelembagaan ekstraktif (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001) yang membutuhkan reformasi jangka panjang dari waktu ke waktu (Resosudarmo, Verico & Pasaribu, 2015). Faktor kelembagaan ini menaikkan tingkat kualitas manusia dan produktivitas untuk Australia sehinggaymeningkatkan kekayaan Australia dalam hal tingkat tabungan, tingkat modal dan PNB per kapita. Mengingat kemajuan yang terus berlangsung secara signifikan dalam hubungan ekonomi antara kedua negara, data menunjukkan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk belajar bagaimana meningkatkan produktivitas dari Australia, termasuk transfer pengetahuan, pengetahuan, dan pengembangan kelembagaan.

### ➤ **POTENSI HUBUNGAN EKONOMI YANG SALING MENGUNTUNGKAN**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan tingkat pembangunan ekonomi Australia menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Tapi berkaitan dengan proses negosiasi ekonomi bilateral, Indonesia perlu bekerja lebih keras daripada Australia. Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalah perlindungan kuota karena kuota yang lebih berbahaya daripada tarif.<sup>61</sup> Perlindungan lainnya, seperti tarif, peraturan dan prosedur perdagangan, hambatan teknis perdagangan, hambatan pada manusia natural, pembatasan FDI, dan komunikasi dan pertukaran informasi, juga perlu dibahas. Selama 1970, Indonesia dan Australia merupakan negara pelindung (Anderson & Garnaut, 1987; Basri & Hill, 2004). Namun, proteksi tarif Australia telah menurun lebih cepat dari Indonesia. Australia mulai menjadi lebih terbuka dan kurang pelindung, termasuk perlindungan terhadap produk Indonesia, sejak 1980-an (Ander anak & Garnaut, 1987). Harus dicatat, bahwa meskipun Indonesia lebih protektif dalam hal tingkat tarif daripada Australia, dalam hal keterbukaan ekonomi (perdagangan terhadap PDB) Indonesia lebih tinggi daripada Australia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat tarif Indonesia lebih tinggi daripada Australia, indikator keterbukaan perdagangan Indonesia tetap lebih tinggi daripada Australia. Hal ini mengindikasikan bahwa, dibandingkan dengan Australia, perekonomian Indonesia lebih tergantung pada ekonomi eksternal.

Di sektor pertanian, Australia lebih maju dalam hal metode, sistem, dan modal. Namun, Indonesia memiliki ekspor pertanian yang lebih tinggi sebagai suatu bagian dari ekspor barang dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor manufaktur Indonesia masih lemah karena daya saing ekspor yang rendah. Ekspor manufaktur perlu perbaikan dalam iklim investasi, biaya melakukan bisnis, pengembangan sumber daya manusia (tenaga kerja terampil khususnya) serta persyaratan berpandangan ke luar dengan visi jangka panjang untuk meningkatkan ekspor dan investasi. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor makanan dan minuman menimbang estimasi indeks makanan dan minuman IMF lebih tinggi dibandingkan dengan mineral dan pertambangan.<sup>62</sup> Namun, meskipun ada fakta bahwa Indonesia memiliki pangsa yang lebih tinggi dengan nilai tambah terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, Australia memiliki produktivitas yang jauh lebih baik dengan nilai tambah pertanian per pekerja setinggi US\$50.498 per tahun dibandingkan dengan di Indonesia US\$1.079 per tahun. Selanjutnya, indikator sektor industri dan manufaktur menunjukkan bahwa Australia dapat mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi tanpa menjadi ekonomi industri. Ini berarti bahwa, selain dari belajar bagaimana cara meningkatkan produktivitas, pengalaman Australia bisa jadi model yang berharga bagi Indonesia tentang bagaimana cara mengembangkan ekonominya dan menjadi

<sup>61</sup> Undang-undang Perdagangan Indonesia No. 7/2014 Pasal 69 (2).

<sup>62</sup> The IMF, *World Economic Outlook: Too Slow for Too Long*, April 2016.

negara berpenghasilan tinggi melalui pendekatan pembangunan sektor non-industri. Ini adalah salah satu faktor kunci yang disebut ‘pembangunan kapasitas’ IA-CEPA seperti misal berbagi keterlibatan dalam pengetahuan dan pengetahuan antara Australia dan Indonesia.<sup>63</sup>

Sektor manufaktur dan industri di Indonesia berkinerja lebih baik daripada Australia, tetapi dalam hal tingkat nilai tambah, manufaktur dan industri sektor Australia lebih baik daripada Indonesia, termasuk produk agroindustri maupun farmasi. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dalam hal nilai tambah dan daya saing global untuk ekspor, Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Australia, tetapi dalam hal andil ekspor teknologi tinggi terhadap PDB, Australia lebih baik dari Indonesia.

Tingkat kualitas sumber daya manusia (IPM), produktivitas (nilai tambah per kapita) dan kinerja lembaga ekonomi (yaitu peringkat kredit) yang lebih tinggi juga pada Australia tercermin dalam kinerja sektor jasa komparatif. Kemungkinan menjadi negara berpenghasilan tinggi tanpa harus menjadi negara industri, akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk belajar bagaimana meningkatkan peran sektor jasa dalam ekonomi, termasuk kapasitas ekspor.

Indonesia memiliki potensi ekspor barang ICT yang lebih besar ke Australia karena Indonesia mencatat persentase yang lebih tinggi untuk total ekspor barang dibandingkan dengan Australia (lihat **Tabel 4**). Namun Indonesia perlu belajar dari Australia untuk mengembangkan pasar keuangan termasuk sektor jasa asuransi. Sementara itu, di pasar derivatif, seperti dapat dilihat dalam daya saing sektor jasa keuangan, Indonesia cukup jauh di belakang Australia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan daya saing sektor riil sebagai kondisi yang diperlukan sebelum mencapai sektor keuangan dan arus masuk investasi yang tinggi dan kuat dalam jangka panjang.

Tabel 4. **Indikator Makroekonomi Komparatif antara Indonesia dan Australia dalam Sektor Jasa (2014)**

INDIKATOR 2014	INDONESIA	AUSTRALIA
Jasa, dll, nilai tambah (% dari PDB)	42	71
Perdagangan jasa (% dari PDB)	6	8
Ekspor barang TIK (% dari total ekspor barang)	3	1
Asuransi dan jasa keuangan (% dari ekspor layanan komersial)	1	6
Jasa ekspor (BoP, miliar US\$ saat ini)	24	54
Ekspor barang (BoP, miliar US\$ saat ini)	175	241
Perdagangan bersih barang dan jasa (BoP, miliar US\$ saat ini)	-3,03	-9,10

	Data Indonesia lebih tinggi dari Australia
	Data Australia lebih tinggi dari Indonesia

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia.

Dalam hal semua bentuk pasar modal, saham, FDI, dan arus bantuan bilateral, Australia jauh lebih maju daripada Indonesia. Adapun untuk arus bantuan bilateral, Indonesia menerima bantuan

<sup>63</sup> Misalnya Percontohan Tenaga Kerja Terampil IA-CEPA yang direkomendasikan oleh IA-BPG (Australia-Indonesia Centre, *Succeeding Together*, 2015, November).

asing yang signifikan dari Australia. Australia merupakan donor luar negeri Indonesia yang terbesar pada tahun 2014, sedangkan Australia tidak menerima dana donor asing dari Indonesia.

Tabel 5. **Indikator Makroekonomi Komparatif antara Indonesia dan Australia dalam Pasar Keuangan (2014)**

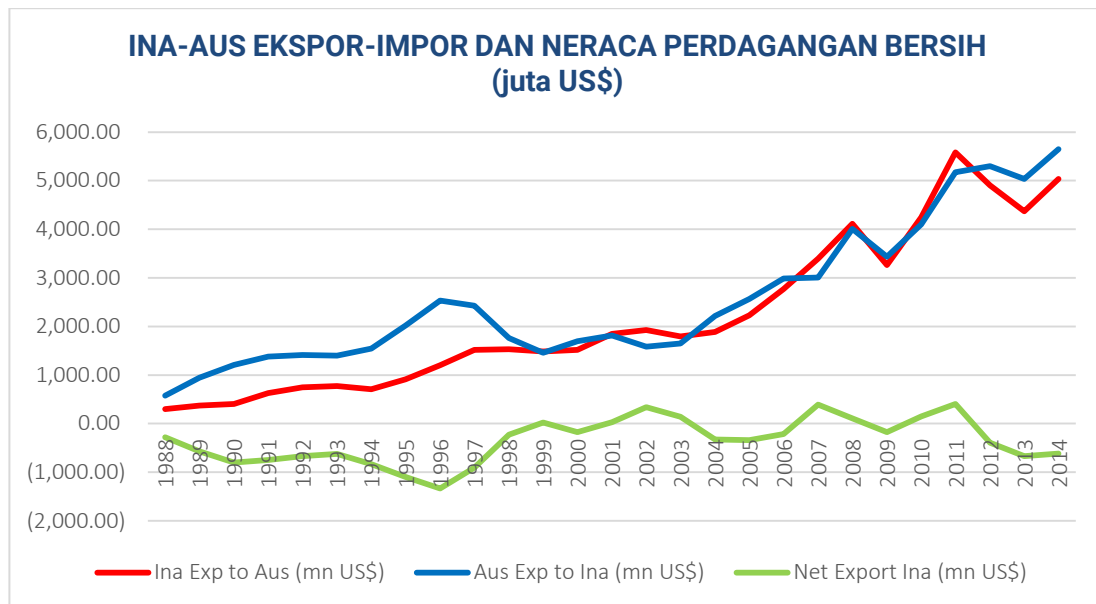
INDIKATOR 2014	INDONESIA	AUSTRALIA
Perusahaan domestik terdaftar, total	506	1.967
Saham diperdagangkan, nilai total (miliar US\$ saat ini)	91	703
Saham diperdagangkan, nilai total (% dari PDB)	10	48
Investasi asing langsung, arus masuk bersih (BoP, miliar US\$ saat ini)	26	46
Arus bantuan bilateral bersih dari donor DAC, Australia (miliar US\$ saat ini) Peringkat 1 di 2014	0,45	Donor

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia.

## HUBUNGAN BISNIS KE BISNIS: TINJAUAN HUBUNGAN PERDAGANGAN

Ada dua indikator utama yang mewakili hubungan ‘bisnis ke bisnis’ antarnegara, termasuk hubungan bilateral. Yang pertama adalah arus barang atau perdagangan, dan yang kedua adalah arus jasa dan investasi. Selanjutnya, ada indikator ketiga, arus manusia atau kehadiran manusia natural seperti wisatawan dari Australia di Indonesia dan mahasiswa dari Indonesia di Australia. Adapun untuk pola perdagangan, sebelum tahun 2000, neraca perdagangan bersih antara Indonesia dan Australia selalu negatif yang berarti impor Indonesia dari Australia lebih tinggi daripada ekspor Indonesia ke Australia. Sejak tahun 2000, Indonesia telah sesekali mencatat neraca perdagangan bersih positif dengan Australia. Ini menegaskan temuan sebelumnya bahwa elastisitas PDB antara Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa Indonesia jadi semakin penting untuk Australia. Pola dapat dilihat di bawah ini:

Grafik 2. Neraca Perdagangan Bersih antara Indonesia &amp; Australia (1988-2014)



Sumber: Indikator Pembangunan Dunia.

### ➤ HUBUNGAN PERDAGANGAN

Data tentang surplus perdagangan kedua negara menunjukkan bahwa Australia mencatat surplus perdagangan sebagian besar produk yang berhubungan dengan makanan seperti sereal, gula, hewan hidup, daging dan produk susu, sedangkan catatan surplus perdagangan Indonesia terutama produk terkait non-perdagangan seperti mineral, besi dan artikel baja, logam, kayu, kertas, karet, pakaian, dan furniture (Resosudarmo, Verico & Pasaribu, 2015). Temuan ini menunjukkan bahwa potensi Indonesia dan Australia untuk membangun hubungan perdagangan yang sangat saling melengkapi sedang berkembang. Hal ini akan memerlukan analisis yang lebih rinci dengan menggunakan indeks untuk memperoleh indeks yang lebih jelas setelah mengamati neraca perdagangan bersih.

Indeks yang digunakan adalah RCA (*Revealed Comparative Advantage*) dan CMSA (*Constant Market Share Analysis*). Hasil-hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada **Sub Lampiran 1**.<sup>64</sup>

Analisis menemukan bahwa Australia memiliki kinerja yang lebih besar di tingkat global untuk hewan hidup, sayuran, dan produk kimia anorganik, sedangkan produk-produk kompetitif Indonesia lebih bervariasi selain produk yang mirip dengan Australia (yaitu hewan seperti ikan, sayuran, serta produk makanan dan minuman jadi) seperti misal produk kayu, pulp dan kertas, pakaian dan tekstil, alas kaki, nikel, timah, dan alat musik. Kedua negara kuat dalam produk mineral dan produk jadi lainnya yang dapat dimakan. Serupa dengan temuan sebelumnya oleh Resosudarmo, Verico dan Pasaribu (2015), perhitungan keunggulan komparatif statis dan dinamis menggunakan 2,015 Data menegaskan bahwa Indonesia memiliki lebih banyak variasi dalam produk kompetitif dari Australia dan keduanya saling melengkapi satu sama lain.

<sup>64</sup> Produk ini diklasifikasikan sebagai "Bagus" jika memiliki RCA lebih dari 1 (satu) dan Sektor Perbandingan Faktor lebih dari 0 (nol), "Menantang" jika memiliki RCA lebih dari 1 (satu) dan Sektor Perbandingan Faktor kurang dari 0 (nol), "Potensial" jika memiliki RCA kurang dari 1 (satu) dan Sektor Perbandingan Faktor lebih dari 0 (nol) dan 'Tidak ada' jika memiliki RCA kurang dari 1 (satu) dan Sektor Perbandingan faktor kurang dari 0 (nol).

Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama ekonomi dan jaringan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan dengan negara-negara Asia Timur. ASEAN telah menerapkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Jepang, Korea, dan Tiongkok, dan karena itu Indonesia mendapat keuntungan penting dari keikutsertaannya dalam jaringan produksi Asia Tenggara untuk memenuhi impor yang diminta oleh Australia (Hill, 1990). Hubungan perdagangan ini memiliki potensi untuk dikembangkan ke tingkat berikutnya dengan memfasilitasi investasi Australia di Indonesia untuk menghasilkan produk yang diminta oleh konsumen Australia tapi yang dapat diproduksi lebih efisien di Indonesia. Di bawah IA-CEPA, jaringan produksi ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi permintaan pasar lokal di kedua negara, tetapi juga permintaan pasar dunia yang dikenal sebagai rantai nilai global.<sup>65</sup> Kerjasama ekonomi yang lebih kuat dengan Indonesia akan memberi manfaat bagi Australia mengingat fakta bahwa Indonesia adalah ekonomi terbesar kedua dari segi ukuran PDB (39%) dan penduduk (42%) di Asia Tenggara dan, kerjasama ekonomi ASEAN telah bergerak dari perdagangan dengan arus bebas jasa, investasi, dan orang di Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak awal 2016, IA-CEPA maupun AANZFTA, membantu kedua negara dalam mengembangkan hubungan bilateral satu sama lain, dan dengan rantai pasokan global.

### ➤ **JARINGAN PRODUKSI**

Dari perspektif Indonesia, jaringan regional plus menyediakan manfaat ekonomi yang lebih banyak, terutama arus masuk investasi asing, daripada arus bilateral dan sub-regional seperti IMT-GT<sup>66</sup>, BIMP<sup>67</sup>, ITRO<sup>68</sup> dan kawasan ASEAN (Verico, K., 2013)<sup>69</sup>. Adapun untuk kawasan ASEAN, integrasi ekonomi telah berubah dari berfokus pada integrasi perdagangan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) menjadi integrasi investasi dan layanan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) sejak awal 2016.

Seperti yang ditunjukkan oleh temuan-temuan empiris sebelumnya, Indonesia menerima banyak manfaat ekonomi dari jaringan regional-plus, dan anggota ASEAN diharapkan mendapatkan manfaat lebih dari AEC pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu untuk mengamati kemungkinan dampak 'tabrakan' antara AEC dan TPP (*Trans-Pacific Partnership*), karena, pertama, Indonesia dan Australia adalah negara anggota kerangka kerja ASEAN-plus seperti AANZFTA dan RCEP. Kedua, karena Australia adalah anggota pendiri dari TPP, sedangkan Indonesia masih di luar itu, meskipun ada aspirasi baru untuk bergabung dengan TPP. Ketiga, kohesi ASEAN dalam menghadapi tantangan yang disajikan oleh TPP, di mana beberapa negara ASEAN adalah anggota sedangkan negara ASEAN yang lain bukan anggota, adalah hal yang sangat penting untuk integrasi

<sup>65</sup> Misalnya, jaringan ekonomi antara Indonesia dan Australia dalam memproduksi daging dan produk ternak (Australia-Indonesia Centre, *Succeeding Together 2015*, November).

<sup>66</sup> IMT GT terdiri dari 14 provinsi di Thailand Selatan (Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, Phuket); 8 negara bagian di semenanjung Malaysia (Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis and Selangor); 10 provinsi di Pulau Sumatera di Indonesia (Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, and Sumatera Barat). Lihat rinciannya <http://www.imtgt.org/>

<sup>67</sup> Perjanjian terhadap Brunei adalah cakupan penuh; dan awalnya provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Itu kemudian diperluas untuk mencakup semua provinsi di Kalimantan Tengah dan Selatan; Sulawesi Tengah, Selatan dan Tenggara; Irian Jaya; dan Maluku), Malaysia (Wilayah Persekutuan Labuan dan Negara bagian Sabah dan Sarawak) dan Filipina (Seluruh pulau Mindanao dan provinsi Palawan). Rincian di <http://www.bimp-eaga.org/>

<sup>68</sup> Lihat K. Verico (2013). *Economic Cooperation in Natural Rubber: Impacts on Natural Rubber's World Supply and Indonesia's Economy*. Asian Journal of Agriculture and Development, 10(2), 75-93.

<sup>69</sup> Lihat K. Verico (2013). *The Impacts of Discriminative Trade Arrangements on Foreign Direct Investment and Foreign Trade in Southeast Asia during the 1988–2008 Period (PhD abstract)*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 49(2), 238-239.

ekonomi ASEAN. Hal ini diharapkan memperluas divergensi ekonomi antaranggota ASEAN seperti Indonesia yang berada di luar TPP, dan negara-negara yang telah bergabung seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Salah satu indikator yang ditunjuk tentang bagaimana Indonesia dan Australia diposisikan dalam jaringan TPP adalah Global Value Chain (GVC) karena jaringan tersebut merupakan jaringan yang mencakup Indonesia dan Australia (lihat **Sub Lampiran 2**). Hal ini menunjukkan bahwa di bawah klasifikasi TPP GVC, semua indikator utama Indonesia dan Australia memiliki pola yang sama: Jarak Permintaan Akhir punya indikator sedang, Jumlah Tahapan Produksi Dalam Pasar Domestik & Pasar Internasional punya indikator sedang dan rendah, serta Indeks Partisipasi Maju & Mundur punya indikator tinggi dan rendah. Selanjutnya, dalam Indeks Partisipasi, Indonesia dan Australia mengadakan koneksi pelengkap.

IndikatorGVC ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pemasok penting untuk proses produksi Australia karena posisi Indonesia berada di tiga negara teratas dalam indeks mundur Australia <sup>70</sup> (lihat **Tabel 6** berikut). Dataset CEIC menunjukkan bahwa Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan barang dengan Australia dalam hal Besi dan Baja (bahan baku), sedangkan Australia mencatat surplus perdagangan terhadap Indonesia dalam hal Besi dan Baja (produk akhir). Ini menegaskan ikatan yang kuat antara kedua negara sebagai mitra dagang, meskipun Indonesia bukan mitra dagang utama bagi Australia dan sebaliknya. Kedua negara memiliki jaringan ekonomi yang saling melengkapi dan, pada awal abad ke-21, besarnya jaringan ini meningkat lebih jauh.

Tabel 6. **Indeks Partisipasi Mundur Australia dalam GVC**

NEGARA	PARTISIPASI GVC MUNDUR	
	NEGARA	PEMASOK ASING UTAMA
Australia	United States	10,4
	China	7,9
	Indonesia	5,7
Indonesia	Saudi Arabia, Kingdom of	11,7
	China	10,4
	Japan	8,3

Sumber: Disusun dengan menggunakan data statistik Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

## ➤ **INVESTASI JANGKA PANJANG (ARUS MASUK FDI)**

Suatu penelitian pada 2015 oleh Institut Penelitian Sosial Ekonomi menemukan bahwa, jika Indonesia membentuk perjanjian ekonomi bilateral dengan negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Australia, maka diharapkan memperoleh manfaat jika perjanjian bilateral dapat meningkatkan arus masuk FDI. Dalam hal arus masuk FDI, investor utama di Indonesia adalah para anggota ASEAN (Fukuoka & Verico 2015). Namun, Australia memiliki potensi untuk menjadi investor utama di Indonesia karena keberadaan AANZFTA. Kedua kerangka ekonomi (bilateral dan ASEAN-plus) bersama-sama dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan

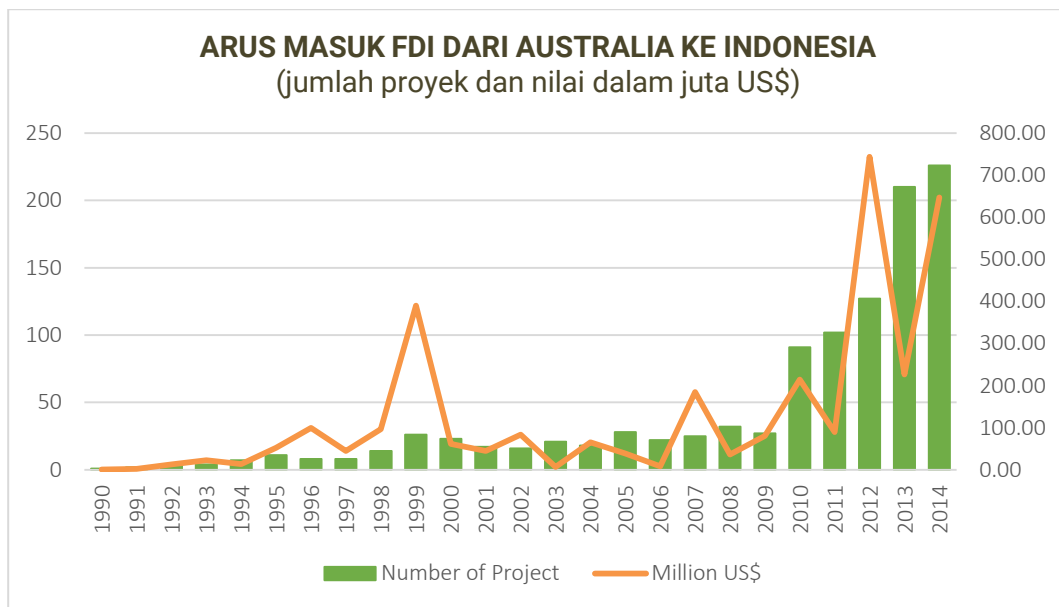
<sup>70</sup> Memungkinkan bagi Indonesia dan Australia untuk mencapai jaringan produksi yang berkelanjutan di sektor pertanian dan pertambangan menyusul kelimpahan dukungan energi yang ada di Indonesia, seperti melalui pemanfaatan hidropower dari Indonesia Timur. Secara geografis, Indonesia sangat strategis bagi aktivitas pelayaran Australia dari Australia ke Asia Timur dan sebaliknya melalui Laut Arafuru.



TPP (jika Indonesia menjadi anggota) akan meningkatkan hubungan investasi antara Australia dan Indonesia.

Arus masuk FDI Australia untuk Indonesia tetap di bawah investor besar lainnya di Indonesia seperti ASEAN, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan, namun kemajuan cukup signifikan, terutama sejak tahun 2000. Ada peningkatan kepercayaan pada pihak investor Australia dalam perekonomian Indonesia dan hal ini bagus untuk masa depan ekonomi Indonesia, karena arus masuk FDI berdampak positif pada produktivitas dan nilai tambah. Jumlah proyek telah meningkat secara signifikan dan nilai investasi FDI juga meningkat besar dari rata-rata kurang dari Rp100 juta per tahun sebelum 2010 menjadi lebih dari US\$400 juta per tahun sejak 2010.

Grafik 3. **Arus Masuk FDI dari Australia ke Indonesia (1990-2014)**



Sumber: Disusun dengan menggunakan data BKPM Indonesia.

Saat ini, lima sektor utama bagi para investor FDI Australia di Indonesia adalah bahan kimia dan farmasi, pertambangan, logam, hotel dan restoran, dan jasa perdagangan, seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. **Sepuluh Besar Sumber Arus Masuk FDI dari Australia ke Indonesia Berdasarkan Sektor pada 2009-2013 (juta US\$)**

SEKTOR	ANDIL FDI PADA 2009-2013	PERINGKAT
Industri Kimia dan Farmasi	834,12	1
Pertambangan	204,10	2
Industri Logam, Mesin, & Elektronik	77,85	3
Hotel & Restaurant	21,28	4
Perdagangan & Perbaikan	21,15	5
Konstruksi	10,25	6
Industri Metallic Non Mineral	9,69	7
Transportasi, Gudang & Komunikasi	6,53	8
Industri makanan	5,18	9
Real Estate, Ind. Estate & Kegiatan Usaha	4,42	10

Sumber: Diklasifikasikan dengan menggunakan data BKPM Indonesia.

### ➤ KONTRIBUSI AUSTRALIA DALAM PASAR JASA KEUANGAN INDONESIA

Dari segi sektor jasa keuangan Indonesia, setidaknya dua bank terbesar Australia telah menjalankan operasi di Indonesia, yaitu ANZ dan Commonwealth bank. Kedua bank tersebut memiliki anak perusahaan di Indonesia. Anak perusahaan yang ketiga, National Australia Bank, telah membuka kantor perwakilan di Indonesia. Menurut data 2014, dalam hal aset, PT Bank ANZ Indonesia memiliki sekitar 0,7% dari total aset perbankan di Indonesia, sementara PT Bank Commonwealth Indonesia sekitar 0,4%.<sup>71</sup> Dalam jasa asuransi, saat ini, ada dua perusahaan asuransi Australia yang beroperasi di Indonesia, yaitu Commonwealth Life yang 80% dimiliki oleh Commonwealth Bank of Australia dan PT Asuransi Parolamas yang 80% dimiliki oleh Insurance Australia Group. Data dari 2014 menunjukkan Commonwealth Life memiliki total aset sekitar Rp6,9 triliun atau sekitar 0,9% dari total aset asuransi di Indonesia dan PT Asuransi Parolamas memegang Rp271 miliar atau sekitar 0,03% dari total aset asuransi di Indonesia.<sup>72</sup>

## HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

Dari hubungan bisnis ke bisnis, hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Australia dapat dilihat dari pergerakan natural manusia yang dikenal sebagai Hubungan antar Manusia.<sup>73</sup> Makalah ini membahas dua indikator: arus pelajar dan arus wisatawan di antara kedua negara. Adapun untuk arus wisatawan, data seri waktu menunjukkan bahwa jumlah wisatawan Australia ke Indonesia telah meningkat secara signifikan selama 10 tahun terakhir.

### ➤ MAHASISWA INDONESIA DI AUSTRALIA DAN MAHASISWA AUSTRALIA DI INDONESIA

Jumlah mahasiswa Indonesia di Australia pada bulan Desember 2014 adalah sekitar 17,925, Dari jumlah tersebut, 55% di antaranya belajar di New South Wales. Jumlah mahasiswa Indonesia di

<sup>71</sup> Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan keuangannya.

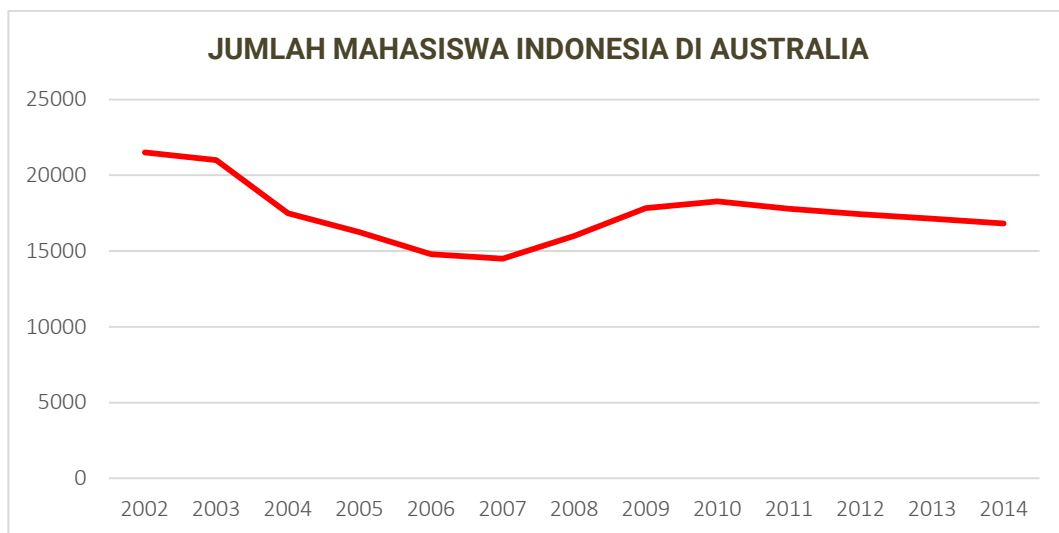
<sup>72</sup> Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan keuangannya.

<sup>73</sup> Lihat A. Missbach dan J. Purdey (eds.). *Linking People: Connections and Encounters between Australians and Indonesians*, (halaman 49-71), Melbourne: Australia.

Australia menduduki peringkat kesembilan di antara mahasiswa asing di Australia. Meskipun dekat dengan Australia, peringkat Indonesia masih di bawah peringkat Vietnam, Thailand, dan bahkan Nepal yang geografinya lebih jauh daripada Indonesia dan demografinya kurang padat ketimbang Indonesia (lihat **Sub Lampiran 3**).

Selama periode empat tahun (2011-2014), jumlah mahasiswa Indonesia di Australia stabil pada sekitar 17,000, Namun angka ini lebih rendah daripada masa puncak yang terjadi di awal tahun 2002 yaitu sekitar dua puluh ribu mahasiswa Indonesia. Tingkat terendah jumlah pelajar Indonesia di Australia terjadi pada tahun 2006 dan 2007 dengan kurang dari lima belas ribu siswa (lihat **Grafik 4**). Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara lain mencatat peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia, mungkin karena lebih tingginya jumlah program pendidikan dan nilai beasiswa yang ditawarkan oleh negara-negara tujuan lainnya.

Grafik 4. **Mahasiswa Indonesia di Australia (2002-2014)**



Sumber: Ilustrasi berdasarkan [https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Pages/InternationalStudentData2014.aspx#Pivot\\_Table](https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Pages/InternationalStudentData2014.aspx#Pivot_Table).

Pada 2014, dari 17.925 mahasiswa Indonesia, 47% terdaftar di Perguruan Tinggi (HE) dan 38% terdaftar di Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan (VET). Kebanyakan mahasiswa Indonesia memutuskan untuk pergi ke Australia untuk belajar keterampilan sektor manajemen, ilmu sosial, dan jasa seperti layanan restoran dan hotel alih-alih keterampilan yang terkait manufaktur atau rekayasa (lihat **Sub Lampiran 4 dan 5**). Hal ini memperkuat hipotesis awal bahwa orientasi ekonomi antara kedua negara sebagian besar didasarkan pada hubungan sektor jasa.

Di sisi lain, jumlah pelajar Australia di Indonesia relatif kecil yaitu sekitar 442 pelajar (2012). Data dari Departemen Pendidikan dan Pelatihan Australia tentang Rencana Colombo Baru pada 2012<sup>74</sup> menunjukkan bahwa dalam hal negara tujuan studi, Indonesia menduduki peringkat ke-15, sementara berdasarkan persentase, 1,9% dari siswa Australia ingin belajar di Indonesia. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan pada 2011 yaitu sebesar 2,2%.

<sup>74</sup> <https://internationaleducation.gov.au/research/Research-Snapshots/Documents/StudentMobility%202011-12.pdf>

## ➤ **WISATAWAN DAN PEKERJA AUSTRALIA DI INDONESIA DAN WISATAWAN INDONESIA DI AUSTRALIA**

Sangat tepat untuk mengamati aliran orang dari Australia ke Indonesia dalam konteks statistik pariwisata karena, pertama, kebanyakan orang Australia mengunjungi Indonesia untuk berwisata, dan, kedua, data kedatangan pariwisata dapat digunakan sebagai indikator proksi hubungan bisnis ke bisnis. Analisis ini menggunakan data yang membandingkan kedatangan orang Australia yang dibandingkan dengan pendatang dari negara-negara lain dan periode waktu yang dihabiskan di Indonesia oleh wisatawan Australia.

Statistik pariwisata Indonesia berdasarkan kebangsaan menunjukkan bahwa pada 2014, selain dari negara-negara ASEAN yang tidak memerlukan visa untuk masuk, wisatawan Australia menyumbang jumlah terbesar untuk pengunjung asing, di atas Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Periode waktu yang digunakan di Indonesia oleh Australia meningkat lebih dari dua kali lipat pada periode 1999-2014, Ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi tujuan pariwisata yang semakin menarik untuk Australia, dan bahwa lintasan hubungan antara kedua negara, sejak 2000, telah didominasi positif.

**Tabel 8. Jumlah Kunjungan Turis di Indonesia Berdasarkan Kebangsaan dan Tingkat Percepatan (1999-2014)**

KEBANGSAAN	2014	1999-2014
ASEAN	3.635.609	2,0
Jepang	505.175	0,8
Korea Selatan	352.004	1,5
Cina	1.052.705	58,9
Perancis	208.537	2,4
Jerman	184.463	1,0
Belanda	168.494	1,8
Inggris	244.594	1,6
Amerika Serikat	246.397	1,5
Australia	1.145.576	2,2

*Sumber: Disusun dengan menggunakan data CEIC.*

Data yang dikumpulkan sejak awal tahun 2000-an menunjukkan bahwa mayoritas warga Australia mengunjungi Indonesia untuk liburan (91% pada 2014, lihat **Tabel 9** di bawah ini). Perbandingan statistik itu dengan tingkat percepatan kunjungan misi resmi (6,09 dari 1999 sampai 2014) menegaskan bahwa sejak era Suharto<sup>75</sup>, Indonesia telah meningkatkan hubungan G2G formal dengan Australia. Peningkatan keseluruhan kunjungan oleh orang Australia menunjukkan pertemuan kepentingan rakyat dari kedua negara. Kunjungan untuk tujuan pendidikan juga mengalami percepatan sebesar 1,87 yang mewakili peningkatan jumlah siswa Australia yang ingin belajar di Indonesia. Tingkat ini bahkan lebih besar daripada kunjungan yang terkait bisnis sebesar 1,45.

<sup>75</sup> Selama era Suharto, Australia adalah anggota IGGI dan CGI dan baru aktif terlibat sebagai penyedia utama dalam pembangunan kapasitas Indonesia, baik di level institusi maupun masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dan program beasiswa.

Tabel 9. **Kedatangan Orang Australia di Indonesia Berdasarkan Tujuan (1999-2014)**

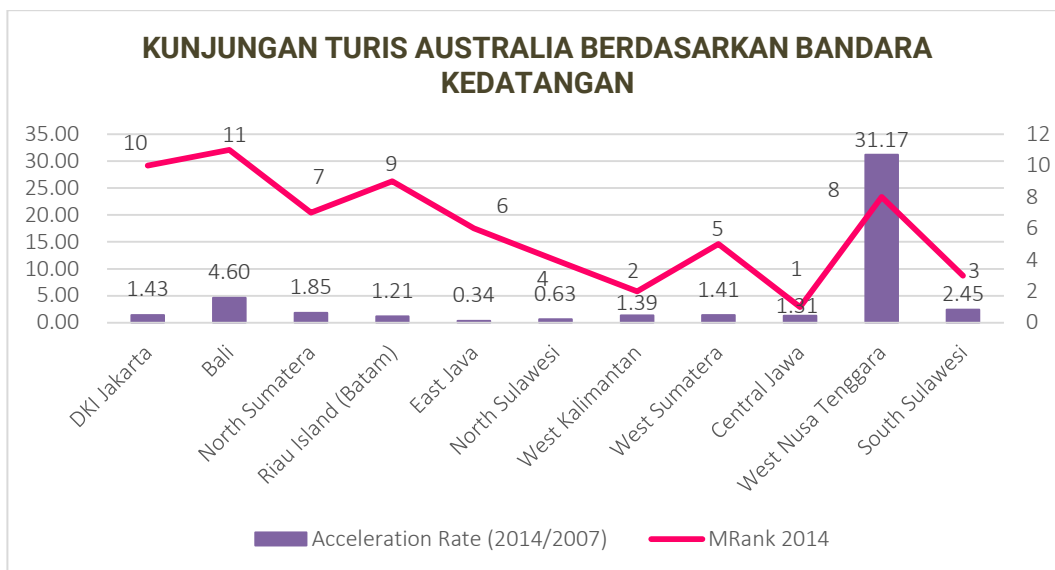
TUJUAN KEDATANGAN	1999	2014	% DARI TOTAL 2014	TINGKAT PERCEPATAN
Bisnis	59.035	85.483	8%	1,45
Misi resmi	338	2.058	0,2%	6,09
Konvensi	2.255	5.347	0,5%	2,37
Liburan	460.369	965.750	91%	2,10
Pendidikan	1.233	2.310	0,2%	1,87
<b>TOTAL</b>	<b>523.230</b>	<b>1.060.948</b>		

Sumber: Dihitung berdasarkan data CEIC.

Kedua negara perlu meningkatkan hubungan bisnis mereka karena tingkat percepatan kunjungan bisnis ada di titik terendah dibandingkan dengan kunjungan untuk tujuan lain. Mengingat banyaknya jumlah kunjungan wisatawan dari Australia ke Indonesia dan tujuan untuk meningkatkan hubungan bisnis di antara kedua negara, peluang yang signifikan mungkin ada untuk investasi Australia di sektor bisnis pariwisata dan bisnis terkait pariwisata di Indonesia seperti restoran, bar, *homestay*, taman rekreasi, toko-toko kerajinan, dan sebagainya; bukan hanya di Bali, tetapi di banyak destinasi pariwisata Indonesia lainnya juga.

Umumnya, warga Australia yang masuk ke Indonesia melalui Jakarta untuk tujuan bisnis dan Australia yang masuk melalui Bali untuk tujuan rekreasi. Data menunjukkan bahwa hampir 90% warga Australia masuk ke Indonesia melalui Bali, diikuti dengan orang-orang yang masuk melalui bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekitar 7,4%. Persentase yang serupa muncul ketika dikategorikan berdasarkan tujuan kunjungan: 91% untuk liburan dan 8% untuk bisnis. Menarik pula untuk dicatat, distribusi orang Australia yang masuk ke bandara Indonesia berdasarkan tingkat dan pertumbuhan. Dalam hal peringkat, Bali adalah nomor satu, tetapi dalam hal pertumbuhan, Nusa Tenggara Barat sebagai pintu masuk bagi pengunjung Australia telah meningkat 31 kali lipat antara 2007-2014 (lihat **Grafik 5** berikut).

Grafik 5. Kunjungan Turis Australia Berdasarkan Bandara Kedatangan, 2014 (MRank) &amp; 2007-2014 (AR)

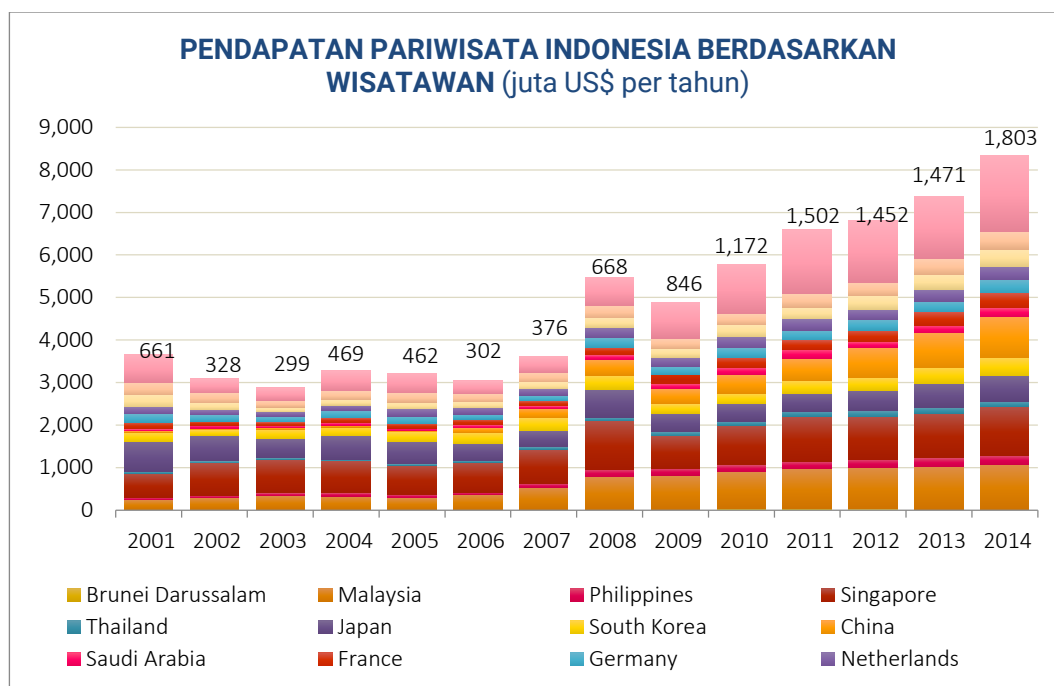


Catatan: MRank merupakan peringkat yang dimodifikasi di mana semakin tinggi peringkat maka semakin tinggi pula angkanya. Rumusnya adalah 12 dikurangi peringkat. Jika peringkatnya 1, maka MRank 11 (tetap tertinggi).

Sumber: Disusun dengan menggunakan data CEIC.

Dalam hal sumber pendapatan pariwisata bagi Indonesia, wisatawan Australia telah menjadi sumber terbesar pendapatan pariwisata selama lima tahun terakhir dengan lebih dari US\$1 miliar per tahun sejak 2009 dan hampir US\$2 miliar pada 2014. Nilai pendapatan ini lebih tinggi daripada turis dari Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang.

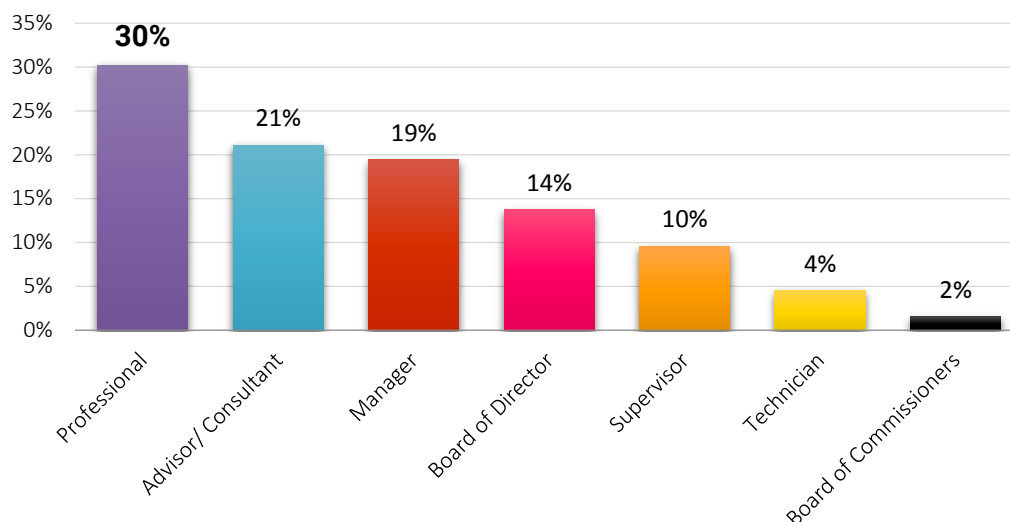
Grafik 6. Pendapatan Pariwisata Indonesia per Tahun (juta US\$), 2001-2014



Sumber: Ilustrasi sendiri berdasarkan data CEIC.

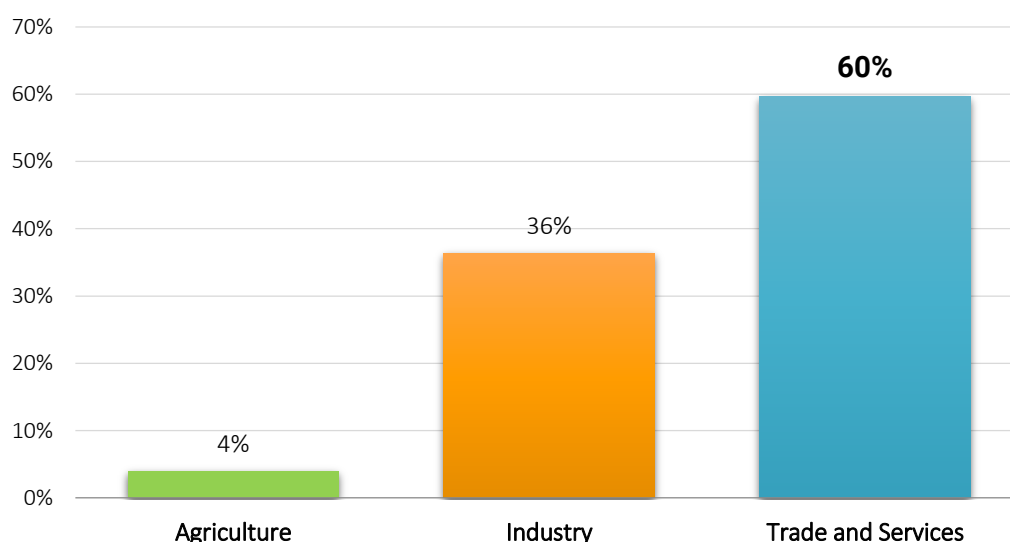
Adapun untuk pekerja Australia di Indonesia, data dari Direktorat Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia menunjukkan bahwa, pada Agustus 2014, pekerja Australia terdiri dari 2.503 individu, atau hanya 3,25% dari jumlah total pekerja asing di Indonesia. Selanjutnya, sebagian besar pekerja asing dikategorikan sebagai ‘profesional’ (30%), ‘penasihat atau konsultan’ (21%), atau ‘manajer’ (19%). Secara sektoral, 60% dari pekerja asing bekerja di sektor perdagangan dan jasa (lihat **Grafik 7 dan 8** di bawah ini).

**Grafik 7. Jumlah Pekerja Asing di Indonesia Berdasarkan Posisi (Agustus 2014)**



Sumber: Disusun dengan menggunakan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia.

**Grafik 8. Jumlah Pekerja Asing di Indonesia Berdasarkan Sektor (Agustus 2014)**



Sumber: Disusun dengan menggunakan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia.

Berdasarkan data 2014, kunjungan wisatawan Indonesia di Australia sekitar 150,000 per tahun, dan menyumbang 2,18% dari total pengunjung asing ke Australia. Hal ini menempatkan Indonesia di antara dua belas negara yang jadi sumber pengunjung asing. Berdasarkan tujuan kunjungan,



sebagian besar orang Indonesia mengunjungi Australia untuk liburan (45%), diikuti dengan mengunjungi teman atau kerabat (28%), bisnis (9%), pendidikan (6%), pekerjaan (4%), dan konvensi atau konferensi (3%).<sup>76</sup>

## PROYEKSI EKONOMI INDONESIA-AUSTRALIA

Meningkatkan hubungan antara ekonomi tetangga Indonesia dan Australia akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi kedua negara. **Tabel 2** di atas menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia telah membaik sejak krisis keuangan Asia dan era reformasi pasca-Soeharto di Indonesia. Kondisi ekonomi yang membaik dapat diamati dalam elastisitas pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan dari Australia ke Indonesia, dan sebaliknya, masing-masing tercatat 0,57 dan 1,64. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menghasilkan dampak yang lebih daripada Australia.

Jika kedua negara dapat mempertahankan atau meningkatkan hubungan ekonomi mereka, maka dampak ini bisa jadi lebih tinggi. Hal ini akan memerlukan kerjasama ekonomi yang serius, intens dan komprehensif, termasuk melalui saluran ekonomi bilateral. Analisis ini menganjurkan peningkatan berbagai saluran pemerintahan ke pemerintah, bisnis ke bisnis dan rakyat ke rakyat. Semua saluran ini akan berpengaruh pada hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia.

Dalam prospek ekonominya, bagian ini berlaku dua asumsi. Pertama, pemulihan ekonomi global secara bertahap, dan, kedua, variabel yang paling representatif untuk pandangan ini adalah variabel makroekonomi. Variabel itu meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat ekonomi PNB per kapita. Yang pertama menunjukkan kinerja ekonomi, sedangkan yang kedua menegaskan pencapaian ekonomi negara secara keseluruhan. Indikator-indikator sekunder pertumbuhan sektoral ekonomi, tingkat inflasi, perdagangan (ekspor dan impor), dan investasi (arus masuk FDI).

Bagian ini berfokus pada dampak masa depan perjanjian ekonomi bilateral pada kinerja ekonomi tetapi juga mempertimbangkan faktor penting lainnya seperti kondisi ekonomi dalam negeri. Proyeksi yang diberikan di sini didasarkan pada perkiraan ekonomi yang dibuat oleh IMF<sup>77</sup> dan perkiraan jangka panjang ekonomi Indonesia yang diambil dari laporan Visi Indonesia 2030.<sup>78</sup> Analisis ini menggunakan Indonesia sebagai patokan, dan menyesuaikan indikator Indonesia untuk memperkirakan efeknya pada perekonomian Australia, menimbang angka elastisitas pertumbuhan ekonomi pada **Tabel 2**. Oleh karena itu diasumsikan bahwa Australia layak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan percepatan ekonomi yang lebih tinggi di Indonesia.

Bagian ini menggunakan data seri waktu 1999-2015 dan memprediksi data 2016-2030. Ditemukan bahwa dengan membandingkan kedua periode, pertumbuhan ekonomi rata-rata jangka panjang Indonesia akan meningkat dari 5% (1999-2014) menjadi 7,4% (2016-2030), sedangkan pertumbuhan ekonomi Australia akan meningkat dari 3,1% (1999-2014) menjadi 3,6 % (2016-2030). Hal ini akan meningkatkan tingkat ekonomi PNB per kapita kedua negara. Indonesia diperkirakan memiliki PNB per kapita sekitar US\$10.385 pada 2030 dari US\$3.573 pada 2015, sedangkan Australia diperkirakan mencapai PNB per kapita sekitar US\$118.648 dari US\$60.070 pada 2015. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia akan naik tiga kali lipat selama 15 tahun ke depan, sementara Australia hampir dua kali lipat. Hal ini masuk akal karena tingkat ekonomi Indonesia masih di bawah kapasitas natural, sementara Australia yang diklasifikasikan sebagai Negara

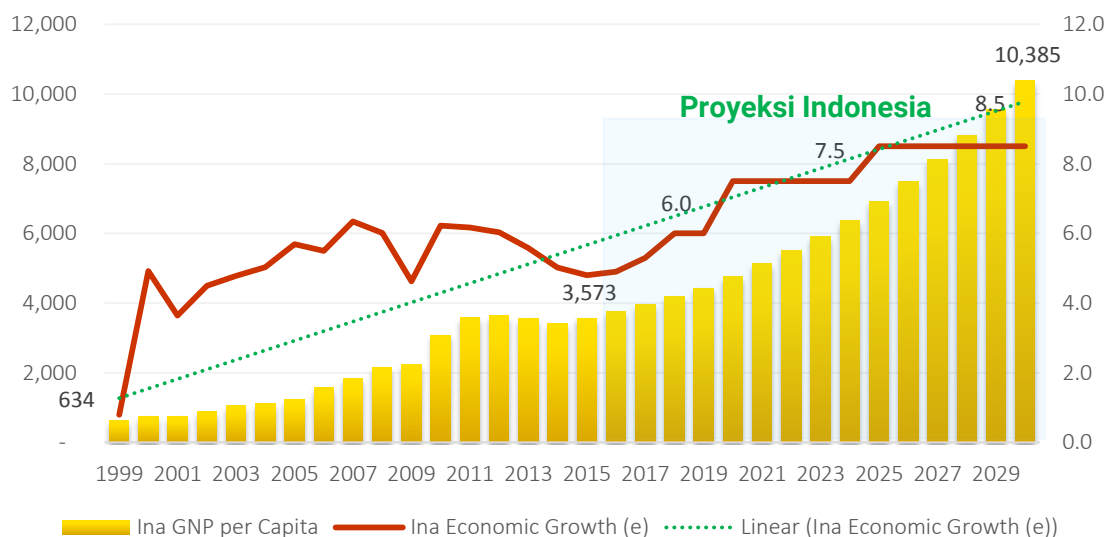
<sup>76</sup> Sumber: Australian Bureau of Statistics and author's calculations.

<sup>77</sup> The IMF, *World Economic Outlook: Too Slow for Too Long*, April 2016.

<sup>78</sup> YIF, *Visi Indonesia 2030*, 2007 (Penulis adalah salah satu co-author dalam laporan ini).

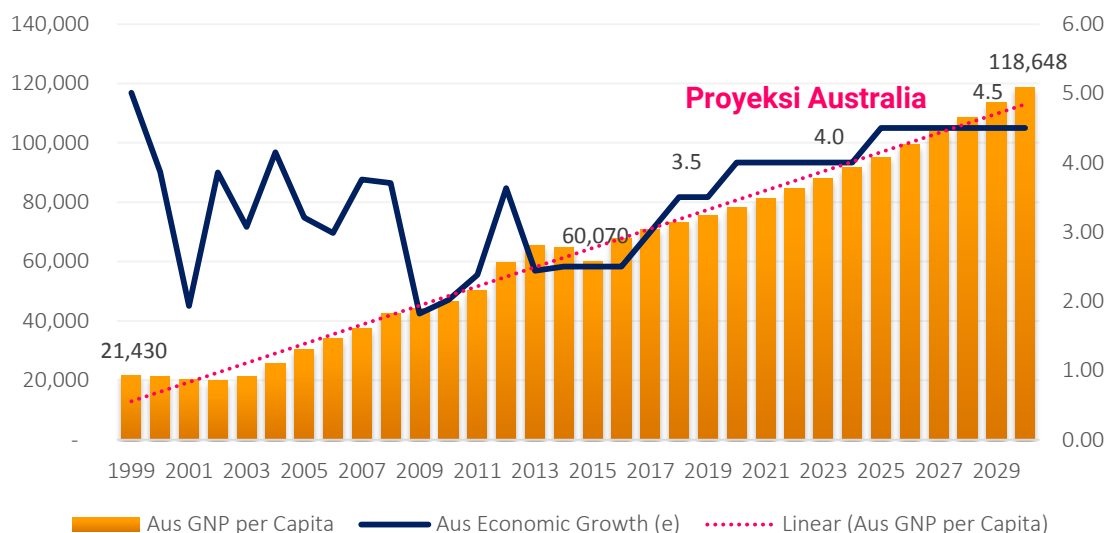
Berpendapatan Tinggi sudah mencapai kapasitas natural. Peningkatan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Australia merupakan faktor penting yang membuat proyeksi tersebut tercapai. Data lengkap tentang perkiraan ekonomi untuk Indonesia dan Australia, baik pertumbuhan ekonomi maupun PNB per kapita, dapat dilihat pada **Grafik 9 dan 10** di bawah ini.

**Grafik 9. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) dan PNB per Kapita (US\$ saat ini) 1999-2030**



Sumber: Dihitung dengan menggunakan statistik ADB dan data Bank Dunia tentang Indikator Pembangunan Dunia.

**Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi Australia (%) dan PNB per Kapita (US\$ saat ini) 1999-2030**



Sumber: Dihitung dengan menggunakan statistik ADB dan data Bank Dunia tentang Indikator Pembangunan Dunia.

Indonesia perlu meningkatkan sektor industri dalam rangka mencapai perkiraan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5% dari 2019 hingga 2024 dan 8,5% dari 2025 hingga 2030. Bagian ini membuat proyeksi pada beberapa variabel pendukung terpilih dari 2016 hingga 2024. Ini terbatas untuk 2024 karena, di luar itu, prediksi jadi kurang andal. Hasil lengkap proyeksi dapat dilihat pada **Sub Lampiran 6**.

Proyeksi pada **Sub Lampiran 6** menunjukkan bahwa, setelah penandatanganan perjanjian ekonomi bilateral, pertumbuhan ekonomi rata-rata di Indonesia dan Australia akan meningkat secara signifikan selama 10 tahun ke depan. Hasil perbandingan dari periode 1999 sampai 2015 dan dari 2016 hingga 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata akan meningkat dari 5% menjadi 6,6%, sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Australia akan meningkat dari 3,1% menjadi 3,6%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan di sektor jasa dan industri, masing-masing sebesar 8,3% (meningkat dari 6,4% pada periode sebelumnya) dan 7,1% (meningkat dari 4,3% pada periode sebelumnya). Sementara itu, pertumbuhan sektor pertanian akan tetap lebih rendah dari pertumbuhan total ekonomi, namun diperkirakan meningkat dari 3,4% menjadi 5,2%. Tingkat inflasi Indonesia diperkirakan tetap stabil pada 4% -4,5% yang rata-rata lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya dari 9,4% menjadi 4,2%. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Indonesia selama 10 tahun ke depan akan lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Hal ini menegaskan peningkatan produktivitas ekonomi di Indonesia. Di sisi penawaran, Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur dan analisis ini memperkirakan Indonesia perlu meningkatkan belanja pemerintah untuk infrastruktur dari 0,92% PDB pada 2013 menjadi 6,82% PDB pada 2024. Dalam perdagangan, ekspor Indonesia ke Australia akan meningkat dari 5,3% menjadi 7%, sedangkan impor dari Australia akan meningkat dari 5,4% menjadi 6%. Secara total, ekspor Indonesia ke Australia akan sedikit lebih tinggi daripada impor dari Australia. Hal ini dimungkinkan jika Australia meningkatkan arus masuk FDI-nya di sektor produksi Indonesia dan kemudian mengimpor produk buatan Indonesia kembali ke Australia. Jaringan produksi ini akan menjadi mungkin jika proporsi arus masuk FDI Australia di Indonesia tumbuh dari 0,1% menjadi 0,6%.

## Sub Lampiran 1

# ANALISIS RCA DAN CMSA INDONESIA DAN AUSTRALIA (2015)

Australia memiliki produk yang 'bagus'
  Indonesia memiliki produk yang 'bagus'
  Kedua negara memiliki produk yang 'bagus'
  Kedua negara tidak memiliki produk yang 'bagus'

HS-2	HEWAN HIDUP; PRODUK HEWAN	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'01	Hewan hidup	0,03	-58.343	Tidak ada	5,81	311.790	Great
'02	Daging dan jeroan daging	0,02	1.772	Potensial	7,49	2.730.401	Great
'03	Ikan, krustasea, moluska, invertebrata air	2,87	336.780	Bagus	0,87	-63.047	Tidak ada
'04	Produk susu, telur, madu, produk hewani yang dapat dimakan	0,56	177.668	Potensial	2,11	-183.235	Menantang
'05	Produk yang berasal dari hewan	0,26	11.387	Potensial	2,06	115.223	Bagus

HS-2	PRODUK NABATI	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'06	Pohon hidup, tanaman, umbi, akar, bunga potong, dll	0,10	-977	Tidak ada	0,04	-4.559	Tidak ada
'07	Sayuran dan akar dan umbi-umbian tertentu yang dapat dimakan	0,15	-3.106	Tidak ada	1,92	415.874	Bagus
'08	Buah, kacang-kacangan, kulit dari buah jeruk, melon yang dapat dimakan	0,48	-14.264	Tidak ada	1,15	712.084	Bagus
'09	Kopi, teh, mate, dan rempah-rempah	4,67	650.795	Bagus	0,08	2.489	Potensial
'10	Sereal	0,08	70.070	Potensial	5,59	-438.121	Menantang
'11	Produk penggilingan, malt, pati, inulin, gluten gandum	0,28	-46.213	Tidak ada	3,11	-6.623	Menantang
'12	Minyak biji, buah-buahan oleat, biji-bijian, biji, buah, dll, neto	0,36	63.490	Potensial	1,75	-358.618	Menantang
'13	Lac, gusi, resin, sap sayuran, dan ekstrak sayuran, neto	1,36	43.623	Bagus	0,14	5.105	Potensial
'14	Sayur bahan anyaman, produk nabati, neto	10,49	29.061	Bagus	0,02	16	Potensial

HS-2	LEMAK DAN MINYAK HEWAN ATAU NABATI DAN PRODUK-PRODUK PECAHANNYA; LEMAK SIAP MAKAN; MALAM HEWANI ATAU NABATI	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'15	Hewan, lemak dan minyak nabati, produk pecahannya, dll	18,24	-1.066.628	Menantang	0,60	30.816	Potensial

HS-2	MAKANAN JADI; MINUMAN, MINUMAN SULING, DAN CUKA; TEMBAKAU DAN MANUFAKTUR PENGGANTI TEMBAKAU	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'16	Olahan makanan daging, ikan, dan makanan laut	2,43	339.926	Bagus	0,23	-19.968	Tidak ada
'17	Gula dan kembang gula	0,53	66.066	Potensial	0,39	-45.915	Tidak ada
'18	Kakao dan kakao olahan	2,97	-56.721	Menantang	0,32	-49.644	Tidak ada
'19	Sereal, tepung, pati, olahan susu, dan produk	1,06	36.325	Bagus	0,83	-176.472	Tidak ada
'20	Sayuran, buah, kacang, dll olahan makanan	0,68	136.663	Potensial	0,18	-74.561	Tidak ada
'21	Olahan makanan lain-lain yang bisa dimakan	1,12	92.941	Bagus	1,32	431.833	Bagus
'22	Minuman, minuman suling (spirit), dan cuka	0,07	-76.552	Tidak ada	1,56	-276.027	Menantang
'23	Residu, limbah industri makanan, pakan ternak	1,00	165.957	Bagus	0,57	-134.932	Tidak ada
'24	Tembakau dan manufaktur pengganti tembakau	1,65	-34.169	Menantang	0,11	-71.647	Tidak ada

HS-2	PRODUK MINERAL	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'25	Garam, belerang, bumi, batu, plester, kapur, dan semen	0,52	67.978	Potensial	0,91	50.472	Potensial
'26	Bijih, terak, dan abu	2,38	-677.121	Menantang	25,78	-2.389.232	Menantang
'27	Bahan bakar mineral, minyak, produk distilasi, dll	2,15	738.687	Bagus	2,27	5.393.400	Bagus

HS-2	PRODUK INDUSTRI KIMIA ATAU INDUSTRI SEJENIS	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'28	Bahan kimia anorganik, senyawa logam mulia, isotop	0,55	129.042	Potensial	4,32	857.040	Bagus
'29	Bahan kimia organik	0,54	-1.171.440	Tidak ada	0,06	89.297	Potensial
'30	Produk farmasi	0,10	84.735	Potensial	0,30	-2.290.740	Tidak ada
'31	Pupuk	0,43	-87.715	Tidak ada	0,38	-66.396	Tidak ada
'32	Tanning, ekstrak pencelupan, tanin, turunan, pigmen, dll	0,75	288.605	Potensial	0,75	-83.341	Tidak ada

HS-2	PRODUK INDUSTRI KIMIA ATAU INDUSTRI SEJENIS	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'33	Minyak esensial, parfum, kosmetik, perlengkapan mandi	0,52	-58.666	Tidak ada	0,40	-37.455	Tidak ada
'34	Sabun, pelumas, lilin, lilin, pasta pemodelan	1,10	-218.678	Menantang	0,26	-16.288	Tidak ada
'35	Aluminides, pati yang dimodifikasi, lem, enzim	0,16	-11.657	Tidak ada	0,57	-99.544	Tidak ada
'36	Bahan peledak, kembang api, pertandingan, piroforik, dll	0,04	-13.291	Tidak ada	0,55	-15.838	Tidak ada
'37	Barang fotografi atau sinematografi	0,01	1.075	Potensial	0,07	-11.111	Tidak ada
'38	Produk kimia lain	1,75	-439.143	Menantang	0,18	-109.636	Tidak ada

HS-2	PLASTIK DAN PRODUK PLASTIK; KARET DAN PRODUK KARET	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'39	Plastik dan produk plastik	0,38	-343.126	Tidak ada	0,13	-141.531	Tidak ada
'40	Karet dan produk karet	4,02	-3.631.143	Menantang	0,10	26.442	Potensial

HS-2	KULIT DAN JANGAT MENTAH, KULIT OLAHAN, KULIT BERBULU DAN PRODUK-PRODUKNYA; PELANA DAN KEKANG; PERLENGKAPAN TRAVEL, TAS DAN WADAH SERUPA; BARANG-BARANG DARI USUS HEWAN	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'41	Jangat dan kulit mentah (selain kulit bulu) dan kulit olahan	0,43	2.364	Potensial	2,76	-79.472	Menantang
'42	Barang dari kulit, usus binatang, kekang, barang wisata	0,71	203.736	Potensial	0,07	-5.022	Tidak ada
'43	Kulit bulu dan bulu buatan, manufaktur darinya	0,02	472	Potensial	0,06	3.596	Potensial

HS-2	KAYU DAN BARANG DARI KAYU; KAYU ARANG; GABUS DAN BARANG DARINYA; MANUFAKTUR JERAMI, ESPARTO ATAU BAHAN ANYAMAN LAINNYA; KERANJANG DAN BARANG ANYAMAN	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'44	Kayu dan barang dari kayu, arang kayu	3,43	811.776	Bagus	0,85	-59.553	Tidak ada
'45	Gabus dan barang dari gabus	0,00	-201	Tidak ada	0,03	-1.890	Tidak ada
'46	Manufaktur bahan anyaman, keranjang anyaman, dll	3,33	24.098	Bagus	0,01	-225	Tidak ada

HS-2	PULP DARI KAYU ATAU BAHAN SELULOSA BERSERAT LAINNYA; KERTAS ATAU KERTAS KARTON (SAMPAH DAN SISA); KERTAS DAN KARTON DAN BARANG DARINYA	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'47	Pulp dari kayu, bahan selulosa berserat, sampah kertas, dll	4,94	836.165	Bagus	0,37	-33.972	Tidak ada
'48	Kertas dan kertas karton, barang pulp, kertas dan karton	2,11	-137.863	Menantang	0,43	19.252	Potensial
'49	Buku, koran, gambar, dll	0,07	-3.438	Tidak ada	0,44	-16.556	Tidak ada

HS-2	TEKSTIL DAN BARANG TEKSTIL	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'50	Sutra	0,01	169	Potensial	0,09	1.686	Potensial
'51	Wol, bulu hewan, benang bulu kuda dan kain darinya	0,02	300	Potensial	14,70	-148.341	Menantang
'52	Kapas	1,35	111.711	Bagus	1,31	-1.193.221	Menantang
'53	Sayuran serat tekstil jaring, benang kertas, kain tenun	0,29	-4.634	Tidak ada	0,01	-598	Tidak ada
'54	Filamen buatan manusia	1,73	-551.715	Menantang	0,03	-8.402	Tidak ada
'55	Serat stapel buatan manusia	5,00	-426.737	Menantang	0,03	-11.786	Tidak ada
'56	Wadding (wadding), felt, bukan tenunan, benang, benang pintal, dll	0,69	33.406	Potensial	0,19	10.503	Potensial
'57	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya	0,44	1.050	Potensial	0,20	-15.332	Tidak ada
'58	Tenunan khusus atau kain berumbai, renda, permadani dll	0,37	-4.600	Tidak ada	0,02	-2.950	Tidak ada
'59	Kain tekstil resap, berlapis, atau laminasi	0,49	1.188	Potensial	0,07	-7.256	Tidak ada
'60	Rajutan atau kain kaitan	0,21	-26.819	Tidak ada	0,02	-9.278	Tidak ada
'61	Barang dari pakaian, aksesoris, rajutan atau merenda	2,17	1.088.420	Bagus	0,03	-29.909	Tidak ada
'62	Barang dari pakaian, aksesoris, tidak merajut atau merenda	2,22	298.538	Bagus	0,03	-27.149	Tidak ada
'63	Barang tekstil buatan, set pakaian, pakaian yang dikenakan dll	0,40	-56.326	Tidak ada	0,16	4.270	Potensial

HS-2	ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, PAYUNG HUJAN, PAYUNG PANAS, TONGKAT JALAN, TONGKAT DUDUK, CAMBUK, PECUT DAN BAGIAN-BAGIANNYA; BULU OLAHAN DAN BARANG DARINYA; BUNGA BUATAN; BARANG DARI RAMBUT MANUSIA	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'64	Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya, bagiannya	4,22	1.822.339	Bagus	0,04	-1.142	Tidak ada
'65	Tutup kepala dan bagiannya	0,32	-5.431	Tidak ada	0,09	-6.431	Tidak ada



HS-2	ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, PAYUNG HUJAN, PAYUNG PANAS, TONGKAT JALAN, TONGKAT DUDUK, CAMBUK, PECUT DAN BAGIAN-BAGIANNYA; BULU OLAHAN DAN BARANG DARINYA; BUNGA BUATAN; BARANG DARI RAMBUT MANUSIA	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'66	Payung, tongkat jalan, kursi-tongkat, cambuk, dll	0,09	-30	Tidak ada	0,02	-1.225	Tidak ada
'67	Kulit burung, bulu, bunga buatan, rambut manusia	4,10	1.495	Bagus	0,01	81	Potensial

HS-2	BARANG DARI BATU, PLESTER, SEMEN, ASBES, MIKA ATAU BAHAN SEMACAM ITU; PRODUK KERAMIK; KACA DAN GLASSWARE	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'68	Batu, gips, semen, asbes, mika, dll barang	0,28	-56.748	Tidak ada	0,08	-14.897	Tidak ada
'69	Produk keramik	0,67	-86.739	Tidak ada	0,11	-10.614	Tidak ada
'70	Kaca dan gelas	0,48	-88.230	Tidak ada	0,15	7.287	Potensial

HS-2	MUTIARA ALAM ATAU BUDIDAYA, BATU PERMATA ATAU SEMI-MULIA, LOGAM MULIA, LOGAM DILAPISI LOGAM MULIA DAN BARANG DARINYA; PERHIASAN IMITASI; KOIN	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'71	Mutiara, batu mulia, logam, koin, dll	0,83	2.507.976	Potensial	1,74	-3.998.115	Menantang

HS-2	LOGAM DASAR DAN BARANG DARI LOGAM DASAR	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'72	Besi dan baja	0,41	413.831	Potensial	0,25	-413.523	Tidak ada
'73	Barang dari besi atau baja	0,40	-662.029	Tidak ada	0,19	-135.902	Tidak ada
'74	Tembaga dan barang darinya	1,05	-1.287.434	Menantang	1,89	-203.726	Menantang
'75	Nikel dan barang darinya	4,67	285.183	Bagus	0,64	-507.924	Tidak ada
'76	Aluminium dan barang darinya	0,31	-291.553	Tidak ada	1,79	-1.492.348	Menantang
'78	Timbal dan barang darinya	0,34	7.813	Potensial	10,46	-24.181	Menantang
'79	Seng dan barang darinya	0,05	3.981	Potensial	4,81	-91.755	Menantang
'80	Nikel dan barang darinya	32,44	457.287	Bagus	0,11	-2.319	Tidak ada
'81	Logam dasar lainnya, cermet ini, barang darinya	0,07	7.746	Potensial	0,87	18.499	Potensial
'82	Alat, alat, alat pemotong, dll dari logam tidak mulia	0,13	7.811	Potensial	0,20	-129.298	Tidak ada

HS-2	LOGAM DASAR DAN BARANG DARI LOGAM DASAR	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'83	Barang lain-lain dari logam tidak mulia	0,20	-171.232	Tidak ada	0,13	-25.494	Tidak ada
HS-2	MESIN DAN MECHANICAL APPLIANCES; PERALATAN LISTRIK; BAGIANNYA; PEREKAM SUARA DAN REPRODUKSI, GAMBAR TELEVISI IMAGE DAN SUARA PEREKAM DAN REPRODUKSI, DAN BAGIAN SERTA AKSESORI BARANG TERSEBUT	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'84	Mesin, nuklir reaktor, boiler, dll	0,35	1.393.930	Potensial	0,23	-399.198	Tidak ada
'85	Listrik, peralatan elektronik	0,49	-641.553	Tidak ada	0,10	-482.630	Tidak ada
HS-2	KENDARAAN, PESAWAT, KAPAL DAN PERALATAN ASOSIASI TRANSPORT	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'86	Kereta api, trem lokomotif, rolling stock, peralatan	0,02	-12.866	Tidak ada	0,23	-13.732	Tidak ada
'87	Kendaraan selain kereta api, trem	0,41	1.922.587	Potensial	0,17	-212.606	Tidak ada
'88	Pesawat, pesawat ruang angkasa, dan bagiannya	0,03	-204.713	Tidak ada	0,36	-119.362	Tidak ada
'89	Kapal, perahu dan struktur terapung lainnya	0,54	-107.058	Tidak ada	0,21	134.898	Potensial
HS-2	OPTIK, FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, UKUR, PENELITIAN, PRESISI, INSTRUMEN DAN PERANGKAT MEDIS ATAU BEDAH; JAM DAN ARLOJI; ALAT-ALAT MUSIK; BAGIAN-BAGIANNYA DAN AKSESORINYA	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'90	Optik, foto, teknis, medis, aparat dll	0,26	761.983	Potensial	0,44	-180.621	Tidak ada
'91	Jam dan arloji dan bagiannya	0,05	12.303	Potensial	0,18	16.111	Potensial
'92	Alat musik, bagian dan aksesoris	12,39	278.679	Bagus	0,12	1.416	Potensial
HS-2	SENJATA DAN AMUNISI; BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'93	Senjata dan amunisi, bagian-bagian dan perlengkapannya	0,00	-2.259	Tidak ada	0,53	-5.193	Tidak ada

HS-2	BARANG PRODUKSI LAIN-LAIN	RCA Ina 2015	SCF INA 2011-2015	Kelas	RCA Aus 2015	SCF AUS 2011-2015	Kelas
'94	Furniture, pencahayaan, rambu-rambu, bangunan prafabrikasi	0,90	-138.279	Tidak ada	0,08	-46.134	Tidak ada
'95	Mainan, game, keperluan olahraga	0,85	444.517	Potensial	0,24	-8.269	Tidak ada
'96	Barang manufaktur lainnya	0,70	-94.941	Tidak ada	0,09	-6.498	Tidak ada
'97	Karya seni, barang kolektor dan barang antik	0,10	10.895	Potensial	0,25	-61.006	Tidak ada
'99	Komoditas yang tidak dirinci	0,30	841.692	Potensial	1,71	-1.720.223	Menantang



## Sub Lampiran 2

# INDIKATOR RANTAI NILAI GLOBAL INDONESIA & AUSTRALIA DALAM KONTEKS TPP

NEGARA	JARAK PERMINTAAN FINAL	JUMLAH TAHAPAN PRODUKSI		INDEKS PARTISIPASI	
		DOMESTIK	INTER-NASIONAL	KE DEPAN	KE BELAKANG
Australia	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah
Kanada	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Chili	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah
Jepang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah
Mexico	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
Selandia Baru	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
Amerika Serikat	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
Cina	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
Indonesia	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah
Brunei Darussalam	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
Malaysia	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Singapura	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi
Viet Nam	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
Rata-rata	2,1	1,6	0,3	23,7	23,6
Max	2,9	2,3	0,8	49,9	33,8
Min	1,6	1,3	0,1	11,3	11,5
Standar Deviasi	0,4	0,2	0,2	12,4	8,5

Sumber: Disusun dengan menggunakan data statistic OECD.

## Sub Lampiran 3

**PELAJAR ASING DI AUSTRALIA PER NEGARA BAGIAN/KAWASAN (2014)**

PERINGKAT	KEBANGSAAN	NSW	VIC	QLD	SA	WA	TAS	NT	ACT	NAT	TOTAL
1	Cina	59.675	49.376	17.834	11.785	7.064	1.431	136	5.531	66	152.898
2	India	13.756	28.824	11.751	3.404	4.146	364	200	645	6	63.096
3	Viet Nam	9.495	13.692	2.840	1.348	2.028	86	96	511	25	30.121
4	Korea Selatan	13.102	4.357	6.582	1.016	1.856	192	71	822	18	28.016
5	Thailand	16.558	5.205	2.324	265	869	92	75	245	9	25.642
6	Brazil	9.549	2.741	6.176	1.017	2.600	9	9	121	45	22.267
7	Malaysia	4.019	8.976	2.676	1.859	3.448	643	18	428	4	22.071
8	Nepal	10.432	3.697	2.351	342	804	235	185	121	13	18.180
9	Indonesia	9.760	4.964	890	412	1.487	20	142	248	2	17.925
10	Pakistan	5.522	6.367	775	237	1.351	60	73	348	0	14.733
11	Lainnya	67.936	47.687	43.725	9.041	20.503	1.438	890	3.421	270	194.911
	<b>TOTAL</b>	<b>219.804</b>	<b>175.886</b>	<b>97.924</b>	<b>30.726</b>	<b>46.156</b>	<b>4.570</b>	<b>1.895</b>	<b>12.441</b>	<b>458</b>	<b>589.860</b>

Sumber: [https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Pages/InternationalStudentData2014.aspx#Pivot\\_Table](https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Pages/InternationalStudentData2014.aspx#Pivot_Table)

#### Sub Lampiran 4

### PELAJAR INDONESIA DI AUSTRALIA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (2011-2014)

TINGKAT PENDIDIKAN	2011	2012	2013	2014
Pendidikan Tinggi (HE)	9,321	9,009	8,707	8,471
Kejuruan (VET)	5,685	5,930	5,898	6,810
Sekolah	304	289	267	230
ELICOS	1,739	1,568	1,603	1,762
Tak berijazah	789	636	633	652
<b>TOTAL</b>	<b>17,838</b>	<b>17,432</b>	<b>17,108</b>	<b>17,925</b>

Catatan: Pendidikan Tinggi = pendidikan universitas; Kejuruan = pendidikan dan pelatihan kejuruan; ELICOS = *English Language Intensive Courses for Overseas Students* (Program Intensif Bahasa Inggris untuk Pelajar Asing); Sekolah = pendidikan dasar dan menengah.

Sumber: [https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Pages/InternationalStudentData2014.aspx#Pivot\\_Table](https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Pages/InternationalStudentData2014.aspx#Pivot_Table)

## Sub Lampiran 5

# MAHASISWA DAN SISWA KEJURUAN DI AUSTRALIA BERDASARKAN BIDANG STUDI (2013)

BIDANG	MAHASISWA	%	BIDANG	SISWA KEJURUAN	%
Manajemen & Perdagangan	4,091	47%	Manajemen & Perdagangan	3,270	55%
Masyarakat & Budaya	805	9%	Makanan, Perhotelan dan Jasa Pribadi	1,589	27%
Teknik & Teknologi Terkait	752	9%	Teknologi Informasi	423	7%
Ilmu Pengetahuan Alam dan Fisika	710	8%	Masyarakat & Budaya	228	4%
Seni Rupa Kreatif	708	8%	Seni Rupa Kreatif	116	2%
Teknologi Informasi	569	7%	Teknik & Teknologi Terkait	90	2%
Kesehatan	272	3%	Program Bidang Campuran	52	1%
Arsitektur & Bangunan	228	3%	Kesehatan	44	1%
Pendidikan	194	2%	Arsitektur & Bangunan	40	1%
Kualifikasi Ganda	191	2%	Pertanian, Lingkungan dan Studi Terkait	40	1%
Pertanian, Lingkungan dan Studi Terkait	115	1%	Pendidikan	26	0%
Program Bidang Campuran	56	1%	Ilmu Pengetahuan Alam dan Fisika	6	0%
Makanan, Perhotelan dan Jasa Pribadi	16	0%	Kualifikasi Ganda	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8,707</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5,924</b>	<b>100%</b>

Sumber: Disusun dengan menggunakan data Kedutaan Besar Indonesia di Canberra.



## Sub Lampiran 6

# PROYEKSI MAKROEKONOMI PILIHAN

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA	TINGKAT INFLASI INDONESIA (PDB Deflator)	PERTUMBUHAN PERTANIAN INDONESIA	PERTUMBUHAN INDUSTRI INDONESIA	PERTUMBUHAN JASA INDONESIA	PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA KE AUSTRALIA (Barang & Jasa)	PERTUMBUHAN IMPOR INDONESIA DARI AUSTRALIA (Barang & Jasa)	PROPORSI FDI AUSTRALIA DI INDONESIA	PERTUMBUHAN EKONOMI AUSTRALIA
1999	0,8	14,2	2,2	2,0	-1,0	-31,8	-40,7	0,2	5,0
2000	4,9	9,6	1,9	5,9	5,2	26,5	25,9	0,0	3,9
2001	3,6	14,3	3,3	2,7	4,9	0,6	4,2	0,0	1,9
2002	4,5	5,9	3,4	4,3	5,2	-1,2	-4,2	0,6	3,9
2003	4,8	5,5	3,8	3,8	6,4	5,9	1,6	0,0	3,1
2004	5,0	8,6	2,8	3,9	7,1	13,5	26,7	0,0	4,1
2005	5,7	14,3	2,7	4,7	7,9	16,6	17,8	0,0	3,2
2006	5,5	14,1	3,4	4,5	7,3	9,4	8,6	0,0	3,0
2007	6,3	11,3	3,5	4,7	9,0	8,5	9,1	0,1	3,8
2008	6,0	18,1	4,8	3,7	8,7	9,5	10,0	0,0	3,7
2009	4,6	8,3	4,0	3,6	5,8	-9,7	-15,0	0,0	1,8
2010	6,2	8,2	3,0	4,9	8,4	15,3	17,3	0,0	2,0
2011	6,2	7,5	3,9	6,3	8,4	14,8	15,0	0,0	2,4
2012	6,0	3,8	4,6	5,3	6,8	1,6	8,0	0,1	3,6
2013	5,6	4,7	4,2	4,2	6,5	4,2	1,9	0,0	2,4
2014	5,0	5,4	4,2	4,2	6,1	1,0	2,2	0,0	2,5
2015	4,8	5,3	3,0	4,2	6,5	5,0	4,0	0,0	2,5
2016	4,9	3,6	3,0	4,2	6,5	5,0	4,0	0,4	2,5
2017	5,3	3,7	4,0	6,0	7,0	6,0	5,0	0,5	3,0
2018	6,0	4,0	5,0	7,0	8,0	6,0	5,0	0,6	3,5
2019	6,0	4,0	5,0	7,0	8,0	6,0	5,0	0,6	3,5
2020	7,5	4,5	6,0	8,0	9,0	8,0	7,0	0,7	4,0

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA	TINGKAT INFLASI INDONESIA (PDB Deflator)	PERTUMBUHAN PERTANIAN INDONESIA	PERTUMBUHAN INDUSTRI INDONESIA	PERTUMBUHAN JASA INDONESIA	PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA KE AUSTRALIA (Barang & Jasa)	PERTUMBUHAN IMPOR INDONESIA DARI AUSTRALIA (Barang & Jasa)	PROPORSI FDI AUSTRALIA DI INDONESIA	PERTUMBUHAN EKONOMI AUSTRALIA
2021	7,5	4,5	6,0	8,0	9,0	8,0	7,0	0,7	4,0
2022	7,5	4,5	6,0	8,0	9,0	8,0	7,0	0,7	4,0
2023	7,5	4,5	6,0	8,0	9,0	8,0	7,0	0,7	4,0
2024	7,5	4,5	6,0	8,0	9,0	8,0	7,0	0,7	4,0
<b>Average 1999- 2015</b>	5,0	9,4	3,4	4,3	6,4	5,3	5,4	0,1	3,1
<b>Average 2016- 2024</b>	6,6	4,2	5,2	7,1	8,3	7,0	6,0	0,6	3,6

Sumber: Dihitung dengan menggunakan statistic ADB dan data Bank Dunia tentang Indikator Pembangunan Dunia.



## LAMPIRAN 2

### DAFTAR PESERTA PERTEMUAN

#### 1. Pertemuan IA-BPG 1 (Perth, 26 April 2016)

No.	NAMA	ORGANISASI
1	Bryan Clark	ACCI
2	Ian Bennett	ACCI
3	Wahyuni Bahar	KADIN Indonesia /APINDO
4	Louise McGrath	Ai Group
5	David Sutanto	IABC
6	Debnath Guharoy	AIBC
7	Phil Turtle	AIBC
8	Ian Satchwell	AIBC
9	Noke Kiroyan	Kiroyan Partners
10	Adi Abidin	Kiroyan Partners
11	Anthony Orford	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia

#### 2. Pertemuan IA-BPG 2 (Jakarta, 2 Juni 2016)

No.	NAMA	ORGANISASI
1	Bryan Clark	ACCI
2	Shinta Widjaja Kamdani	KADIN Indonesia /APINDO
3	Wahyuni Bahar	KADIN Indonesia /APINDO
4	Shanti Samdasani	KADIN Indonesia /APINDO
5	Sherly Susilo	APINDO
6	Louise McGrath	Ai Group
7	David Sutanto	IABC
8	George Marantika	IABC
9	Debnath Guharoy	AIBC
10	Phil Turtle	AIBC
11	Ian Satchwell	AIBC
12	Noke Kiroyan	Kiroyan Partners
13	Anton Rizki Sulaiman	Kiroyan Partners
14	Adi Abidin	Kiroyan Partners
15	Margareth Olivia	Kiroyan Partners
16	Fauzi Nasution	Kiroyan Partners
17	Catherine Slack	Kiroyan Partners
18	Adam Fenton	Kiroyan Partners
19	Kiki Verico	Universitas Indonesia
20	Kyle Springer	Perth USAsia Centre
21	Djarmiko Witjaksono	Kementerian Perdagangan Indonesia
22	Peter Roberts	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
23	Todd Dias	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia

### 3. Pertemuan IA-BPG 3 (Melbourne, 13 Juli 2016)

No.	NAMA	ORGANISASI
1	Bryan Clark	ACCI
2	Wahyuni Bahar	KADIN Indonesia /APINDO
3	George Marantika	KADIN Indonesia
4	Sherly Susilo	APINDO
5	Louise McGrath	Ai Group
6	David Sutanto	IABC
7	Debnath Guharoy	AIBC
8	Phil Turtle	AIBC
9	Ian Satchwell	AIBC
10	Noke Kiroyan	Kiroyan Partners
11	Anton Rizki Sulaiman	Kiroyan Partners
12	Kate Sullivan	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
13	Frances Lisson	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
14	Cassandra Harton	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
15	Caroline McCarthy	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
16	Deddy Saleh	Kementerian Perdagangan Indonesia

### 4. Pertemuan IA-BPG 4 (Jakarta, 1 Agustus 2016)

No.	NAMA	ORGANISASI
1	Bryan Clark	ACCI
2	Ian Bennett	ACCI
3	Wahyuni Bahar	KADIN Indonesia /APINDO
4	George Marantika	KADIN Indonesia /APINDO
5	Jessica Callista	KADIN Indonesia
6	Astari Adityawati	KADIN Indonesia
7	Sherly Susilo	APINDO
8	David Sutanto	IABC
9	Debnath Guharoy	AIBC
10	Phil Turtle	AIBC
11	Ian Satchwell	AIBC
12	Noke Kiroyan	Kiroyan Partners
13	Adi Abidin	Kiroyan Partners
14	Margareth Olivia	Kiroyan Partners
15	Fauzi Nasution	Kiroyan Partners
16	Adam Fenton	Kiroyan Partners
17	James Nation	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia

## LAMPIRAN 3

# RANGKUMAN PROSES DAN HASIL KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN [INDONESIA]

Rencana Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia telah dibahas sejak 2012. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kerjasama bilateral serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Secara khusus, melalui kerja sama ini, kedua negara berusaha untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan, investasi dan kerjasama di sektor-sektor prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada 2012, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), sebagai bagian dari IA-BPG (Indonesia-Australia Business Partnership Group), telah menyelenggarakan sejumlah konsultasi dengan para pemangku kepentingan, demi menelaah kritik dan masukan dari organisasi anggotanya. Konsultasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang dianggap sebagai hambatan, tantangan, ekspektasi dan peluang yang dimunculkan oleh IA-CEPA. Kiroyan Partners, konsultan yang terlibat dalam penyusunan makalah posisi IA-BPG untuk IA-CEPA pada 2012, kemudian sekali lagi mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam penyusunan laporan ini. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan terdiri dari wawancara langsung dan diskusi kelompok terpadu (FGD) dengan perwakilan dari asosiasi. Sebanyak 54 asosiasi terlibat dalam proses ini (lihat daftarnya di **Lampiran 4**).

### PERTANYAAN KUNCI DALAM KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan menggunakan sejumlah pertanyaan kunci terbuka untuk memandu wawancara dan diskusi kelompok terpadu/FGD (pada 30 Mei 2016), dan mengupayakan jawaban yang didukung oleh bukti nyata atau berupa pengalaman pribadi.

1. Bagaimana sektor bisnis di Indonesia melihat IA-CEPA sebagai sarana untuk menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia?
2. Isu apa yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia dalam diskusi menuju IA-CEPA?
3. Apa ekspektasi dan tantangan dari IA-CEPA, baik dalam negosiasi maupun implementasi?
4. Bentuk kerjasama apa yang dapat dicapai dengan kelompok bisnis Australia?
5. Bentuk kerjasama apa yang dapat dicapai dengan kelompok atau sektor bisnis Anda?

### PANDANGAN TERKAIT KEMITRAAN INDONESIA-AUSTRALIA

Secara umum, asosiasi bisnis memandang kerjasama dengan Australia sebagai inisiatif yang baik. Secara geografis, kedekatan Australia dan Indonesia memberikan sejumlah manfaat di sektor pariwisata, pendidikan dan komoditas kompetitif seperti produk pertanian dari Australia atau produk perkebunan dari Indonesia. IA-CEPA akan menarik peluang investasi asing di Indonesia untuk mendorong kegiatan di sektor riil. Selain itu, IA-CEPA akan berdampak positif pada perkembangan teknologi dan keilmuan di Indonesia.

## PELUANG

- Indonesia masih membutuhkan tambahan modal asing berupa investasi dalam bentuk produksi barang dan jasa. Kesempatan investasi yang menarik di Indonesia akan meningkatkan konsumsi energi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas barang dan jasa.
- IA-CEPA menciptakan peluang untuk pengembangan sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Kebutuhan untuk penyesuaian standar kualitas produk barang dan jasa di Australia akan mendorong penelitian dan pengembangan produk lokal agar mampu bersaing di pasar Australia. Kapasitas yang meningkat ini juga dapat menjadi dampak tidak langsung dari investasi bisnis Australia di Indonesia.
- Produk kayu tropis Indonesia, memiliki potensi untuk pasar Australia, yang diekspor dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi. Ekspor bahan bangunan dari Indonesia ke Australia memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, di sektor pariwisata, seni dan budaya Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi untuk pasar Australia terutama bagi kunjungan wisata singkat, atau bahkan untuk kaum lansia/pensiunan yang justru ingin tinggal lebih lama di Indonesia. Selain itu, perdagangan makanan tropis juga dinilai sebagai salah satu dari beberapa peluang terbuka untuk kedua negara.<sup>79</sup>
- Kerjasama di bidang teknologi serta seni dan budaya juga cenderung mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah<sup>80</sup> di Indonesia. Kemajuan dalam infrastruktur teknologi sebagai bagian dari hubungan bilateral akan memiliki dampak yang signifikan pada industri kreatif.
- Melalui IA-CEPA, produsen dalam negeri Indonesia dapat didorong untuk mengembangkan produk berkualitas tinggi (premium) untuk pasar Australia yang memiliki daya beli lebih tinggi.

## RISIKO DAN TANTANGAN

- Asosiasi bisnis menyoroti perhatian akan risiko yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan barang dan jasa di beberapa sektor dalam IA-CEPA. Dalam hal peluang pasar, banyak perusahaan Indonesia melihat pasar Australia dengan sangat hati-hati mengingat penduduk Australia hanya sekitar sepersepuluh dari jumlah penduduk Indonesia. Permintaan yang relatif kecil akan mengakibatkan biaya logistik yang relatif tinggi jika melakukan perdagangan dengan Australia; sementara masih banyak permintaan yang belum terpenuhi di pasar Indonesia.
- Industri Indonesia tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap ketersediaan bahan baku atau peralatan dan mesin dari Australia. Ketersediaan bahan baku dan alat-alat dari Australia tidak mampu bersaing dengan bahan dan peralatan dari negara-negara lain, seperti Jepang, Taiwan, Tiongkok, Belgia, Norwegia, Jerman, dan bahkan Belanda (untuk teknologi instalasi air).
- Produk pertanian Australia diyakini memiliki potensi untuk menantang pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia, termasuk sektor peternakan dan perkebunan yang masih bekerja keras untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnisnya di Indonesia.
- Di sektor pertambangan batubara dan mineral, dunia bisnis Indonesia melihat Australia sebagai pesaing kuat dengan nilai produksi, kualitas dan pasar yang hampir sama di Asia.

---

<sup>79</sup> Usulan dari AGI dan AGRI.

<sup>80</sup> Usulan dari APJII.

- Standar yang berbeda antara kedua negara dapat berdampak negatif terhadap peluang barang dan jasa Indonesia memasuki pasar Australia. Hal ini dapat membahayakan keseimbangan perdagangan Indonesia dengan Australia dan menyulitkan tercapainya neraca perdagangan yang seimbang antara kedua negara.

## HAMBATAN

Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait kegiatan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Australia, dapat diidentifikasi sejumlah hambatan internal (di Indonesia) dan eksternal (di Australia) untuk perdagangan.

Hambatan eksternal terkait kebijakan Australia, meliputi:

1. **Standar kualitas produk di Australia terlalu tinggi.**<sup>81</sup> Di sektor pertanian dan pangan, isu utama yang sering dimunculkan selama diskusi adalah terkait sertifikasi kayu serta proses pengolahan produk makanan dan minuman, termasuk di dalamnya produk obat herbal. Pengakuan Australia atas standar kualitas yang ada di Indonesia harus ditingkatkan sehingga memberi peluang bagi produk Indonesia memasuki pasar Australia.
2. **Perbedaan standar kompetensi di sektor jasa dan sumber daya manusia.**<sup>82</sup> Perbedaan standar ini berdampak pada kurangnya pengakuan atas kualitas jasa dan sumber daya manusia Indonesia, sehingga menghambat laju pertumbuhan perdagangan jasa dari Indonesia ke Australia. Di sektor pertambangan, kompetensi SDM Indonesia dalam layanan teknis pertambangan dinilai kuat.
3. **Pengenaan tarif impor di Australia.**<sup>83</sup> Terbatasnya permintaan total akan barang dan kecilnya potensi pasar membuat biaya ekspor ke Australia menjadi lebih tinggi. Pengenaan tarif impor di Australia mengakibatkan kenaikan harga dan membuat produk Indonesia sulit bersaing di pasar Australia.
4. **Praktik kebijakan perdagangan Australia.**<sup>84</sup> Di masa lalu, Australia pernah menuduh Indonesia melakukan praktik dumping tanpa disertai bukti yang kuat dan valid. Hal ini membebani dunia usaha Indonesia untuk memberikan bukti penyangkal, hal yang sangat mahal untuk dikerjakan.
5. **Australia tidak melakukan upaya demi menciptakan perdagangan yang lebih seimbang dengan Indonesia.** Sebagai contoh, di sektor daging olahan, Indonesia adalah konsumen terbesar daging Australia. Namun, Australia tidak aktif mendorong pemasaran daging olahan yang diproduksi di Indonesia. Peran aktif Australia sebenarnya mampu mendorong tingkat konsumsi daging Australia lewat Indonesia.
6. **Proses izin impor Australia yang memakan waktu,** misalnya, importir kopi dapat menghabiskan sampai 10-14 hari untuk memproses izin impor bagi Australia.
7. **Kurangnya bimbingan dan pemetaan peluang bisnis di Australia.**<sup>85</sup> Peran pemerintah Australia dan Indonesia untuk menghasilkan pedoman serta pemetaan peluang bisnis di Australia akan mendorong bisnis di Indonesia dalam mengevaluasi perkembangan bisnis di Australia.

---

<sup>81</sup> Usulan dari AELI, APINDO Medan, APINDO NTT, ASEPHI, APIKI, ASRIM, PPA-Kosmetika dan AEKI.

<sup>82</sup> Usulan dari ISD.

<sup>83</sup> Usulan dari API dan ASKINDO.

<sup>84</sup> Usulan dari ASEPHI, AEKI, AMTI, INApLas, AKLI dan ASRIM.



Hambatan internal yang terkait dengan praktik kebijakan Indonesia meliputi:

1. **Kurangnya kepastian hukum dan penegakan hukum.** Bisnis membutuhkan kepastian hukum dan konsistensi untuk dapat menilai kelayakan investasi. Hal ini mencakup penegakan hukum di Indonesia yang mampu melindungi bisnis dari penyimpangan etika dan pelanggaran yang merugikan sektor bisnis.
2. **Kurang serta rendahnya kualitas infrastruktur.** Ketersediaan infrastruktur yang dapat diandalkan sangat mempengaruhi supply chain (rantai pasokan) dan logistik. Permasalahan dalam hal ini akan mengakibatkan biaya produksi semakin tinggi, sehingga harga produk menjadi lebih tinggi dan kurang kompetitif.
3. **Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan teknologi.** Sektor pertanian dan peternakan, misalnya, tidak memiliki mekanisasi atau teknologi pertanian yang secara efektif dapat meningkatkan kapasitas produksi. Penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas produk tidak secara aktif diupayakan, sehingga sulit untuk bersaing di pasar internasional.
4. **Peran pasif lembaga negara dalam pemetaan pasar luar negeri.** Instansi pemerintah terkait pengembangan ekspor, demikian pula atase perdagangan ekonomi memiliki peran dalam pengelolaan data dan memberikan informasi akurat tentang peluang pasar luar negeri, atau dalam hal ini di Australia. Pendekatan yang bersifat pasif dari lembaga negara akan membatasi ketersediaan informasi yang seharusnya dapat diproses oleh pelaku bisnis demi menangkap peluang pengembangan usaha.
5. **Standar kualitas dan kompetensi dalam negeri yang masih rendah.** Dihadapkan dengan standar kompetisi internasional yang tinggi, perusahaan Indonesia sering mengalami kesenjangan dalam standar kualitas dan kompetensi yang akhirnya menghambat peluang perdagangan internasional yang lebih besar.

## POIN-POIN PENTING

Dunia usaha Indonesia mengusulkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah kedua negara, sebagaimana mereka akan melakukan proses negosiasi IA-CEPA, untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut dapat menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Pemerintah harus mampu **mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi prioritas** yang akan ditampilkan dalam perdagangan internasional. Berbagai sektor industri yang tumbuh di Indonesia akan mengalami dilema dalam negosiasi kerjasama bilateral, di mana satu sektor akan diuntungkan sementara sektor lainnya harus dikorbankan. Identifikasi yang tepat akan membantu memastikan perumusan strategi dan intervensi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi risiko kerugian dari sektor yang termasuk dalam skema kerjasama bilateral. Dalam hal kemasakan, kerja sama ekonomi yang komprehensif masih perlu mengidentifikasi fokus perdagangan yang akan menguntungkan secara nasional. Khusus untuk sektor industri tepung, disarankan untuk dikeluarkan dari IA-CEPA.
2. Pemetaan industri dalam negeri akan **memperkuat posisi tawar pemerintah** dalam proses negosiasi karena pemerintah dapat dengan jelas melihat potensi pertukaran yang berimbang. Secara umum untuk Australia, Indonesia adalah pesaing di sektor pertambangan, sedangkan di sektor pertanian,

---

<sup>85</sup> Berulang kali dikemukakan oleh mayoritas pemangku kepentingan.

Indonesia-Australia dapat saling melengkapi. Penting pula bagi Indonesia untuk menjajaki kemungkinan pertukaran di sektor pariwisata dan pendidikan.

3. **Meningkatkan standar nasional dan saling memberikan pengakuan atas standar masing-masing.** Kebutuhan untuk peningkatan standar nasional dan penetapan standar telah diidentifikasi di beberapa sektor. Misalnya, dalam sertifikasi kesehatan serta standar dunia fashion dan mode. Sementara di sektor lain, pengakuan standar yang sama perlu dibahas dalam negosiasi, seperti misalnya kompetensi teknis profesional Indonesia.
4. **Mengembangkan pusat informasi bisnis yang terpercaya.** Pengungkapan informasi yang jelas dari kedua negara akan meningkatkan kepercayaan bisnis untuk melakukan studi kelayakan terhadap pengembangan bisnis di masing-masing negara. Pusat informasi bisa menjadi referensi terpercaya bagi para pelaku usaha untuk memetakan peluang dan risiko, serta memfasilitasi pemasaran produk-produk Indonesia di Australia.
5. **Mengubah kebijakan impor di Australia.** Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong ekspor Indonesia ke Australia dan membuka daya saing produk Indonesia. Kebijakan impor yang terkait dengan tarif dan dokumen administrasi yang diperlukan perlu ditegakkan lebih efektif dan efisien.
6. **Menyediakan perlindungan hukum dari politik perdagangan yang tidak adil.** Negosiasi di sektor hukum harus kuat dan transparan untuk melindungi bisnis dalam berurusan dengan praktik politik yang bisa merugikan pihak lain. Penyelesaian sengketa perdagangan perlu dilakukan dengan melibatkan kedua negara secara terbuka memberikan bukti terkait tuntutan.

Para pemangku kepentingan juga sangat mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perbaikan internal demi meningkatkan iklim usaha di Indonesia.

1. **Perbaikan administrasi birokrasi dalam hal perizinan, kepastian hukum dan perlindungan hukum** adalah prioritas utama untuk menarik investasi asing, terutama dari Australia. Kepastian hukum dan perlindungan ini harus mampu mengakomodasi perhitungan investasi yang jelas dan menguntungkan. Perlindungan terhadap pelanggaran hukum sering menjadi isu yang memprihatinkan untuk dunia usaha.
2. **Perbaikan kualitas infrastruktur pendukung** juga diperlukan oleh dunia usaha, secara khusus agar dapat mengurangi biaya produksi dan logistik. Di sektor pariwisata dan industri kreatif, infrastruktur sangat penting untuk pemasaran barang dan jasa melalui penggunaan teknologi dan fasilitas umum sebagai sebuah wadah tampil bagi produk-produk Indonesia.
3. **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi** demi mendorong produksi barang dan jasa berkualitas premium untuk pasar Australia yang memiliki daya beli lebih tinggi dari Indonesia. Kerjasama di bidang pendidikan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh. Selain program pertukaran mahasiswa atau studi di Australia, investasi Australia di sektor pendidikan Indonesia juga harus didorong.
4. **Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga negara**, terutama lembaga-lembaga yang berperan dalam pengembangan kegiatan ekspor atau perdagangan internasional. Peran lembaga-lembaga negara yang secara aktif mengelola informasi pasar luar negeri dapat berdampak pada ketersediaan informasi tentang pasar potensial dan peluang investasi untuk pengembangan bisnis di Australia. Manajemen informasi ini sangat penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan baik untuk jangka panjang.

## Lampiran 4

# KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN INDONESIA

### POKOK-POKOK YANG DIKEMUKAKAN DALAM WAWANCARA

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>AAUI</b> <b>(Asosiasi Asuransi Umum Indonesia)</b>	<p>Mengingat potensinya yang besar, pasar asuransi telah menarik sejumlah nama besar di dunia asuransi internasional. Hal ini didorong oleh peraturan investasi yang mudah, hingga memungkinkan kepemilikan asing sampai 80% di perusahaan asuransi Indonesia. Hal ini disebabkan pengakuan bahwa risiko harus dikelola tanpa batas. Australia memiliki beberapa partisipasi dalam pasar, tetapi keterlibatan lebih jauh, masih sangat diharapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri asuransi erat kaitannya dengan kebijakan dan preferensi dari negara, karena nilai transaksi untuk klaim bisa sangat tinggi – terutama dalam kaitannya dengan industri besar seperti penerbangan. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara untuk memperkuat asuransi dan reasuransi menjadi hal penting, termasuk dalam hubungan dengan Australia.</li> <li>2. Peluang investasi Australia di industri ini masih sangat besar. Peraturan industri asuransi Indonesia cukup kondusif untuk menarik investasi di perusahaan asuransi.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas modal sumber daya manusia sangat penting untuk didorong melalui kerjasama sertifikasi internasional – seperti dengan ANZIIF (<i>Australia-New Zealand Institute of Insurance and Finance</i>) lewat lembaga sertifikasi Indonesia. Asosiasi berharap personelnnya dapat diakui secara internasional.</li> </ol>
<b>AEKI</b> <b>(Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopi Indonesia merupakan komoditas yang masuk ke Australia lewat perdagangan dengan AS.</li> <li>2. Harus ada pengakuan atas standar sertifikasi kesehatan kopi Indonesia yang telah diterima di pasar internasional. Standar sertifikasi kesehatan yang digunakan oleh Australia terlalu ketat dan menyulitkan masuknya produk pertanian Indonesia ke pasar Australia.</li> <li>3. Proses perizinan impor memakan waktu 10-14 hari agar kopi Indonesia bisa masuk ke Australia. Hal ini akan mempengaruhi dunia usaha yang harus menyerap biaya tambahan agar bisa tetap menjaga kualitas kopi selama proses tersebut.</li> <li>4. Kesempatan Kerjasama dengan Australia perlu berfokus pada investasi pengolahan kopi sehingga dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi. Dalam hal transfer pengetahuan dan teknologi di industri kopi, Indonesia relatif lebih baik dibanding Australia.</li> <li>5. Pemerintah perlu lebih gigih dalam mempertahankan posisi tawar dalam proses negosiasi. Memperkuat ketersediaan data dan informasi yang akurat dapat membantu mempertahankan posisi tawar melalui pemahaman yang menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan dari sektor domestik.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>AELI (Asosiasi Eksportir Lada Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Australia kurang menarik untuk ekspor lada karena populasinya yang kecil. Pasar utama untuk lada Indonesia adalah Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.</li> <li>2. Harus ada pengakuan yang setara dari Australia atas standar kesehatan produk pertanian Indonesia yang sudah diterima oleh pasar Eropa dan AS.</li> <li>3. Indonesia perlu melakukan perbaikan internal demi menetapkan standar bagi kualitas produk pertanian nasional.</li> <li>4. Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam pengolahan dan logistik demi mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk nasional.</li> </ol>
<b>AEPI (Asosiasi Eksportir Perkulitan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekspor kulit Indonesia sebagian besar mengarah ke Eropa, sementara Indonesia mengimpor kulit berkualitas rendah dari Australia. Untuk barang-barang berbahan kulit, kerjasama dengan Australia cukup bermanfaat, meski ukuran pasarnya kecil. Australia dapat membantu membangun kapasitas dalam memproduksi barang berbahan kulit yang bernilai tinggi.</li> <li>2. Asosiasi memahami bahwa setiap hubungan bilateral harus berusaha menuju stabilitas, karena ini akan mempengaruhi hubungan perdagangan dan ekonomi.</li> <li>3. Pemerintah harus mengidentifikasi prioritas dalam sektor ekonomi dan perdagangan yang mungkin erat berhubungan dengan Australia. Juga perlu diidentifikasi apa yang masing-masing negara butuhkan dari yang lain.</li> <li>4. Pemerintah perlu mendorong investasi di industri untuk memperkuat kapasitas produksi dan kualitas barang berbahan kulit.</li> <li>5. Pemerintah perlu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas kelembagaan untuk ekonomi dan perdagangan internasional, terutama dalam hal mempromosikan produk-produk Indonesia di luar negeri.</li> </ol>
<b>AGI (Asosiasi Gula Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan gula di Indonesia masih lebih besar daripada pasokan gula dalam negeri yang kemudian mengharuskan impor dari Australia.</li> <li>2. Kapasitas industri gula dalam negeri dapat ditingkatkan melalui transfer pengetahuan dan teknologi dari Australia.</li> <li>3. Peluang untuk kerja sama dengan Australia meliputi: investasi di pabrik baru bagi pengolahan gula, revitalisasi pabrik tua, dan pengadaan peralatan dan mesin.</li> </ol>
<b>AGII (Asosiasi Gas Industri Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi gas industri berorientasi untuk memenuhi permintaan domestik dan tidak untuk ekspor. Tren pertumbuhan ekonomi yang lemah telah menyebabkan gas industri saat ini mengalami kelebihan pasokan.</li> <li>2. Kesempatan kerjasama dengan Australia, antara lain adalah berinvestasi dalam pengembangan industri di sektor riil untuk konsumsi gas industri.</li> <li>3. Australia tidak bisa bersaing dengan Norwegia dan Belgia untuk memasok bahan baku ammonium nitrat, dan dengan Jepang dan Cina untuk memasok mesin bagi produksi gas industri.</li> <li>4. Pemerintah harus meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang dapat menjamin keamanan dan administrasi perizinan untuk mengurangi biaya produksi.</li> <li>5. Pemerintah perlu mengevaluasi pemanfaatan kebijakan energi dalam negeri, agar lebih berorientasi pada infrastruktur dalam negeri. Ekspor gas alam saat ini terlalu tinggi, sehingga kurang memberi dukungan kurang bagi industri lain. Sebagai contoh: gas alam dalam negeri dapat dikonversi menjadi listrik yang</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>lebih murah untuk memfasilitasi manufaktur yang lebih murah serta meningkatkan kualitas produksi, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas perdagangan Indonesia.</p>
<b>AGRI</b> <b>(Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama bilateral dengan Australia tidak dapat hanya dilakukan di sektor perdagangan barang (perjanjian perdagangan bebas), yang hanya menekankan solusi untuk hambatan terkait tarif dan non-tarif. Kerjasama tersebut harus melibatkan kerjasama ekonomi. Jika hanya di perdagangan barang, kemungkinan akan merugikan perekonomian nasional.</li> <li>2. Indonesia harus memposisikan diri sebagai produsen yang dapat menggunakan standar kualitas Australia, sehingga produknya dapat memenuhi kebutuhan pasar Australia di dunia. Investasi dari Australia dapat mendorong posisi ini.</li> <li>3. Standar kesehatan dan kualitas produk Indonesia harus meningkat seiring dengan kerjasama bilateral ini. Hal tersebut terjadi melalui transfer pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan.</li> <li>4. Proses negosiasi harus dijalankan secara konsisten oleh tim yang tidak berubah-ubah dan sifatnya permanen.</li> <li>5. Pemerintah harus melibatkan pengusaha dengan kompetensi dan pemahaman yang cukup dalam industri mereka, agar dapat menyusun perjanjian kerjasama.</li> </ol>
<b>AILKI</b> <b>(Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan standar Indonesia dalam mengembangkan metode konversi energi yang berguna untuk industri luminer di Indonesia.</li> <li>2. Kurangnya informasi untuk memahami karakter pasar Australia dalam industri luminer.</li> <li>3. Kurangnya fasilitas serta bentuk kegiatan promosi produk Indonesia yang dapat berinteraksi secara intensif dengan pasar Australia.</li> <li>4. Meningkatkan standar produk Indonesia yang mengintegrasikan standar keselamatan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar internasional.</li> <li>5. Meningkatkan intensitas perdagangan Indonesia-Australia untuk mengurangi biaya transportasi yang selama ini tidak dapat bersaing dengan perdagangan China-Australia.</li> <li>6. Memberdayakan mahasiswa Indonesia di Australia sebagai agen pemasaran bagi produk Indonesia.</li> </ol>
<b>AKAINDO</b> <b>(Asosiasi Kontraktor Air Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan dengan negara-negara asing lebih tergantung pada kontraktor besar yang melibatkan anggota AKAINDO.</li> <li>2. Ketersediaan bahan baku bergantung pada produksi dalam negeri, sementara mesin diimpor dari Jepang, Denmark dan Jerman.</li> <li>3. Teknologi instalasi air mengacu pada pengetahuan dari Eropa.</li> <li>4. Secara umum, AKAINDO tidak melihat banyak manfaat bagi anggotanya dalam kerjasama Indonesia-Australia.</li> <li>5. Manfaat kerjasama IA-CEPA untuk AKAINDO bersifat tidak langsung, yaitu jika ada pengembangan investasi infrastruktur dan/atau kerjasama melalui hibah atau pinjaman dari Australia ke Indonesia.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>AKKINDO</b> <b>(Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pembicaraan kerjasama, penting untuk memperhatikan semua rincian demi memastikan kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi kedua negara.</li> <li>2. Tidak ada kesulitan yang berarti sepanjang pengalaman anggota berpartisipasi di pameran di Australia, demikian pula bagi mereka yang terlibat dalam pameran di Indonesia.</li> <li>3. Ada banyak tantangan dalam administrasi visa yang memakan waktu 5-10 hari kerja, mahal dan memiliki risiko pembatalan karena visa ditolak. Sebaliknya, Australia tidak memerlukan visa untuk masuk ke Indonesia.</li> <li>4. Partisipasi aktif dari instansi pemerintah Indonesia diperlukan untuk mendukung pengusaha dalam mengenali karakter pasar Australia dan memasarkan barang dan jasa Indonesia ke Australia.</li> <li>5. Penting sekali untuk melibatkan pengusaha dalam proses negosiasi sehingga dapat membantu pemerintah memahami peta nasional ekonomi riil.</li> <li>6. Mengizinkan pendirian sekolah Australia di Indonesia, akan sangat menguntungkan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memberikan alternatif lebih baik daripada mengirim anak-anak sekolah ke Australia setiap tahunnya.</li> </ol>
<b>AKLI</b> <b>(Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah perlu meninjau peraturan saat ini demi menghindari tumpang tindih peraturan yang membebani pengusaha, serta memastikan ketersediaan hukum yang sederhana, terintegrasi dan praktis.</li> <li>2. Perlu ada standar yang sama terkait kompetensi bagi pekerja listrik ke Australia sehingga memudahkan pergerakan pekerja. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mendukung program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis.</li> <li>3. Kesempatan investasi dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi dari Australia ke Indonesia.</li> </ol>
<b>AP3</b> <b>(Asosiasi Produsen Pipa Pengeboran Gas dan Minyak Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pipa tidak melihat dampak langsung dari kerjasama Indonesia-Australia.</li> <li>2. Harapannya adalah agar pemerintah dapat membantu sektor industri dalam mengurangi biaya logistik yang mempengaruhi persaingan harga produksi, jika memang ingin meningkatkan kualitas produk serta membuka peluang untuk ekspor pipa.</li> <li>3. Kerjasama Indonesia-Australia lebih baik fokus pada sektor pertanian dan peternakan.</li> </ol>
<b>APBI-Ban</b> <b>(Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan perdagangan Australia dengan Negara-negara Persemakmuran Inggris, seperti Malaysia, Singapura dan India, lebih kuat. Dalam kerjasama bilateral, Indonesia harus mampu bersaing dengan tiga negara tersebut di kawasan Asia.</li> <li>2. Isu-isu yang bisa menjadi perhatian dalam kerjasama ini antara lain transfer pengetahuan di bidang pertambangan, pendidikan, serta perdagangan seni dan budaya (fashion, kerajinan tangan, pariwisata).</li> </ol>
<b>APBI-ICMA</b> <b>(Asosiasi Pertambangan Batubara)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi Australia terlalu kecil, hanya sekitar 25 juta jiwa (2015), sehingga bukan merupakan pasar yang menarik.</li> <li>2. ICMA melihat Australia sebagai pesaing, karena merupakan eksportir batubara terbesar di dunia.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Indonesia – Indonesian Coal Mining Association)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peluang kerja sama dengan Australia meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Investasi Australia di Indonesia untuk meningkatkan konsumsi energi batu bara di dalam negeri.</li> <li>Ekspor bahan bangunan dan furnitur dari Indonesia ke Australia.</li> <li>Penguatan kebijakan sektor pariwisata dan visa wisata untuk menarik warga lansia/pensiunan dari luar negeri (Australia) untuk tinggal lebih lama di Indonesia.</li> </ol> </li> <li>Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk premium Indonesia untuk diserap oleh pasar Australia dengan daya beli tinggi.</li> <li>Kebijakan pemerintah melindungi kelestarian alam sehingga dapat bersaing di sektor pertanian serta jaminan kepatuhan hukum dari pengusaha dalam negeri.</li> </ol>
<b>APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah perlu memperkuat posisi tawar dengan Australia guna menghadapi praktik-praktik politik dalam perdagangan luar negeri, semisal adanya tuduhan tanpa dasar. Biaya yang dibutuhkan dalam upaya litigasi atas klaim tersebut cukup mahal.</li> <li>Perdagangan kayu internasional dapat menguntungkan sembari tetap berkontribusi bagi peremajaan hutan.</li> <li>Australia membutuhkan kayu berdaun lebar tropis dan Indonesia membutuhkan kayu berdaun jarum. Kebutuhan yang saling melengkapi ini punya potensi untuk perdagangan yang saling menguntungkan.</li> </ol>
<b>API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional dan dilindungi dari kemungkinan kebijakan perdagangan yang merugikan.</li> <li>Kesempatan yang setara bagi kedua negara untuk memasarkan produknya di pasar negara mitra.</li> <li>Menciptakan sinergi dalam perdagangan dan kebijakan industri dari berbagai kementerian, yang mendukung dunia usaha untuk berproduksi dan bersaing di pasar internasional.</li> <li>Pemerintah harus menyediakan dukungan infrastruktur keuangan (modal) bagi industri tekstil.</li> <li>Peningkatan efisiensi proses impor untuk menghindari karantina ganda. Meningkatkan akses ke pasar melalui investasi gudang kapas di Indonesia.</li> <li>Pembebasan biaya tarif impor dan ketentuan akses pelabuhan bagi kegiatan perdagangan antar kedua negara.</li> <li>Mendorong kinerja ekspor melalui peningkatan standar produk dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di industri tekstil, dengan mengacu pada standar ASEAN</li> </ol>
<b>API-IMA (Asosiasi Pertambangan Indonesia – Indonesian Mining Association)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Secara umum, Australia merupakan pesaing bagi Indonesia di sektor pertambangan.</li> <li>Bentuk kerjasama yang mungkin memberikan manfaat bagi Indonesia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas produksi melalui pengetahuan dan transfer teknologi.</li> <li>Peluang investasi ada bagi Australia untuk mengembangkan smelter tambang.</li> <li>Pemerintah perlu menjamin kepastian hukum yang konsisten dan penegakan</li> </ol>



ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>hukum yang tegas agar dapat menarik investasi bisnis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses negosiasi untuk kerjasama harus melibatkan pelaku usaha dalam diskusi dan membantu pemerintah untuk memberikan pengetahuan teknis, tidak hanya mengandalkan para ahli.</li> <li>Penting bagi pemerintah untuk memahami sektor prioritas yang akan menjadi poin utama dalam negosiasi.</li> </ol>
<b>APIKI (Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peluang kerjasama ada untuk Australia dalam penyediaan bahan baku industri pengalengan ikan atau investasi di fasilitas pengolahan yang akan meningkatkan pengetahuan dan teknologi dalam industri pengalengan ikan.</li> <li>Pemerintah harus meninjau kebijakan di sektor perikanan yang terkait dengan pembatasan impor bahan baku dan larangan bongkar muat di laut.</li> <li>Adanya kesulitan pemasaran karena populasi Australia yang kecil dan standar kesehatannya yang tinggi. Namun, hal ini bisa memberikan peluang dalam meningkatkan produk dan standar kesehatan pengalengan ikan Indonesia.</li> </ol>
<b>APINDO-Kaltim (Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Kalimantan Timur)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hubungan Indonesia-Australia perlu ditingkatkan bersamaan dengan pengakuan dan penghargaan atas budaya Indonesia di posisi yang setara dan tidak lebih rendah dari budaya Australia.</li> <li>Adanya peluang investasi Australia untuk meningkatkan berbagai sektor di Kalimantan termasuk peternakan, penambangan batubara, karet, kelapa sawit dan perikanan yang saat ini tidak beroperasi secara optimal. Investasi asing harus memprioritaskan kelangsungan hidup jangka panjang dan dampak sosial yang positif.</li> <li>Program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kejuruan bersertifikat dari Australia perlu didukung oleh pemerintah sehingga dapat tumbuh dan tidak terbatas pada perusahaan saja.</li> <li>Kerjasama antara Australia-Indonesia tidak harus terpusat di Jakarta saja, tetapi juga membuka akses langsung ke daerah lain. Akses infrastruktur logistik yang sudah tersedia melalui pelabuhan internasional dan transportasi udara ke bandara internasional membuat lebih mudah bagi para pelaku usaha untuk berinteraksi secara langsung.</li> <li>Kemitraan antara pengusaha dan pemerintah daerah sudah cukup baik. Administrasi visa ke Australia juga mudah.</li> <li>Komoditas perdagangan yang baik dari Kalimantan Timur meliputi mebel kayu dan buah-buahan tropis, seperti buah naga.</li> <li>Kebijakan ekonomi nasional pemerintah Indonesia sudah sangat mendukung dunia usaha, namun implementasinya di tingkat lokal masih perlu lebih didorong lagi.</li> </ol>
<b>APINDO-NTT (Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama bilateral dengan Australia yang hanya mencakup perdagangan tidak akan bermanfaat bagi Indonesia.</li> <li>Beberapa kendala yang ada antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan standar evaluasi dari kedua negara yang memberikan kesempatan yang sama bagi produk Indonesia untuk masuk Australia.</li> <li>Penyediaan informasi mengenai karakteristik pasar Australia untuk mendorong penelitian dan inovasi bagi pengembangan merek produk</li> </ol> </li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Instansi pemerintah Indonesia harus lebih progresif dan proaktif dalam memfasilitasi pemasaran, lisensi, bantuan hukum dan dukungan lain yang berhubungan dengan investasi atau operasi bisnis di Australia.</li> <li>d. Pengurusan administrasi visa ke Australia masih lama (12 hari), masih berpusat di Jakarta dan harganya mahal, terutama bagi para pelaku usaha dari Indonesia Timur.</li> <li>e. Australia belum memberikan apresiasi yang memadai terhadap karya budaya dan seni Indonesia, berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Negara-negara Eropa.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peluang kemungkinan kerjasama dengan Australia antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertukaran tenaga ahli dan pekerja terampil untuk saling transfer pengetahuan dan teknologi,</li> <li>b. Produk kayu jadi ke Australia.</li> </ul> </li> <li>4. Risiko yang mungkin muncul adalah praktik transit di Australia.</li> <li>5. Australia memiliki dua isu penting dalam kerja sama dengan Indonesia. Pertama, isu keamanan nasional Australia, mengingat Indonesia adalah tetangga terbesar. Kedua, upaya mempertahankan ekspor pertanian dan peternakan, karena Indonesia merupakan pasar terbesar untuk produk tersebut.</li> <li>6. Tim negosiasi harus memiliki keterampilan diplomatik, pengetahuan teknis dan pemahaman yang baik tentang isu-isu sosial, budaya dan politik, serta aturan yang ada.</li> <li>7. Perlu dibentuk suatu Badan Kerjasama Sektor Pemerintah-Swasta di Australia untuk membantu pelaku usaha Indonesia agar segera mengatasi masalah yang mungkin timbul saat menjalankan bisnis di Australia.</li> </ul>
<b>APINDO-Sumut (Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Sumatera Utara)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat peluang kerjasama dengan Australia melalui investasi dalam sektor industri ternak yang memungkinkan transfer pengetahuan di bidang peternakan. Indonesia memiliki kekuatan dalam penyediaan pakan ternak yang berkualitas.</li> <li>2. Risiko perdagangan Australia dengan Sumatera Utara adalah perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang yang perlu dipantau lebih dekat.</li> <li>3. Peningkatan birokrasi dan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan pemerasan terhadap dunia usaha adalah prioritas utama untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lokal.</li> <li>4. Dalam praktiknya, kerjasama harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap standar produk, budaya dan etos kerja di Indonesia; dan tidak memposisikan diri sebagai tetangga yang lebih superior.</li> <li>5. Perlunya peningkatan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta di Indonesia untuk menjamin investor asing dan merangsang kepercayaan nasional. Saat ini, semua pihak tidak sepenuhnya mempercayai satu sama lain; dan sinergi belum tercapai.</li> </ul>
<b>APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jaringan serat optik melalui Australia akan mempermudah akses internet yang saat ini didominasi oleh Amerika Serikat.</li> <li>2. Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh anggota asosiasi ini sebagian besar</li> </ul>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Indonesia)</b>	<p>melalui komunikasi langsung antara pelaku bisnis di Indonesia dan Australia. Salah satu komunikasi awal telah menawarkan peluang bisnis dalam bentuk hibah dan bantuan dari Pemerintah Negara Bagian Victoria.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hambatan terbesar yang dirasakan oleh APJII adalah bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah sering menghilangkan kesempatan bagi anggota asosiasi yang sebagian besar UKM.</li> <li>4. Koperasi merupakan alternatif yang dianjurkan oleh asosiasi ini demi melindungi kepentingan usaha kecil di Indonesia dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan milik negara/BUMN.</li> </ol>
<b>APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya kesetaraan hukum perdagangan internasional dalam kerjasama bilateral.</li> <li>2. Pemerintah harus memperkuat posisinya dalam menghadapi tuduhan di perdagangan internasional agar dapat menuntut penyajian bukti dari negara yang menuduh.</li> <li>3. Australia tidak dapat membuat tuduhan tak berdasar - proses verifikasi harus dilakukan bersama-sama demi menghindari biaya litigasi yang tinggi yang dibebankan pada pelaku bisnis.</li> </ol>
<b>APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesia merupakan pengekspor kayu lapis ke Australia namun volume perdagangannya tidak besar. Statistik perdagangan yang lebih akurat tidak tersedia, tetapi yang pasti, perdagangannya telah menurun sampai sekitar setengahnya dalam beberapa tahun terakhir.</li> <li>2. Pesaing utama Indonesia adalah Tiongkok dan Malaysia, namun pelaku usaha Indonesia yakin kualitas produknya jauh lebih unggul. Kayu lapis biasanya digunakan dalam industri konstruksi kapal (cetakan, dek dan interior), material decking, papan tulis, melamin dan konstruksi bracing.</li> <li>3. Sertifikat produk Indonesia, yaitu SVLK (Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu), juga jauh lebih unggul dari para pesaingnya. Legalitas produk dari negara-negara pesaing masih diragukan. Sementara itu Australia memiliki standar verifikasi sendiri (ANS). Kayu bersertifikat SVLK seharusnya tidak begitu mengalami kesulitan saat memasuki pasar Australia.</li> <li>4. Penyelarasan dan pengakuan kedua negara atas standar dan sertifikasi legalitas masing-masing akan menjadi langkah signifikan dalam memfasilitasi keterlibatan bilateral. Standar sertifikasi di Indonesia terbilang tinggi karena melibatkan verifikasi pihak ketiga, yakni dari pihak Uni Eropa.</li> <li>5. Australia harus berkomitmen untuk menerapkan standar ILPA dalam konteks persaingan dengan Tiongkok dan Malaysia. Para pemangku kepentingan Indonesia yakin legalitas produk mereka jauh lebih unggul dari pesaing.</li> <li>6. Pajak, CSR kepada masyarakat, dan pendanaan infrastruktur seperti jalan, semuanya membuat harga produk kayu Indonesia lebih tinggi. Biaya lain untuk memenuhi standar Australia membuat produk Indonesia tidak mampu bersaing.</li> <li>7. Kewajiban pajak ekspor kayu harus dikurangi dari 15% menjadi 5%.</li> </ol>
<b>APLINDO (Asosiasi Industri Pengecoran)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Australia adalah pemasok biji aluminium untuk industri logam di Indonesia.</li> <li>2. Standar Kompetensi pengecoran logam Indonesia diadopsi dari Australia.</li> <li>3. Pemerintah harus meningkatkan standar kompetensi dan kualitas produk lokal,</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Logam Indonesia)</b>	<p>terutama di sektor logam untuk dapat bersaing di pasar internasional.</p> <p>4. Pemerintah harus meninjau kebijakan energi dan logistik untuk mendorong pertumbuhan industri logam.</p>
<b>APMI (Asosiasi Perusahaan Pengeboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak pengeboran selalu dilakukan melalui proses tender yang menciptakan tekanan demi menjaga biaya rendah. Karenanya para ahli pengeboran Indonesia dapat memperoleh gaji yang lebih baik di luar negeri sehingga Indonesia sering kehilangan ahli lapangan yang pergi ke negara-negara lain, terutama negara-negara Timur Tengah.</li> <li>2. Faktor-faktor sosial-politik seperti sengketa tanah dapat menjadi penghalang untuk kegiatan di sektor ini. Sebagai contoh pemilik tanah di Sulawesi yang menolak untuk mengizinkan akses di seluruh tanah sengketa yang menyebabkan gangguan terhadap kegiatan eksplorasi.</li> <li>3. Kerjasama yang efektif dengan Australia akan membutuhkan komunikasi terbuka untuk memberikan informasi dan mengidentifikasi peluang di industri. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan asosiasi bisnis, atau pemerintah kedua Negara, harus menjadi 'penentu penyesuaian' (<i>match maker</i>) dalam hal mencocokkan bisnis dengan peluang. Informasi seperti ini penting, sulit didapatkan, mahal, dan sangat esensial bagi dunia usaha.</li> <li>4. Kebijakan pemerintah harus memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan menengah. Aturan pemerintah saat ini membatasi pertumbuhan perusahaan domestik.</li> <li>5. Ahli pertambangan Indonesia belum menerima pengakuan atau gaji yang mencerminkan keahlian mereka dibandingkan dengan pekerja Australia. Jika dibandingkan, gaji tenaga ahli Indonesia sekitar enam kali lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di Australia dengan tingkat keterampilan yang sama. Pemerintah belum cukup memperjuangkan keahlian pertambangan Indonesia.</li> <li>6. Peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia, pelatihan dan keterampilan merupakan hal yang berpotensi besar dalam kerja sama dengan Australia. Hal ini dapat berupa investasi ditambah dengan transfer teknologi, atau dalam pelatihan profesional dan sertifikasi Australia. Hal ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.</li> </ol>
<b>APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan pembiayaan (<i>second tier</i>) akan tergantung pada kegiatan perdagangan utama yang ada antara Indonesia dan Australia jika memang ada produk perdagangan yang membutuhkan pembiayaan: kebutuhan untuk jasa keuangan.</li> <li>2. Investasi di bidang jasa keuangan di Indonesia memberikan kesempatan bagi transfer pengetahuan dan peluang kerja baru.</li> <li>3. Pemerintah harus fokus pada penguatan peternakan sapi melalui kerjasama IA-CEPA dengan mengelola sumber daya lahan yang ada di Indonesia Timur.</li> <li>4. Peranan industri perbankan sangat penting sebagai inisiator untuk pertumbuhan investasi – terutama di sektor peternakan. Perusahaan pembiayaan juga akan tumbuh melalui transaksi pendukungnya, misalnya, pakan ternak, mesin pertanian dan pengelolaan peternakan.</li> <li>5. Negosiasi tidak boleh sekedar politis atau terbatas pada hasil jangka pendek bagi pemerintah yang sedang berjalan. Perjanjian tersebut harus memberikan hasil jangka panjang. Dengan demikian, keterlibatan pelaku usaha dalam</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>negosiasi sangat penting.</p> <p>6. Memahami budaya dan hukum positif di Australia agar dapat menghasilkan target kerja kuantitatif dalam kerjasama bilateral</p>
<b>APPMI</b> <b>(Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri garmen dan fashion Indonesia sudah cukup besar bagi perancang busana dan pelaku bisnis Indonesia. Namun, masih mungkin ada potensi perdagangan dengan Australia dalam produk-produk fashion berkualitas tinggi.</li> <li>2. Pemerintah harus menekankan kesinambungan untuk membuat kerjasama bilateral berkelanjutan, yang tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan.</li> <li>3. Menerapkan standar nasional Indonesia di sektor fashion sehingga semua UKM mengacu pada standar yang sama.</li> <li>4. Pemerintah harus memberikan dukungan konkret untuk mendorong pemasaran dan promosi produk fashion di pasar internasional.</li> <li>5. Proses administrasi pemerintahan harus lebih efektif dalam mendukung kegiatan pemasaran produk.</li> </ol>
<b>APRISINDO</b> <b>(Asosiasi Persepatuan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pengakuan internasional atas produksi Indonesia, terutama di industri manufaktur alas kaki, atau industri lainnya, di mana produk tersebut dijual kembali menggunakan merek internasional.</li> <li>2. Perdagangan Indonesia dengan Australia di sektor alas kaki sebagian besar dalam pembelian bahan baku dan transfer pengetahuan. Sebagai tujuan ekspor, pasar Australia dianggap kecil.</li> <li>3. Potensi perdagangan Indonesia dengan Australia adalah dominan untuk pasokan bahan baku, meskipun mungkin untuk ekspor produk premium.</li> <li>4. Gaya bahasa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan posisi yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional.</li> <li>5. Pemerintah harus mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas perdagangan ekonomi berdasarkan potensi dan kekuatan dalam negeri.</li> <li>6. Kebijakan untuk industri dalam negeri harus menekankan upaya produksi yang menghasilkan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada. Jadi bukan untuk perdagangan bahan baku, namun mendorong produksi dan ekspor barang jadi.</li> <li>7. Pemerintah harus mendorong kegiatan promosi internasional yang meningkatkan pengenalan merek atau produk Indonesia.</li> </ol>
<b>APSyFI</b> <b>(Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi wol di Indonesia dengan memasukkan transfer teknologi wol cukup potensial untuk industri Indonesia.</li> <li>2. Kerjasama alternatif lain ada di kemajuan teknologi serat atau benang yang menjamin ketersediaan bahan kain atau serat dari Australia dan Indonesia saja.</li> <li>3. Pemerintah harus memberikan dukungan promosi di ekspor industri pakaian ke Australia sehingga akan merangsang pertumbuhan industri serat di Indonesia.</li> <li>4. Pemerintah harus meninjau ulang kerjasama Indonesia-Tiongkok sebagai pembanding karena Tiongkok merupakan pesaing yang kuat di sektor industri fiber.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>APTINDO (Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pengecualian dalam perjanjian kerjasama bilateral terkait dengan komoditas tepung.</li> <li>2. Tepung Indonesia cukup kompetitif dengan produk Tiongkok dan Australia. Sementara itu, pasar di Indonesia masih cukup besar.</li> <li>3. Kerjasama dengan Australia memiliki risiko besar terhadap produksi pertanian lokal Indonesia.</li> </ol>
<b>APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi di Indonesia harus mampu bekerja sama dengan universitas-universitas Australia untuk melakukan penelitian dan pengembangan demi memfasilitasi hasil yang diperlukan dalam bisnis.</li> <li>2. Kerjasama dengan Australia di sektor jasa pendidikan akan mendorong inovasi dan kreativitas yang lebih besar dalam membangun nilai bisnis baru.</li> </ol>
<b>ARMI (Asosiasi Reklamasi Mineral dan Energi Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan Australia hanya memberikan sedikit manfaat bagi industri pertambangan dan industri pendukungnya. Ketergantungan pada dunia barat harus dikurangi.</li> <li>2. ARMI berfokus pada pemberdayaan perusahaan lokal untuk melakukan reklamasi mineral dan energi di Indonesia. Kompetensi dan teknologi ARMI mampu bersaing dengan Australia.</li> <li>3. Kesempatan kerjasama dengan Australia bisa melalui peningkatan pengetahuan untuk memproses Coal Bed Methane (cbm) sebagai alternatif energi yang masih belum dikembangkan di Indonesia.</li> <li>4. Iklim investasi jangka panjang membutuhkan sistem kebijakan publik yang secara konsisten memberikan manfaat bagi pertumbuhan nasional dan tidak berubah seiring pergantian pemerintahan.</li> <li>5. Peningkatan sistem manajemen di sektor minyak dan gas terutama terkait birokrasi pemerintahan harus terus dilaksanakan dan memberikan dampak berkelanjutan.</li> <li>6. Keterlibatan pelaku usaha dalam negosiasi perjanjian kerjasama bilateral sangat penting untuk memberikan perspektif teknis dan operasional sehingga tidak hanya didominasi oleh pertimbangan politik.</li> </ol>
<b>ASEPHI (Asosiasi Eksportir Dan Produsen Handicraft Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan investasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri, dan dengan demikian meningkatkan aplikasi teknologi serta kapasitas sumber daya manusia Indonesia.</li> <li>2. Kegiatan investasi Australia diharapkan dapat membuka akses pasar kerajinan di Australia. Investor Australia dapat produksi di Indonesia kemudian memasarkannya di Australia.</li> <li>3. Peraturan impor Australia harus mengakomodasi standar produk Indonesia agar membuka peluang bagi produk Indonesia memasuki pasar Australia.</li> <li>4. Biaya dan prosedur yang panjang untuk impor ke Australia - terutama untuk produk-produk Indonesia - harus diatasi demi meningkatkan daya saing harga untuk produk di pasar konsumen Australia.</li> <li>5. Peningkatan kapasitas atase perdagangan di sektor ekonomi agar mampu melakukan diplomasi ekonomi, pemasaran produk dan kerjasama expo.</li> <li>6. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam melindungi kepentingan bisnis Indonesia agar tahan menghadapi tuduhan dan berbagai politik perdagangan</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>yang merugikan. Misalnya: tuduhan dumping, pemalsuan merek, kebijakan penolakan barang berdasarkan sampel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat mekanisme promosi yang lebih efektif dan efisien dari semua komoditas perdagangan Indonesia di pasar luar negeri guna mengurangi biaya tinggi untuk promosi.</li> <li>Perlindungan kekayaan intelektual Indonesia dan penguatan branding internasional sebagai negara produsen kerajinan melalui label “<i>Made in Indonesia</i>” untuk semua produk yang diproduksi di Indonesia, meskipun menggunakan kemasan merek internasional.</li> </ol>
<b>ASKINDO</b> <b>(Asosiasi Kakao Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembebasan tarif impor di Australia untuk produk coklat cukup menjanjikan, meskipun pelaku usaha di bidang ini masih belum tertarik untuk memasuki pasar Australia.</li> <li>Kerjasama investasi dari Australia ke Indonesia bisa mendorong industri pengolahan kakao yang dapat dipasarkan di Australia dan Eropa.</li> </ol>
<b>ASPINDO</b> <b>(Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hilirisasi batubara, peningkatan kalori untuk bahan baku energi pembangkit listrik batubara, sejalan dengan pengalaman dengan proyek Gunung Bayan yang sempat terhenti.</li> <li>Penjualan produk teknologi perlu menyertakan komitmen untuk melakukan penelitian tambahan sesuai dengan kondisi Indonesia demi memaksimalkan produk, agar tidak membeli mentah begitu saja. Pemerintah harus mendorong perusahaan untuk lebih bermitra dengan perusahaan Indonesia.</li> <li>Pemerintah harus menyiapkan aturan mengenai pengaturan hilirisasi sehingga aturan pertambangan batubara tidak disamakan dengan pertambangan mineral.</li> </ol>
<b>ASRIM</b> <b>(Asosiasi Industri Minuman Ringan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesempatan untuk bekerja sama dengan Australia pada pasokan bahan harus mempertimbangkan tiga parameter: keberlanjutan pasokan, standar kualitas, dan harga. Kerjasama ini akan menguntungkan sektor yang dijalankan ASRIM sehingga Australia mampu bersaing dengan pemasok gula dari Thailand dan Vietnam, atau mesin dari Jepang dan Tiongkok.</li> <li>Pemerintah perlu meninjau kebijakan impor gula mentah maupun gula rafinasi.</li> <li>Produk ASRIM tidak akan kompetitif jika hanya diproduksi di Indonesia dan diekspor ke Australia. Memproduksi produk dan memperluas bisnis di Australia adalah cara yang paling masuk akal bagi perusahaan Indonesia untuk menembus pasar Australia. Hal ini harus didukung oleh kebijakan pro-investasi seperti insentif, regulasi yang ramah investasi dan dukungan mesin pengadaan.</li> <li>Pengakuan yang sama bagi produk ASRIM sangat dibutuhkan baik oleh Indonesia maupun Australia agar dapat mengurangi biaya produksi terkait penyesuaian standar formula produk, penggunaan bahan kimia dalam produk maupun standar kesehatannya.</li> <li>Meningkatkan kapasitas, kemampuan branding, penelitian dan pengembangan serta inovasi produksi massal bagi minuman tradisional Indonesia juga dapat dilihat sebagai peluang untuk kerjasama dengan Australia.</li> </ol>



ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>FOREK (Forum Rektor Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan lembaga tinggi di Indonesia dan Australia dalam penelitian dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan inovasi bisnis.</li> <li>2. Dana penelitian dan pengembangan dari Australia dibutuhkan untuk pengembangan program inkubator bisnis</li> </ol>
<b>GABEL (Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesia bersaing dengan Tiongkok dalam produksi barang elektronik. Namun Indonesia memiliki keunggulan alami, yaitu lebih dekat dengan Australia. Ada potensi besar jika produk dapat dikirimkan langsung ke Australia, namun saat ini mayoritas ekspor selalui melalui Singapura dan Hong Kong.</li> <li>2. Industri kayu/balok kayu merupakan industri pendukung untuk elektronik. Jika proses sertifikasi kayu – yaitu sistem sertifikasi SVLK – selaras dengan standar Australia, maka ini akan memudahkan perdagangan elektronik juga.</li> <li>3. Produk elektronik Indonesia sudah mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Jika ini selaras dengan standar Australia, maka akan memfasilitasi perdagangan.</li> <li>4. Tarif impor dapat menjadi poin negosiasi, namun tidak secara signifikan mempengaruhi perdagangan.</li> <li>5. <i>Indonesian Trade Promotion Centre</i> (ITPC) harus bekerja lebih keras dalam mempromosikan produk-produk Indonesia di Australia.</li> </ol>
<b>GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada risiko dalam kerjasama bilateral dengan Australia di sektor pertanian karena akan sulit untuk bersaing dengan Australia, terutama di sektor industri susu.</li> <li>2. Australia kurang mungkin dilihat sebagai pasar yang menarik untuk minyak sawit. Namun pelabelan makanan mungkin akan meningkatkan konsumsi produk berbasis minyak kelapa sawit.</li> <li>3. Pemerintah harus terus-menerus memperhatikan rincian negosiasi, terutama poin tertentu yang bisa menguntungkan kepentingan pebisnis Indonesia.</li> <li>4. Kerjasama bilateral harus dikaji dengan hati-hati guna mencegah defisit perdagangan yang lebih besar setelah perjanjian berlaku.</li> <li>5. Salah satu wilayah kerjasama potensial dengan Australia adalah dalam membangun kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang berpeluang meningkatkan produksi di Indonesia.</li> </ol>
<b>GAPKINDO (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar karet Indonesia lebih nyaman dengan negara-negara Timur Tengah karena mereka memiliki kesenjangan permintaan yang signifikan dibandingkan Australia.</li> <li>2. Kualitas karet Indonesia masih harus bersaing dengan Thailand dalam hal kualitas pengolahan perkebunan karet dan teknologi.</li> <li>3. Negosiasi kerjasama harus berkomitmen pada transaksi yang seimbang antara kedua negara. Nilai produk lokal Indonesia bisa menjadi titik tawar (bargaining points) dalam negosiasi dengan Australia.</li> <li>4. Perdagangan barang berbahan baku karet dengan Australia akan mempengaruhi pertumbuhan industri karet dalam negeri.</li> </ol>
<b>GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meski pasar Australia dianggap kecil, GAPMMI melihat peluang kerjasama untuk meningkatkan kualitas produk makanan dan minuman dari Indonesia. Australia tetap merupakan pasar yang menarik untuk produk premium dan dapat membantu dalam penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peluang untuk bekerjasama dengan Australia dapat mendorong peningkatan produksi makanan dan minuman berkualitas premium yang bisa dijual di Australia.</li> <li>3. Pemerintah dapat meningkatkan perannya dalam pemasaran, promosi dan negosiasi terkait izin investasi di Australia.</li> <li>4. Wilayah kerja sama dapat mencakup ketersediaan produk dasar/mentah yang dapat diperoleh secara ekonomis di Australia.</li> <li>5. Di wilayah lain, ada kemungkinan kerja sama dalam hal peningkatan kapasitas, peningkatan branding, penelitian dan pengembangan atau inovasi produk secara massal untuk minuman tradisional Indonesia.</li> </ol>
<b>GIATPI (Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang pertumbuhan Australia sebagai pasar dinilai kecil. Namun, investasi Australia dalam membangun pabrik pengolahan plastik (relokasi industri) di Indonesia dapat dilihat sebagai langkah yang pas dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan Australia.</li> <li>2. Peraturan dan kebijakan di Indonesia kurang mendukung implementasi perjanjian perdagangan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang komprehensif dan mendukung bisnis, terutama terkait dengan produk terkemuka Indonesia.</li> </ol>
<b>GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk mengakhiri perdebatan kepentingan sektoral antarkementerian di Indonesia.</li> <li>2. Program pengembangan standardisasi produk di industri manufaktur juga diperlukan sebagai referensi untuk konsumen Australia.</li> <li>3. Kerjasama dalam program perbaikan pengelolaan produk lewat pertumbuhan dan percepatan waktu panen di industri pertanian, peternakan dan perikanan.</li> <li>4. Berusaha menyaingi dominasi perdagangan Thailand dengan membuka peluang ekspor, misalnya ekspor buah-buahan tropis seperti pisang ambon, jahe, kelapa, kopi, kakao, kelapa sawit, dan karet, termasuk produk alas kaki.</li> <li>5. Memperkuat strategi pengawasan impor produk yang beredar di pasar domestik dengan mengoptimalkan manfaat dari instrumen pengamanan perdagangan yang diatur oleh WTO (World Trade Organization) seperti aturan Anti-Dumping, Perlindungan, dan Anti-Subsidi.</li> <li>6. Menerapkan Rules of Origin untuk menghindari praktik perdagangan yang tidak adil seperti transshipment ilegal.</li> <li>7. Kegiatan Ekspor-Impor harus dilakukan hanya di empat pelabuhan yang telah ditetapkan: Tanjung Priok, Cikarang, Tanjung Perak dan Tanjung Emas.</li> <li>8. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja, transfer pengetahuan, teknologi dan perbaikan standar produk, terutama terkait penggunaan bahan kimia dan standar kesehatan.</li> <li>9. Memantau dan mengevaluasi secara bersama terkait keuntungan serta kerugian dari IA-CEPA bagi kedua negara guna mengidentifikasi kendala dalam perjanjian bilateral dan menyusun solusi yang harus melibatkan asosiasi terkait di industri.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>GPMT</b> <b>(Gabungan</b> <b>Perusahaan</b> <b>Makanan Ternak)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam upaya melayani pasar Australia, produsen sering menghadapi standar kesehatan Australia yang ketat dan menghambat upaya lebih lanjut untuk membawa produk ke pasar, hal ini terlihat misalnya dalam produksi udang. Modal sumber daya manusia Indonesia dan bahan baku dalam memproduksi pakan cukup memadai, tetapi harus ada upaya terpadu oleh kedua pemerintah dalam memastikan agar produk tersebut dapat memasuki pasar Australia.</li> <li>2. Pertanyaan terkait data dan informasi dapat ditempatkan sebagai isu utama demi mengatasi kesenjangan informasi yang disebabkan lingkungan politik perdagangan yang tidak sehat. Kedua pemerintah perlu bersama-sama meneliti dan mengumpulkan data demi memastikan transparansi, dan penerimaan di pasar kedua negara.</li> <li>3. Kedua negara harus bersama-sama mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan dan mengakui sertifikasi produk dan standar kesehatan.</li> <li>4. Manfaat dari hubungan perdagangan dengan Australia akan terbatas jika hanya terkait perdagangan barang. Kerjasama ini harus mencakup transfer teknologi dan transfer pengetahuan.</li> <li>5. Kebijakan pemerintah Indonesia harus konsisten, dan tidak hanya karena harus memenuhi kepentingan politik, tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang.</li> <li>6. Australia perlu dengan jelas menyatakan komitmennya untuk membuka pasar bagi produk-produk Indonesia.</li> </ol>
<b>HKI</b> <b>(Himpunan</b> <b>Kawasan Industri</b> <b>Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisnis Australia belum sepenuhnya memanfaatkan kawasan industri di Indonesia, maka perjanjian ini harus mendorong investasi tersebut melalui fasilitas manufaktur bangunan. Pemerintah perlu lebih meningkatkan infrastruktur dan memberikan panduan untuk meningkatkan hubungan industrial.</li> <li>2. Pemerintah perlu mendorong Australia untuk berinvestasi di bidang manufaktur yang berlokasi di kawasan industri yang telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.</li> <li>3. Konsistensi dalam kebijakan ekonomi pemerintah tetap menjadi tantangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, terutama untuk masa jangka panjang.</li> <li>4. Pemerintah harus berfokus pada penyediaan infrastruktur dan panduan bagi hubungan industrial.</li> <li>5. Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam rangka memperkuat posisinya di perdagangan internasional.</li> </ol>
<b>IABC</b> <b>(Indonesia-</b> <b>Australia Business</b> <b>Council)</b>	<p>Pendapat umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung IA-BPG dan IA-CEPA untuk mewujudkan potensi perdagangan dan investasi.</li> <li>2. Percaya bahwa Indonesia mengacu ekonomi global, meskipun dengan beberapa kekhawatiran.</li> <li>3. Diperlukan sebuah suara yang kuat dalam mengekspresikan hubungan yang jelas antara perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>4. Kedua pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan di Indonesia yang rumit, prosedur yang tumpang tindih dan tidak jelas dan kompleks menghambat perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan konsistensi yang lebih besar.</li> <li>2. Seruan untuk proses konsultasi kebijakan dan pengambilan peraturan yang lebih nyata.</li> <li>3. Mengharapkan perlakuan yang sama terhadap modal asing dan domestik serta barang yang masuk ke negara.</li> </ol> <p>Barang, Jasa, Perdagangan dan Investasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada pariwisata dengan penekanan pada konektivitas. Di bidang pendidikan, perlu untuk saling memanfaatkan dan melengkapi, termasuk kemungkinan usaha patungan antarperguruan tinggi swasta.</li> <li>2. Investasi harus terbuka untuk semua tingkatan, termasuk untuk UKM.</li> <li>3. Menyadari perlu ketersediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil guna ditarik oleh perusahaan terkait.</li> <li>4. Kedua negara bisa saling melengkapi dalam hal keterampilan.</li> <li>5. Mengurangi intervensi pemerintah dalam proyek-proyek jangka panjang</li> <li>6. Tidak hanya ekspor barang, tetapi juga harus fokus pada keunggulan yang diselaraskan untuk keuntungan bersama</li> </ol> <p>Perjanjian perdagangan dan IA-CEPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung negosiasi yang mengikat dan transparan di IA-CEPA.</li> <li>2. Menginginkan upaya yang independen, namun tetap menyadari bahwa beberapa isu harus diurus kemudian karena bisa menghambat proses negosiasi</li> <li>3. Pemerintah harus mempromosikan manfaat dari AANZFTA, serta mengakui 1993 Perjanjian Investasi Bilateral.</li> <li>4. Ketika AANZFTA berjalan, tarif seharusnya tidak menjadi masalah. Namun lebih untuk menyelaraskan pajak dan bea, termasuk mematuhi pajak yang wajar serta kemampuannya untuk merepatriasi pendapatan dan keuntungan.</li> <li>5. Dewan Bisnis (<i>Business Council</i>) akan mendapat manfaat dari program bantuan pembangunan yang jelas melalui <i>Aid for Trade</i>.</li> <li>6. Sengketa komersial harus diselesaikan secara efisien dan jelas bila sewaktu-waktu jalur hukum diperlukan.</li> </ol>
<b>INAPlas</b> <b>(Indonesian Olefin Aromatic &amp; Plastic Industry Association – Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk HDPE (High Density Polyethylene) Indonesia menghadapi kesulitan dalam memasuki Australia sejak sebelum tahun 2000, meskipun produk ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Bagi INAPlas, sebagai satu-satunya negara yang menolak produk, Australia telah menetapkan standar yang tidak jelas dan tidak kompatibel.</li> <li>2. Mempertahankan bea masuk 10% Australia bagi negara yang berkategori MFN (most favoured nation).</li> <li>3. Daya saing domestik Indonesia harus ditingkatkan. Plastik lokal seharusnya tidak dikenakan pajak.</li> <li>4. Pemerintah harus menyediakan area untuk investasi infrastruktur di Australia sehingga tidak akan ada kebutuhan untuk bahan impor dan Australia bisa nyaman berinvestasi.</li> <li>5. Pemerintah harus memfasilitasi pertemuan asosiasi dan pameran produk baik di</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>Indonesia maupun di Australia sehingga kedua negara akan memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Misalnya pertemuan asosiasi di ASEAN berlangsung setidaknya dua kali setahun dan termasuk di dalamnya terdapat penghargaan bagi industri plastik negara-negara ASEAN.</p>
<b>INPEMIGAS</b> <b>(Asosiasi Industri Penunjang Migas)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan Australia dapat dimulai di bidang seni dan budaya, pendidikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam skala nasional.</li> <li>2. Keunggulan Indonesia dibandingkan dengan Australia ada di industri eksplorasi minyak.</li> </ol>
<b>ISD</b> <b>(Indonesia Service Dialogue)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan Australia atas standar kompetensi jasa Indonesia sangat diperlukan.</li> <li>2. Pemerintah perlu mengembangkan strategi kerjasama dengan menekankan sektor unggulan, mengembangkan zona ekonomi yang terletak dekat Australia, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang bisa meningkatkan daya saing industri jasa.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan professional IT, pertanian, pertambangan, peternakan dan tenaga dukungan medis merupakan sektor potensial dalam membangun kerjasama dengan Australia.</li> <li>b. Pembangunan ekonomi Indonesia timur yang berdekatan dengan kota Darwin.</li> <li>c. Kapasitas yang sama dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia.</li> </ol> </li> <li>3. Membahas kerjasama dalam sertifikasi kompetensi kerja kolaboratif sehingga akan meningkatkan peluang tenaga kerja Indonesia untuk memasuki pasar Australia.</li> <li>4. Pelibatan komunitas bisnis (terutama jasa) dalam negosiasi dan diskusi kedua negara sehingga pemahaman pasar kedua negara dapat diperkaya.</li> <li>5. Merumuskan secara rinci dan spesifik kerjasama industri jasa dengan menekankan area yang merupakan keunggulan Indonesia.</li> <li>6. Pemerintah perlu bersikap proaktif dalam mengusulkan perjanjian kerjasama sehingga bisa meningkatkan daya tawar Indonesia. Seperti misal, proses pengajuan visa untuk Australia harus dibuat lebih mudah.</li> <li>7. Badan Sertifikasi Nasional perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain yang relevan untuk menyesuaikan standar kompetensi demi meningkatkan daya saing bisnis domestik.</li> <li>8. Kerjasama dan koordinasi antardepartemen perlu diperkuat demi menyisihkan ego masing-masing kementerian, sehingga pelaksanaan kerjasama akan lebih mudah.</li> <li>9. Transfer Pengetahuan dari Australia masih diperlukan guna meningkatkan kompetensi dan daya saing lokal/daerah. Selain itu, diperlukan implementasi yang jelas dari peraturan yang ada.</li> </ol>
<b>ISWA</b> <b>(Indonesian Sawmil &amp; Wood Working)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sektor pengolahan kayu untuk bangunan berupa barang jadi maupun setengah jadi berpotensi menjadi komoditas perdagangan untuk pasar Australia.</li> <li>2. Investasi pengolahan kayu berdaun lebar di Indonesia bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan pasar Australia karena kebijakan nasional Indonesia</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Manufacturers Association – Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian &amp; Olahan Indonesia)</b>	<p>memungkinkan ekspor kayu mentah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendukung, pelayanan publik dalam urusan logistik, penelitian dan pengembangan pasar, pengelolaan informasi dan data yang lebih baik untuk memetakan potensi perdagangan internasional serta peningkatan kapasitas perkebunan rakyat.</li> </ol>
<b>NAMPA (National Meat Processors Association – Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan daging dengan Australia dengan menggunakan negara pemasok seperti India dan Brazil sebagai bahan perbandingan.</li> <li>2. Keuntungan ekonomis bagi masyarakat Indonesia dapat diperoleh melalui investasi pengolahan daging Australia di Indonesia guna meningkatkan proses pemasaran daging Indonesia, transfer pengetahuan dan teknologi yang mendukung penyediaan bahan untuk perbaikan sektor peternakan</li> </ol>
<b>PERBANAS (Perhimpunan Bank-bank Nasional)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Australia masih dipandang sebagai pasar kecil, namun jika nilai perdagangan bilateral ini meningkat, maka hal ini juga akan secara dramatis meningkatkan bunga bank Indonesia untuk terlibat dalam perdagangan dengan Australia.</li> <li>2. Secara umum, perbankan Indonesia tidak terlibat pasar internasional; sejauh ini pasar internasional hanya terbatas pada tiga bank BUMN terbesar. Sementara itu, tiga bank terbesar di Australia – Commonwealth, ANZ dan Westpac – telah mulai beroperasi di Indonesia.</li> <li>3. Bank-bank di Indonesia dapat terlibat lebih banyak dengan Australia jika perjanjian kerjasamanya cukup fasilitatif; sejauh ini bank-bank lokal masih berfokus pada perluasan operasi domestik mereka.</li> <li>4. Tingkat transaksi perbankan di Australia (dinilai oleh perbankan di Indonesia) masih sangat kecil. Pertumbuhan perbankan akan tergantung pada nilai perdagangan – sebagaimana tercermin di sektor riil.</li> <li>5. Adanya kebutuhan akan data dan informasi tentang peluang perdagangan dengan Australia dari perspektif industri perbankan.</li> <li>6. Sektor perbankan mungkin memainkan peran penting dalam penentu penyesuaian (<i>match-making</i>) dunia usaha, yang kemudian akan mengarah ke peningkatan transaksi internasional dengan Australia.</li> <li>7. Diperlukan perbaikan dalam hal regulasi dan evaluasi kinerja perbankan untuk memastikan daya saing di pasar ASEAN dan pasar global. Hal ini demi peningkatan kemampuan industri perbankan dalam negeri di pasar internasional.</li> </ol>
<b>PPA Kosmetika (Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan kosmetik Indonesia masih berfokus pada negara-negara Asia Timur seperti Korea, Jepang, Tiongkok dan Timur Tengah. Australia masih dianggap pasar kecil dan Indonesia masih tidak yakin apakah lanolin Australia dapat dengan mudah diperoleh pasar domestik.</li> <li>2. Pasar kosmetik Australia bergerak ke arah industri hijau dengan menggunakan bahan-bahan alami. Hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan bagi industri herbal Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan alami industri kosmetik Australia.</li> <li>3. Peraturan impor Australia masih merupakan tantangan bagi produk Indonesia, karena menetapkan standar yang terlalu tinggi, peraturan pemakaian bahan</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>kimia yang ketat serta pajak yang tinggi.</p> <p>4. Diperlukan informasi yang bersifat terbuka dan terus diperbarui terkait pasar Australia demi memperkuat kerjasama KADIN dan lembaga pemerintah dengan lembaga lain di luar negeri.</p> <p>5. Teknik negosiasi pemerintah Indonesia harus menjamin keseimbangan perjanjian sehingga tidak hanya mengikuti syarat dan ketentuan dari sisi Australia.</p> <p>6. Dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian nasional, pemerintah harus memastikan bahwa investasi asing berfokus pada sektor hulu dan akses pasar internasional dibuka untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan dalam negeri, tetapi juga permintaan internasional.</p> <p>7. Produk kosmetik harus menerapkan standar GMP dan hanya diberikan di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian.</p>

## DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KONSULTASI

No.	ASSOCIATION	
1	<b>APJII</b>	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
2	<b>APTISI</b>	Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
3	<b>FOREK</b>	Forum Rektor Indonesia
4	<b>AEPI</b>	Asosiasi Eksportir Perkulitan Indonesia
5	<b>APPMI</b>	Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia
6	<b>APRISINDO</b>	Asosiasi Persepatuan Indonesia
7	<b>ASEPHI</b>	Asosiasi Eksportir Dan Produsen Handicraft Indonesia
8	<b>GIATPI</b>	Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia
9	<b>PPA-Kosmetika</b>	Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia
10	<b>AAUI</b>	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
11	<b>AKKINDO</b>	Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia
12	<b>APPI</b>	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
13	<b>ISD</b>	Indonesia Services Dialogue
14	<b>PERBANAS</b>	Perhimpunan Bank-bank Nasional
15	<b>ASRIM</b>	Asosiasi Industri Minuman Ringan
16	<b>GAPMMI</b>	Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia
17	<b>APINDO Kaltim</b>	Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Kalimantan Timur
18	<b>APINDO Medan</b>	Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Sumatera Utara (Medan)
19	<b>APINDO NTT</b>	Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur
20	<b>GPEI</b>	Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
21	<b>HKI</b>	Himpunan Kawasan Industri Indonesia
22	<b>AILKI</b>	Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan Indonesia
23	<b>AKAINDO</b>	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia
24	<b>AKLI</b>	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia



No.	ASSOCIATION	
25	<b>APBI (BAN)</b>	Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia
26	<b>API</b>	Asosiasi Pertekstilan Indonesia
27	<b>APKI</b>	Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia
28	<b>APKINDO</b>	Asosiasi Panel Kayu Indonesia
29	<b>APLINDO</b>	Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia
30	<b>APSyFI</b>	Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia
31	<b>GB ELEKTRONIKA</b>	Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia
32	<b>INApIas</b>	<i>Indonesian Olefin and Plastic Industry Association</i>
33	<b>ISWA</b>	<i>Indonesian Sawmill and Wood Product Manufacturers Association</i> – Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia
34	<b>AGII</b>	Asosiasi Gas Industri Indonesia
35	<b>AP3</b>	Asosiasi Produsen Pipa Pengeboran Gas dan Minyak Indonesia
36	<b>APBI-ICMA</b>	Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia – <i>Indonesian Coal Mining Association</i>
37	<b>API-IMA</b>	Asosiasi Pertambangan Indonesia – <i>Indonesian Mining Association</i>
38	<b>APMI</b>	Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia
39	<b>ARMI</b>	Asosiasi Reklamasi Mineral dan Energi Indonesia
40	<b>ASPINDO</b>	Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia
41	<b>INPEMIGAS</b>	Asosiasi Industri Penunjang Migas
42	<b>AEKI</b>	Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia
43	<b>AELI</b>	Asosiasi Eksportir Lada Indonesia
44	<b>AGI</b>	Asosiasi Gula Indonesia
45	<b>AGRI</b>	Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia
46	<b>APHI</b>	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
47	<b>APIKI</b>	Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia
48	<b>APTINDO</b>	Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia
49	<b>ASKINDO</b>	Asosiasi Kakao Indonesia
50	<b>GAPKI</b>	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
51	<b>GAPKINDO</b>	Gabungan Perusahaan Karet Indonesia
52	<b>GP. JAMU</b>	Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia
53	<b>GPMT</b>	Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia
54	<b>NAMPA</b>	<i>National Meat Processors Association</i> – Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia
55	<b>IABC</b>	<i>Indonesia-Australia Business Council</i>

## Lampiran 5

# KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN AUSTRALIA

### RANGKUMAN USULAN, PRESENTASI DAN LAPORAN

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Advisian – Adam Aspinall</b> <b>“Peluang Energi Baru di Masa Depan”</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih dari seperlima dari penduduk Indonesia tidak memiliki akses listrik.</li> <li>2. Permasalahan energi ini akan menghambat setiap upaya pembangunan ekonomi dan sosial, maka ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan listrik bagi semua warga.</li> <li>3. Untuk sektor industri listrik itu sendiri, lima belas tahun ke depan akan ditandai dengan munculnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan eksponensial di area tenaga surya.</li> <li>• Tata Kelola Smart Grids dan Big Data.</li> <li>• Kendaraan dan tempat penyimpanan listrik.</li> <li>• Daya Mini Grid otonom atau berbasis komunitas.</li> <li>• Transmisi HVDC antara sumber pembangkit dan pusat daya.</li> </ul> </li> <li>4. Kendaraan Listrik (Electronic Vehicle), yang memiliki keunggulan nyata atas mesin bensin sekarang ini, akan mendominasi jalanan dalam waktu dekat.</li> <li>5. Penyimpanan Listrik dan energi surya akan memungkinkan sumber pembangkit di daerah kecil serta akan membuka akses bagi negara-negara atau masyarakat tertinggal untuk melakukan peralihan seketika dari sumber energi berbasis bahan bakar fosil.</li> <li>6. Penyediaan listrik skala besar dalam waktu dekat akan didorong oleh ekspansi sumber energi terbarukan.</li> <li>7. Di sektor energi terbarukan, terutama matahari dan angin, Australia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan dan memasok listrik ke wilayah tersebut.</li> </ol>
<b>Program Antarbudaya AFS Australia pada Forum IA-CEPA Sydney untuk IA-BPG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya memperoleh visa multiple entry bisnis atau izin tinggal terbatas (KITAS) untuk Indonesia masih membutuhkan proses yang kompleks. Banyak pebisnis Australia beralih ke visa turis ketika mereka harusnya bepergian dengan visa bisnis dan hal ini berdampak pada pelaporan dan klasifikasi pemerintah Australia terhadap perjalanan ke Indonesia.</li> <li>2. Mendorong proyek budaya bilateral, khususnya di bidang seni, guna mengembangkan hubungan dan pemahaman lintas budaya.</li> <li>3. Mengembangkan perhatian yang lebih besar tentang Indonesia (termasuk studi bahasa Indonesia) dalam sistem pendidikan Australia (sekolah dan universitas).</li> </ol>
<b>AIBC</b> <b>“Mewujudkan IA-CEPA: Memahami Aspirasi Pemangku Kepentingan”</b>	<p>Laporan AIBC merangkum pandangan para pemangku kepentingan mulai dari pelaku bisnis, pemerintah dan sektor nirlaba yang ada di IA-CEPA. Poin-poin penting meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sifat saling melengkapi yang kuat dari ekonomi ekonomi kedua negara dapat menciptakan peluang kerjasama yang menguntungkan demi meningkatkan</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>perekonomian, dengan cara yang tak bisa dilakukan sendiri oleh kedua negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kualitas dan ketentuan yang diidentifikasi bagi IA-CEPA adalah harus merupakan:</li> <li>3. Perjanjian Abad ke-21 yang melampaui perjanjian perdagangan generasi sebelumnya dan akan sangat berorientasi ke depan untuk permasalahan khas abad ke-21.</li> <li>4. Berkualitas tinggi dan komprehensif, mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, pergerakan orang dan kerjasama ekonomi. Demikian pula terkait: perdagangan elektronik; kebijakan persaingan; usaha pemerintah; hak kekayaan intelektual; lingkungan hidup; tenaga kerja; ketentuan kelembagaan dan kerangka kerja (misalnya: transparansi; prosedur penyelesaian sengketa; pengaturan kelembagaan). Serta masalah lain yang memperhitungkan isu-isu baru dan yang relevan dengan realitas bisnis.</li> <li>5. Perjanjian juga harus mencakup: Kerjasama Ekonomi. Komitmen yang lebih maju dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia dan Selandia Baru (ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement, AANZFTA), termasuk terkait perdagangan barang. Sektor jasa dan ekonomi digital merupakan bidang utama untuk kerjasama perdagangan. Bidang prioritas lainnya meliputi: perencanaan infrastruktur, pembiayaan dan pengiriman; pendidikan; tenaga kerja; keuangan; pertanian; pengolahan makanan; inovasi; pariwisata; kesehatan dan perawatan lansia. Juga, transfer dan penggunaan teknologi tinggi di sektor tradisional. Prioritas tinggi yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, yaitu pada infrastruktur dan konektivitas kelautan juga patut diperhatikan.</li> <li>6. IA-CEPA juga harus bersifat, atau menyertakan unsur: keseimbangan dengan saling menguntungkan; dilandasi pada perjanjian yang sudah ada; terarah pada peluang dan inovatif; dinamis dan fleksibel; berorientasi pada pembangunan dan kerjasama ekonomi; segera memberi hasil nyata; sangat melibatkan dan menerima masukan semua pemangku kepentingan; memperhatikan masalah dan mekanisme lintas sektoral; dalam kerangka rantai nilai global; mengupayakan pertukaran pengetahuan dan teknologi; menyandingkan keunggulan komparatif; mentransformasi ekonomi; dan merupakan kerjasama ekonomi.</li> <li>7. AIBC merekomendasikan area yang diidentifikasi dapat memberi hasil awal yang dapat dicapai demi membangun momentum dan pengakuan untuk IA-CEPA. Bidang-bidang tersebut adalah: Infrastruktur; industri ternak sapi dan daging merah; keterampilan; kerjasama sektor kejuruan; pelatihan perawat; usulan MOU terkait pelatihan keterampilan; pergerakan pekerja dan tenaga ahli; pekerja musiman atau pekerja lain ke Australia; profesional Australia di Indonesia; kerja magang; jasa keuangan; layanan profesional; pertanian; pengolahan makanan; standar industri makanan dan obat-obatan; desain; perhotelan dan jasa pariwisata; pendidikan; kesehatan; sumber daya dan energi; peralatan pertambangan, teknologi dan sektor jasa. Usulan ini menambahkan empat bidang sektoral lagi ke delapan bidang yang telah diidentifikasi dalam Laporan IA-BPG 2012: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanian dan agribisnis</li> <li>b. Pertambangan dan energi</li> </ol> </li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Manufaktur</li> <li>d. Jasa keuangan</li> <li>e. Profesional dan usaha jasa</li> <li>f. Pendidikan dan penelitian</li> <li>g. Layanan kesehatan</li> <li>h. Ekonomi hijau</li> </ul> <p>Untuk daftar sektor di atas harus ditambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan infrastruktur</li> <li>b. ekonomi digital dan e-commerce</li> <li>c. Pertukaran keterampilan dan tenaga kerja</li> <li>a. Pariwisata dan perhotelan</li> </ul>
<b>Forum IA-CEPA AIBC – Adelaide</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan/penghapusan daftar negatif adalah sentimen kuat yang diungkapkan oleh peserta. Daftar negatif ini membatasi investasi asing langsung dari UKM hanya sampai pada tingkat tertentu, juga tidak kondusif bagi pertumbuhan perusahaan dan perluasan investasi kewirausahaan serta bagi para pengusaha muda.</li> <li>2. Indonesia saat ini tidak memiliki kategori visa pelajar. Ada biaya pajak bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Indonesia.</li> <li>3. Mengizinkan akses bagi universitas-universitas Australia untuk membuka pasar di Indonesia. Hal tersebut akan mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan dan pendidikan tinggi Indonesia.</li> <li>4. Dibutuhkan jaminan hukum dan perjanjian investasi serta kepastian penerapannya di tingkat provinsi – ini adalah ancaman utama bagi investasi asing langsung. Saran untuk mengangkat kerangka investasi (misalnya dengan sejumlah MOU daerah) sebagai mekanisme utama membimbing investasi dua arah – akan mengesampingkan peraturan (hukum).</li> <li>5. Pertukaran yang lebih banyak terkait ide dan budaya dengan mendorong program pertukaran ‘out-of-the-city’, seperti yang dihasilkan dari pertukaran mahasiswa di daerah pedesaan Victoria.</li> </ol>
<b>Forum IA-CEPA AIBC – Brisbane</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekhawatiran tentang kebijakan proteksionis di Indonesia terkait pasar profesional, sementara di pasar profesional Asia lain, sepertinya tidak demikian. Misalnya, pembatasan perusahaan asal Australia untuk menggunakan nama mereka sendiri di Indonesia; pembatasan profesional asing (misalnya pengacara, teknisi, dokter, dll) untuk memperlengkapi mitranya di Indonesia.</li> <li>2. Di sektor pendidikan, ada tantangan dalam menyampaikan pesan bahwa peningkatan keterampilan tidak hanya berupa pelatihan formal tetapi juga eksposur dengan orang dan ide. Sulit bagi pemegang visa liburan-kerja (working holiday) untuk belajar di Australia, karena persyaratan bahasa Inggris yang sangat ketat. Saat kebutuhannya adalah skor kemampuan Bahasa Inggris 5.5 (IELTS). Padahal untuk program pendidikan 3-6 bulan (misalnya untuk Sertifikat 4 di bidang Perawatan Lansia/Aged Care) persyaratan ini tampaknya tidak terlalu dibutuhkan, terutama karena siswa akan segera kembali bekerja dan bekerja dalam lingkungan yang hanya menggunakan Bahasa Indonesia.</li> <li>3. Sudah luas diketahui bahwa orang Australia di atas usia 60 atau 65 tahun</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>tidak dapat mengajukan permohonan untuk visa KITAS. Hal yang menjadi masalah bagi berbagai profesional Australia dalam kelompok usia tersebut, yang ingin membuka bisnisnya di pasar Indonesia.</p> <p>4. Tidak adanya risalah dan info terbaru IA-BPG bagi para pelaku usaha yang seharusnya bisa untuk setidaknya menyajikan kerangka untuk ide-ide/masukan, terutama sebelum konsultasi pemangku kepentingan dilakukan.</p>
<b>Forum IA-CEPA AIBC – Melbourne</b>	<p>1. Bisnis harus mempertimbangkan apa yang saat ini tidak dimiliki: Sektor Jasa: perlu lebih komprehensif, membangun komitmen pada kerja sama plurilateral dan multilateral yang sudah ada. Indonesia telah membuka tawaran di 65 dari 165 sektor, tapi ini masih perlu diperluas; Investasi: perlu menyesuaikan aturan investasi AANZFTA, mengingat bahwa aturan tersebut tidak memiliki jadwal operasi. Prinsip yang perlu dipertimbangkan: perlakuan nasional, konsep negara favorit, kesetaraan dan transparansi.</p> <p>2. Kebutuhan untuk mempertimbangkan hubungan masing-masing negara dengan negara lain. Ada peluang di mana Australia dapat mengirim bahan baku ke Indonesia untuk diberi nilai tambah dan kemudian mengirimkannya ke Asia utara (Tiongkok dan Jepang). Ini akan lebih mudah jika Australia memiliki keyakinan bahwa ekspor ke Indonesia bisa berjalan tanpa hambatan.</p> <p>3. IA-CEPA harus mempertimbangkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas.</p>
<b>Forum IA-CEPA AIBC – Perth</b>	<p>1. Ada beberapa hambatan untuk keterlibatan Australia di sektor pendidikan dan pelatihan. Misalnya, pembatasan pendidikan asing dan organisasi pelatihan yang beroperasi di Indonesia; persyaratan modal minimum untuk sebuah perusahaan baru sekitar AU\$ 50.000 hingga AU\$ 200.000, hal yang bertentangan dengan sifat usaha jasa bermodal kecil; pembatasan pada pekerja asing di Indonesia, termasuk orang-orang dengan keterampilan yang penting bagi pendidikan dan kerjasama pelatihan; rendahnya kompetensi Bahasa Inggris orang Indonesia demikian pula kompetensi Bahasa Indonesia di kalangan warga Australia; rendahnya tingkat kepercayaan antar pelaku usaha Indonesia dan Australia.</p> <p>2. Ada banyak pembahasan tentang kurangnya pemahaman dan kepercayaan antara pelaku usaha Indonesia dan Australia, dan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Ada juga masalah kepercayaan di internal Indonesia.</p> <p>3. Perlu liberalisasi peraturan antara Australia dan Indonesia untuk memungkinkan kerjasama dan pengembangan kapasitas di bidang pendidikan dan pelatihan di Indonesia. BPG harus memeriksa perjanjian dimana Indonesia juga menjadi salah satu pihaknya (misalnya, AEC).</p> <p>4. IA-CEPA harus mencakup inisiatif untuk pendekatan yang mempercepat kemitraan pendidikan tinggi.</p> <p>5. Indonesia dan Australia bersama-sama bisa mengembangkan 'Food Plan 2030' untuk mendukung ketersediaan pangan Indonesia, investasi dan perdagangan dua arah, serta pembangunan kapasitas sebagai bagian dari pendekatan sistemnya.</p> <p>6. Perlu dipastikan agar industri kreatif dan olahraga juga dicakup dalam IA-</p>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>CEPA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. IA-CEPA perlu mengambil pandangan yang lebih luas terkait keamanan, untuk menyertakan mekanisme anti-korupsi, ketersediaan rantai logistik, memperbaiki pola makan dan kesehatan, serta membangun saling pengertian dan kepercayaan.</li> <li>8. Pemerintah kedua negara harus mempromosikan pengerjaan bisnis di negara lain dan memberikan panduan yang mudah diakses.</li> <li>9. IA-CEPA harus mencakup mekanisme untuk memfasilitasi investasi Australia di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.</li> </ol>
<p><b>Air Asia X – Benjamin Ismail</b>  <b>“Menghubungkan Kedua Wilayah”</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Australia adalah pasar utama yang menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan dengan menghubungkannya ke pasar utama lainnya di Asia Timur dan Selatan.</li> <li>2. Industri penerbangan di Asia-Pasifik siap untuk pertumbuhan lebih lanjut seiring dengan meningkatnya liberalisasi dan perjanjian layanan udara bilateral, terutama di ASEAN. Hal ini akan menghilangkan hambatan monopoli dan merangsang peluang perdagangan regional, pariwisata dan kesempatan kerja.</li> <li>3. Meningkatkan kemudahan memperoleh visa dan mempermudah peraturannya:</li> <li>4. Australia telah memudahkan aturan visa untuk Tiongkok dan India.</li> <li>5. Malaysia pun telah memudahkan visa untuk Tiongkok dan e-visa untuk India.</li> <li>6. Indonesia telah memperkenalkan kebijakan bebas visa masuk ke lebih dari seratus negara, termasuk Australia.</li> <li>7. Kami bermaksud untuk menjembatani kesenjangan di wilayah tersebut, yang memungkinkan akses mudah untuk bisnis, pendidikan dan liburan wisatawan, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan pasangan tujuan dan rute baru yang unik - Dimulai dari New Delhi-Auckland pada awal 2016 sehingga memungkinkan koneksi untuk Australia, Selandia Baru, dan India.</li> <li>• Meningkatkan frekuensi penerbangan pada rute lalu lintas tinggi selama ini, yaitu Australia dan Tiongkok.</li> <li>• Menjelajahi peluang di pasar yang belum terlayani untuk merangsang permintaan pasar baru, yaitu Iran, Tiongkok (pasar sekunder).</li> <li>• Kampanye pemasaran yang intensif untuk memacu permintaan perjalanan di kedua wilayah, Asia dan Australia.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>ANZ – Glen Maguire (Chief Economist, Asia-Pacific)</b>  <b>“Peluang dan Tantangan Ekonomi di Wilayah Ini”</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fundamental ekonomi ASEAN cukup stabil. Investasi akan menjadi daya tarik di tahun-tahun mendatang, dengan kemungkinan platform produksi bermigrasi dari Asia Timur ke Asia Tenggara. Salah satu penentu untuk migrasi ke Selatan ini adalah bahwa wilayah Mekong memiliki biaya tenaga kerja termurah di Asia dan mengalami arus urbanisasi yang cepat.</li> <li>2. Bagi Australia, tren di tetangga utaranya ini akan memberikan kesempatan yang kaya di bidang ekspor, impor dan investasi. Permintaan produk pertanian akan tumbuh secara signifikan terutama akibat urbanisasi dan tumbuhnya kelas menengah. Pertumbuhan komoditas akan dipercepat oleh pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Sektor jasa juga</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>menunjukkan potensi besar, termasuk permintaan di sektor pendidikan.</p> <p>3. Dinamika demografi di ASEAN akan mendorong urbanisasi yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut.</p>
<p><b>ANZ – Rob Lomdahl, Leonie Lethbridge</b>  <b>“ANZ di Indonesia dan Masa Depan Perbankan”</b></p>	<p>1. ANZ di Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANZ memiliki saham 99% di PT Bank ANZ Indonesia dan merupakan investor Australia terbesar di sektor jasa keuangan Indonesia, dengan investasi lebih dari AUD 1 Miliar.</li> <li>• Jaringan ANZ di Indonesia terdiri dari 28 kantor cabang dan 53 ATM di 11 kota di seluruh Indonesia, melayani Retail &amp; Wealth, Pembiayaan Konsumen, Bank Swasta, Kelembagaan dan pelanggan komersial.</li> <li>• ANZ Indonesia memiliki sekitar 1.100 karyawan tetap.</li> </ul> <p>2. Kebijakan Data On-Shore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank asing di Indonesia sangat mengeluhkan peraturan yang diusulkan yang mensyaratkan data on-shoring. Hal yang membutuhkan investasi sangat besar dari bank luar negeri.</li> <li>• Usulan awal tahun 2012 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia mengamankan semua perusahaan pelayanan publik (termasuk bank) harus memproses transaksi dan datanya di pusat data on shore.</li> <li>• Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia baru-baru ini menyatakan bahwa peraturan tentang industri e-commerce akan ditunda sampai 2019 atau 2020. Dapat diantisipasi bahwa industri seperti penerbangan dan jasa keuangan dapat dibebaskan dari persyaratan. Namun ketidakpastian ini tetap menjadi perhatian bagi industri jasa keuangan.</li> </ul> <p>3. Tingkat Ekuitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) berada di bawah tekanan untuk segera mengurangi kepemilikan asing di sektor keuangan.</li> <li>• Parlemen Indonesia sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang menetapkan kepemilikan asing sebesar 40%. Aturan ini sebelumnya hanya akan diterapkan untuk investasi setelah 2012. Parlemen Indonesia dan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) akan mengupayakan agar memungkinkan kepemilikan asing lebih besar dari 40%.</li> <li>• Aturan hukum ini akan berdampak investasi ANZ di ANZ Indonesia.</li> </ul> <p>4. Visa industri jasa keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OJK menentukan batasan tersendiri terkait staf asing di sektor perbankan. Kebijakan ini tidak mengikuti aturan Kementerian Tenaga Kerja yang membolehkan satu anggota staf asing per sepuluh staf lokal.</li> <li>• Pembatasan ini secara signifikan akan membatasi transfer keterampilan untuk staf Indonesia, mengurangi persaingan dan membatasi kegiatan bank asing.</li> </ul> <p>5. Investasi di Australia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANZ secara publik menganjurkan adanya investasi Indonesia di sektor perbankan Australia, yang menggarisbawahi status Australia sebagai salah satu pasar perbankan yang paling terbuka di dunia. Salah satu</li> </ul>



ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>bank Indonesia (salah satu dari empat besar Bank BUMN akan segera membuka cabang di Melbourne).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi lintas beberapa sektor akan menunjukkan potensi dimana dapat ditemukan Keunggulan Kompetitif Bersama serta dimana Australia dan Indonesia dapat bergabung untuk menghadapi pasar ketiga (lihat laporan <i>'Succeeding Together'</i>).</li> </ul>
<b>Australian Sugar Industry Alliance</b> <b>"Usulan kepada IA-BPG untuk IA-CEPA"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meskipun menjadi pemasok utama gula mentah ke Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 (hampir sepertiga dari semua impor), ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) akan lebih mengutamakan gula Thailand, karena perbedaan tarif dengan gula Australia.</li> <li>Biaya tambahan untuk penyuling gula Indonesia karena hanya mampu menggunakan sumber gula Thailand adalah sekitar USD 20 per ton, sehingga menghabiskan biaya per tahun sekitar USD 60 juta, dengan memperhitungkan kebutuhan impor Indonesia.</li> <li>Penurunan tarif yang berlaku untuk impor gula mentah Australia ke tingkat yang setara dengan yang diterapkan Thailand akan memastikan penyuling Indonesia terus memperoleh sumber impor gula mentah dari Australia dan mempertahankan akses ke sumber pemasok alternatif berkualitas tinggi.</li> <li>Tidak akan ada efek buruk pada pendapatan tarif untuk Indonesia jika ada pengurangan tarif yang diterapkan untuk impor Australia. Tanpa pengurangan, impor gula mentah dari Australia akan sangat terbatas.</li> </ol>
<b>BlueScope</b>	<p>Rekomendasi Tingkat Tinggi terkait IA-CEPA dari BlueScope:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akses Pasar bukanlah pengubah pasar yang utama dikarenakan saat ini belum ada timbal balik dalam hal tarif atas produk baja antara Indonesia dan Australia, maka IA-CEPA dapat membuka kesempatan untuk mencapai keseimbangan dalam akses pasar. Namun berdasarkan pengalaman BlueScope, karena banyaknya perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA), akses pasar sebagian besar bukan merupakan halangan utama dalam perdagangan. Hambatan lain yang lebih terasa adalah peningkatan biaya dan kompleksitas dalam menjalankan usaha. Seperti ditegaskan di bawah ini, IACEPA harus memberikan kepastian bahwa Hambatan Non-Tariff (Non-Tariff Barriers/NTB), Hambatan Teknis untuk Perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT) dan bentuk proteksionisme ekstrim tidak akan meningkat seiring dengan pengurangan atau penghapusan tarif. Dalam kaitannya dengan dampak bisnis BlueScope, ganti rugi yang efektif dari Non-Tariff Measures (NTMs) dan TBT akan lebih menguntungkan untuk merangsang perdagangan dan investasi daripada penurunan multitalahun tarif ekspor baja dari Australia ke Indonesia.</li> <li>Mekanisme untuk mengatasi perilaku yang mendistorsi perdagangan (baik di wilayah maupun di luar wilayah perbatasan) harus diupayakan, termasuk mekanisme yang meningkatkan biaya dan kompleksitas dalam melakukan bisnis yang umumnya didominasi oleh hal-hal terkait NTB dan TBT, dan perlakuan istimewa yang diberikan kepada BUMN. Di Indonesia, BlueScope telah mengamati penurunan efektivitas SNI (Badan standar nasional Indonesia) dalam hal verifikasi dan pelaksanaan standar kualitas. Juga, seiring berkurangnya tarif di Indonesia, muncul pula proses impor yang lebih panjang, kompleksitas yang lebih besar dan biaya yang lebih tinggi untuk bea</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>cukai, peningkatan biaya penanganan pelabuhan dan peningkatan kemacetan pelabuhan dengan risiko biaya kelebihan waktu labuh (demurrage cost) yang lebih tinggi. Hal ini sering kali dilakukan demi mendukung kepentingan perusahaan baja lokal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aturan terkait Asal Barang (Rules of Origin) yang diniatkan untuk mengupayakan penyederhanaan, harus memiliki dasar yang kuat dalam integritas dan transparansi. Aturan ini harus mencegah perpindahan negara (country-hopping) atau transformasi minimal, serta memastikan negara pihak ketiga tidak dapat memperoleh tarif preferensi atau menghindari peningkatan nilai perdagangan ilegal (trade remedies).</li> <li>Investor/pemilik perusahaan asing harus memiliki pijakan yang sama dalam pembentukan standar dengan harmonisasi atau saling mengakui preferensi standar baru, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengangkat kualitas dan mandat lingkungan (BUMN tidak selalu harus menjadi pemain satu-satunya atau pengaruh utama dalam hal ini). Pengenalan standar baru di luar proses harmonisasi harus melalui proses notifikasi WTO TBT. Standar yang ada seharusnya tidak disederhanakan begitu saja lewat harmonisasi tanpa mempertimbangkan implikasinya bagi industri dalam negeri (misalnya terkait penilaian dampaknya saat adopsi oleh UKM, pemeliharaan mandat lingkungan dan kualitas produk, dll). Juga, keragaman standar baru dapat berdampak pada preferensi perusahaan lokal untuk sekedar memperoleh pengadaan dari pemerintah, yang hanya akan mengganggu perdagangan dan investasi internasional.</li> <li>Harus ada retensi penuh atas hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian WTO tentang Perbaikan Perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk mengatasi perdagangan baja yang tidak adil, penghapusan atas hak ini mirip dengan upaya menghapuskan kebijakan persaingan internasional, sehingga menghapus kemampuan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil (yang cukup meningkat di industri baja global dan mengakibatkan peningkatan bentuk proteksionisme ekstrim).</li> <li>Ketentuan Kerjasama Ekonomi Teknis harus berfokus pada liberalisasi arus perdagangan dan investasi yang selama ini mengalami kemacetan. Ada kesempatan pasti bagi Australia, untuk melakukan pengembangan kapasitas dan transfer teknis dari praktik terbaik kepada pejabat pemerintah di Indonesia dalam kerangka penggunaan dan penerapan Perjanjian WTO. Hal ini terutama sekali untuk Perjanjian Perbaikan Perdagangan, di mana saat ini sering salah digunakan oleh pemerintah sehingga memiliki risiko komersial dan reputasi bagi perusahaan milik asing seperti BlueScope.</li> </ol>
<b>Chamber of Commerce Northern Territory (NT)</b> <b>"Signifikansi Pasar Indonesia bagi Ekonomi NT Saat ini dan Masa Mendatang"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan Indonesian Customs Pre-Inspection yang berbasis di Darwin telah dibuka kembali dan setuju untuk melayani ekspor Australia (via Darwin) ke Indonesia Timur - termasuk yang saat ini perlu masih dialihkan melalui Jawa atau Singapura.</li> <li>IA-CEPA memberikan pengakuan karena pentingnya mengembangkan wilayah Timur Indonesia dan mengakui hubungan khusus yang dimiliki Northern Territory dengan provinsi seperti Kalimantan Timur (Balikpapan) dan Maluku (Saumlaki).</li> <li>Penyediaan program pemerintah untuk mendukung pelaku bisnis dan dan</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	pegawai negeri Australia untuk mempelajari Bahasa Indonesia - sebaliknya bagi mereka yang di Indonesia untuk belajar Bahasa Inggris.
<b>Charles Sturt University Centre for Customs and Excise Studies</b> "Pendirian Pusat Fasilitas Perdagangan Unggulan di Jakarta, Indonesia"	1. Membentuk Pusat Unggulan bagi Fasilitas Perdagangan, yang berbasis di Jakarta, untuk mengatasi berbagai hambatan perdagangan dengan solusi yang berdasar pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, termasuk yang terkandung dalam Perjanjian WTO tentang Fasilitas Perdagangan. Sementara fokus awalnya adalah perdagangan bilateral antara Australia dan Indonesia, ada kesempatan untuk memperluas konsep dan fasilitas ini untuk menjadi pusat regional unggulan bagi negara-negara Asia Tenggara dan/atau ASEAN.
<b>Cristian Teo dan Rekan</b> "Pembatasan KONtrak Baru bagi Perusahaan PMA IUJK – Pemutusan Investasi Asing"	1. Penerapan Pembatasan Kontrak Baru tidak adil bagi Perusahaan PMA IUJK, yang telah membuat investasi besar di Indonesia selama masa ekonomi yang baik maupun buruk. 2. Pembatasan ini akan melindungi perusahaan konstruksi lokal dengan memberi monopoli atas kontrak ukuran kecil dan menengah demi melindungi mereka selama masa ekonomi yang buruk. 3. Keputusan ini tampaknya kurang konsisten dengan agenda pemerintah saat ini dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan produksi minyak dan gas.
<b>Cristian Teo dan Rekan</b> "Rancangan Baru ESDM untuk Undang-undang Pertambangan – Aturan yang Simping Siur"	1. Kemungkinan pemisahan penyedia layanan usaha pertambangan milik asing dari industri pertambangan lokal dan peningkatan pembatasan pekerja ekspatriat di industri pertambangan lokal kemungkinan akan ditentang keras oleh investor asing. 2. Ada pasti akan oposisi lanjutan, dari investor baik asing maupun industri pertambangan lokal, terkait dibentuknya Tim Penyidik dengan kekuatan mirip kepolisian dan wewenang untuk menutup proyek pertambangan yang dicurigai melakukan tindak kriminal. 3. RUU Pertambangan yang diajukan April lalu perlu diperhatikan, dari sisi positifnya, terkait RUU tersebut menunjukkan komitmen Kementerian ESDM memikirkan kembali peran yang tepat bagi BUMN untuk turut serta dalam pengembangan industri pertambangan local masa depan. Kementerian ESDM telah jelas memutuskan, pada tahap ini, untuk tidak memberi BUMN peran dominan dalam industri pertambangan lokal meskipun BUMN masih akan menikmati hak-hak istimewa tertentu. 4. Hal ini juga akan disambut oleh banyak produsen mineral logam yang saat ini tidak dapat mengekspor produk mineral mentah mereka.
<b>Darwin Port – Mike Hughes</b> "Mitra Perdagangan Asia-Australia"	1. Darwin diposisikan untuk melayani Australia tengah, dari bagian utara hingga ke wilayah Melbourne, meliputi daerah yang kaya sumber daya dan merupakan simpul manufaktur. Dari Darwin, Australia dapat lebih jauh mencapai wilayah Utara dan Barat. Pelabuhannya yang telah diperluas dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan baru untuk kota dan untuk negara bagian Northern Territory.

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Euromonitor</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDB riil harus tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2016 setelah mencapai 4,7% pada 2015. Kenaikan dalam investasi publik akan membantu menopang perekonomian. Dukungan tambahan akan datang dari keuntungan konsumsi pribadi. Kelemahan terkait harga komoditas akan membatasi ekspor. Dibutuhkan upaya lebih agresif untuk mempromosikan investasi swasta. Ekonomi tumbuh mencapai 5,0% pada kuartal keempat 2015.</li> <li>2. Untuk mendapatkan kembali momentum, bagian dari program stimulus terbaru harus mencakup langkah-langkah untuk percepatan investasi skala besar. Tahun 2016, pemerintah merencanakan program yang diupayakan negara bagian untuk membangun pelabuhan, jalan dan kereta api di seluruh negara. Belanja infrastruktur akan meningkat hampir 8% lebih jika dibandingkan tahun 2015.</li> <li>3. Tingkat pengangguran sebesar 6,0% pada tahun 2015 dan diperkirakan akan turun ke 5,9% pada 2016. Diperkirakan 70% dari pekerja memiliki pekerjaan di sektor informal di mana upah dan keamanan kerja masih rendah.</li> <li>4. Pertumbuhan tahunan PDB riil diperkirakan akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar 5,3% dalam jangka menengah.</li> </ol>
<b>Export Council of Australia "Membangun Hubungan Ekonomi antara Australia dan Indonesia"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan persyaratan Asal Barang harus diliberalisasikan sebanyak mungkin, sementara kedua negara berusaha mengadopsi pendekatan yang konsisten untuk masalah teknis demi membantu mengurangi tingkat kompleksitas dan regulasi.</li> <li>2. Ketentuan terbatas terkait Penyelesaian Sengketa antara Investor dan Negara (Investor-State Dispute Settlement, ISDS) mungkin perlu dimasukkan sebagai sarana untuk mengamankan kesepakatan dalam Perjanjian. ISDS yang disusun dengan baik (yang mengecualikan kepentingan nasional yang sah dari Australia dan Indonesia) bisa memajukan kepentingan perdagangan kedua negara.</li> <li>3. Mekanisme Resolusi Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution, ADR) harus dimasukkan dalam IA-CEPA sebagai sarana untuk memfasilitasi resolusi sengketa sederhana dan berbiaya rendah bagi UKM.</li> <li>4. Karena pelaku usaha Australia, terutama UKM, tidak memiliki pemahaman praktis tentang manfaat wilayah perdagangan bebas dan bagaimana mengaksesnya, maka penting sekali untuk membantu mereka dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Meningkatkan kesadaran tentang Indonesia-Australia CEPA khususnya dalam komunitas UKM;</li> <li>o Memberikan atau mengarahkan bisnis untuk mengakses informasi yang jelas dan ringkas tentang bagaimana wilayah perdagangan bebas dapat dimanfaatkan;</li> <li>o Mempromosikan informasi yang 'ramah UKM' tentang manfaat dari wilayah perdagangan bebas, khususnya bagi sektor industri kunci;</li> <li>o Memastikan bahwa penekanan yang cukup juga diupayakan dalam mendorong perusahaan untuk mencari informasi dan saran yang akan membantu mereka mengurangi risiko dan dapat beroperasi secara menguntungkan di pasar.</li> </ul> </li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Grain Growers "Inisiatif Strategis terkait Industri Gandum bagi Indonesia"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan pembentukan Pusat Unggulan Indonesia-Australia untuk industri gandum di sebuah universitas Indonesia yang akan: a) mengajar pembuatan kue dan mie dengan standar industri Australia, b) melakukan pelatihan di bidang penggilingan gandum, dan c) pelatihan dalam penyimpanan dan pengujian gandum.</li> </ol>
<b>Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector menyediakan mekanisme bilateral guna memajukan kerjasama - karena menyatukan pemerintah dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan industri peternakan daging merah dan sapi.</li> <li>2. Awalnya kemitraan ini diupayakan oleh industri kami dan sekarang difasilitasi oleh Department of Agriculture and Water Resources (DAWR) Australia, tujuan dari kemitraan ini adalah untuk mensinergikan kekuatan dan potensi Australia dan Indonesia dalam mengembangkan sektor peternakan sapi Indonesia dan meningkatkan prospek untuk investasi jangka panjang dan perdagangan antara Indonesia dan Australia.</li> <li>3. Kemitraan ini telah mendorong dana sebesar AU \$ 12.175.000 (disediakan oleh DAWR) untuk kegiatan kerjasama pada tahun 2016, dengan fokus pada peternakan, pengolahan daging, logistik, dan pengembangan keterampilan.</li> </ol>
<b>Lowy Institute</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan ekonomi yang sulit secara historis menyebabkan pemimpin Indonesia memberlakukan reformasi ekonomi, sehingga beberapa berpendapat bahwa masa buruk justru mengakibatkan kebijakan yang baik. Tapi karena pertumbuhan Indonesia telah melambat selama tahun lalu, pemerintah mulai beranjak dari pola ini, dan malah memilih proteksionisme sebagai alternatifnya. Narasi dari pemerintahan saat ini seperti penguatan rupiah, sentimen anti-asing, dll semuanya dikombinasikan untuk mendorong Indonesia ke arah proteksionisme.</li> <li>2. Keputusan Indonesia baru-baru ini untuk memotong kuota impor sapi hidup dari Australia telah dilihat oleh beberapa orang sebagai contoh tentang bagaimana hubungan antara Australia dan Indonesia semakin surut dari sebelum-sebelumnya. Padahal kenyataannya keputusan ini kurang terkait dengan bagaimana Indonesia memandang Australia namun lebih karena perubahan karakter dari kebijakan perdagangan di Indonesia.</li> <li>3. Sikap Indonesia terhadap perdagangan dan investasi dalam beberapa tahun terakhir dinilai sebagai sikap yang gamang. Sebab di sisi lain, Indonesia adalah anggota aktif dalam G20, APEC, dan ASEAN. Partisipasi seperti ini di masa lalu telah mendorong reformasi kebijakan dalam negeri yang menjamin Indonesia beroleh manfaat dari integrasi ekonomi yang lebih besar dengan negara-negara lainnya.</li> <li>4. Para ekonom sering menilai reformasi ekonomi di Indonesia sebagai pola yang mengikuti 'Hukum Sadli', yaitu kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan kebijakan yang baik. Tentu saja hal ini sudah terjadi di masa lalu. Penurunan tajam pendapatan minyak pada 1980-an mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi ekonomi berbasis luas yang mendorong pembangunan industri di Indonesia. Pada akhir 1990-an, Indonesia memperkenalkan paket lain dari reformasi ekonomi sebagai bagian dari program IMF untuk membuat jalan keluar dari krisis keuangan Asia.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
<b>Meat and Livestock Australia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>CEPA harus komprehensif dan mencakup liberalisasi perdagangan untuk semua produk daging merah dan ternak sapi (diatur dalam Bab 1, 2, 5, 15, 16 dan 41 Jadwal Tarif Terharmonisasi).</li> <li>Penegasan kembali kebijakan tarif impor nol, penghapusan tarif yang diatur dalam AANZFTA dan penghapusan tarif impor yang tidak dibahas dalam AANZFTA.</li> <li>Mengupayakan akses tak terbatas ke pasar Indonesia - dengan menghilangkan ukuran-ukuran regulasi, mengamankan transparansi standar sanitasi serta memastikan perdagangan lain yang mendistorsi ketentuan tersebut tidak akan diperkenalkan untuk industri ternak, daging sapi, daging domba, daging kambing dan jeroan Australia - adalah hal yang merupakan prioritas demi menyediakan kepastian dan kesinambungan bagi perdagangan dengan Indonesia.</li> <li>Akan saling menguntungkan jika diupayakan peningkatan dialog berkelanjutan antara pemerintah Australia dan Indonesia, untuk menghindari aturan impor atau makanan di masa depan, yang mungkin akan menjadi hambatan non-tarif. Dialog dalam waktu dekat juga harus digunakan untuk menghindari ketidakpastian yang sering dikaitkan dengan persyaratan impor tertentu dan inkonsistensi penerapannya di seluruh wilayah Indonesia.</li> <li>Indonesia menuntut agar pemotongan hewan/operasi pengolahan daging Australia yang dikerjakan untuk ekspor ke pasar Indonesia harus disetujui melalui protokol sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh negara.</li> </ol>
<b>Minor Hotels – Mike Anderson “Perubahan Wajah Industri Perhotelan”</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minor Group memiliki 138 properti di 23 negara yang menyediakan lebih dari 17 ribu kamar.</li> <li>Grup ini memperluas usahanya melalui pengembangan model “<i>serviced apartment</i>”, selain dari model hotel tradisional.</li> <li>Pengunjung telah berkembang pesat, termasuk pengunjung internasional. Dalam waktu dekat, peningkatan pengunjung dari Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya akan terus berlanjut.</li> <li>Ledakan pengunjung ini berasal dari generasi digital, maka muncul kebutuhan untuk kehadiran hotel secara online, dan menyediakan konektivitas internet di properti hotel.</li> </ol>
<b>Minter Ellison</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tampaknya ada pandangan umum yang meyakini bahwa bekerja dengan standar profesional akan memberi manfaat lebih. Baik di bidang hukum atau di bidang lain ada kecenderungan penguatan (dalam hal interaksi bilateral) terkait standar etika, pengakuan dan berdirinya lembaga-lembaga profesi.</li> <li>Sebuah pandangan dominan bahwa dalam hal instrumen perdagangan bilateral (FTA, BIT atau lainnya) diharapkan memiliki pengaturan kebijakan yang jelas dan kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini berarti Australia (Lihat posting 2 Juli 2016) perlu memperjelas pula pemikirannya sendiri.</li> <li>Keterlibatan lebih besar dalam ruang pendidikan tinggi dipandang oleh universitas sebagai wilayah yang memungkinkan perolehan keuntungan dengan lebih mudah. Peningkatan pelatihan Bahasa Indonesia jika dipercepat akan menjadi sangat bernilai. Tingkat relatif partisipasi pelajar Australia di bidang ini mungkin sudah mengalami penurunan.</li> </ol>

ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aturan persaingan lintas perbatasan dan peraturan e-commerce telah dinilai sebagai prioritas dan hal yang paling mungkin dicapai.</li> <li>Dalam konteks masyarakat dan aliran investasi kebutuhan untuk kemungkinan peningkatan arus secara teratur cukup penting untuk diupayakan. Sesuai dengan kondisi masyarakat dan kepekaan politiknya, ada harapan bahwa investasi atau perdagangan lintas perbatasan dengan fokus Australia bagian Utara mungkin akan mendukung pencapaian awal yang saling menguntungkan bagi kedua negara.</li> </ol>
<b>National Farmers Federation</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Jaringan Pemimpin Agribisnis Indonesia-Australia, dengan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>menciptakan hubungan kerja yang lebih dekat di sektor agribisnis,</li> <li>membangun komunikasi yang efektif dan saling melengkapi, dan</li> <li>memungkinkan identifikasi dan pengembangan peluang bisnis dengan lebih mudah.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Perth USAsia Centre "Perubahan Arsitektur Sistem Perdagangan Asia- Pasifik: Implikasinya bagi IA-CEPA"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejak negosiasi IA-CEPA dimulai pada tahun 2010, konteks regional dan nasional kebijakan perdagangan Australia dan Indonesia telah berubah secara dramatis.</li> <li>Fokus sebelumnya pada wilayah perdagangan bebas bilateral telah memberikan cara bagi strategi baru untuk 'memultilateralisasi' arsitektur perdagangan Asia-Pasifik. Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan dua pendekatan utama saat ini.</li> <li>Sekarang sudah ada kendaraan kelembagaan yang lebih luas yang di dalamnya tercakup harapan agar upaya memperdalam hubungan ekonomi Australia-Indonesia dapat terwujud</li> <li>Australia juga telah menyelesaikan rancangan wilayah perdagangan bebas yang jauh lebih luas. Hal ini dapat memberikan landasan bagaimana menerapkan beberapa isu yang bersifat 'WTO-Plus' dari agenda IA-CEPA.</li> <li>IA-BPG harus mengadopsi konteks baru ini ke dalam upaya menetapkan prioritas IA-CEPA menjelang putaran negosiasi berikutnya, yang dijadwalkan pada Agustus 2016.</li> </ul> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IA-BPG harus meninjau 'rekomendasi yang terkonsolidasi' di tahun 2012 dengan kerangka setelah munculnya kendaraan multilateral baru untuk kerjasama ekonomi Australia-Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelu memberi perhatian terkait masalah mana yang tetap akan menjadi prioritas IA-CEPA, dan mana yang mungkin lebih baik ditangani melalui mekanisme alternatif.</li> <li>RCEP, mekanisme konsultasi AANZFTA, dan TPP semuanya telah menyediakan kendaraan kelembagaan baru melalui mana aspirasi tertentu mungkin akan bisa lebih baik maju.</li> </ol> </li> <li>IA-BPG harus meninjau pendekatan ke arah wilayah WTO-Plus dengan konteks wilayah-wilayah perdagangan bebas Australia yang baru. <ol style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian ini menyediakan template dimana negosiasi IA-CEPA</li> </ol> </li> </ol>



ORGANISASI	POKOK-POKOK USULAN
	<p>dapat dibangun dan berinovasi.</p> <p>b. AANZFTA dan TPP menyediakan model instruktif untuk masalah dampak regional; sedangkan ChAFTA dan MAFTA mungkin lebih cocok untuk hal-hal yang terkait dengan negara berkembang tertentu.</p>
<b>Peter Cook (Usulan kepada AIBC)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya transparansi dalam kaitannya dengan peraturan impor/ekspor merupakan hambatan yang signifikan untuk usaha kecil yang tidak bisa membayar biaya riset dan navigasi peraturan yang kompleks.</li> </ol>
<b>Standards Australia "Dukungan terhadap Rencana Aksi Harmonisasi Standar IA-CEPA"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standards Australia telah bekerja sama dengan Badan Standar Nasional Indonesia (BSN) tentang hal-hal terkait standar internasional, dan telah membantu BSN melalui pembangunan kapasitas, terutama untuk mempromosikan Good Standardisation Practice.</li> <li>2. Penerapan Rencana Aksi Harmonisasi Standar IA-CEPA tertentu akan membuka manfaat yang signifikan bagi dunia usaha Australia dan Indonesia, terutama bagi UKM.</li> <li>3. Pengembangan harmonisasi standar yang komprehensif, koherensi dengan peraturan yang ada dan program konvergensi teknis akan memperkuat sistem standardisasi di Indonesia terkait dengan penerapan IA-CEPA dan akan meningkatkan penyesuaian sistem peraturan lokal pada norma-norma internasional.</li> </ol>

## DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ORGANISASI

No.	PEMANGKU KEPENTINGAN/ORGANISASI
1	Advisian Worley Parsons Group
2	AFS Intercultural Program Australia
3	Australia Indonesia Business Council (AIBC)
4	AIBC IA-CEPA Forum – Adelaide
5	AIBC IA-CEPA Forum – Brisbane
6	AIBC IA-CEPA Forum – Melbourne
7	AIBC IA-CEPA Forum – Perth
8	Air Asia X
9	ANZ
10	Australian Chamber of Commerce and Industry
11	Australian Sugar Industry Alliance
12	Bluescope
13	Chamber of Commerce of the Northern Territory
14	Charles Sturt University
15	Cristian Teo and Partners
16	Darwin Port
17	Euromonitor
18	Export Council of Australia
19	Grain Growers
20	International Energy Agency
21	Lowy Institute
22	Meat and Livestock Australia
23	Minor Hotels
24	Minter Ellison
25	National Farmers Federation
26	Perth USAsia Centre
27	Peter Cook for AIBC
28	Standards Australia

## REFERENSI

- Acemoglu, D., S. Johnson and J.A. Robinson. 2001. "The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation." *American Economic Review* 91: 1369–1401.
- Anderson, K. and R. Garnaut. 1987. *Australian Protectionism: Extent, Causes and Effects*. Sydney: Allen & Unwin.
- ANZ Bank, *News Release: Australian Service Dependent Economy and Ageing Population could cause Skilled Labour Shortage by 2030*, June 2016.
- Arndt, H.W. 1968. "Trade Relations between Australia and Indonesia." *The Economic Record* 44: 168–193.
- Australian Financial Review, "GrainCorp's Mark Palmquist warns we are losing the wheat export war," 30 May 2016
- Australia-Indonesia Centre, *Succeeding Together*, 2015: November
- Basri, M.C. and H. Hill. 2004. "Ideas, Interest and Oil Prices: the Political Economy of Trade Reform during Suharto's Indonesia." *The World Economy* 27: 633–655.
- Crawford, J.G. 1935. "The Development of Trade with Netherlands-Indies and British Malaya." In *Australia and the Far East: Diplomatic and Trade Relations*, edited by I.C. Ross, 203–241. Sydney: Angus and Robertson.
- DEEWR Australia, *The Seasonal Worker Program*, 2002.
- DFAT, "Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, Indonesia", July 2016.
- Fukuoka, Y and Verico, K (2015). Indonesia – China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges in Young-Chan Kim (ed). *Chinese Global Production Networks in ASEAN*, Springer: UK, (pp.53-68).
- Hill, H. 1990. "Australia Challenges and Indonesia and Opportunities in a 'Small' Economic Relationship." *ASEAN Economic Bulletin* 6: 283–306.
- \_\_\_\_\_. 2000. *The Indonesian Economy* (2<sup>nd</sup> ed). Cambridge: Cambridge University Press.
- Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG), *Position Paper*, 2012
- International Energy Agency, *Southeast Asia Energy Outlook 2015: World Energy Outlook Special Report*
- McLean, I.W. 2004. "Australian Economic Growth in Historical Perspective." *Economic Record* 80: 330–345.
- Missbach, A., and Purdey, J (eds.). (2015). *Linking People: Connections and Encounters between Australians and Indonesians*, (pp.49-71), Melbourne: Australia
- Nasution, A. (2016), *Decentralization Program in Indonesia since 1999*. Paper

Perth USAsia Centre, *Horizon Report*, May 2016.

PMSEIC, *Australia and Food Security in a Changing World*, The Prime Minister's Science, Engineering and Innovation Council, 2010.

PwC, *Indonesia—set for rapid spending growth powered by Internet-based segments*, 2014.

Resosudarmo, B., Verico, K., and Pasaribu, D (2015). Evaluating the Importance of Australia-Indonesia Economic Relations in Missbach, A., and Purdey, J (eds.). *Linking People: Connections and Encounters between Australians and Indonesians*, (pp.49-71), Melbourne: Australia

The IMF. (2016). *World Economic Outlook: Too Slow for Too Long*, April

World Trade Organization, *Frequently Asked Questions about TRIPS in the WTO*, Copyright 2016.

Verico, K. (2013). Economic Cooperation in Natural Rubber: Impacts on Natural Rubber's World Supply and Indonesia's Economy. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 10(2), 75-93

\_\_\_\_\_. (2013). *The Impacts of Discriminative Trade Arrangements on Foreign Direct Investment and Foreign Trade in Southeast Asia during the 1988–2008 Period (PhD abstract)*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 49(2), 238-239.

YIF. (2007). *Visi Indonesia 2030*, LPEM: Jakarta

## SOURCES OF DATA

<http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/10/Indonesia-Services-Dialogue-Policy-Recommendation-Yose-Rizal-Damuri.pdf>

[http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal/biumum/!ut/p/c5/04\\_](http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal/biumum/!ut/p/c5/04_)

<http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2015>

<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2014>

<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-country-product/>

[http://www.trademap.org/tradestat/Product\\_SelProduct\\_TS.aspx?nvpm=1||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1](http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1)<http://www.ceicdata.com/id>



**KADIN INDONESIA**

Menara Kadin Indonesia, 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950  
INDONESIA

[www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)



**Australian  
Chamber of Commerce  
and Industry**

Commerce House, Level 3  
24 Brisbane Avenue Barton ACT 2600  
AUSTRALIA

[www.acci.asn.au](http://www.acci.asn.au)



**INDONESIA AUSTRALIA  
BUSINESS COUNCIL**

World Trade Centre I, 16<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920  
INDONESIA

[www.iabc.or.id](http://www.iabc.or.id)



**AUSTRALIA INDONESIA  
BUSINESS COUNCIL**

International Chamber House  
Level 5, 121 Exhibition Street Melbourne VIC 3000  
AUSTRALIA

[www.aibc.com.au](http://www.aibc.com.au)



Permata Kuningan Building, 10<sup>th</sup> Floor  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta 12980  
INDONESIA

[www.apindo.or.id](http://www.apindo.or.id)

**AiGROUP**

Level 2 / 441 St. Kilda Road  
Melbourne VIC 3004  
AUSTRALIA

[www.aigroup.com.au](http://www.aigroup.com.au)